

MEMBANGUN KETAHANAN PANGAN MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN PETANI



KINERJA
PEMBANGUNAN
PERTANIAN

TAHUN 2010 - 2014



KEMENTERIAN PERTANIAN
2014

KATA PENGANTAR

Lima tahun membangun pertanian pada era Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II untuk ketahanan pangan dan mewujudkan kesejahteraan petani merupakan bagian penting dari implementasi empat target sukses pembangunan pertanian yang meliputi (1) peningkatan swasembada berkelanjutan padi dan jagung dan swasembada kedelai, gula dan daging sapi, (2) peningkatan diversifikasi pangan, (3) peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor dan (4) peningkatan kesejahteraan petani. Melalui strategi yang dikemas dalam 7 gema revitalisasi yang meliputi (1) revitalisasi lahan, (2) revitalisasi perbenihan dan perbibitan, (3) revitalisasi infrastruktur pertanian, (4) revitalisasi SDM petani, (5) revitalisasi permodalan petani, (6) revitalisasi kelembagaan petani, dan (7) revitalisasi teknologi dan industri hilir, telah berujung pada berbagai capaian yang memberikan manfaat bagi bangsa dan negeri ini. Meskipun disadari masih banyak yang belum tercapai, berbagai *success story* telah mewarnai pembangunan pertanian 2010-2014.

Dalam lima tahun terakhir, kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian nasional semakin nyata. Selama periode 2010-2013, kontribusi sektor pertanian terhadap PDB mencapai 15% per tahun. Sub sektor tanaman pangan merupakan kontributor terbesar terhadap PDB sektor pertanian dengan kontribusi rata-rata sebesar 48%, dan berturut-turut diikuti oleh kontribusi sub sektor perkebunan sebesar 13%, dan sub sektor peternakan sebesar 12%. Investasi di sektor pertanian primer dari Penanaman Modal Asing (PMA) mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 15,43% per tahun. Dalam 5 tahun terakhir nilai ekspor produk pertanian mencapai US\$ 152,91 milyar, sementara nilai impor produk pertanian mencapai US\$ 66,76 milyar, dengan demikian neraca perdagangan produk pertanian surplus sebesar US\$ 86,15 milyar. Nilai Tukar Petani (NTP) selama periode 2010-2013 memperlihatkan kecenderungan yang meningkat setiap tahunnya, yaitu dari 101,77 pada tahun 2010 menjadi 104,95 pada tahun 2013. Pada periode yang sama, jumlah penduduk miskin di perdesaan atau pada sektor pertanian menurun dengan laju sebesar 3,69%/tahun.

Produksi pangan utamanya padi, jagung, kedelai, gula dan daging sapi umumnya telah mengalami peningkatan. Meskipun beberapa komoditas pangan seperti kedelai belum mencapai swasembada disebabkan sulitnya memperoleh tambahan lahan untuk perluasan tanam, tetapi peningkatan produksinya tumbuh positif. Pada periode 2010-2014, pertumbuhan produksi padi sebesar 1,30% per tahun, jagung 0,46% per tahun, gula hablur 3,31% per tahun, daging sapi dan kerbau 7,5% per tahun. Selain komoditas pangan utama tersebut, beberapa komoditas lain produksinya juga tumbuh positif, yaitu daging unggas 2,81% per tahun, telur 7,80% per tahun, buah-buahan 1,15% per tahun, sayuran 3,38% per tahun, kelapa sawit 7,46% per tahun, karet 4,11% per tahun, kelapa 0,64% per tahun dan kopi 0,38% per tahun. Produksi padi pada 2010 tercatat 66,47 juta ton GKG meningkat menjadi 69,87 juta ton pada tahun 2014, setara dengan beras 39,28 juta ton. Dengan tingkat konsumsi pada tahun 2014 sebesar 35,08 juta ton beras, maka pada tahun 2014 tercapai surplus beras sebesar 4,2 juta ton.

Angka-angka capaian produksi tersebut diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai

lembaga resmi pemerintah. Surplus produksi beras ini sering dipertanyakan pada saat-saat tertentu di wilayah tertentu terjadi kenaikan harga. Kondisi ini disebabkan karena distribusi beras tidak lancar akibat konektivitas antar daerah/antar pulau di wilayah Indonesia belum baik. Guna mendukung upaya peningkatan produksi tersebut selama kurun waktu 2010-2014 telah dicetak sawah baru seluas 235.494 ha, optimalisasi sawah seluas 706.567 ha dan perbaikan jaringan irigasi seluas 1.885.566 ha.

Dalam rangka penganeekaragaman konsumsi pangan, sebagai upaya menindak lanjuti "*Directive Presiden*" untuk mengembangkan kemandirian pangan di tingkat keluarga, Kementerian Pertanian telah mengembangkan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dengan memanfaatkan lahan pekarangan sebanyak lebih dari 12.000 unit yang tersebar di seluruh provinsi. Potensi lahan pekarangan Indonesia yang mencapai 10,3 juta ha sangat potensial untuk mewujudkan ketahanan pangan keluarga. Upaya ini juga sangat sejalan dengan upaya untuk mengurangi inflasi oleh beberapa produk pertanian seperti cabai. Melalui pengembangan KRPL tersebut, setiap rumah tangga masyarakat mampu mengurangi pengeluarannya sebesar Rp 825.000,-/rumah tangga/bulan. Pengembangan pertanian juga dikembangkan dalam konsep kawasan yang ditujukan untuk memenuhi skala ekonomi serta memberikan nilai ekonomi masyarakat yang lebih tinggi. Produk komoditas baik sayuran, pangan local seperti aneka umbi, tanaman obat keluarga (TOGA), ternak unggas, kelinci serta jenis ternak lainnya. Dalam program ini selain memenuhi kebutuhan pangan masyarakat juga untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya.

Selama kurun waktu 2010-2014, Kementerian Pertanian melaksanakan program dan kegiatan untuk peningkatan daya saing produk pertanian mulai dari upaya meningkatkan mutu hasil, mengembangkan agroindustri pedesaan dan menyediakan informasi pasar baik domestik maupun internasional hingga mewujudkan terobosan ekspor.

Untuk mengembangkan agroindustri di pedesaan telah dibangun industri hilir pertanian yang berbasis sumberdaya lokal dengan inovasi teknologi dan manajemen agribisnis produk-produk yang dikembangkan, sehingga memiliki nilai tambah dan daya saing untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal, nasional, regional dan internasional. Pengembangan agroindustri difokuskan pada pengolahan beras, singkong (kasava), bahan olah karet rakyat, kakao, kelapa dan susu. Sampai dengan tahun 2014 telah dikembangkan agroindustri unit pengolahan hasil (UPH) beras sebanyak 1.373 unit, UPH tepung *Modified Cassava Flour* (Mocaf) 176 unit, pengolahan karet rakyat 186 unit, mesin pengolahan hasil kelapa 109 unit, UPH susu 101 unit, dan UPH Bahan Olahan Karet (Bokar) sebanyak 237 unit. Selain itu, Kementerian Pertanian selama 2010-2013 juga mengembangkan kegiatan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) di lebih 30.000 desa di seluruh Indonesia, dengan rincian 27.821 desa yang telah terealisasi selama 2010-2013 dan 3.000 desa ditargetkan pada tahun 2014.

Percepatan dan peningkatan akses ekspor difokuskan pada beberapa komoditas utama yang memiliki daya saing di pasar global, antara lain komoditi perkebunan (kelapa sawit, kakao, kopi, karet, minyak atsiri), dan komoditi hortikultura (buah, sayur, tanaman hias, dan biofarmaka).

Selain pasar utama yang selama ini menjadi andalan tujuan ekspor seperti Eropa, Amerika Serikat, Jepang, Singapura, Malaysia dan Negara Asean lainnya, juga telah dikembangkan akses pasar ke berbagai Negara di Timur Tengah dan Arab Saudi, Tiongkok, Korea, India, Bangladesh dan Eropa Timur.

Dalam penelitian dan pengembangan inovasi dan teknologi, Kementerian Pertanian telah menghasilkan berbagai varietas unggul baru (VUB) dan beragam inovasi dan teknologi pendukungnya. Dalam mendukung pencapaian peningkatan produksi dan produktivitas pangan, selama periode 2010-2014 telah dihasilkan 49 VUB padi dengan produktivitas 8-12 ton/ha, 14 VUB jagung dengan produktivitas 10-13 ton/ha, 2 VUB kedelai 2-3 ton/ha. Teknologi pendukung yang telah dihasilkan untuk meningkatkan produksi pertanian, antara lain: sistem Kalender Tanam (Katam) sebagai pedoman pertanaman padi, jagung dan kedelai; sistem tanam padi Jajar Legowo yang dapat meningkatkan hasil sebesar 13,83%; alat mesin untuk tanam (transplanter) untuk mempercepat waktu dan menurunkan biaya tanam; serta mesin panen padi (*combine harvester*) yang dapat menurunkan susut hasil hingga 1,87%.

Dalam hubungan kerjasama internasional, selama 2010-2014 Kementerian Pertanian aktif pada forum kerjasama lembaga internasional, baik bilateral, regional maupun multilateral. Salah satu peran aktif Kementerian Pertanian dalam hubungan internasional adalah ditunjuknya Indonesia menjadi tuan rumah Pertemuan Tingkat Menteri Pertanian bidang Ketahanan Pangan *Development Eight* (D-8) ke-3 pada tahun 2012 di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Capaian utama dalam pertemuan ini adalah dihasilkannya Mataram Initiative, yaitu komitmen bersama Menteri-menteri D-8 untuk program ketahanan pangan.

Pada pertemuan *Asean Ministerial Agriculture and Forestry* dengan kepemimpinan Indonesia telah disepakati dan ditandatangani kerjasama APTERR (*ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve*) di Jakarta pada tanggal 7 Oktober 2011. Kerjasama ini sangat penting dan strategis dalam mendukung program Ketahanan Pangan.

Capaian lainnya dalam hubungan internasional adalah diterimanya penghargaan "Notable Result" dari FAO untuk Pemerintah Indonesia yang telah berhasil mencapai target penurunan angka kelaparan dan kemiskinan lebih dari 50% sesuai target pertama *Millenium Development Goals* (MDGs) dan target *World Food Summit* (WFS), tiga tahun lebih awal dari tahun 2015.

Di samping membangun ketahanan pangan, yang tidak kalah pentingnya adalah mewujudkan kesejahteraan petani. Kementerian Pertanian telah berusaha meningkatkan pendapatan petani dengan capaian pertumbuhan pendapatan rata-rata per tahun untuk petani tanaman pangan pertumbuhannya naik 8,68%, pekebun naik 2,45%, peternak naik 4,04% per kapita per tahun selama 2010-2013.

Selama 2010-2014, Kementerian Pertanian telah melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan melakukan langkah-langkah perubahan atau pembaharuan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. Disamping itu, Kementerian Pertanian telah mendapat opini Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP) dari BPK pada Tahun Anggaran 2013. Sedangkan untuk penilaian kinerja layanan publik, Kementerian Pertanian memperoleh peringkat 4 dari 18 kementerian/lembaga negara pada tahun 2013 dari Ombudsman RI. Adapun tentang indeks integritas, Kementerian Pertanian berada pada posisi 5 dari 20 instansi pusat yang disurvei KPK.

Dalam rangka mengantisipasi dan menyesuaikan terhadap hukum pertanian yang bergerak secara dinamis sesuai dengan isu dan tuntutan yang berkembang di masyarakat, maka selama 2010-2014 telah diterbitkan Peraturan Perundangan berupa 3 Undang-Undang, 11 Peraturan Pemerintah, 6 Peraturan Presiden, 1 Instruksi Presiden, 466 Peraturan Menteri Pertanian dan 22.378 Keputusan Menteri Pertanian. Undang-undang yang telah diterbitkan selama 2010-2014 adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Tantangan dan permasalahan yang dihadapi saat ini dan ke depan dalam pembangunan pertanian yang menonjol adalah: (1) meningkatnya permintaan beras sesuai dengan peningkatan jumlah penduduk, (2) adanya perubahan iklim global yang berdampak pada perubahan sistem usahatani, (3) konversi lahan pertanian ke non pertanian, (4) sempitnya luas garapan dan status kepemilikan lahan, (5) rusaknya infrastruktur jaringan irigasi, (6) terbatasnya infrastruktur transportasi dan perhubungan seperti pelabuhan, moda transportasi untuk distribusi ternak dan komoditas pangan lainnya baik kereta api, kapal laut maupun angkutan udara, (7) sulitnya mendapatkan permodalan, (8) menurunnya minat generasi muda untuk terjun di bidang pertanian, (9) persyaratan agunan kredit KKPE berupa sertifikat tanah dan (10) semakin menyusutnya jumlah penyuluh.

Untuk mengendalikan konversi lahan ini, telah diterbitkan Undang-undang No. 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan empat Peraturan Pemerintah. Dalam kaitannya dengan konsumsi beras, telah berhasil menurunkan konsumsi beras dari 139,15 kg/kapita/tahun pada tahun 2010 menjadi 124,66 kg/kapita/tahun pada tahun 2013. Dalam rangka menyiapkan landasan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan pertanian ke depan, telah diterbitkan buku Strategi Induk Pembangunan Pertanian (SIPP) 2015-2045, yang diluncurkan pada tanggal 7 Juni 2014, saat pembukaan Pekan Petani Nelayan Nasional (PENAS) XIV di Malang, Menteri Pertanian di hadapan Presiden.

Tahun 2014 merupakan tahun terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2009-2014. Oleh karena itu Kementerian Pertanian berkomitmen untuk memenuhi berbagai target pelaksanaan pembangunan pertanian tahun 2014 sebagai bagian dari upaya pencapaian target RPJMN 2009-2014 tersebut. Berbagai target output yang belum bisa dicapai akan dioptimalkan upaya pencapaiannya hingga akhir tahun 2014 ini. Diharapkan asumsi-asumsi program pendukung dari sektor industri, perdagangan, serta infrastruktur dan lahan yang belum terlaksana pada tahun 2010-2014 dapat dilaksanakan pada periode tahun 2015-2019 yang akan datang. Situasi masyarakat yang stabil dan mendapatkan informasi yang faktual sangat dibutuhkan untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi upaya pencapaian target

pembangunan pertanian, khususnya bagi peningkatan kesejahteraan petani.

Akhirnya, atas nama pribadi dan kementerian, Saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada semua *stakeholder* atas dukungan dan partisipasinya dalam mewujudkan agenda-agenda pembangunan pertanian dalam lima tahun terakhir ini. Selama tahun 2010-2014 ini, Saya sebagai pimpinan Kementerian Pertanian dan sebagai pribadi tentu saja tidak luput dari salah dan khilaf, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu, Saya memohon maaf kepada seluruh jajaran Kementerian Pertanian dan semua *stakeholder*.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, melimpahkan rahmat, karunia, dan ridho-Nya kepada kita semua, dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat petani Indonesia.

Jakarta, Oktober 2014
Menteri Pertanian

Suswono

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	xi
PENDAHULUAN	1
BAGIAN I. MEMBANGUN KEMANDIRIAN PANGAN	5
BAB I KONSEPSI KEMANDIRIAN PANGAN	11
1.1. Sistem Ketahanan Pangan.....	11
1.2. Potensi Peningkatan Produksi	13
BAB II UPAYA MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS DAN PRODUKSI TANAMAN	
PANGAN	19
2.1. Intensifikasi	19
2.2. Meningkatkan Indeks Pertanaman (IP).....	29
2.3. Ekstensifikasi.....	30
2.4. Menurunkan Kehilangan Hasil.....	32
BAB III PENGEMBANGAN KOMODITAS HORTIKULTURA	37
BAB IV PENGEMBANGAN KOMODITAS PERKEBUNAN	41
BAB V MENGEMBANGKAN KOMODITAS PETERNAKAN	55
BAB VI MENINGKATKAN PERAN KELEMBAGAAN PERTANIAN	63
6.1. Kelembagaan Petani	63
6.2. Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP)	67
6.3. Kelembagaan Perbenihan	68
6.4. Kelembagaan Pelayanan Jasa Alat Mesin Pertanian.....	69
6.5. Kelembagaan Petani Pemakai Air	71
BAB VII MENINGKATKAN DIVERSIFIKASI PANGAN	75
7.1. Meningkatkan Keragaman Komoditas Pangan.....	75
7.2. Menganekaragamkan Konsumsi Pangan Penduduk	78
7.3. Mengembangkan Pengolahan Pangan Lokal.....	79
7.4. Mempertahankan Kearifan Lokal	85
BAGIAN II. MENINGKATKAN NILAI TAMBAH, DAYA SAING, DAN EKSPOR	89
BAB VIII MENINGKATKAN MUTU PRODUK PERTANIAN	91
9.1. Kebijakan Standarisasi Produk Pertanian	91
9.2. Standarisasi Produk Pertanian	94
BAB IX MENINGKATKAN NILAI TAMBAH PRODUK PERTANIAN	99

8.1. Pengolahan Beras.....	99
8.2. Pengolahan Modified Cassava Flour (MOCAF)	101
8.3. Pengolahan Bahan Olah Karet Rakyat (BOKAR).....	103
8.4. Pengolahan Kakao.....	105
8.5. Pengolahan Kelapa.....	107
8.6. Pengolahan Susu.....	111
BAB X PENERAPAN GOOD AGRICULTURAL PRACTICES (GAP)	115
10.1. Meningkatkan Daya Saing Melalui GAP	115
10.2. Mengembangkan Produk Pertanian Ramah Lingkungan	116
10.3. Meningkatkan Keamanan Pangan.....	125
10.4. Mengembangkan GAP untuk Keberlanjutan Pertanian	129
BAB XI MEMBANGUN JEJARING PASAR	139
11.1. Meningkatkan Akses Petani Terhadap Pasar.....	139
11.2. Mengembangkan Jejaring Pasar Domestik.....	140
11.3. Mengembangkan Jejaring Pasar Internasional.....	151
BAB XII PENGEMBANGAN USAHA DAN INVESTASI	165
12.1. Meningkatkan Peluang Usaha	165
12.2. Meningkatkan Layanan Investasi di Sektor Pertanian.....	170
12.3. Pelayanan Perizinan Pertanian	172
BAGIAN III. MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN PETANI	177
BAB XIII PENINGKATAN PENDAPATAN PETANI	179
13.1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Petani	180
13.2. Penyediaan Subsidi Sarana Produksi Pertanian	192
13.3. Stabilisasi Harga Pangan	195
13.4. Proteksi/Perlindungan Produk Pertanian (Karantina).....	207
13.5. Penyediaan Pembiayaan Usahatani yang Murah dan Mudah diakses Petani.....	217
13.6. Penyediaan dan Pengembangan Infrastruktur Pedesaan.....	218
BAB XIV PENINGKATAN DAYA BELI PETANI	225
14.1. Peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP).....	225
14.2. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto	228
14.3. Kebijakan Pengendalian Inflasi	230
BAGIAN IV. MANAJEMEN PEMBANGUNAN PERTANIAN	235
BAB XV DUKUNGAN MANAJEMEN	235
15.1. Strategi Induk Pembangunan Pertanian (SIPP) 2014-2045	235
15.2. Perkembangan Anggaran dan Pembiayaan Kredit Kementerian Pertanian Tahun 2010-2013	238

15.3. Akuntabilitas Keuangan	239
15.4. Penyediaan dan Pengolahan Data Serta Sistem Informasi Pertanian.....	240
15.5. Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik.....	243
15.6. Kehumasan.....	246
15.7. Kepegawaian dan Reformasi Birokrasi	250
15.8. Peraturan Perundang-undangan	248
15.9. Hubungan Kerjasama Internasional.....	261
BAB XVII PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR	
KEMENTERIAN PERTANIAN	265
PENUTUP	271

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Perkembangan Produksi dan Kebutuhan Beras Tahun 2010-2013	9
Tabel 2. Target dan Realisasi Pelaksanaan SL-PTT Padi, Jagung dan Kedelai Tahun 2010-2013	20
Tabel 3. Sasaran dan Realisasi SL-PTT Kedelai Tahun 2010-2013.....	24
Tabel 4. Indeks Pertanaman Padi di Lahan Sawah Tahun 2012.....	29
Tabel 5. Bantuan Sarana Pasca Panen Tahun 2013	34
Tabel 6. Keragaan Data Produksi Komoditas Buah Unggulan Hortikultura 2010-2014..	39
Tabel 7. Produksi Komoditas Sayuran Unggulan Hortikultura Tahun 2010-2014	40
Tabel 8. Produksi Komoditas Tanaman Hias dan Tanaman Obat Tahun 2010-2014.....	40
Tabel 9. Produksi Gula Periode Tahun 2010-2013	44
Tabel 10. Produksi Komoditas Peternakan Tahun 2010-2013	55
Tabel 11. Produksi dan Distribusi Semen Beku Balai Besar Inseminasi Buatan/Balai Inseminasi Buatan Nasional.....	58
Tabel 12. Rekapitulasi Teknologi yang Didiseminasikan Kementerian Pertanian	62
Tabel 13. Rekapitulasi Kelompok tani dan Gabungan Kelompok tani Per Wilayah.....	64
Tabel 14. Rekapitulasi Data THL-TB Penyuluh Pertanian Berdasarkan Pendidikan	67
Tabel 15. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan PIP Tahun 2010-2014	72
Tabel 16. Jumlah SNI Sektor Pertanian yang Diterbitkan Selama Tahun 2010-2013.....	91
Tabel 17. Penerapan ISO 9001:2008 di Empat Pabrik Gula.....	93
Tabel 18. Harmonisasi Standar Bidang Pertanian Tingkat ASEAN 2010-2013.....	94
Tabel 19. Pembinaan Sistem Pertanian Organik dan Sertifikasi Organik 2009-2014	95
Tabel 20. Pembinaan Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan Periode 2010-2014 (Pelaku Usaha/Poktan/Gapoktan)	96
Tabel 21. Kegiatan Pengawasan Terhadap Pelaku Usaha Tahun 2010-2014.....	97
Tabel 22. Jumlah Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda (SPPT) SNI dari Lemabaga Sertifikasi Produk (LS-Pro) Alsintan, Balai Pengujian Mutu Alsintan (BPMA), tahun 2010-2013	98
Tabel 23. Daftar Produk Olahan Organik Impor yang Mendapat Rekomendasi OKPO Tahun 2010-2014.....	126
Tabel 24. Keragaan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Tahun 2010-2013	127
Tabel 25. Laboratorium Pengujian Berdasarkan Ruang Lingkup Pengujian	128
Tabel 26. Laboratorium Pengujian Lingkup Eselon I Kementerian Pertanian	129
Tabel 27. Kerjasama Pemasaran Produk Pertanian Tahun 2010-2013.....	142
Tabel 28. Produk Pertanian yang telah Memiliki Sertifikat Indikasi Geografis.....	162
Tabel 29. Jumlah Perijinan Pupuk dan Pestisida 2013-2013.....	172
Tabel 30. Penerbitan Surat Ijin Pemasukan/Pengeluaran Benih Tanaman 2013-	

	Mei 2014	173
Tabel 31.	Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pemasukan/Pengeluaran Peternakan 2013- Mei 2013	174
Tabel 32.	Permohonan dan Penerbitan RIPH per Jenis Komoditi 2012-2013.....	175
Tabel 33.	Perkembangan Pendapatan Petani per Kapita 2010-2013	179
Tabel 34	Jumlah Petani Menurut Sub Sektor dan Jenis Kelamin Hasil ST2013.....	180
Tabel 35.	Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Petani Utama Hasil ST2013	181
Tabel 36.	Tenaga Kerja Pertanian Berdasarkan Pendidikan Tahun 2010-2013.....	181
Tabel 37.	Klasifikasi P4S Secara Nasional	183
Tabel 38.	SMD Yang Telah Difasilitasi Tahun 2010-2012	189
Tabel 39.	Contoh SMD yang Berhasil Mengembangkan Usahanya.....	190
Tabel 40.	Alokasi Anggaran Subsidi Pupuk Kementerian Pertanian Tahun 2010-2014...	193
Tabel 41.	Perkembangan Realisasi Subsidi Pupuk 2010-2014	194
Tabel 42.	Alokasi Anggaran Subsidi Benih Kementerian Pertanian 2010-2014	194
Tabel 43.	Perkembangan Harga GKP Tingkat Petani Tahun 2010-2014	199
Tabel 44.	Perkembangan Harga Beras Kualitas IR di PIBC Tahun 2010-2014.....	200
Tabel 46.	Fluktuasi Harga Bawang Merah dan Cabai Tahun 2010-2014.....	203
Tabel 47.	Perkembangan Harga Cabai dan Bawang Merah Tahun 2010-2014	204
Tabel 48.	Perkembangan Harga Pangan Hewani Tingkat Konsumen Tahun 2010-2014	205
Tabel 49.	Perkembangan Harga Pangan Hewani Tingkat Produsen Tahun 2010-2014...	206
Tabel 50.	Perusahaan yang Melayani Perlakuan Fumigasi dan Kemasan Kayu	214
Tabel 51.	Hasil Pemetaan Lahan Sawah Tahun 2012	219
Tabel 52.	Perkembangan NTP per Sub Sektor Tahun 2010-2014.....	226
Tabel 53.	Perkembangan Kontribusi Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2010-2013	232
Tabel 54.	Posisi Komoditas Pertanian Pada 20 Komoditas Dominan Penyumbang Inflasi Nasional Tahun 2010-2013	234
Tabel 55.	Bimbingan Teknis dan Sistem Informasi Pertanian Untuk Pengelola Data di Pusat dan Daerah.....	243
Tabel 56.	Jabatan Fungsional Rumpun Ilmu Hayat Pertanian (RIHP)	251
Tabel 55.	Produk Legislasi Pertanian Tahun 2010-2013.....	259

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Permasalahan Mendasar dan Strategi Tujuh Gema Revitalisasi Pertanian.....	3
Gambar 2. Presiden Menghadiri Acara Panen Padi Bersama Menteri Pertanian	4
Gambar 3. Kerangka Pikir Filosofis Penyelenggaraan Ketahanan Pangan	6
Gambar 4. Bagan Sistem Ketahanan Pangan berdasarkan Undang undang Pangan Nomor 18/2012	12
Gambar 5. Padi Hibrida Varietas HIPA 11 mampu berproduksi 10,6 ton/hektar	13
Gambar 6. Cara Tanam Sistem Jajar Legowo.....	13
Gambar 7. Varietas Padi Gogo Situ Bagendit Toleran terhadap Kekeringan	14
Gambar 8. Varietas Padi Rawa Inpara 5	15
Gambar 9. Tanaman Gandum dan Sorgum sebagai Komoditas Pilihan Tanaman Bersumber Karbohidrat Non-padi	15
Gambar 10. Tumpangsari Ubi Kayu Dengan Kacang Tanah.....	16
Gambar 11. Sapi Madura.....	17
Gambar 12. Padang Penggembalaan Ternak di Daerah Bomberay, Kabupaten Fakfak.....	18
Gambar 13. Konsep Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT).....	20
Gambar 14. Perkembangan Produktivitas Padi Tahun 2010-2014.....	22
Gambar 15. Panen Perdana SL-PTT Jagung di Kabupaten Garut	23
Gambar 16. Perkembangan Produktivitas Jagung Tahun 2010-2014	24
Gambar 17. Panen Perdana SL-PTT Kedelai di Kab. Grobogan	25
Gambar 18. Perkembangan Produktivitas Kedelai Tahun 2010-2014	26
Gambar 19. Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT).....	27
Gambar 20. Pengamatan Curah Hujan Oleh Peserta SLI	26
Gambar 21. Kalender Tanam Terpadu Versi 2.0.....	29
Gambar 22. Perkembangan Kegiatan Cetak Sawah Tahun 2010-2013	29
Gambar 23. Tanam Perdana di Areal Cetak Sawah	32
Gambar 24. Alat Panen <i>Combine Harvester</i>	33
Gambar 25. <i>Combine Harvester</i> buatan Kementerian Pertanian	35
Gambar 26. Mesin Perontok Biji-bijian Multikomoditas	36
Gambar 27. Perluasan Areal Jeruk Siam di Tanjung Jabung Barat, Jambi	37
Gambar 28. Wakil Menteri Pertanian di Kawasan Pengembangan Bunga Krisan di Kota Tomohon	38
Gambar 29. Bongkar/Rawat Ratoon	41
Gambar 30. Mesin Pengepres Tebu.....	42
Gambar 31. KBD di Kabupaten Pati.....	43
Gambar 32. Perkembangan Komoditas Kelapa Sawit Tahun 2010-2013	44

Gambar 33. Bibit Kelapa Sawit.....	45
Gambar 34. Kegiatan Integrasi Tanaman Sawit dan Ternak	47
Gambar 35. Perkembangan Komoditi Karet Tahun 2010-2013	48
Gambar 36. Penyadap Karet	49
Gambar 37. Perkembangan Komoditi Kakao Tahun 2010-2013.....	49
Gambar 38. Pertumbuhan Tanaman Kakao Hasil dari Gernas Kakao	50
Gambar 39. Perkembangan Komoditi Kelapa Tahun 2010-2013	51
Gambar 40. Perkembangan Komoditas Kopi Tahun 2010-2013.....	52
Gambar 41. Pengembangan Kopi Robusta	53
Gambar 42. Pengembangan Kopi di Provinsi Lampung	54
Gambar 43. Menteri Pertanian dengan Sapi Tipe Limousin.....	56
Gambar 44. Sosialisasi IB di VBC Sapi Potong, Desa Plosorejo, Kec, Tawangharjo, Grobogan	57
Gambar 45. Pemberiaan Penghargaan kepada Juara I Tingkat Nasional Petugas IB oleh Presiden.....	57
Gambar 46. Sapi Pejantan Unggul Tipe Brahman.....	58
Gambar 47. Inovasi Teknologi Penggemukan Sapi Potong	60
Gambar 48. Padang Penggembalaan di Papua Barat.....	61
Gambar 49. Demplot FMA.....	66
Gambar 50. Benih Padi yang Dihasilkan oleh FMA Beleke	66
Gambar 51. THL-TBPP di lahan pertanian di Lahan SLPTT Padi.....	67
Gambar 52. Benih Kedelai	69
Gambar 53. Unit Pelayanan Jasa Alat Mesin Pertanian (UPJA)	71
Gambar 54. Kegiatan Fisik Pengelolaan Irigasi Partisipatif (PIP).....	73
Gambar 55. Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL).....	76
Gambar 56. Pemanfaatan Pekarangan Rumah untuk KRPL	77
Gambar 57. KRPL Kayen dan Olahan Kripik Sukun.....	77
Gambar 58. Perkembangan Konsumsi Kelompok Pangan Tahun 2010-2013	78
Gambar 59. Perkembangan Konsumsi Energi Tahun 2010-2013	79
Gambar 60. Produk Tepung Kasava Bimo dan Starter Bimo-CF.....	80
Gambar 61. Acara serah terima alat mesin produksi tepung kasava Bimo antara Kementerian Pertanian dengan PP Muslimat NU	82
Gambar 62. Peluncuran Produk <i>Snackbars</i> di Kabupaten Malang, Jawa Timur	83
Gambar 63. Produk Olahan Sorgum Setengah Jadi (Sorgum sosoh, dan Tepung sorgum).....	84
Gambar 64. Olahan Nasi Sorgum Instan.....	84
Gambar 65. Olahan Bubur Sorgum Instan (Serpihan Bubur Sorgum Instan, Bubur Sorgum yang telah Diformulasi dengan Gula dan Susu, dan Bubur Sorgum Siap Diseduh)	85

Gambar 66. “Thiwul” Pangan Nusantara Berbahan Dasar Ubi Kayu.....	86
Gambar 67. “Papeda” Pangan Nusantara Berbahan Dasar Sagu	87
Gambar 68. Pengembangan Agroindustri di Perdesaan Periode 2010-2013	89
Gambar 69. Jumlah SNI Sektor Pertanian Yang Diterbitkan 2010-2013	92
Gambar 70. Menteri Pertanian Meninjau Alat dan Mesin Pertanian	93
Gambar 71. Produk Bersertifikat Organik	94
Gambar 72. Produk Bersertifikat Prima 3	95
Gambar 73. Produk Bersertifikat Jaminan Varietas.....	96
Gambar 74. Pengawasan OKKP-P kepada OKKP-D Periode 2010-2014	97
Gambar 75. Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan.....	98
Gambar 76. Hasil Pengujian Alsintan oleh Laboratorium BPMA.....	98
Gambar 77. Menteri Pertanian bersama dengan Menko Perekonomian dan Menteri Perdagangan inspeksi ke Pasar Induk Beras Cipinang.....	99
Gambar 78. Sebaran Alat Penggilingan Padi Tahun 2010-2013	100
Gambar 79. Pengolahan MOCAF	101
Gambar 80. Komoditas Karet	104
Gambar 81. Fasilitasi Bantuan Peralatan Pengolahan BOKAR Tahun 2010-2014	103
Gambar 82. Pertumbuhan UPPB Sampai Tahun 2013.....	104
Gambar 83. Pengembangan Komoditas Kakao	106
Gambar 84. Proses Pengolahan Kakao Fermentasi	107
Gambar 85. Pengembangan Varietas Kelapa Genjah	107
Gambar 86. Produk Olahan Kelapa	108
Gambar 87. Fasilitasi Bantuan Peralatan Pengolahan Kelapa Tahun 2010-2014	109
Gambar 88. Proses Produksi Gula Kelapa.....	109
Gambar 89. Menteri Pertanian dan Wakil Menteri Pertanian pada acara Hari Susu Nusantara 2013	111
Gambar 90. Penyebaran Fasilitasi Peralatan Pengolahan Susu Tahun 2010-2014	112
Gambar 91. Menteri Pertanian Beserta Istri Meninjau Kebun Jeruk yang Menerapkan GAP.....	115
Gambar 92. Contoh Produk Pertanian Organik	116
Gambar 93. Menteri Pertanian Menghadiri Konferensi Internasional Kelapa Sawit 2013 di Bali.....	117
Gambar 94. Petani Kelapa Sawit.....	118
Gambar 95. Upaya Percepatan Implementasi ISPO 2010-2014	119
Gambar 96. Prinsip Dasar <i>System of Rice Intensification</i> (SRI).....	120
Gambar 97. Target dan Realisasi Pengembangan Metode SRI 2006-2013	121
Gambar 98. Menteri Pertanian Memanen Cabai	122
Gambar 99. Capaian Pelaksanaan Kegiatan OKKP-D	126
Gambar 100. Penerapan GAP Tanaman Sayuran dan Buah di Kebun Percobaan	

Brastagi, Badan Litbang Pertanian	130
Gambar 101. Menteri Pertanian Melakukan Panen Raya Kedelai Tahun 2013 di Kabupaten Lombok Tengah NTB	131
Gambar 102. Menteri Pertanian Melakukan Penganangan Model Percepatan Penerapan Teknologi Tebu Terpadu (MP2T3) 2013 di Pati, Jawa Tengah	132
Gambar 103. Menteri Pertanian Meninjau Peternakan Sapi	134
Gambar 104. Menteri Pertanian Meninjau Benih Padi Bersertifikat	137
Gambar 105. Penerapan Sistem Manajemen Mutu dengan <i>Good Manufacturing Practices</i> (GMP) pada penggilingan padi terpadu.....	137
Gambar 106. Menteri Pertanian bersama Menteri Perdagangan Melakukan Jumpa Pers	139
Gambar 107. Faktor Penyebab Lemahnya Posisi Tawar Petani	140
Gambar 108. Menteri Pertanian Mengunjungi Pameran Pertanian	141
Gambar 109. Perkembangan Lokasi Pelayanan Informasi Pasar Tahun 2010-2012	141
Gambar 110. Perkembangan Pelayanan Informasi Pasar 2010-2013	143
Gambar 111. Contoh Penyebarluasan Informasi Pasar Melalui Website Kementan	144
Gambar 113. Menko Perekonomian dan Menteri Pertanian Meninjau Stand Produk Pertanian Nusantara	145
Gambar 114. Menteri Pertanian Meninjau Pameran Hortikultura.....	145
Gambar 115. Menteri Pertanian Membuka Acara Agro & Food Expo 2013	148
Gambar 116. Acara SAMEX 2013	149
Gambar 117. Acara BATAMEX 2011.....	149
Gambar 118. AGRINEX EXPO 2013.....	150
Gambar 119. Menteri Pertanian Melepas Ekspor Markisa ke Singapura Tahun 2014	151
Gambar 120. Menteri Pertanian Melakukan Launching Ekspor Perdana Manggis ke Australia.....	152
Gambar 121. Menteri Pertanian Melakukan Launching Ekspor Sayuran ke Singapura Tahun 2011.....	153
Gambar 122. Wakil Menteri Pertanian Melakukan Launching Ekspor Hortikultura ke Singapura Tahun 2011	154
Gambar 123. Launching Ekspor Pisang dari Deli Serdang Sumatera Utara ke Singapura Tahun 2012	154
Gambar 124. Menteri Pertanian Melepas Ekspor Bunga Melati dari Tegal, Jawa Tengah ke Singapura.....	155
Gambar 125. Pelepasan Ekspor Markisa ke Singapura	155
Gambar 126. Perkembangan Jumlah Gapoktan Berorientasi Ekspor 2011-2013.....	156
Gambar 127. Perkembangan Volume Produksi dan Ekspor pada Gapoktan Berorientasi Ekspor 2011-2013	157
Gambar 128. Kegiatan Usaha Tani Gapoktan Wargi Punggupay.....	157
Gambar 129. Kegiatan Usaha Tani Kelompok Tani Dewa Family.....	158

Gambar 130. Kegiatan Usaha Tani Kelompok Agribisnis Ubi Cilembu Pelopor.....	159
Gambar 131. Kegiatan Usaha Tani Salak Paguyuban Mitra Tourindo.....	159
Gambar 132. In Store Marketing – Pasir Panjang Wholesale Center.....	160
Gambar 133. In Store Marketing NTUC Fair Price	160
Gambar 134. In Store Marketing di Supermarket Giant Singapura.....	161
Gambar 135. Produk Indikasi Geografis Pertanian Indonesia	162
Gambar 136. Menteri Pertanian menghadiri acara Penandatanganan Nota Kesepahaman Bidang Pertanian Indonesia-Malaysia	165
Gambar 137. Keragaan Penumbuhan Kemitraan Melalui Temu Usaha.....	166
Gambar 138. Target dan Realisasi Desa/Gapoktan PUAP 2010-2013.....	167
Gambar 139. Menteri Pertanian Menandatangani Nota Kesepahaman Bidang Pertanian Indonesia-Peru	170
Gambar 140. Menteri Pertanian bersama Menteri Perdagangan Melakukan Panen Cabai Merah.....	175
Gambar 141. Usaha P4S Mekar Tani Jaya.....	184
Gambar 142. Kebun Tanaman Obat.....	185
Gambar 143. Pelatihan Peserta Magang Jepang di BBPP Lembang.....	186
Gambar 144. Pembekalan Peserta Magang Jepang.....	187
Gambar 145. Pengembangan Kelompok Ternak Sapi oleh SMD	191
Gambar 146. Mekanisme Penyediaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi	192
Gambar 147. Mekanisme Penyaluran Benih Bersubsidi.....	195
Gambar 148. Perkembangan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah-Beras pada Inpres Kebijakan Perberasan Tahun 2009-2012	197
Gambar 149. Perkembangan Harga GKP dan HPP GKP Tahun 2010-2014.....	197
Gambar 150. Perkembangan Harga Beras Dalam Negeri Tingkat Grosir Tahun 2010-2014.....	198
Gambar 151. Perkembangan Harga Beras dalam Negeri dan Internasional Tahun 2010-2014.....	199
Gambar 152. Perkembangan Harga Kedelai Dalam Negeri Periode 2010-2014	201
Gambar 153. Perkembangan Harga Pembelian Bawang Merah Tahun 2010-2013	202
Gambar 154. Perkembangan Harga Cabai Merah Tahun 2010-2014	202
Gambar 155. Perkembangan Harga Minyak Goreng Curah dan Gula Pasir Tingkat Konsumen Periode 2010-2014.....	206
Gambar 156. Perkembangan Harga Daging Sapi Periode 2010-2014	207
Gambar 157. Perkembangan Harga Daging Ayam Ras Periode 2010-2014	208
Gambar 158. Perkembangan Harga Telur Ayam Ras Periode Tahun 2010-2014	208
Gambar 159. Deteksi dan Cegah Tangkal Produk Tumbuhan Impor.....	209
Gambar 160. Menteri Pertanian Melakukan Pemusnahan Terhadap Benih Tumbuhan yang Tertular oleh OPTK Asal Luar Negeri	210

Gambar 161. Pengawasan Lalu Lintas Media Pembawa HPHK (Sapi)	210
Gambar 162. Trend Penurunan Volume Buah, Sayur Segar dan Umbi Lapis Impor Tahun 2011-2013	211
Gambar 163. Cegah Tangkal Masuk dan Menyebarnya OPTK Lalat Buah Asal Luar Negeri.....	212
Gambar 164. Pelaksanaan Tindakan Karantina Perlakuan Fumigasi Terhadap Komoditas Tumbuhan Ekspor	213
Gambar 165. Menteri Pertanian Melakukan Pemusnahan Daging Celeng Ilegal di Pelabuhan Merak	214
Gambar 166. Pemberkasian terhadap Para Tersangka oleh PPNS Karantina	215
Gambar 167. Pengawasan Karantina terhadap OPTK Kelapa/Kelapa Sawit dan Pemusnahan Benih Kelapa Sawit yang tidak Dilengkapi Dokumen Karantina.....	216
Gambar 168. Realisasi Kredit Program Pertanian Tahun 2010-2013.....	217
Gambar 169. Kegiatan LKM-A Gapoktan Harum Sari.....	218
Gambar 170. Sebaran Kegiatan PSA per Sub Sektor	220
Gambar 171. Pipanisasi di Kabupaten Ngawi	220
Gambar 172. Pengelolaan Tata Air Mikro di Lahan Rawa.....	221
Gambar 173. Kondisi Lokasi Setelah Pembangunan Saluran.....	221
Gambar 174. Rehabilitasi Jaringan Kabupaten Jember	222
Gambar 175. Pembangunan Embung/Parit Tahun 2010-2014.....	223
Gambar 176. Pengembangan Nilai Tukar Petani 2010-2013	225
Gambar 178. Rataan Distribusi PDB per Sektor 2010-2013.....	228
Gambar 179. Distribusi PDB per Sektor 2013.....	229
Gambar 180. Rataan Distribusi PDB Sektor Pertanian 2013	229
Gambar 181. Pertumbuhan PDB Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutan dan Perikanan Tahun 2010-2013	230
Gambar 182. Menteri Pertanian Memantau Harga Komoditas Pertanian di Pasar Tradisional	230
Gambar 182. Perkembangan Indeks Inflasi Umum Tahun 2010-2013.....	231
Gambar 183. Rapat Koordinasi Stabilisasi Harga Pangan.....	233
Gambar 189. Kerangka Dasar SIPP	236
Gambar 190. Presiden RI me-launching Buku SIPP.....	237
Gambar 191. Perkembangan APBN Kementerian Pertanian dan Dana Alokasi Khusus Bi- dang Pertanian Tahun 2010-2013.....	238
Gambar 192. Target dan Realisasi PNPB Tahun 2010-2013	238
Gambar 193. Capaian Opini BPK Tahun 2010-2013	239
Gambar 194. Peningkatan Kapasitas Bandwith Kementerian Pertanian Tahun 2010-2013	240

Gambar 195. Peningkatan Jumlah Komputer dan Akun Email Tahun 2010-2013.....	241
Gambar 196. Jumlah Server dan Storage di Kementerian Pertanian Tahun 2010-2013 ...	241
Gambar 197. Jumlah Pemohon dan Permohonan Informasi Publik Pada PPID Utama Kementerian Pertanian Tahun 2010-2013.....	245
Gambar 198. Pelaksanaan Kegiatan Menteri Pertanian 2010-2014.....	247
Gambar 199. Pelaksanaan Dialog oleh Menteri Pertanian Tahun 2010-2014	247
Gambar 200. Berita Pertanian Tahun 2010-2014	248
Gambar 201. Respon Krisis di Media Cetak dan media Elektronik Tahun 2010-2014.....	249
Gambar 203. Pemberitaan Media Cetak Tahun 2010-2014.....	249
Gambar 204. Media Cetak Terbanyak yang Memberitakan Kementerian Pertanian Tahun 2010-2014	250
Gambar 205. Jumlah Pegawai Kementerian Pertanian Tahun 2010-2013.....	250
Gambar 206. Data PNS Kementerian Pertanian Berdasarkan Pendidikan Tahun 2010-2013	251
Gambar 207. Rekapitulasi Penerima Tanda Kehormatan Kementerian Pertanian	252
Gambar 208. Pemberian Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya (SLKS) 2010-2013.....	253
Gambar 209. Naskah Perjanjian Kementerian Pertanian yang Dihasilkan pada Periode 2010-2013	261
Gambar 210. 31st FAO Regional Conference For Asia and the Pacific.....	263
Gambar 211. Menteri Pertanian RI Suswono Memberikan Arahan Pada Acara Pembukaan Pembinaan Tekad Antikorupsi	268

Pembangunan pertanian memegang peranan strategis dalam perekonomian nasional. Peran strategis pertanian tersebut digambarkan melalui kontribusi yang nyata melalui sumbangan terhadap PDB, penyediaan pangan, bahan baku industri, pakan dan bio-energi, penyerap tenaga kerja, sumber devisa negara, dan sumber pendapatan, serta pelestarian lingkungan.

Strategi dan kebijakan pembangunan pertanian diarahkan untuk mencukupi pangan bangsa, meningkatkan daya saing dan mewujudkan kesejahteraan petani. Dalam rangka mencukupi pangan bangsa, ada dua upaya pokok, yaitu meningkatkan produksi dan diversifikasi. Diversifikasi pangan untuk mengurangi konsumsi beras dan penggunaan terigu yang bahan baku sepenuhnya tergantung impor. Program diversifikasi pangan ini juga disertai dengan perbaikan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman, yang ditunjukkan oleh semakin meningkatnya skor Pola Pangan Harapan (PPH).

Ke depan Indonesia dituntut untuk terus meningkatkan ketahanan pangan agar mampu menyediakan pangan yang cukup bagi penduduknya. Pembangunan pertanian tidak hanya upaya meningkatkan ketahanan pangan, tetapi juga mampu untuk menggerakkan perekonomian nasional. Arah kebijakan dan strategi yang ditempuh sampai 2014 diakumulasikan pada target terwujudnya kesejahteraan rakyat yang berbasis pada pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

Visi dan Misi Pembangunan Pertanian

Visi pembangunan pertanian adalah terwujudnya pertanian industrial unggul berkelanjutan yang berbasis sumberdaya lokal untuk meningkatkan kemandirian pangan, nilai tambah, ekspor, dan kesejahteraan petani. Guna mencapai visi tersebut, Kementerian Pertanian menetapkan Misi yang diemban dalam pembangunan pertanian 2010-2014, yang mencakup:

1. Mewujudkan sistem pertanian berkelanjutan yang efisien, berbasis iptek dan sumberdaya lokal, serta berwawasan lingkungan melalui pendekatan sistem agribisnis;
2. Menciptakan keseimbangan ekosistem pertanian yang mendukung keberlanjutan peningkatan produksi dan produktivitas untuk meningkatkan kemandirian pangan;
3. Mengamankan plasma-nutfah dan meningkatkan pendayagunaannya untuk mendukung diversifikasi dan ketahanan pangan;
4. Menjadikan petani yang kreatif, inovatif, dan mandiri serta mampu memanfaatkan iptek dan sumberdaya lokal untuk menghasilkan produk pertanian berdaya saing tinggi;
5. Meningkatkan produk pangan segar dan olahan yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH) dikonsumsi;
6. Meningkatkan produksi dan mutu produk pertanian sebagai bahan baku industri;

7. Mewujudkan usaha pertanian yang terintegrasi secara vertikal dan horizontal guna menumbuhkan usaha ekonomi produktif dan menciptakan lapangan kerja di pedesaan;
8. Mengembangkan industri hilir pertanian yang terintegrasi dengan sumberdaya lokal untuk memenuhi permintaan pasar domestik, regional dan internasional;
9. Mendorong terwujudnya sistem kemitraan usaha dan perdagangan komoditas pertanian yang sehat, jujur dan berkeadilan;
10. Meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan aparatur pemerintah bidang pertanian yang amanah dan profesional.

Sasaran

Target utama yang hendak dicapai Kementerian Pertanian tahun 2010-2014 bersama dengan seluruh pemangku kepentingan bidang pertanian dirumuskan dalam Empat Sukses pembangunan pertanian, yaitu:

1. Pencapaian Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan;
2. Peningkatan Diversifikasi Pangan;
3. Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, dan Ekspor Produk Pertanian; dan
4. Peningkatan Kesejahteraan Petani.

Permasalahan Pembangunan Pertanian

Dalam rangka mencapai empat target sukses, permasalahan-permasalahan mendasar yang dihadapi adalah:

1. Lahan: konversi lahan, kepemilikan lahan yang sempit, dan sulitnya akses petani ke lahan terlantar/hutan;
2. Perbenihan dan Perbibitan: lemahnya sistem produksi dan distribusi benih dan hambatan pengembangan benih transgenik;
3. Infrastruktur dan Sarana: tingginya kerusakan jaringan irigasi, tingginya biaya produksi dan transportasi;
4. Sumber Daya Manusia: terbatasnya jumlah SDM dan masih rendahnya kualitas SDM.
5. Pembiayaan Petani: sulitnya petani mendapatkan pinjaman, banyaknya petani gurem/kecil, dan tunggakan KUT yang belum diputihkan;
6. Kelembagaan Petani: lemahnya kelembagaan petani dan kapasitas kelembagaan yang beragam;
7. Teknologi dan Industri Hilir: masih menggunakan alat/teknologi tradisional dan industri yang belum berkembang.

Strategi Pencapaian Sasaran

Strategi yang ditempuh adalah Tujuh Gema Revitalisasi Pertanian, yang meliputi: (1) Revitalisasi Lahan; (2) Revitalisasi Perbenihan dan Perbibitan; (3) Revitalisasi Infrastruktur dan Sarana; (4)

Revitalisasi Sumber Daya Manusia; (5) Revitalisasi Pembiayaan Petani; (6) Revitalisasi Kelembagaan Petani; dan (7) Revitalisasi Teknologi dan Industri Hilir.



Gambar 1. Permasalahan Mendasar dan Strategi Tujuh Gema Revitalisasi Pertanian

Selain upaya peningkatan produksi komoditas pertanian dan diversifikasi, Kementerian Pertanian secara konsisten dan terus-menerus berupaya meningkatkan mutu hasil, meningkatkan nilai tambah dengan mengembangkan agroindustri perdesaan, seperti mengembangkan pengolahan berbagai komoditas pertanian dan terus memberikan pelayanan informasi pasar domestik dan internasional sampai mencari terobosan ekspor, dalam rangka meningkatkan daya saing.

Muara dari upaya pembangunan pertanian di atas pada akhirnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Sudah banyak kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah selama Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II, seperti penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP), subsidi, baik subsidi benih, pupuk maupun subsidi bunga kredit seperti Kredit Ketahanan Pangan (KKP), Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP), Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE), Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS), penyediaan anggaran untuk kegiatan di tingkat petani melalui mekanisme bantuan langsung masyarakat.

Pembangunan pertanian ke depan akan dihadapkan pada berbagai tantangan yang kompleks dan tidak mudah, untuk itu dalam pembangunan pertanian tidak bisa hanya dilakukan oleh Kementerian Pertanian. Pembangunan pertanian memerlukan dukungan dan sinergitas program dan kegiatan dari semua pemangku kepentingan yang mencakup sektor atau kementerian/ lembaga lain, perguruan tinggi, pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten maupun kota, dunia usaha, perbankan, lembaga-lembaga pembiayaan bukan bank, perguruan tinggi, organisasi profesi dan kemasyarakatan, serta peran aktif dari semua petani, pekebun dan peternak di seluruh tanah air sebagai pelaku utama pembangunan pertanian.



Gambar 2. Presiden Menghadiri Acara Panen Padi Bersama Menteri Pertanian

Dalam pembangunan pertanian 2010-2014, Kementerian Pertanian juga telah berusaha meningkatkan akuntabilitas keuangan yang pada Tahun Anggaran 2013, memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

Kementerian Pertanian juga telah melaksanakan Reformasi Birokrasi yang terus dimonitor dan dievaluasi dengan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) secara on line berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012.

BAGIAN I MEMBANGUN KETAHANAN PANGAN

Pangan merupakan komoditas yang sangat strategis karena merupakan kebutuhan utama bagi masyarakat Indonesia. Kecukupan pangan wajib terpenuhi sebagai hak dan kelangsungan hidup bangsa. Untuk menjaga kestabilan ekonomi dan politik bangsa, pangan harus tersedia yang cukup dan merata, terjangkau oleh semua penduduk dengan konsumsi pangan yang beragam, bergizi dan seimbang, aman dan halal.

Dalam sejarah Republik Indonesia, Presiden Soekarno menyadari betul betapa pentingnya permasalahan pemenuhan kebutuhan pangan bagi kelangsungan kehidupan bangsanya, hal ini disampaikan beliau dalam pidato pada acara Peletakan Batu Pertama pembangunan Gedung Fakultas Pertanian, Universitas Indonesia di Bogor, 27 April 1952, yaitu: *"...., apa yang saya hendak katakan itu, adalah amat penting, bahkan mengenai soal mati-hidupnya bangsa kita di kemudian hari.... Oleh karena, soal yang hendak saya bicarakan itu mengenai soal persediaan makanan rakyat"*.

Pandangan dan pola pikir seperti ini masih berlanjut dianut oleh Presiden kedua Soeharto. Ini terbukti bahwa 21 tahun kemudian, pada 11 Mei 1973, dalam salah satu acara kunjungan kerja di Yogyakarta, Presiden Soeharto waktu itu mengemukakan: *"..... jadi kalau kita akan mengatasi kekurangan beras itu dengan mengimpor, bilamana kemungkinan devisa itu ada, keadaan di dunia pun juga tidak mengizinkan kita"*. Selanjutnya Presiden kedua mengemukakan *".....Kita harus menghasilkan sendiri bahan-bahan pangan khususnya beras dalam jumlah yang kita telah ketahui agar kestabilan dari pada harga beras itu betul-betul akan terjamin....."*. Pada bagian lain Presiden Soeharto berujar *".....kalau kita simpulkan keseluruhannya jelas daripada harga beras yang tidak bisa dikendalikan, stabilitas nasional akan terganggu....."*

"segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman".

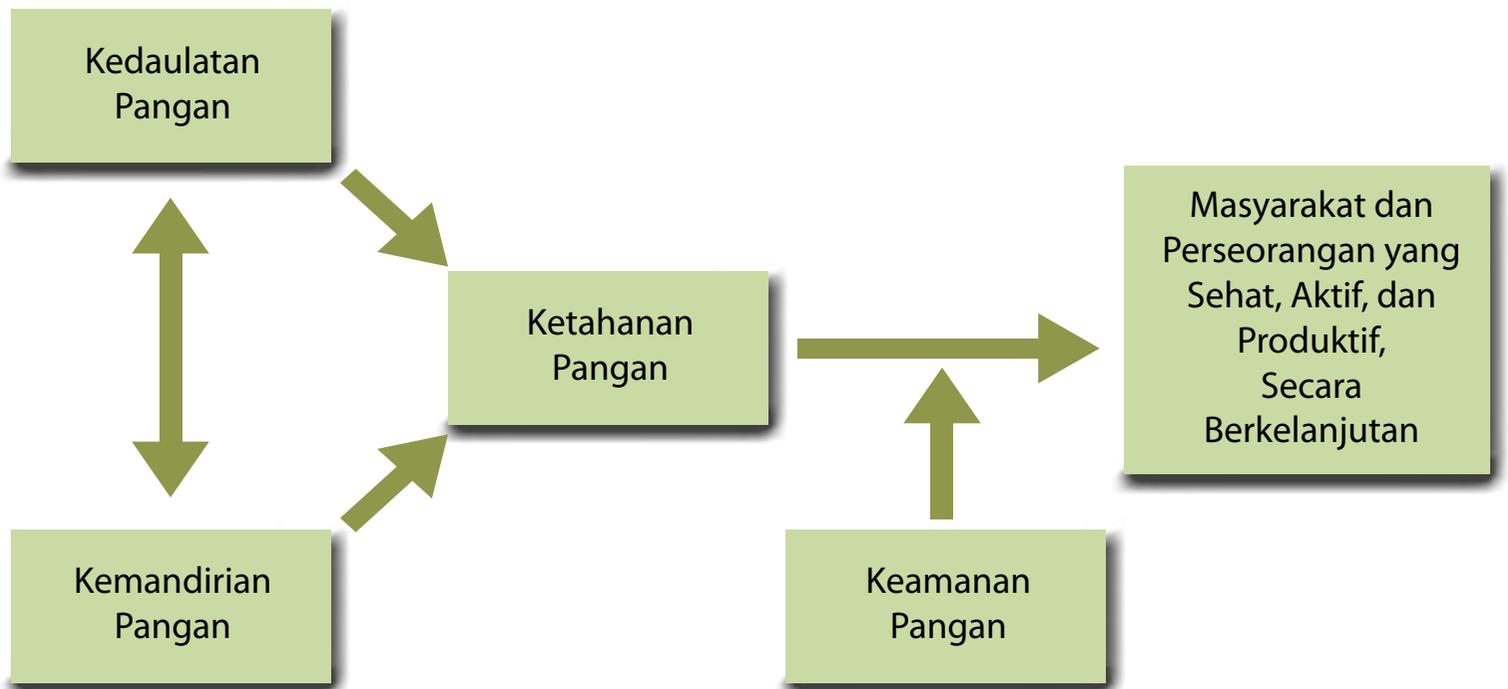
Penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan dengan berdasarkan pada Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan.

Kedaulatan pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.

Kemandirian pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat.

Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Skema hubungan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan, seperti pada gambar berikut:



Gambar 3. Kerangka Pikir Filosofis Penyelenggaraan Ketahanan Pangan

Tantangan yang dihadapi dalam menyediakan pangan bangsa, antara lain: meningkatnya permintaan beras sesuai dengan peningkatan jumlah penduduk. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010 jumlah penduduk Indonesia telah mencapai 237.556.363 jiwa, meningkat sebesar 2,67% dari perkiraan jumlah penduduk tahun 2009. Tantangan lainnya adalah adanya perubahan iklim global yang berdampak pada sistem usahatani padi di semua negara produsen padi dunia, sebagai contoh pada tahun 2010, terjadi hujan sepanjang tahun (tidak ada musim kemarau),

menyebabkan luas tanam padi di lahan rawa (lebak dan pasang surut) menurun drastis. Di lahan lain yang airnya tersedia sepanjang tahun, petani cenderung secara terus menerus bertanam padi, akibatnya hama Wereng Batang Coklat (WBC) meningkat dan berlanjut pada tahun 2011.

Pembangunan pertanian juga menghadapi permasalahan mendasar, yaitu menurunnya rata-rata luas pemilikan lahan diikuti dengan meningkatnya ketimpangan distribusi pemilikan lahan khususnya untuk agroekosistem persawahan di Jawa. Status penguasaan lahan oleh sebagian besar petani belum memiliki legalitas yang kuat dalam bentuk sertifikat, sehingga lahan belum bisa dijadikan sebagai jaminan untuk memperoleh modal usaha melalui perbankan.

Konversi lahan sawah ke non sawah terjadi di semua wilayah, baik di sekitar kota besar maupun kecil, dan bahkan sampai ke desa-desa. Konversi lahan pertanian terutama lahan sawah tidak hanya menyebabkan kapasitas produksi pangan turun, tetapi merupakan salah satu bentuk kerugian investasi, degradasi agroekosistem, degradasi tradisi dan budaya pertanian, dan merupakan salah satu sebab semakin sempitnya luas garapan usahatani serta turunnya kesejahteraan petani sehingga kegiatan usaha tani yang dilakukan petani tidak dapat menjamin tingkat kehidupan yang layak baginya. Tantangan untuk menekan laju konversi lahan pertanian ke depan adalah bagaimana melindungi keberadaan lahan pertanian melalui perencanaan dan pengendalian tata ruang; meningkatkan optimalisasi, rehabilitasi dan ekstensifikasi lahan; meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha pertanian serta pengendalian pertumbuhan penduduk.

Beragam kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk mendorong ketersediaan lahan pertanian berkelanjutan. Termasuk memberikan insentif dan perlindungan, atau melarang konversi lahan pertanian produktif dengan tujuan agar lahan pertanian tidak terus-menerus berkurang.

Untuk menghambat laju konversi lahan, Kementerian Pertanian telah menerbitkan empat Peraturan Pemerintah sebagai tindak lanjut dari Undang-undang No. 41 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yaitu Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Walaupun sudah ada Undang-undang No. 41 Tahun 2009 beserta empat Peraturan Pemerintah turunannya, namun dalam pelaksanaannya masih memerlukan diterbitkannya Peraturan Daerah (Perda) oleh Kepala Daerah. Tanpa adanya Perda, Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tidak bisa dilaksanakan. Kenyataannya sebagian besar daerah belum menerbitkan Peraturan Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan karena harus didahului penerbitan Perda Penataan Ruang. Tanpa adanya peraturan daerah tentang Penataan Ruang dan Perlindungan Lahan

Pertanian Berkelanjutan maka konversi lahan tidak akan bisa dikendalikan. Sebagai akibatnya, lahan pertanian di daerah semakin berkurang, bahkan diprediksi lahan pertanian padi seluas 2 juta hektar terancam hilang dalam beberapa tahun ke depan karena dikonversi untuk kepentingan non pertanian.

Selain masalah lahan, infrastruktur irigasi seperti bendungan, waduk dan jaringan irigasi sebagian besar umur teknisnya sudah cukup lama, sementara pemeliharaan kurang optimal, ditambah lagi dengan rusaknya lingkungan terutama daerah aliran sungai (*Catchment Area*), maka ketersediaan air irigasi untuk budidaya padi menjadi berkurang, terutama pada musim kemarau. Sedang di musim penghujan air hujan langsung mengalir ke sungai mengakibatkan banjir dan mempercepat pendangkalan waduk, bendungan, situ, serta jaringan irigasi. Dampak kedua hal tersebut luas tanam dan panen menjadi lebih kecil dari potensinya.

Keterbatasan akses petani terhadap permodalan dan masih tingginya suku bunga usaha tani masih menjadi permasalahan yang dihadapi oleh petani. Di sisi lain petani juga belum memiliki kemampuan untuk mengakses sumber permodalan/lembaga keuangan formal, diantaranya diakibatkan oleh tidak mudahnya prosedur pengajuan kredit dan ketiadaan agunan yang dipersyaratkan, sehingga petani lebih memilih "rentenir" yang menyediakan pinjaman modal dengan cepat walau dengan tingkat bunga yang lebih tinggi dibanding lembaga keuangan formal. Kondisi ini, pada akhirnya semakin memperburuk kondisi arus tunai (*cash flow*) dan kesejahteraan petani.

Permasalahan lain yang dihadapi dalam penyediaan pangan adalah pola konsumsi pangan masyarakat masih didominasi oleh beras. Kebutuhan beras untuk konsumsi masyarakat akan semakin bertambah. Keadaan ini telah menjadi perhatian Kementerian Pertanian selama 2010-2014. Belum optimalnya upaya diversifikasi pangan, disebabkan antara lain belum berkembangnya pangan lokal berbasis teknologi pengolahan pangan, pola konsumsi pangan masyarakat serta belum optimalnya dukungan dari program sektor lain dalam percepatan diversifikasi pangan.

Walaupun begitu banyak permasalahan yang dihadapi dalam memenuhi kebutuhan pangan bangsa, Kementerian Pertanian selama 2010-2014 telah berusaha menjawab dan mencari solusi tantangan dan permasalahan dalam rangka Membangun Ketahanan Pangan dan Mewujudkan Kesejahteraan Petani dengan melakukan rencana aksi yang terencana dan target serta sasaran yang terukur.

Sebagian besar produksi pangan selama periode tahun 2010-2014 mengalami peningkatan, bahkan untuk beras, produksinya lebih besar dibanding kebutuhan, sehingga mencapai surplus. Besarnya surplus beras pada tahun 2010 sebesar 4,31 juta ton, tahun 2011 sebesar 3,92 juta ton, tahun 2012 sebesar 5,79 juta ton dan tahun 2013 sebesar 5,51 juta ton, sehingga secara total surplus beras sampai dengan tahun 2013 mencapai 19,53 juta ton. Sebagian besar surplus tersebut disimpan di gudang-gudang masyarakat.

Tabel 1. Perkembangan Produksi dan Kebutuhan Beras Tahun 2010-2013

Uraian	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014*)
Produksi Padi (000 Ton GKG)	66.469	65.757	69.056	71.291	69.871
Produksi Beras (000 Ton)	37.371	36.962	38.823	40.080	39.284
Konsumsi Beras (000 Ton)	33.056	33.045	33.035	34.568	35.089
Surplus/Defisit (000 Ton)	4.315	3.917	5.788	5.512	4.195

Keterangan:

Produksi padi tahun 2010-2013 = ATAP, tahun 2014*) = ARAM 1 BPS-RI

Mengingat surplus beras di masyarakat cukup besar, maka Kementerian Pertanian mengembangkan Lumbung Pangan Masyarakat, dengan memfasilitasi pembangunan fisik lumbung, pengisian cadangan pangan dan penguatan kelembagaan kelompok. Melalui pemberdayaan tersebut diharapkan masyarakat dapat mengelola cadangan pangan yang ada dikelompoknya, dan juga dapat meningkatkan peran dalam menjalankan fungsi ekonomi bagi anggotanya sehingga mampu mempertahankan dan mengembangkan cadangan pangan yang dimiliki.

PENGEMBANGAN LUMBUNG PANGAN

Pada akhir tahun 2009 Jorong Simpang Tigo mendapat bantuan dari Kementerian Pertanian sebesar Rp. 30 juta untuk pembangunan lumbung pangan melalui kelompok lumbung Rangkaian Simpati dan telah selesai dibangun bulan Februari 2010. Anggota kelompok Rangkaian Simpati membuat kegiatan kerja mengumpulkan tabungan beras dan gabah petani, yang dimulai dari gabah dan beras anggota kelompok. Untuk anggota kelompok yang memiliki sawah pada saat panen mengumpulkan 10 kg Gabah Kering Panen (GKP) untuk disimpan di lumbung, sedangkan untuk anggota yang tidak memiliki sawah mengumpulkan hasil panen lain seperti ubi kayu, kelapa dan lain-lain senilai 10 kg GKP.

Kegiatan lainnya yang dikelola lumbung pangan desa ini adalah mendistribusikan beras dalam kegiatan jual beli beras. Kegiatan ini sangat terasa manfaatnya bukan hanya dalam kelompok, masyarakat di sekitar lumbung tetapi juga masyarakat di sekitar Jorong. Ini terlihat dalam aktivitas jual beli beras yang dilakukan kelompok lumbung pangan bukan hanya dalam kelompok, masyarakat Jorong Simpang Tigo tetapi juga masyarakat di luar Jorong Simpang Tigo.

1.1. Sistem Ketahanan Pangan

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi setiap rakyat Indonesia. Pangan harus senantiasa tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Pemenuhan konsumsi pangan harus mengutamakan produksi dalam negeri dengan memanfaatkan sumber daya dan kearifan lokal secara optimal.

Ketahanan pangan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan bangsa karena merupakan salah satu pilar ketahanan nasional suatu bangsa, dan menunjukkan eksistensi kedaulatan bangsa. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, “kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, halal, merata, dan terjangkau”, dan ketahanan pangan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat, karena Negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan tingkat nasional, daerah dan perseorangan. Dalam penyelenggaraan ketahanan pangan tidak lepas dari kedaulatan pangan dan kemandirian yang disukung keamanan pangan, sehingga dapat mencapai tujuan dari penyelenggaraan ketahanan pangan yaitu masyarakat dan perseorangan yang sehat, aktif, dan produktif, secara berkelanjutan.

Secara umum kemandirian pangan secara nasional diartikan sebagai kemampuan suatu bangsa untuk menjamin seluruh penduduknya memperoleh pangan dalam jumlah yang cukup, kualitas yang layak, aman yang didasarkan pada optimasi pemanfaatan dan berbasis pada keragaman sumberdaya domestik. Pada tingkat rumah tangga, kemandirian pangan diartikan sebagai kemampuan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan pangannya dengan jumlah, mutu, keragaman, gizi dan aman; baik dari hasil produksi sendiri ataupun membeli di pasar, sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang ada.

Kemandirian pangan dapat dijabarkan dalam empat dimensi pokok, yaitu : (1) kapasitas masyarakat dan individu dalam memahami dan mengupayakan pencapaian ketahanan pangan; (2) pandangan individu dan masyarakat terhadap sumberdaya yang dimiliki/yang ada; (3) bagaimana masyarakat menjalankan dan mengembangkan proses-proses kemasyarakatan; dan (4) bagaimana masyarakat menjalankan pengelolaan organisasi/kelompok masyarakat. Keempat dimensi pokok ini tidak bisa dilihat secara parsial, tetapi keempatnya secara menyeluruh. Oleh karena itu, kemandirian pangan sangat erat kaitannya dengan pengelolaan keseluruhan sistem penghidupan (livelihood system) yang ada di masyarakat oleh masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2012, dalam rangka mencapai ketahanan pangan yang mantap dan berkesinambungan, ada 3 sub sistem ketahanan pangan yang harus diperhatikan yaitu:

1. Ketersediaan pangan yang cukup dan merata,
2. Keterjangkauan pangan yang efektif dan efisien, serta
3. Konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman dan halal.

Ketiga sub sistem tersebut perlu diwujudkan sampai tingkat pemanfaat kegiatan ketahanan pangan yaitu sebagai berikut:

1. Memanfaatkan potensi sumber daya lokal yang beragam untuk peningkatan ketersediaan pangan dengan teknologi spesifik lokasi dan ramah lingkungan;
2. Mendorong masyarakat untuk mau dan mampu mengkonsumsi yang beragam, bergizi seimbang, dan aman untuk kesehatan;
3. Mengembangkan perdagangan pangan regional dan asal daerah, sehingga menjamin pasokan pangan ke seluruh wilayah dan terjangkau oleh masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
4. Memanfaatkan pasar pangan internasional secara bijaksana bagi pemenuhan konsumen yang beragam; serta
5. Memberikan jaminan bagi masyarakat miskin di perkotaan dan perdesaan dalam mengakses pangan yang bersifat pokok.



Gambar 4. Bagan Sistem Ketahanan Pangan berdasarkan Undang-undang Pangan Nomor 18/2012

1.2. Potensi Peningkatan Produksi

(1) Kesenjangan Hasil Antara Potensi dan Kondisi di Lapangan Masih Tinggi

Upaya peningkatan produksi masih terbuka lebar. Produktivitas yang di atas 6 ton/hektar diterapkan SL-PTT padi hibrida, sedang yang di bawah 6 ton/hektar dapat diterapkan SL-PTT padi non hibrida, dengan paket lengkap dan pengawalan/pendampingan yang ketat, di lokasi yang sesuai (tepat).



Gambar 5. Padi Hibrida Varietas HIPA 11 mampu memproduksi 10,6 ton/hektar

(2) Tersedia Teknologi untuk Meningkatkan Produktivitas

Hasil penelitian Kementerian Pertanian, serta hasil adopsi dan adaptasi teknologi dari berbagai sumber, baik lokal maupun mancanegara, telah banyak tersedia teknologi untuk meningkatkan produktivitas budidaya padi. Teknologi tersebut antara lain dengan tanam padi bibit muda (kurang dari 20 hari) dan hemat air (SRI), cara tanam (jajar legowo, tanam 1 batang), disertai dengan pemupukan secara berimbang sesuai kebutuhan lapangan. Teknologi tersebut dirakit dalam satu kegiatan dengan nama Pengelolaan Tanaman dan sumberdaya secara Terpadu (PTT).



Gambar 6. Cara Tanam Sistem Jajar Legowo

(3) Potensi Sumberdaya Lahan Kering yang Masih Luas

Indonesia masih memiliki potensi lahan kering sangat luas yaitu 46.877.603 ha yang cocok untuk pertanian, hingga saat ini penggunaan lahan kering masih rendah, yaitu seluas 33.103.733 ha, dapat ditingkatkan melalui perluasan areal lahan kering yang masih terlantar seluas 13.773.870 ha.



Gambar 7. Panen Perdana Padi Varietas Situ Bagendit

Pengembangan Padi Hibrida Di Lahan Kering Di Kabupaten Gunung Kidul Provinsi D. I. Yogyakarta

Salah satu upaya peningkatan produksi padi ladang di Kabupaten Gunung Kidul dilakukan dengan menanam varietas padi hibrida di lahan kering. Potensi pengembangan padi lahan kering yang ada di Kabupaten Gunung Kidul seluas 67.114 ha (89,52%), sawah irigasi 2.344 ha (3,13%) dan sawah tadah hujan 5.514 ha (7,35%). Pada tahun 2013 telah dilaksanakan pengembangan varietas padi hibrida di lahan kering yang dilaksanakan pada tiga lokasi kecamatan meliputi: Wonosari seluas 20 ha dengan produktivitas mencapai 10,3 ton GKP/Ha; Paliyan seluas 50 ha dengan produktivitas mencapai 9 ton GKP/Ha; dan Semanu seluas 9 ha dengan produktivitas 10 ton GKP/Ha. Produktivitas padi ladang (padi lahan kering) Kabupaten Gunung Kidul pada tahun 2013 (ATAP) mencapai 44,76 ku/ha (produktivitas tertinggi kedua setelah Provinsi Jawa Timur (47,52 ku/ha).

(4) Potensi Sumberdaya Lahan Rawa Pasang Surut dan Lebak Masih Luas

Berdasarkan hasil pemetaan Kementerian Pertanian, luas lahan rawa di seluruh Indonesia sekitar 33,43 juta ha, hingga saat ini luas lahan rawa yang dimanfaatkan untuk budidaya pertanian baru mencapai 2,270 juta ha. Artinya, lahan rawa yang dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian hanya 23,8 persen dari luas total lahan rawa yang sesuai untuk kegiatan pertanian. Sisanya, 76,2 persen atau seluas sekitar 7,26 juta ha belum dimanfaatkan.



Gambar 8. Varietas Padi Rawa Inpara 5

(5) Tersedianya Potensi Pengembangan Produksi Berbagai Pangan Pilihan Selain Beras

Keanekaragaman sumber daya pangan khas daerah menyediakan pengganti sumber pangan pokok (sumber karbohidrat) yang cukup banyak, baik dari kelompok padi-padian maupun dari umbi-umbian. Sudah saatnya sumber pangan tersebut dikembangkan, baik dari sisi ketersediaannya (produksi) maupun pengembangan teknologi pengolahan dan penyajiannya sebagai pangan pilihan selain beras, disertai dengan upaya untuk memasyarakatkannya. Dengan upaya tersebut, diharapkan ketergantungan terhadap beras sebagai sumber pangan pokok menjadi berkurang, sehingga beban peningkatan produksi padi/beras menjadi lebih ringan.



Sorgum Varietas Super-2

Gandum Varietas Guri-1

Gambar 9. Tanaman Gandum dan Sorgum sebagai Komoditas Pilihan Tanaman Bersumber Karbohidrat Non-padi

Intercropping atau tumpangsari merupakan suatu usaha menanam beberapa jenis tanaman pada lahan dan waktu yang sama, yang diatur sedemikian rupa dalam barisan-barisan tanaman. Sistem tanam tumpangsari mempunyai banyak keuntungan antara lain: akan terjadi peningkatan efisiensi (tenaga kerja, pemanfaatan lahan maupun penyerapan sinar matahari), populasi tanaman dapat diatur sesuai yang dikehendaki, dalam satu areal diperoleh produksi lebih dari satu komoditas, tetap mempunyai peluang mendapatkan hasil manakala satu jenis tanaman yang diusahakan gagal, dan kombinasi beberapa jenis tanaman dapat menciptakan beberapa jenis tanaman dapat menciptakan stabilitas biologis sehingga dapat menekan serangan hama dan penyakit serta mempertahankan kelestarian sumber daya lahan dalam hal ini kesuburan tanah.

Pengembangan *Intercropping*

Tumpangsari baris ganda ubi kayu dengan tanaman kacang tanah menunjukkan bahwa produksi ubi kayu pada tumpangsari tersebut 56 % lebih tinggi dibandingkan hasil ubi kayu yang ditanam secara monokultur oleh petani. Di samping itu petani masih mendapatkan hasil panen tanaman kacang tanah sebagai tanaman pada musim pertama maupun tanaman kacang-kacangan lain sebagai tanaman lorong pada akhir musim hujan.



Gambar 10. Tumpangsari Ubi Kayu Dengan Kacang Tanah

(6) Pangan Asal Hewani

Untuk pangan asal hewani, Indonesia memiliki ternak asli yang merupakan Sumber Daya Genetik (SDG) seperti sapi Bali, sapi Peranakan Ongole (PO), sapi Sumba Ongole (SO), sapi Madura, sapi Aceh, sapi Pesisir, dan sapi Persilangan hasil inseminasi buatan. Untuk ternak ruminansia kecil seperti kambing dan domba, keberadaannya banyak di masyarakat seperti kambing Kacang, Peranakan Ettawa, kambing Boer, domba Ekor Gemuk, domba Ekor Tipis, dan domba Garut. Untuk ternak babi, sedikitnya dikategorikan dalam dua kelompok yaitu babi lokal dan babi eks impor, yang hampir semuanya dipelihara masyarakat.



Gambar 11. Sapi Madura

Untuk ternak unggas lokal utamanya ayam buras, sedikitnya terdapat 31 bangsa atau populasi yang tersebar di wilayah nusantara. Seluruh ternak lokal tersebut merupakan plasma nutfah yang masih dapat dikembangkan untuk meningkatkan populasi, produksi, dan kemampuan produksinya. Potensi lahan sebagai sumber pakan hijauan sebesar 74,8 juta ha dan potensi hasil samping produk pertanian/perkebunan/perikanan yang melimpah sebagai sumber bahan pakan ternak.

(7) Tersedia Padang Penggembalaan Cukup Luas untuk Pengembangan *Ranch* Peternakan

Masih tersedia padang penggembalaan yang cukup luas dan pengembangan ranch ternak ruminansia terutama di Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Pulau Sumbawa dan Sulawesi.

Pengembangan Peternakan Berbasis Padang Penggembalaan

Pengembangan peternakan berbasis padang penggembalaan di kawasan Bomberay, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, dilakukan melalui perbaikan padang penggembalaan seluas 1.100 ha, melalui improvement rumput lokal setempat dengan jenis rumput *Brachiaria humideicola* (BH), *Brachiaria decumben* (BD) dan penanaman legum pohon Gamal (*Gliricidia sepium*). Selain memperbaiki vegetasi pada padang penggembalaan, sebagai sumber pakan pada awal pemeliharaan dibuat kebun rumput produksi seluas 90 Ha. Kebun rumput ini akan menjadi sumber cadangan pakan bagi ternak yang digembalakan.

Kegiatan ini juga memfasilitasi penyediaan infrastruktur dasar untuk mendukung pelaksanaan pengembangan padang penggembalaan di Bomberay seperti pagar luar 44.000 meter, pagar paddock 33.000 meter, shelter, gudang pakan, sumur dan bak air, cluster, sumur, kandang jepit, peralatan mesin pengolah lahan. Sebagai stimulus awal, kelompok peternak yang akan mengembangkan peternakan sapi potong berbasis padang penggembalaan di Kabupaten Fak fak diberikan sapi induk sejumlah 1.200 ekor dan jantan 120 ekor untuk penguatan kepemilikan ternak di 12 kelompok.



Gambar 12. Padang Penggembalaan Ternak di Daerah Bomberay, Kabupaten Fak-Fak

BAB II. UPAYA MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS DAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN

Produksi pangan ditentukan oleh luas areal tanam/panen dan produktivitas yang dihasilkan setiap satuan luas areal panen. Untuk itu, dalam upaya meningkatkan produksi pangan diantaranya ditempuh melalui perluasan areal tanam/panen dan peningkatan produktivitas. Perluasan areal tanam/panen dapat ditempuh melalui penambahan areal lahan baru/ekstensifikasi dan peningkatan indeks pertanaman (IP). Sedangkan peningkatan produktivitas dapat ditempuh dengan intensifikasi melalui penerapan paket teknologi spesifik lokasi berdasarkan kondisi biofisik dan sosial ekonomi. Paket teknologi spesifik lokasi terdiri dari varietas unggul, teknologi budidaya, panen dan pascapanen.

Produktivitas tanaman ditentukan oleh potensi genetik, lingkungan tumbuh dan manajemen budidaya panen dan pascapanen. Efektivitas penerapan paket teknologi perlu didukung oleh penyediaan benih, pupuk dan pestisida yang memenuhi kriteria tepat jenis, jumlah, kualitas, dosis, waktu, dan harga. Di samping itu, juga diperlukan dukungan penyuluhan, pengawalan teknologi, kelembagaan serta peranserta aktif dari pemerintah daerah setempat dan stakeholder yang terkait.

2.1. Intensifikasi

Intensifikasi dilakukan dengan pendekatan Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) yang dikembangkan berdasarkan pembelajaran dari kesalahan sistem intensifikasi revolusi hijau dan mengakomodir prinsip-prinsip *System of Rice Intensification* (SRI) dengan mengintroduksi teknologi untuk memecahkan masalah bio-fisik dan sosial-ekonomi petani spesifik lokasi.

Penyebarluasan penerapan PTT dalam rangka meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas tanaman pangan khususnya padi, jagung dan kedelai dilakukan melalui Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT), yang merupakan wahana tempat proses belajar dan mengajar secara langsung di lapangan. Melalui SL-PTT diharapkan mampu mengubah perilaku peserta/petani dari ketergantungan (*dependent*) ke arah kemandirian (*independent*) dan saling ketergantungan (*interdependent*) ke arah kerja kelompok (*team work*), dari perilaku kerja berdasarkan kebiasaan ke arah perilaku kerja rasional dan profesional (ahli).

2.1.1. Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT)

Salah satu program peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai adalah melalui Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT). Konsep SL-PTT disajikan pada gambar berikut.



Gambar 13. Konsep Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT)

Pelaksanaan SL-PTT yang dipandu oleh petugas lapangan (penyuluh pertanian, petugas POPT, pengawas benih, dan peneliti) telah terbukti dapat mempercepat adopsi inovasi teknologi dan penyebaran ke petani di sekitar lokasi SL-PTT. Salah satu indikator keberhasilan meluasnya penerapan PTT di tingkat petani adalah meningkatnya produktivitas/hasil per satuan luas. Selain itu, juga ditandai dengan meningkatnya kemampuan manajemen budidaya oleh kelompok tani penerima manfaat kegiatan SL-PTT.

Tabel 2. Target dan Realisasi Pelaksanaan SL-PTT Padi, Jagung dan Kedelai Tahun 2010-2014

No	Komoditas	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014*)
1	Padi	Target (000 Ha)	2.500	2.779	3.402	4.386	3.895
		Real (000 Ha)	2.394	2.739	3.243	3.729	2.340
2	Jagung	Target (000 Ha)	150	207	200	235	206
		Real (000 Ha)	149	207	198	196	135
3	Kedelai	Target (000 Ha)	250	300	350	412	62
		Real (000 Ha)	186	300	327	336	34

Keterangan: *) Realisasi SL-PTT padi, jagung dan kedelai kondisi s.d. bulan September 2014

Pada tahun 2014, pelaksanaan SL-PTT padi tersebar di 395 kabupaten/kota di 31 provinsi se-Indonesia (kecuali DKI Jakarta dan Kep.Riau). SL-PTT jagung di 200 kabupaten/kota di 29 provinsi (kecuali DKI Jakarta, Bali, Babel dan Kep.Riau). Sedangkan SL-PTT kedelai di 137 kabupaten/kota

di 29 provinsi (kecuali DKI Jakarta, Babel, Kepulauan Riau dan Maluku Utara).

SL-PTT Padi Sawah Kabupaten Solok, Sumatera Barat Kelompok Tani Karya Sepakat, Nagari Cupak, Kec. Gunung Talang

Kelompok tani Karya Sepakat merupakan salah satu kelompok tani di Kabupaten Solok yang melaksanakan kegiatan SL-PTT Tahun 2012 dengan dana APBD. Varietas padi sawah yang digunakan sejak mengikuti SL-PTT adalah VUB Inpari-12. Hasil produksi yang dihasilkan berkisar antara 6 - 6.5 ton/ha.

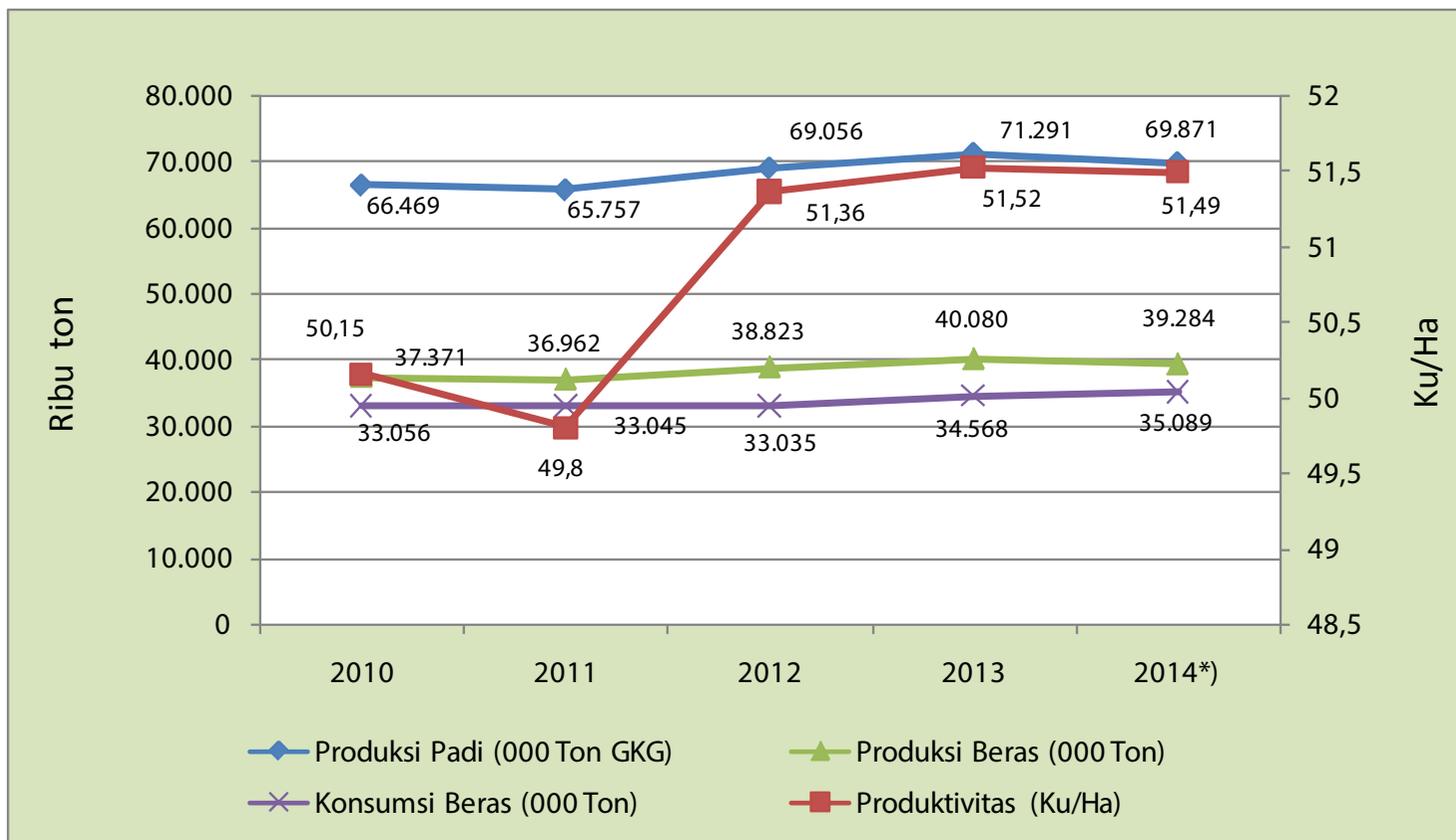
Paket yang diterima per hektar terdiri dari : Pupuk Urea 150 Kg, Pupuk NPK 200 Kg, dan Pupuk Organik 700 Kg. Komponen teknologi seperti sistem tanam jajar legowo (4 : 1) sedangkan komponen utama untuk meningkatkan produktivitas padi adalah benih unggul, dan varietas yang umumnya digunakan adalah *Anak Daro* dan *Inpari 12*. Varietas tersebut selalu tersedia saat petani membutuhkan yang merupakan hasil swadaya petani. Keunggulan varietas ini adalah harga tinggi, tahan penyakit serta memiliki anakan banyak.

Pengetahuan petani peserta SLPTT sudah cukup berpengalaman dalam penggunaan saprodi seperti pemakaian pupuk berimbang, serta pemanfaatan air secara efisien karena didukung adanya ketersediaan air yang cukup sepanjang tahun.

Beberapa faktor keberhasilan program SLPTT dalam meningkatkan produktivitas padi adalah : pemakaian pupuk kandang, sistim tanam jajar legowo, serta pemakaian benih unggul dan berumur muda.



Perkembangan produksi padi selama periode tahun 2010-2014 menunjukkan trend pertumbuhan yang positif, meningkat sekitar 3,4 juta ton GKG dari 66.469 juta ton GKG pada tahun 2010 menjadi 69.871 juta ton tahun 2014, atau tumbuh rata-rata 1,30% per tahun. Peningkatan produksi padi tahun 2010-2014 disebabkan oleh peningkatan luas panen 0,61% per tahun dari 13,253 juta ha tahun 2010 menjadi 13,570 juta ha pada tahun 2014 dan peningkatan produktivitas sebesar 0,67% per tahun dari 50,15 ku/ha tahun 2010 menjadi 51,49 ku/ha pada tahun 2014.



Keterangan: * Produksi padi tahun 2014 = ARAM 1 BPS-RI

Gambar 14. Perkembangan Produktivitas Padi Tahun 2010-2014

Dibandingkan dengan kebutuhan konsumsi beras tahunan, produksi padi tahun 2010-2013 terjadi surplus beras setiap tahun. Walaupun terjadi surplus, namun masih terjadi impor beras dalam jumlah yang relatif kecil dalam rangka memenuhi keperluan cadangan beras pemerintah (CBP) dan stabilisasi harga, serta harga gabah/beras di tingkat petani lebih tinggi dari harga pembelian pemerintah (HPP) terutama terjadi pada tahun-tahun terakhir (2011 dan 2012), sehingga Perum Bulog tidak mampu mengadakan beras seluruhnya dari produksi dalam negeri.

Fokus utama pencapaian sasaran produksi jagung adalah peningkatan produktivitas melalui SL-PTT berbasis kawasan yang dialokasikan pada kawasan pertumbuhan (jagung hibrida dan jagung komposit), kawasan pengembangan (jagung hibrida) dan kawasan pemantapan (jagung hibrida).

Komponen PTT Jagung dasar yaitu: 1) Varietas unggul baru, hibrida atau komposit, 2) Benih bermutu dan berlabel, 3) Populasi 66.000-75.000 tanaman/ha dan 4) Pemupukan berdasarkan kebutuhan tanaman dan status hara tanah. Sedangkan komponen PTT Jagung pilihan adalah: 1) Penyiapan lahan, 2) Pemberian pupuk organik, 3) Pembuatan saluran drainase pada lahan kering, atau saluran irigasi pada lahan sawah, 4) Pembumbunan, 5) Pengendalian gulma secara mekanis atau dengan herbisida kontak, 6) Pengendalian hama dan penyakit, dan 7) Panen tepat waktu dan pengeringan segera.

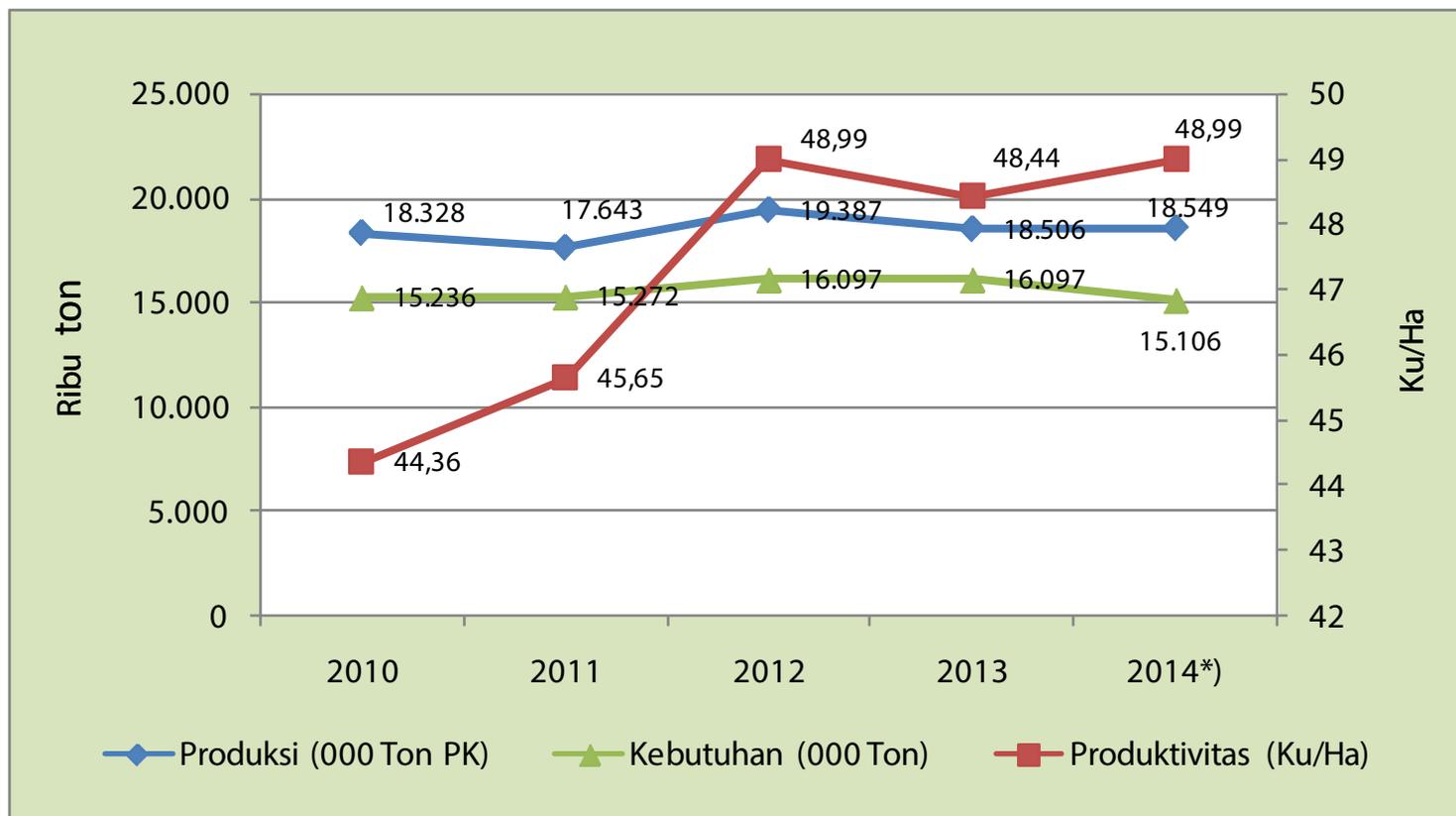
SL-PTT Jagung

Perkembangan tanaman jagung di Desa Dangdeur, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, Jawa Barat meningkat pesat sejak dimulainya kegiatan SLPTT jagung pada tahun 2011. Seiring dengan semakin meningkatnya prospek bisnis jagung di Indonesia, kegiatan SLPTT terbukti mampu sebagai pemicu semangat masyarakat untuk memilih jagung sebagai tanaman utama mata pencahariannya sebagai petani. Pada tahun 2011 luas tanam tanaman jagung di Garut seluas 60.558 ha, pada tahun 2012 meningkat menjadi 72.971 ha dan produktivitas mencapai $\pm 73,70$ ku/ha PK. Bahkan Ketua kelompok Mukti Tani, mampu mencapai produksi 13,3 ton per ha. Hal ini membuktikan bahwa tanaman jagung terbukti dapat meningkatkan pendapatan petani. Saat ini bahkan beberapa petani khususnya di Kecamatan Banyuresmi menanam jagung 2 kali.



Gambar 15. Panen Perdana SL-PTT Jagung di Kabupaten Garut

Perkembangan produksi jagung selama periode tahun 2010-2014 menunjukkan trend pertumbuhan yang positif, meningkat sekitar 221 ribu ton pipilan kering dari 18,328 juta ton pipilan kering pada tahun 2010 menjadi 18,549 juta ton tahun 2014 atau tumbuh rata-rata 0,46% per tahun, untuk produktivitas mengalami kenaikan 2,56% per tahun dari 44,36 ku/ha tahun 2010 menjadi 48,99 ku/ha tahun 2014. Sedangkan luas panen mengalami penurunan 2,1% per tahun dari 4.132 juta ha tahun 2010 menjadi 3,786 juta ha tahun 2014.



Keterangan: * Produksi jagung tahun tahun 2014 = ARAM 1 BPS-RI

Gambar 16. Perkembangan Produktivitas Jagung Tahun 2010-2014

Dibandingkan dengan kebutuhan, produksi jagung tahun 2010-2013 menghasilkan surplus setiap tahun. Namun demikian, walaupun setiap tahun terjadi surplus, juga ada impor, terutama untuk memenuhi kebutuhan industri pakan ternak yang relatif tetap setiap bulan, sementara produksi berfluktuasi (musiman) serta sebagian mutu produk belum memenuhi standar industri pakan.

Kegiatan SL-PTT kedelai ditargetkan mampu menaikkan produktivitas 0,5 ton/ha hingga 0,7 ton/ha, rata-rata peningkatan produktivitas SL-PTT kedelai tahun 2010-2013 sebesar 3,61% per tahun.

Tabel 3. Sasaran dan Realisasi SL-PTT Kedelai Tahun 2010-2013

No.	Tahun	Sasaran SLPTT (Ha)	Realisasi			
			Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Ku/Ha)	Produksi (Ton)
1	2010	250.000	244.145	231.938	13,86	321.466
2	2011	300.000	300.000	283.500	13,9	394.065
3	2012	350.000	325.465	309.192	14,21	439.361
4	2013	411.740	336.028	134.632	15,63	210.488

Pelaksanaan SL-PTT kedelai juga didukung dengan adanya Harga Pembelian kedelai di tingkat petani (HBP) dimaksudkan sebagai implementasi pelaksanaan Program Stabilisasi Harga Kedelai (SHK) sebagai upaya menjaga stabilisasi harga kedelai dan memberikan jaminan pasar dengan tujuan agar petani mendapat penghasilan yang lebih baik serta terus berkembangnya industri pangan berbahan baku kedelai. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 18/M-DAG/PER/3/2014, harga pembelian kedelai di tingkat petani sebesar Rp 7.500,-/kg periode April-Juni 2014 dan HBP untuk periode Juli – September 2014 sebesar Rp 7.600,-/kg.

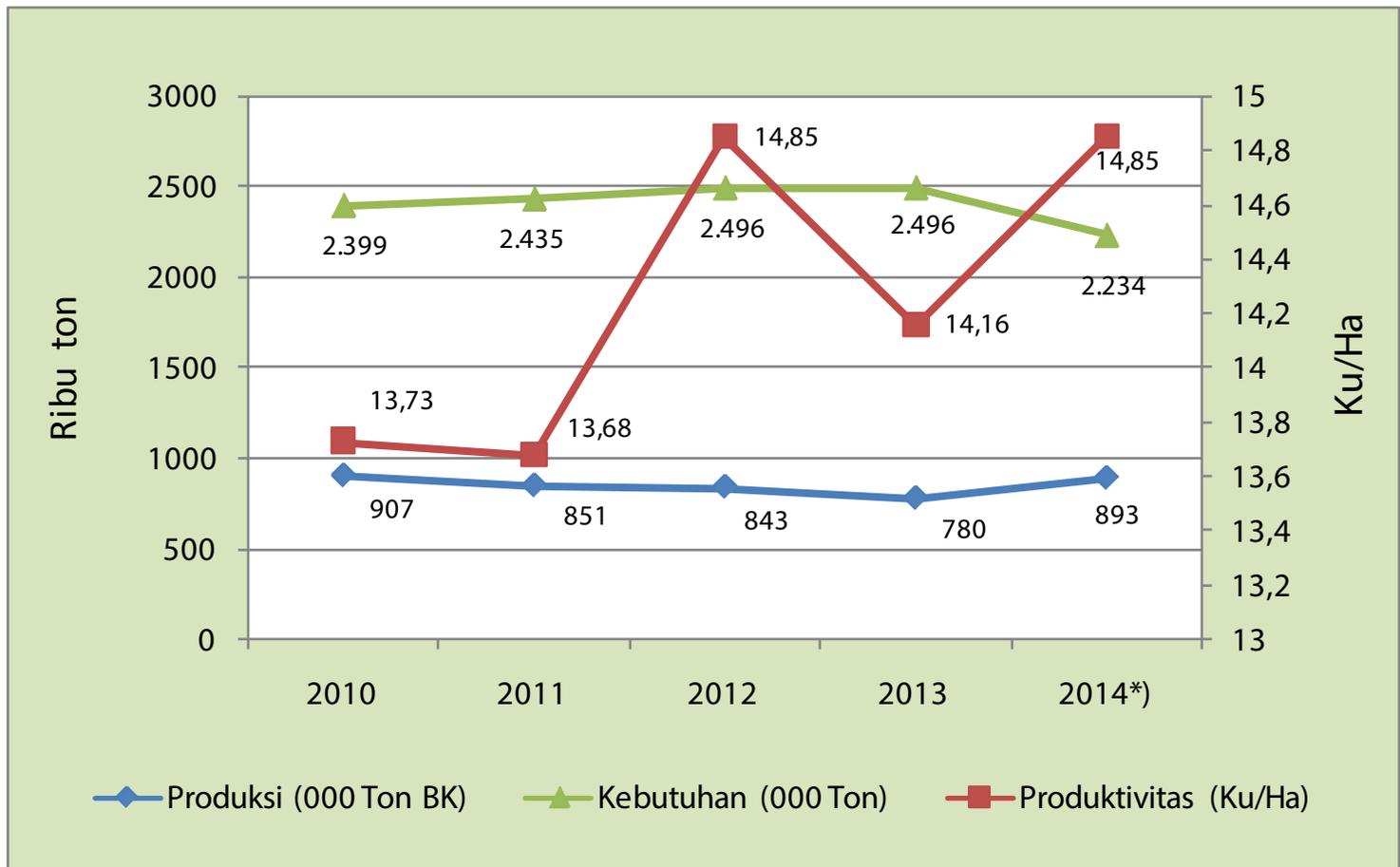
SL-PTT Kedelai

Panen raya kedelai Program SL-PTT dilaksanakan oleh Wakil Menteri Pertanian di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah pada hamparan seluas 120 ha di Desa Pojok, Kecamatan Tawangharjo di lahan sawah tadah hujan yang berdampingan dengan hutan rakyat. Desa pojok merupakan salah satu desa sentra produksi kedelai di Kabupaten Grobogan dengan produktivitas kedelai sebesar 18,00 ku/ha.



Gambar 17. Panen Perdana SL-PTT Kedelai di Kabupaten Grobogan

Berbeda dengan perkembangan produksi padi dan jagung, perkembangan produksi kedelai selama periode tahun 2010-2014 menunjukkan fluktuasi setiap tahun, pada tahun 2010-2013 mengalami penurunan. Perkembangan produksi kedelai menunjukkan trend pertumbuhan yang negatif, menurun sebesar 14 ribu ton biji kering dari 907 ribu ton biji kering pada tahun 2010 menjadi 893 ribu ton biji kering tahun 2014, atau penurunan rata-rata 0,04% per tahun. Perkembangan produktivitas kedelai menunjukkan trend pertumbuhan yang positif. Terjadi kenaikan produktivitas dari 13,73 ku/ha tahun 2010 menjadi 14,185ku/ha tahun 2014 atau tumbuh rata-rata 2,10% per tahun.



Keterangan: *) Produksi kedelai tahun 2014= ARAM 1 BPS-RI

Gambar 18. Perkembangan Produktivitas Kedelai Tahun 2010-2014

2.1.2. Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT)

Pelaksanaan SL-PHT mempunyai prinsip melakukan pemberdayaan petani dan mampu merubah perilaku menuju perilaku yang lebih baik dalam melakukan budidaya tanaman sehat dengan memanfaatkan musuh alami dan agensia hayati dalam pelaksanaan SL-PHT serta pemanfaatan informasi iklim.

Pengamanan pertanaman dari gangguan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dilakukan melalui dua cara yaitu: Pre-emptif dan responsif. Tindakan pre-emptif yaitu melakukan upaya-

upaya pengendalian OPT berdasarkan pengalaman musim yang lalu agar spot serangan OPT pada musim tanam berikutnya tidak terjadi, antara lain dengan melakukan: tanam serentak, tanam jajar legowo, pergiliran tanaman/varietas, tanam varietas tahan, eradikasi sumber serangan (tanaman/singgang terserang, lubang tikus), penggunaan benih sehat, penggunaan tanaman refugia di galengan sebagai rumah musuh alami, dan penggunaan pupuk organik.

Pengendalian Hama Terpadu (PHT) selain mampu meningkatkan produktivitas/mempertahankan potensi produksi dan kualitas hasil, juga mempertahankan keberlangsungan dan kelestarian usaha tani.



Gambar 19. Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT)

SL-PHT berpengaruh terhadap peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani dalam mengendalikan OPT dan penanganan kondisi iklim, juga berdampak pada penguatan kelembagaan kelompok yang tercermin dalam berkembangnya jumlah kelompok alumni SL-PHT dan terbentuknya kawasan PHT secara luas (kecamatan).

Selama periode 2007 sampai dengan 2013 telah dilaksanakan SL-PHT sebanyak 7.466 unit/kelompok, dan tahun 2014 ditargetkan sebanyak 1.000 unit/kelompok (realisasi sampai dengan Mei 2014 sebanyak 302 unit/kelompok). Pelaksanaan SL-PHT hampir di seluruh provinsi dengan konsentrasi di daerah sentra produksi yang rawan gangguan OPT.

2.1.3. Sekolah Lapang Iklim (SLI)

Sekolah Lapangan Iklim (SLI) adalah salah satu upaya yang dilakukan untuk meminimalkan kehilangan hasil akibat dampak perubahan iklim (banjir dan kekeringan). Kegiatan SLI dilaksanakan dalam mewujudkan peningkatan kemampuan SDM perlindungan tanaman pangan, khususnya petugas atau petani dalam pemahaman, penerapan, pemasyarakatan, dan pelebagaan antisipasi dan mitigasi DPI.

Sekolah Lapangan Iklim mulai dikembangkan pada tahun 2003 dengan lokasi *pilot project* kegiatan SLI di Kabupaten Indramayu. Penentuan Kabupaten Indramayu dengan pertimbangan bahwa wilayah Kabupaten Indramayu merupakan daerah yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim, yaitu banjir dan kekeringan.

Kegiatan SL Iklim terdiri dari kegiatan pertemuan Pra-SLI dan pertemuan Inti SLI. Pertemuan Pra-SLI dilaksanakan sebagai persiapan (Pemerintah Daerah terkait, calon peserta SLI) dan mengumpulkan berbagai data dan informasi yang diperlukan untuk menunjang kegiatan SLI. Sedangkan pertemuan Inti SLI dilaksanakan untuk belajar bersama tentang pengetahuan dasar iklim serta aplikasi informasi iklim dan teknik budidaya tanaman pangan (teknologi tepat guna sederhana untuk mengatasi permasalahan terkait iklim).

Pada tahun 2010, SLI dilaksanakan sebanyak 200 unit di 29 propinsi. Pada tahun 2012, SLI dilaksanakan sebanyak 130 unit di 30 Provinsi dan pada tahun 2013 dilaksanakan sebanyak 188 unit (165 unit komoditas padi dan 23 unit komoditas jagung) di 30 provinsi. Untuk tahun 2014, kegiatan SLI ditargetkan sebanyak 120 unit/kelompok, sedangkan realisasi sampai dengan Mei 2014 sebanyak 27 unit/kelompok.

2.1.4. Kalender Tanam (Katam)

Kalender tanam (Katam) terpadu merupakan pedoman atau alat bantu yang memberikan informasi secara spasial dan tabular untuk tanaman padi, jagung, dan kedelai tentang prediksi iklim, awal dan pola tanam, luas tanam potensial, wilayah rawan banjir dan kekeringan, potensi serangan OPT, rekomendasi dosis dan kebutuhan pupuk, dan rekomendasi varietas yang sesuai dengan kondisi iklim untuk tanaman padi, jagung, dan kedelai.

Melalui pemanfaatan Katam, dapat diperoleh informasi awal waktu tanam pada setiap level kecamatan (tersedia 6.911 Kecamatan, 505 Kabupaten, 34 Provinsi), sehingga petani dapat menanam padi secara tepat waktu berdasarkan prediksi cuaca.

KALENDER TANAM TERPADU
Versi 2.0
Musim Hujan (MH)
Oktober 2014 - Maret 2015

(MT I 2014/2015 - MT II 2015)

versi Android

SMS Center:
082 123 456 500
08 123 565 1111

MASUK

SCIENCE . INNOVATION . NETWORKS

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2014

SISTEM INFORMASI KALENDER TANAM TERPADU MEMUAT INFORMASI :

- Estimasi waktu dan luas tanam padi dan palawija
- Estimasi wilayah rawan banjir, kekeringan dan serangan OPT
- Rekomendasi varietas dan kebutuhan benih
- Rekomendasi dan kebutuhan pupuk
- Rekomendasi mekanisasi pertanian
- Info tanam - BPP
- Kalendar Tanam Rawa
- Monitoring online kondisi tanaman pangan menggunakan CCTV
- Standing Crop Padi Sawah Jawa dan Bali MK II 2014

INFORMASI TERSEDIA PADA LEVEL KECAMATAN UNTUK SELURUH INDONESIA

BMKG LAPAN

Gambar 21. Kalender Tanam Terpadu Versi 2.0

Keunggulan Sistem Informasi Katam Terpadu, antara lain:

- Bersifat dinamis, karena disusun berdasarkan prakiraan iklim per musim;
- Sangat operasional, karena disusun hingga skala kecamatan;
- Bersifat spesifik lokasi, karena mempertimbangkan potensi sumberdaya iklim, air dan tanah, wilayah rawan bencana (banjir, kekeringan, OPT) yang belum tentu sama antara satu kecamatan dengan kecamatan lainnya;
- Dapat diintegrasikan dengan rekomendasikan teknologi (pupuk, benih, PHT);
- Mudah diperbaharui/di-updatesesuai dengan perkembangan prakiraan hujan bulanan atau musiman, serta
- Mudah dipahami, karena disusun secara spasial dan tabular dengan uraian yang jelas.

2.2. Meningkatkan Indeks Pertanaman (IP)

Indeks Pertanaman merupakan frekuensi pertanaman dalam setahun pada luasan baku lahan. Dengan penanaman dua kali padi dalam setahun pada baku lahan 1 ha, maka luas tanam menjadi 2 ha dengan indeks pertanaman 2, disebut IP2 atau IP200. Banyak faktor yang menentukan tingkat IP yang secara teknis ditentukan oleh ketersediaan air, khususnya pada musim kemarau (MT II).

Optimasi Lahan Pertanian adalah salah satu usaha meningkatkan IP melalui perbaikan fisik dan kimiawi tanah, perbaikan teknologi budidaya, varietas umur genjah, serta bantuan sarana dan prasarana lainnya. Melalui kegiatan penelitian dan pengembangan telah dihasilkan teknologi budidaya hemat air *alternate wet and drying* (AWD) dan varietas umur genjah sampai sangat genjah misalnya Inpari 1, Inpari 11 dan Inpari 13 dan varietas toleran kekeringan diantaranya Inpari 10 dengan potensi hasil 10 ton/ha disamping juga tahan wereng batang coklat dan hawar daun bakteri.

Tabel 4. Indeks Pertanaman Padi di Lahan Sawah Tahun 2012

No.	Pulau	Luas Sawah (Ha)				Luas Tanam (Ha)			
		IP < 1	1 ≤ IP ≤ 1,5	1,5 < IP ≤ 2	IP > 2	IP < 1	1 ≤ IP ≤ 1,5	1,5 < IP ≤ 2	IP > 2
1	Sumatera	429.894	800.670	901.106	179.777	377.136	944.176	1.576.621	405.396
2	Jawa	21.188	529.798	2.059.142	641.566	15.699	700.158	3.695.513	1.409.149
3	Bali, Nusa Tenggara	88.085	240.281	106.492	29.956	63.297	316.795	187.298	62.640
4	Kalimantan	386.530	678.653	3.308	-	312.132	742.953	5.351	-
5	Sulawesi	27.570	315.285	552.893	44.086	24.515	428.173	959.428	102.276
6	Maluku, Papua	21.433	29.977	5.274	1.898	12.232	40.587	9.636	4.284
Total		974.700	2.594.664	3.628.215	897.283	805.011	3.172.842	6.433.847	1.983.745

Sumber: BPS (diolah)

Selama periode 2010-2014, upaya peningkatan indeks pertanaman (IP) padi yang telah ditempuh melalui upaya penerapan teknologi budidaya, penanaman varietas umur genjah, serta bantuan sarana dan prasarana lainnya telah mampu meningkatkan frekuensi luas tanam padi yang dicapai dalam setahun pada luas baku lahan yang tersedia.

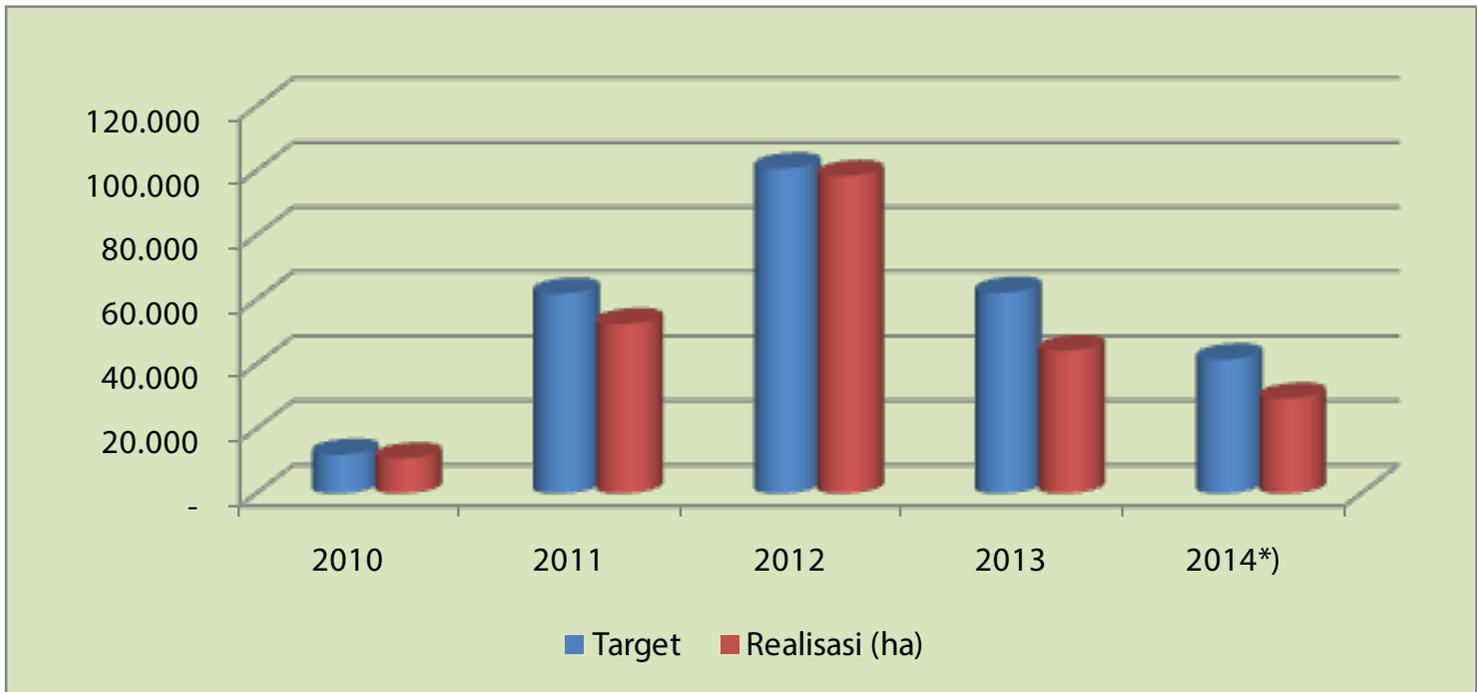
IP padi sawah meningkat menjadi 1,57 pada tahun 2014, dengan luas tanam padi sawah seluas 12,72 juta ha pada luas baku lahan sawah 8,10 juta ha. Bila digolongkan menurut sebaran indeks pertanaman, padi sawah sebagian besar merupakan pertanaman dengan IP antara 1 hingga 1,5 dan IP lebih besar dari 1,5 hingga 2, dan sisanya pertanaman dengan IP di bawah 1 dan IP di atas 2.

Luas tanam padi sawah dengan IP antara 1 hingga 1,5 seluas 3.17 juta ha, IP lebih besar dari 1,5 hingga 2 seluas 6.43 juta ha, IP di bawah 1 seluas 0,81 juta ha dan IP di atas 2 seluas 1,98 juta ha.

2.3. Ekstensifikasi

Ekstensifikasi pertanian perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya penurunan produksi hasil pertanian dan untuk memenuhi kebutuhan pangan. Perluasan sawah adalah suatu

usaha penambahan luas baku lahan sawah pada berbagai tipologi lahan yang belum pernah diusahakan untuk pertanian dengan sistem sawah. Sejak beberapa tahun terakhir ratusan ribu hektar sawah baru telah terbentang. Upaya yang dilakukan Kementerian Pertanian ini bagaikan berpacu dengan aktivitas alih fungsi lahan pertanian yang telah berlangsung sejak lama.



Keterangan *) 2014: Hingga September

Gambar 22. Perkembangan Kegiatan Cetak Sawah Tahun 2010-2014

Masih cukup luasnya potensi lahan yang terdapat di luar Pulau Jawa, terutama pada Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua menyebabkan sangat prospektifnya kegiatan perluasan sawah. Pada tahun 2010 terealisasi cetak sawah baru seluas 10.845 ha, tahun 2011 seluas 52.260 ha, tahun 2012 seluas 98.432 sedangkan pada tahun 2013 terealisasi sawah baru seluas 55.558 ha. Untuk tahun 2014, realisasi cetak sawah diproyeksikan seluas 29.392 ha. Total realisasi cetak sawah dari tahun 2010 sampai dengan 2014 seluas 235.494 ha.

Kontribusi kegiatan perluasan sawah adalah meningkatnya luas baku lahan sawah yang akan meningkatkan produksi padi. Kontribusi dapat kita perkirakan dengan asumsi bahwa kegiatan perluasan sawah menghasilkan produktivitas rata-rata 2,5 ton/ha pada tahun pertama. Untuk tahun berikutnya, produktivitas dan indeks pertanaman diperkirakan akan meningkat.

Kesuksesan program perluasan sawah menjadi bagian penting dari upaya menjaga ketahanan pangan dan pencapaian swasembada pangan berkelanjutan di negara ini. Untuk itu keterlibatan pihak-pihak terkait menjadi keniscayaan dalam program ini. Ego sektoral yang kerap dituding sebagai penghalang dalam keberhasilan berbagai program pemerintah harus dapat diminimalisir dalam program perluasan sawah, karena sangat mungkin program ini merupakan bagian penting dari masa depan pangan di negara ini.

Tanam Perdana di Areal Cetak Sawah

Menteri Pertanian bersama Panglima TNI melakukan tanam perdana di areal cetak sawah di Kabupaten OKI, Sumatera Selatan. Pada Tahun Anggaran 2013, kegiatan cetak sawah yang dilakukan bekerjasama dengan TNI sudah terealisasi 100 ha di Kabupaten OKI, 200 ha di Kabupaten Sambas, 200 ha di Kabupaten Kapuas Hulu, 100 ha di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan 100 ha di Kabupaten Batanghari.



Gambar 23. Tanam Perdana di Areal Cetak Sawah

2.4. Menurunkan Kehilangan Hasil

Tingkat susut hasil (losses) masih cukup tinggi. Pada tahun 2012 Kementerian Pertanian bekerjasama dengan BPS-RI melakukan updating data dan penyempurnaan pelaksanaan survei susut dengan metode survei yang lebih akurat dan terkini. Dari hasil pengolahan data survei MK I dan MK II diperoleh angka susut hasil panen dan penumpukan sementara 0,53 %; perontokan 0,83 %; pengeringan 6,09 %; penggilingan 2,92 % (total susut hasil panen, perontokan, pengeringan dan penggilingan sebesar 10,43 %; konversi pengeringan (GKP ke GKG) 83,11 % dan rendemen penggilingan (GKG ke beras) 62,85 %.

Agar susut hasil tanaman pangan dapat diturunkan, maka kemampuan dan keterampilan Sumber Daya Manusia (SDM), seperti aparat/petugas dan penyuluh pertanian serta para petani yang tergabung dalam wadah kelompok tani (poktan)/gabungan kelompok tani (gapoktan) dalam menangani pascapanen hasil produksi tanaman pangannya perlu lebih ditingkatkan.



Gambar 24. Alat Panen *Combine Harvester*

Upaya-upaya yang telah dilakukan selama ini dalam penanganan pascapanen telah dialokasikan bantuan sarana pascapanen sebanyak 373 paket yang dialokasikan kepada 378 poktan/gapoktan pada 189 kabupaten/kota, 31 provinsi. Selain itu pada tahun 2011 telah dialokasikan bantuan sarana pengering padi/gabah tipe bak datar (*flat bed dryer*) sebanyak 231 unit di 82 Kabupaten/Kota, 15 Provinsi. Sarana pengering tersebut merupakan salah satu upaya penanganan pascapanen padi pada saat panen di musim hujan dimana pengeringan dengan penjemuran tidak dapat dilakukan dan/atau saat panen melimpah di musim kemarau yang perlu penanganan pengeringan secara cepat. Apabila terjadi penundaan pengeringan pada saat musim hujan, maka akan menyebabkan turunnya mutu gabah dan beras giling.

Pada tahun 2012 bantuan pascapanen melalui APBN Tugas Pembantuan di Kabupaten/Kota untuk komoditas padi, jagung, kedelai, ubikayu dan ubi jalar diberikan kepada 504 poktan/gapoktan di 204 Kabupaten/Kota, 31 Provinsi, dengan rincian: 1) Bantuan pascapanen padi dialokasikan pada 431 poktan/gapoktan di 183 kabupaten/kota, 31 provinsi, 2) Bantuan pascapanen jagung dialokasikan pada 15 poktan/gapoktan di 11 kabupaten/kota, 15 provinsi, 3) Bantuan pascapanen kedelai dialokasikan pada 25 poktan/gapoktan di 20 kabupaten/kota, 14 provinsi, 4) Bantuan pascapanen ubikayu dialokasikan pada 12 poktan/gapoktan di 4 kabupaten/kota, 1 provinsi, 5) Bantuan pascapanen ubijalar dialokasikan pada 10 poktan/gapoktan di 9 kabupaten/kota, 2 provinsi.

Sejalan dengan makin meningkatnya kemajuan teknologi pascapanen yang lebih unggul dan perlu disebarluaskan ke petani/kelompok tani maka pada tahun 2012 dialokasikan bantuan sarana panen dan pascapanen yang lebih modern antara lain *combine harvester* sebanyak 355 unit; *flat bed dryer* kapasitas 3-3,5 ton sebanyak 80 unit; *vertical dryer* kapasitas 3,5-6 ton sebanyak 70 unit ; *vertical dryer* kapasitas 9-10 ton sebanyak 22 unit; *Power Thresher* padi 300 unit; *Power Thresher* Multiguna/kedelai sejumlah 100 unit pada 82 kabupaten/kota di 17 Provinsi.

Tabel 5. Bantuan Sarana Pasca Panen Tahun 2013

No	Bantuan Sarana Pasca Panen	Unit/Kelompok	Kabupaten	Provinsi
1	Padi	482	212	30
2	Jagung	92	68	21
3	Kedelai	55	45	16
4	Ubi Kayu	27	24	13
5	Ubi Jalar	25	20	14

Fasilitasi bantuan yang disediakan pemerintah berupa bantuan sarana pascapanen dan kegiatan asistensi, bimbingan teknis serta gerakan penanganan pascapanen telah memberikan hasil dan manfaat terhadap penurunan kehilangan hasil (*losses*), peningkatan kualitas hasil dan nilai tambah bagi petani/kelompok tani. Disamping itu, bantuan dan fasilitasi pemerintah tersebut telah mendorong kelompok tani untuk membentuk dan mengembangkan unit pelayanan jasa alsintan, serta mengembangkan usahanya secara mandiri.

Untuk komoditas hortikultura, perbaikan pasca panen dialokasikan bantuan sarana dan peralatan seperti gudang penyimpanan bawang merah, grading dan packaging unit untuk buah dan sayuran serta peralatan pengolahan seperti *vacuum drying*, *vacuum sealer*, *vacuum frying*, *juicer*, mesin pembungkus, alat *press* tutup gelas plastik.

Kementerian Pertanian juga telah memfasilitasi kegiatan Sekolah Lapangan *Good Handling Practices* (SLGHP) yang dimulai pada tahun 2011. Melalui kegiatan SLGHP ini telah difasilitasi

sarana pasca panen buah untuk kelompok tani di kabupaten/kota di Indonesia antara lain berupa keranjang panen, alat angkut bermotor, alat penyisir, alat panen, alat angkut roda 3, gerobak dorong, kantong panen, bangsal pasca panen, alat pembersih, karton box pengemas dan bak pencuci. Pada tahun 2013 telah berhasil dilaksanakan kegiatan SLGHP sebanyak 155 kelompok dan sebanyak 69 kelompok pada tahun 2014.

Fasilitasi peralatan pasca panen hasil perkebunan yang pernah diberikan antara lain adalah alat pasca panen kakao, kopi, karet, mete, minyak atsiri, gambir, dan alat pengolahan kelapa terpadu, kacang mete, gula kelapa dan tebu.

Beberapa teknologi alat dan mesin pertanian (alsintan) untuk menurunkan kehilangan hasil sebagai berikut:

Mesin Panen Padi *Indo Combine Harvester*

Salah satu teknologi inovatif yang dihasilkan oleh Kementerian Pertanian adalah mesin panen padi *Indo Combine Harvester* yang sesuai untuk kondisi pertanian padi sawah Indonesia. Mesin panen padi tersebut mampu menurunkan susut panen padi sekaligus mengatasi kelangkaan tenaga kerja panen yang sudah terjadi di beberapa sentra produksi padi di Indonesia.



Gambar 26. *Combine Harvester* buatan Kementerian Pertanian

Kemampuan kinerja mesin tersebut mampu menggabungkan beberapa kegiatan potong-angkut-rontok-pembersihan-sortasi-pengantongan dalam satu proses kegiatan yang terkontrol. Adanya proses kegiatan panen yang tergabung dan terkontrol menyebabkan susut hasil yang terjadi hanya sebesar 1,87% atau berada di bawah rata-rata susut hasil metode "gropyokan" (sekitar 10%). Sedangkan tingkat kebersihan gabah panen yang dihasilkan oleh mesin tersebut mencapai 99,5%. Mesin panen padi *Indo Combine Harvester* yang dioperasikan oleh 1 orang operator dan 2 pembantu operator ini mampu menggantikan tenaga kerja panen sekitar 50 HOK/ha. Kapasitas kerja mesin berkisar 4-6 jam/ha.

Mesin perontok biji-bijian multikomoditas (Padi, Jagung dan Kedelai)

Fungsi dan keunggulan dari mesin ini adalah untuk merontok padi dari tangkainya, mudah dipindah (bobot: 150 kg), bisa potong pendek/panjang, bisa untuk padi, jagung, kedelai. Kapasitas kerja 600 kg/jam, dengan penggerak motor diesel 6,5 hp/ 2200 rpm. Mesin ini mampu menekan susut hingga 10% hasil dibanding cara gebot.



Gambar 27. Mesin Perontok Biji-bijian Multikomoditas

Salah satu upaya yang dilakukan dalam pengembangan komoditas hortikultura (buah-buahan) adalah penumbuhan sentra-sentra produksi komoditas melalui perluasan areal hortikultura (buah-buahan). Kegiatan perluasan areal hortikultura (buah-buahan) dimaksudkan untuk membantu petani agar dapat memanfaatkan lahan-lahan yang sementara tidak diusahakan/terlantar menjadi lahan produktif untuk komoditas buah-buahan yang pada akhirnya menjadi tambahan pendapatan, meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan petani. Perluasan areal hortikultura merupakan upaya investasi jangka panjang dan diarahkan untuk komoditas buah-buahan Unggulan Nasional yang mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif.

Jenis komoditas yang dikembangkan diprioritaskan komoditas buah-buahan Unggulan Nasional (mangga, manggis, durian, jeruk, dan rambutan) dan Unggulan Daerah yang mempunyai pangsa pasar yang baik.

Kawasan agribisnis hortikultura merupakan suatu wilayah dengan kesamaan ekosistem dan disatukan oleh fasilitas infrastruktur ekonomi yang sama sehingga membentuk kawasan yang berisi kegiatan usaha berbasis hortikultura mulai dari penyediaan sarana produksi, budidaya, penanganan dan pengolahan pasca panen dan pemasaran serta kegiatan pendukungnya.

Pengembangan Perluasan Areal Jeruk

Perluasan areal jeruk dengan menggunakan teknologi lahan pasang surut di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi pada tahun 2010 telah membuahkan hasil. Keberhasilan tersebut ditandai dengan telah dilakukannya panen perdana jeruk siam seluas 50 hektar pada tahun 2013 di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Panen Jeruk siam di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sudah dipanen mulai bulan Juni 2013 dan terus berlangsung sampai Desember 2013. Hasil panen jeruknya rata-rata 2 ton per hektar per bulan. Harga jual jeruk di kebun Rp. 5-6 ribu per kg. Penghasilan petani bisa mencapai Rp.10 juta per bulan per hektar.



Gambar 28. Perluasan Areal Jeruk Siam di Tanjung Jabung Barat, Jambi

Pengembangan Kawasan Florikultura



Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara sebagai kawasan florikultura berkembang cukup pesat. Kota Tomohon yang memiliki penduduk 98.000 jiwa terletak di dataran tinggi beriklim sejuk yang sangat cocok untuk lokasi tumbuh berbagai jenis bunga dan sayuran. Pertanaman bunga krisan yang didanai APBN 2012 seluas 18.500 m². Saat ini lahan yang diusahakan untuk florikultura seluas 70 ha dari total potensi lahan pengembangan hortikultura seluas 1.870 ha. Pertanaman bunga krisan yang dilakukan secara berkelompok dan perorangan telah terbukti meningkatkan pendapatan warga Tomohon.



Gambar 29. Wakil Menteri Pertanian di Kawasan Pengembangan Bunga Krisan di Kota Tomohon

Pengembangan Kawasan Jamur

Kementerian Pertanian memberikan bantuan sarana budidaya jamur berpakubung dan *autoclave* kepada Kelompok Usaha Bersama “Gunung Tiram Mandiri”. Kelompok ini telah mampu menghasil alat-alat pembibitan dan budidaya jamur yang terjangkau bagi petani jamur, antara lain: 1) *Steamer*, 2) *Mixer*, 3) mesin pres hidrolik dan 4) *auto clave* untuk sterilisasi bibit. Berkat keberhasilan pengembangan budidaya jamur, sejak bulan Desember 2013, kelompok Usaha Bersama “Gunung Tiram Mandiri” menjadi model pengembangan jamur bagi “Konsorsium Pengembangan Industri Perdesaan Berbasis Sumberdaya Lokal Komoditi Jamur”.

Produksi komoditas buah-buahan cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Rata-rata pertumbuhan untuk komoditas buah-buahan dari tahun 2010-2013 sebesar 1,15%. Produksi komoditas buah unggulan hortikultura adalah durian, jeruk, mangga, manggis, nanas, pisang dan salak. Pada periode 2010-2014, produksi komoditas buah unggulan tertinggi adalah pisang, urutan kedua adalah mangga, ketiga adalah jeruk, keempat adalah salak, kelima adalah durian, dan diurutan terakhir adalah nanas.

Tabel 6. Keragaan Data Produksi Komoditas Buah Unggulan Hortikultura Tahun 2010-2014

Komoditas	Produksi (000 ton)					% Pertumbuhan Rata-rata
	2010	2011	2012	2013*)	2014**)	
Durian	492	884	888	690	847	8,66
Jeruk	2.029	1.819	1.612	1.411	2.363	0,41
Mangga	1.287	2.131	2.376	2.059	2.598	13,82
Manggis	85	118	190	119	113	0,22
Nanas	1.406	1.541	1.782	1.837	1.818	6,06
Pisang	5.755	6.133	6.189	5.359	7.070	3,95
Salak	750	1.082	1.035	992	981	5,17

Sumber : BPS

Keterangan : *) Angka Sementara **) Angka Renstra Hortikultura

Untuk buah unggulan, rata-rata pertumbuhan dari tahun 2010-2014 komoditas durian sebesar 8,66%, komoditas jeruk sebesar 0,41%, komoditas mangga sebesar 13,82%, komoditas manggis sebesar 0,22%, komoditas nanas sebesar 6,06%, komoditas pisang sebesar 3,95%, dan komoditas salak sebesar 5,17%. Pada periode tahun 2010-2014 rata-rata pertumbuhan produksi tertinggi adalah komoditas mangga dikarenakan meningkatnya kebutuhan ekspor dan kebutuhan untuk

bahan baku industri olahan buah kaleng, sedangkan rata-rata pertumbuhan produksi terendah adalah komoditas manggis.

Produksi komoditas sayuran cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Rata-rata pertumbuhan untuk komoditas sayuran dari tahun 2010-2013 sebesar 3,38%. Komoditas sayuran unggulan hortikultura terdiri dari komoditas bawang merah, cabai dan kentang.

Tabel 7. Produksi Komoditas Sayuran Unggulan Hortikultura Tahun 2010-2014

Komoditas	Produksi (000 ton)					% Pertumbuhan Rata-rata
	2010	2011	2012	2013*)	2014**)	
Bawang Merah	1.049	893	964	959	1.202	2,40
Cabai	1.329	1.483	1.657	1.719	1.525	2,94
Kentang	1.061	955	1.094	1.023	1.211	2,55

Sumber : BPS dan Pusdatin, Diolah

Ket : *) Data Produksi adalah Angka Sementara **) Angka Renstra Hortikultura

Rata-rata pertumbuhan produksi komoditas sayuran unggulan hortikultura pada periode tahun 2010-2014 yang paling tinggi adalah produksi cabai sebesar 2,94%, diurutkan kedua adalah kentang sebesar 2,55%, dan diurutkan ketiga adalah bawang merah sebesar 2,40%.

Tabel 8. Produksi Komoditas Tanaman Hias dan Tanaman Obat Tahun 2010-2014

Komoditas	Produksi (000 tangkai)					% Pertumbuhan Rata-rata
	2010	2011	2012	2013*)	2014**)	
Anggrek	14.050	15.490	20.728	15.457	15.912	0,83
Krisan	185.233	305.868	397.652	383.985	218.911	-4,11
Tanaman Obat	419	398	449	587	498	2,93

Sumber : BPS dan Pusdatin, Diolah

Ket : *) Data Produksi adalah Angka Sementara **) Angka Renstra Hortikultura

Perkembangan produksi komoditas florikultura (anggrek dan krisan) dari tahun 2010-2014 yaitu: komoditas anggrek rata-rata pertumbuhan meningkat sebesar 0,83%, dan untuk komoditas krisan rata-rata pertumbuhan menurun sebesar 4,11%. Produksi komoditas florikultura untuk komoditas krisan pada periode tahun 2010-2012 selalu mengalami peningkatan, dan pada tahun 2012 mencapai produksi paling tinggi, namun pada periode 2013-2014 mengalami penurunan produksi. Untuk komoditas anggrek pada periode 2010-2014 cenderung stagnan. Sedangkan untuk tanaman obat mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 2,93%.

Selama tahun 2010-2014 ada 15 komoditas perkebunan yang pengembangannya didukung APBN, yaitu: kelapa sawit, kelapa, kakao, kopi, lada, jambu mete, teh, tebu, karet, kapas, tembakau, cengkeh, jarak pagar, nilam, dan kemiri sunan. Dari 15 komoditas tersebut ada 6 komoditas yang diprioritaskan yaitu: tebu, kelapa sawit, karet, kakao, kelapa dan kopi.

(1) Tebu

Pengembangan tanaman tebu di Indonesia hingga Tahun 2013 telah mencapai 451.406 hektar dengan produksi 2.550.991 ton gula yang tersebar di 9 provinsi. Jumlah petani yang terlibat dalam usaha tebu mencakup 1.098.005 (kepala keluarga dan tenaga kerja). Ekspor komoditas tebu mencapai nilai US\$ 67,6 juta dengan volume 518.300 ton dalam bentuk molases, sedangkan impor tebu tahun 2013 mencapai US\$ 2.190,78 juta dengan volume 3,707 juta ton terutama raw sugar untuk memenuhi kebutuhan industri.

Dalam kurun waktu 2010-2013 luas arel tebu giling terus mengalami peningkatan rata-rata sebesar 2,45% per tahun. Peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2010-2011 sebagai dampak kebijakan dan program dalam bentuk Akselerasi Peningkatan Produksi dan Produktivitas tebu melalui program bongkar ratoon dan perluasan tebu. Produksi hablur meningkat 3,30% per tahun serta rendemen meningkat 7,47% per tahun.

Bongkar/Rawat Ratoon

Program peningkatan produktivitas tebu dan rendemen gula di sektor *on-farm* dilakukan melalui intensifikasi tebu salah satunya melalui kegiatan Bongkar Ratoon. Pada tahun 2013, Kementerian Pertanian memfasilitasi kegiatan Bongkar Ratoon seluas 50.000 ha yang dilaksanakan di 10 provinsi. Dengan adanya kegiatan bongkar ratoon dapat meningkatkan rendemen tebu petani sehingga produksi, produktivitas dan mutu tebu meningkat secara nasional.



Gambar 31. Bongkar/Rawat Ratoon

Kementerian Pertanian telah berhasil merancang alat kepras tebu tipe juring ganda yang merupakan pengembangan dari mesin kepras tebu tipe juring tunggal (prototipe I). Keunggulan utama mesin pengepras tebu ini adalah adanya konsep multifungsi atau 3 (tiga) proses sekaligus dalam satu kegiatan dan menggunakan 2 unit pisau. Ketiga proses tersebut adalah pemotongan tunggul tebu sisa panen oleh pisau berputar (sudut kemiringan pemotongan 10-200), pemutusan akar samping oleh *coulter*, dan pengkairan sepanjang baris tanam oleh *chisel*.



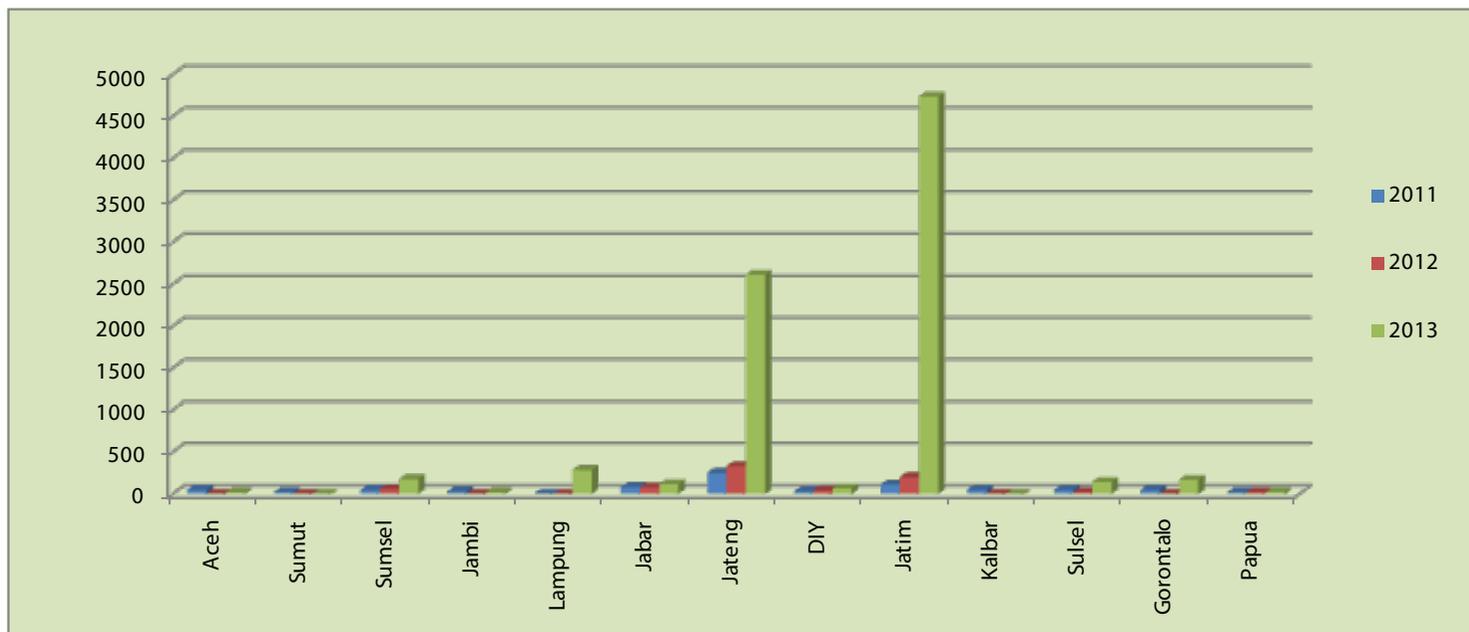
Gambar 32 . Mesin Pengepras Tebu

Penataan Varietas

Salah satu faktor penting didalam upaya mempertahankan kelangsungan produktivitas tebu secara berkelanjutan adalah penggunaan varietas tebu unggul. Tersedianya varietas unggul baru, setiap saat menjadi keharusan yang tidak dapat ditawar, mengingat masa pakai varietas unggul komersial umumnya 3-5 tahun.

Benih yang digunakan sebagai sumber benih untuk KBD adalah benih dari jenis varietas unggul yang bermutu yaitu benar, murni, dan sehat serta bersertifikat. Pembangunan KBD TA 2011–2014 menggunakan benih kultur jaringan (G2) atau benih asal kultur jaringan. Dengan teknik tersebut diharapkan dapat diperoleh benih yang murni dan sehat.

Pada periode tahun 2011-2013 telah dibangun KBD di 13 provinsi yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Gorontalo dan Papua. Hingga akhir tahun 2013 telah dibangun KBD seluas 9.849,26 Ha.



Gambar 33. Pengembangan Kebun Bibit Datar

Roadmap penataan varietas terus dilakukan perbaikan berdasarkan kondisi aktual. Mengingat masih banyak petani yang lebih menyukai varietas tertentu seperti Bululawang. Diharapkan pabrik gula dapat berperan dalam mengenalkan varietas baru dengan sifat kemasakan yang beragam.



Gambar 34. KBD di Kabupaten Pati

Pembangunan Kebun Benih Datar (KBD) Tebu

KBD Kultur Jaringan TA. 2012 di Kabupaten Pati yang dilaksanakan oleh Kelompok Tani Yusuf Makmur berlokasi di Desa Margorejo, Kecamatan Margorejo seluas 2 Ha. Varietas yang ditanam antara lain PSJT 941, PS 881, PS 864, dan VMC 76-16. Dari hasil sertifikasi diperoleh penangkaran dengan perbandingan 1:7.

Pengembangan tanaman tebu di Indonesia hingga Tahun 2013 telah mencapai 451.406 hektar dengan produksi 2.550.991 ton gula yang tersebar di 9 provinsi. Jumlah petani yang terlibat dalam usaha tebu mencakup 1.098.005 orang (kepala keluarga dan tenaga kerja). Ekspor komoditas tebu mencapai nilai US\$ 67,6 juta dengan volume 518.300 ton dalam bentuk *molases*, sedangkan impor tebu tahun 2013 mencapai US\$ 2.190,78 juta dengan volume 3,707 juta ton terutama *raw sugar* untuk memenuhi kebutuhan industri.

Tabel 9. Produksi Gula Periode Tahun 2010-2013*)

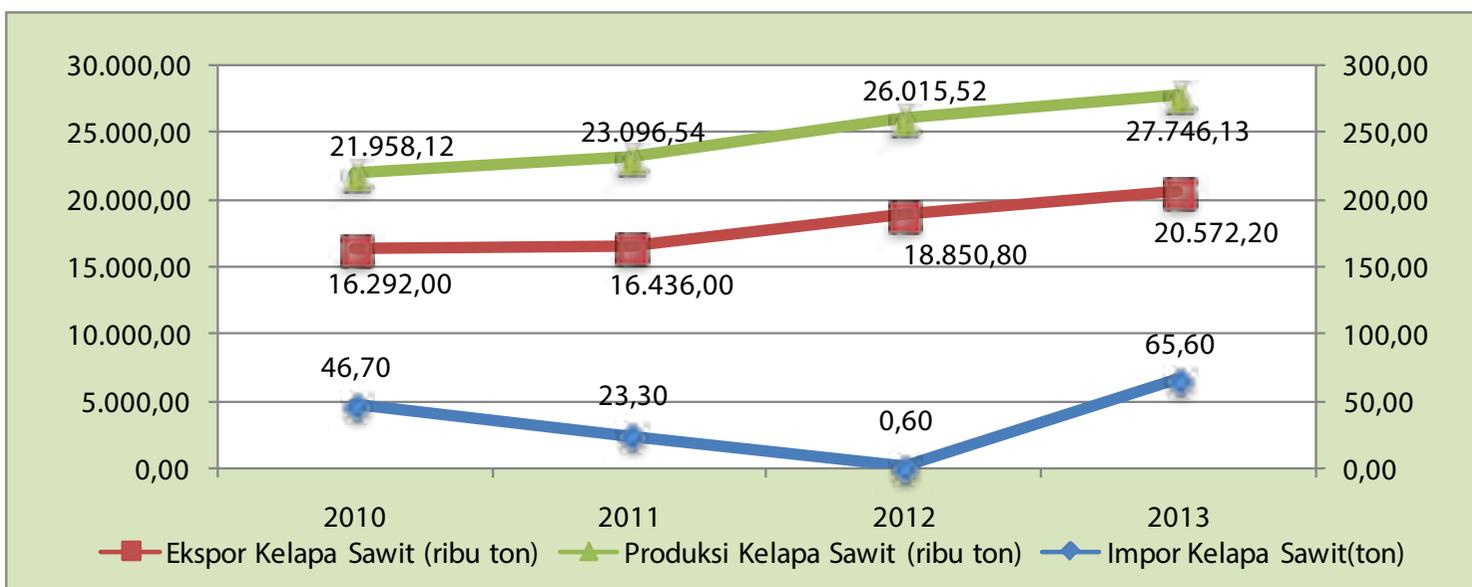
Uraian	Tahun				Peningkatan (%)
	2010	2011	2012	2013*)	
Areal Giling (Ha)	418.266	450.298	451.191	451.406	2,45
Produksi Tebu (Jt Ton)	34,22	30,32	31,89	33,67	-0,88
Rendemen (%)	6,47	7,35	8,13	8,20	7,47
Produksi Hablur (Jt Ton)	2,29	2,27	2,59	2,55	3,31

Ket : *) Angka sementara BPS

Dalam kurun waktu 2010-2013 luas arel tebu giling terus mengalami peningkatan rata-rata sebesar 2,45% per tahun. Demikian juga rendemen yang meningkat 7,47% per tahun dan produksi hablur juga meningkat 3,31% per tahun. Produksi tebu pada tahun 2013 33,67 juta ton dengan rendemen sebesar 8,20%, dimana pada tahu 2013 rendemen pada tingkat paling tinggi antara periode 2010-2013.

(2) Kelapa Sawit

Rata-rata laju pertumbuhan luas areal kelapa sawit selama 2010-2013 sebesar 5,73%, sedangkan produksi kelapa sawit periode 2010-2013 meningkat 7,46% per tahun. Pada tahun 2012 luas areal diperkirakan mencapai 9,07 juta ha dengan produksi 23,52 juta ton. Realisasi ekspor komoditi kelapa sawit sampai tahun 2012 telah mencapai volume 20,57 juta ton (minyak sawit/CPO dan minyak sawit lainnya) dengan nilai US\$ 19,35 miliar. Neraca perdagangan untuk komoditi kelapa sawit dengan pada tahun 2012 telah mencapai US \$ 18,52 miliar.



Gambar 35. Perkembangan Komoditas Kelapa Sawit Tahun 2010-2013

Dalam rangka meningkatkan produksi kelapa sawit dilakukan peremajaan, pengembangan baru/perluasan, peningkatan efisiensi dan peningkatan produktivitas (produktivitas kelapa sawit dan usaha) berlandaskan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan

lingkungan, seperti diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen tahun 2002, pasal 33, ayat (4).

Dalam rangka memfasilitasi terwujudnya pengembangan usaha perkebunan rakyat, baik untuk pengembangan baru/perluasan dan peremajaan, maka pendekatan yang ditempuh adalah mendorong usaha perkebunan besar untuk melakukan kerjasama dengan masyarakat sekitar/petani untuk pengembangan perkebunan rakyat dalam wadah pola kemitraan, dengan dukungan pendanaan Kredit Pengembangan Energi Nabati-Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) dan untuk membantu petani sehari-hari dalam kegiatan pengembangan usahatannya disediakan petugas pendamping (TKP dan PLP-TKP) yang bertugas di setiap wilayah pengembangan Program Pengembangan Revitalisasi Perkebunan, sampai dengan 30 Juni 2014 persetujuan Bank Pelaksana dalam Pengembangan Perkebunan melalui Program Revitalisasi Perkebunan telah terealisasi seluas 226.262 ha.

Peningkatan produktivitas kelapa sawit dilakukan dengan cara: (i) Penyempurnaan dan penyesuaian berbagai pedoman teknis pengembangan perkebunan kelapa sawit; (ii) Sosialisasi prinsip-prinsip penerapan praktek pertanian yang baik (*Good Agriculture Practices/GAP*); (iii) Bimbingan, fasilitasi dan advokasi penerapan GAP; dan (iv) Pengembangan layanan penunjang agribisnis kelapa sawit, seperti akses kepada benih unggul bermutu bersertifikat, pupuk dan alat mesin pertanian, serta teknologi. Dalam rangka meningkatkan kecukupan dan kemantapan dukungan sumber benih unggul bermutu bersertifikat serta ketersediaan pada tingkat petani dilakukan dengan cara: (i) Membina dan mengembangkan sumber benih; (ii) Memantapkan tata cara pemesanan dan mekanisme distribusinya; dan (iii) Meningkatkan kemampuan pengawasan. Varietas Kelapa Sawit telah dilepas sebagai benih bina pada tahun 2010 sebanyak 2 varietas, tahun 2011 sebanyak 4 varietas, tahun 2012 sebanyak 1 varietas, tahun 2013 sebanyak 1 varietas.



Gambar 36. Bibit kelapa Sawit

Dalam rangka meningkatkan kecukupan dan kemantapan dukungan sumber benih unggul bermutu bersertifikat serta ketersediaan pada tingkat petani, Kementerian Pertanian dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 secara langsung mengalokasikan anggaran untuk kegiatan peningkatan produktivitas kelapa sawit rakyat melalui penggantian benih tidak bersertifikat dengan benih unggul bermutu bersertifikat di beberapa provinsi sebagai berikut:

1. Kegiatan penggantian benih tidak bersertifikat dengan benih unggul bermutu bersertifikat tahun 2011 seluas 500 ha di Provinsi Jambi di 5 kabupaten masing-masing 100 ha yaitu Tanjung Jabung Barat, Batanghari, Muaro Jambi, Sarolangun dan Tebo.
2. Kegiatan penggantian benih tidak bersertifikat dengan benih unggul bermutu bersertifikat tahun 2012 seluas 5.095 ha di 7 provinsi yaitu Provinsi Sumatera Utara 500 ha, Bengkulu 1.485 ha, Sumatera Selatan 1.000 ha, Riau 1.400 ha, Sumatera Barat 230 ha, Kalimantan Barat 280 ha dan Sulawesi Barat 200 ha.
3. Kegiatan penggantian benih tidak bersertifikat dengan benih unggul bermutu bersertifikat tahun 2013 seluas 200 ha di provinsi Sumatera Barat seluas 100 ha dan provinsi Sulawesi Barat seluas 100 ha.

Kegiatan ini dimaksudkan dalam rangka sosialisasi penggunaan benih kelapa sawit unggul bermutu bersertifikat, sehingga diharapkan petani sekitar mengikuti dengan menggunakan benih unggul yang nantinya dapat meningkatkan produktivitas kelapa sawit secara nasional.

Dalam rangka turut memecahkan peningkatan produksi komoditi strategis hasil pertanian, sekaligus meningkatkan produktivitas usaha kelapa sawit, maka didorong tumbuhnya inovasi untuk pemanfaatan limbah dan hasil samping kelapa sawit serta pengembangan tanaman pangan intensif pengganti tanaman penutup tanah. Untuk itu, sejak tahun 2007 telah dilakukan introduksi pengembangan cabang usahatani sapi di perkebunan rakyat kelapa sawit (integrasi sawit-sapi) di 7 Provinsi (12 lokasi), yang saat ini telah berkembang di perkebunan rakyat di 12 Provinsi (22 lokasi) dan perusahaan perkebunan. Sedangkan untuk pengembangan tumpang sari tanaman pangan sebagai pengganti tanaman penutup tanah dan memberikan sumber pendapatan petani selama menunggu tanaman belum menghasilkan (TBM), telah dilakukan percontohan peremajaan kelapa sawit yang telah berumur 25 tahun di 7 Provinsi.

Dalam rangka upaya penerapan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan, telah diterbitkan Permentan Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO*) Dalam upaya penerapannya telah dilakukan sosialisasi di Pusat dan Daerah serta Luar Negeri.

Selain itu Kementerian Pertanian juga melakukan pemberdayaan petani kelapa sawit berupa pelatihan penumbuhan kebersamaan yang bertujuan untuk menumbuhkan kebersamaan dalam kelompok tani sehingga tercipta kesadaran antar sesama anggota untuk melaksanakan kegiatan usaha bersama-sama dalam wadah kelompok produktif, dari tahun 2012 hingga 2013 telah dilatih sebanyak 2.100 orang.

Integrasi Sawit - Sapi

Kelompok Tani Subur Makmur, di Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, yang mempunyai kebun kelapa sawit 890 Ha, memperoleh bantuan ternak sapi sebanyak 50 ekor pada tahun 2009/2010, yang saat ini telah menjadi 200 ekor. Dari berbagai kegiatan bimbingan dan pelatihan yang diperoleh, kelompok tani ini telah memiliki formula pakan sapi sendiri, pabrik kompos kapasitas 80 ton/bulan, pabrik konsentrat kapasitas 23 ton/bulan, serta usaha perikanan dan tanaman lainnya. Anggota kelompok dapat memupuk tanaman sawitnya dengan dosis 15 kg/pohon/tahun, setelah pemupukan kompos tersebut produktivitas TBS yang sebelumnya 17 ton/ha/tahun meningkat menjadi 19 -20 ton/ha/tahun. Atas keberhasilannya mengelola bantuan, kelompok tani menjadi layak Bank, sehingga disetujui permohonan kreditnya untuk pengembangan ternak sapi. Disamping itu kelompok tani telah berhasil membuat alat pencacah pelepah sawit dan janjang kosong kerjasama dengan tukang setempat.

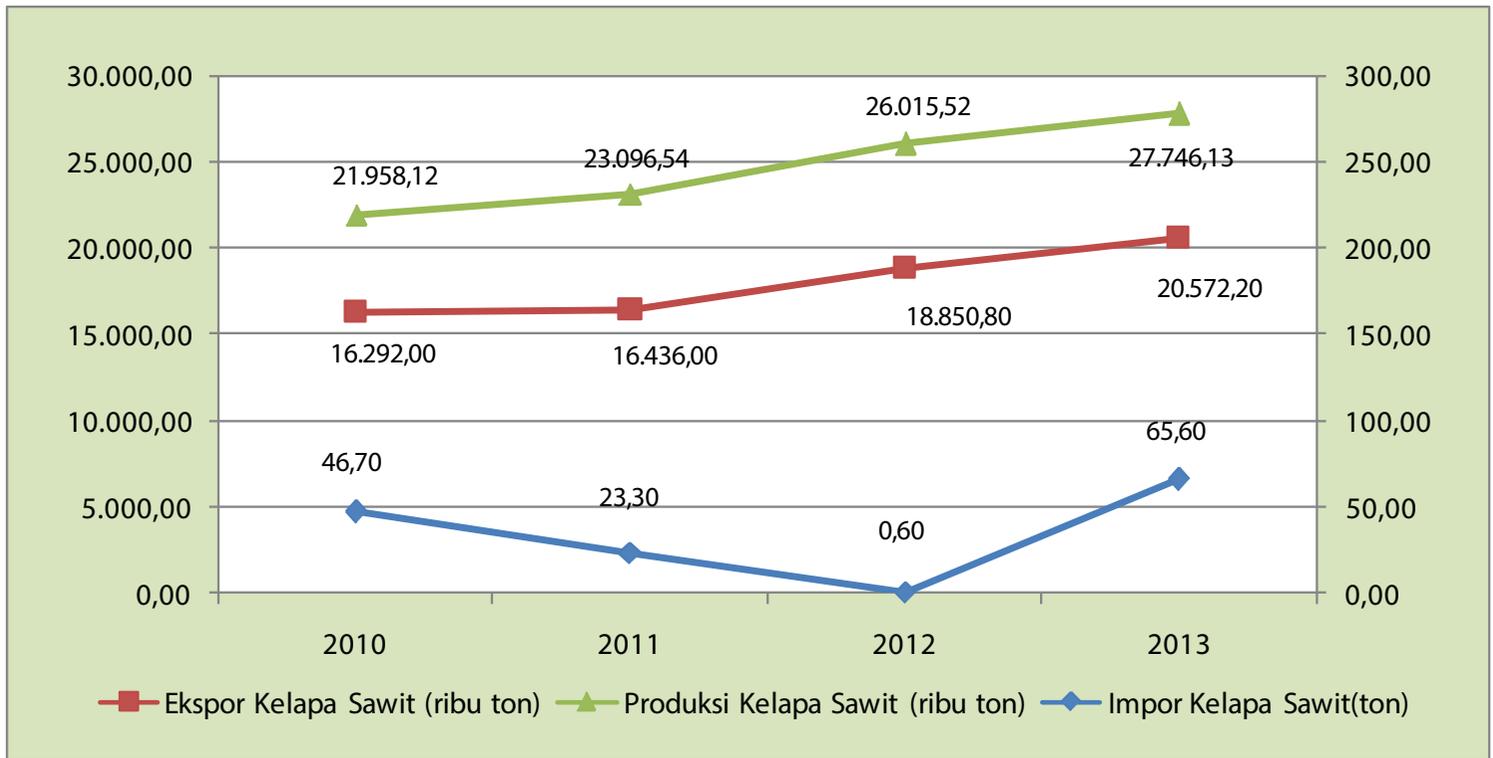


Gambar 37. Kegiatan Integrasi Tanaman Sawit dan Ternak

(3) Karet

Rata-rata laju pertumbuhan luas areal tanaman karet selama 2010-2013 sebesar 1,04%, sedangkan produksi karet periode tahun 2010-2013 meningkat rata-rata 4,11% per tahun. Peningkatan luas

areal yang relatif kecil tersebut disebabkan karena adanya kesepakatan tiga negara produsen karet terbesar di dunia yaitu Indonesia, Thailand dan Malaysia (ITRC). Realisasi luas areal karet pada tahun 2012 diperkirakan mencapai 3,48 juta ha dengan produksi 3,04 juta ton.



Gambar 38. Perkembangan Komoditi Karet Tahun 2010-2013

Untuk memfasilitasi terwujudnya pengembangan usaha perkebunan rakyat, baik untuk pengembangan baru/pelebaran dan peremajaan, selain petani secara swadaya melakukannya dan pemberian bantuan benih unggul bermutu bersertifikat, pupuk dan pestisida pada tahun pertama melalui sumber dana APBN, juga disediakan dukungan pendanaan Kredit Pengembangan Energi Nabati-Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) dan untuk membantu petani sehari-hari dalam kegiatan pengembangan usahatannya disediakan petugas pendamping (TKP dan PLP-TKP) yang bertugas di setiap wilayah pengembangan Program Pengembangan Revitalisasi Perkebunan, sampai dengan 30 Juni 2014 persetujuan Bank Pelaksana dalam Pengembangan Perkebunan melalui Program Revitalisasi Perkebunan telah terealisasi seluas 11.104 ha.

Peningkatan produktivitas karet dilakukan dengan cara: (i). Penyempurnaan dan penyesuaian berbagai pedoman teknis pengembangan perkebunan kelapa sawit; (ii). Sosialisasi prinsip-prinsip penerapan praktek pertanian yang baik (*Good Agriculture Practices/GAP*); (iii). Bimbingan, fasilitasi dan advokasi penerapan GAP; dan (iv). Pengembangan layanan penunjang agribisnis karet, seperti akses kepada benih unggul bermutu bersertifikat, pupuk dan ALSINTAN, serta teknologi. Dalam rangka meningkatkan kecukupan dan kemantapan dukungan sumber benih unggul bermutu bersertifikat serta ketersediaan pada tingkat petani dilakukan dengan cara: (i) Membina dan mengembangkan penangkar; (ii). Meningkatkan kemampuan pengawasan.

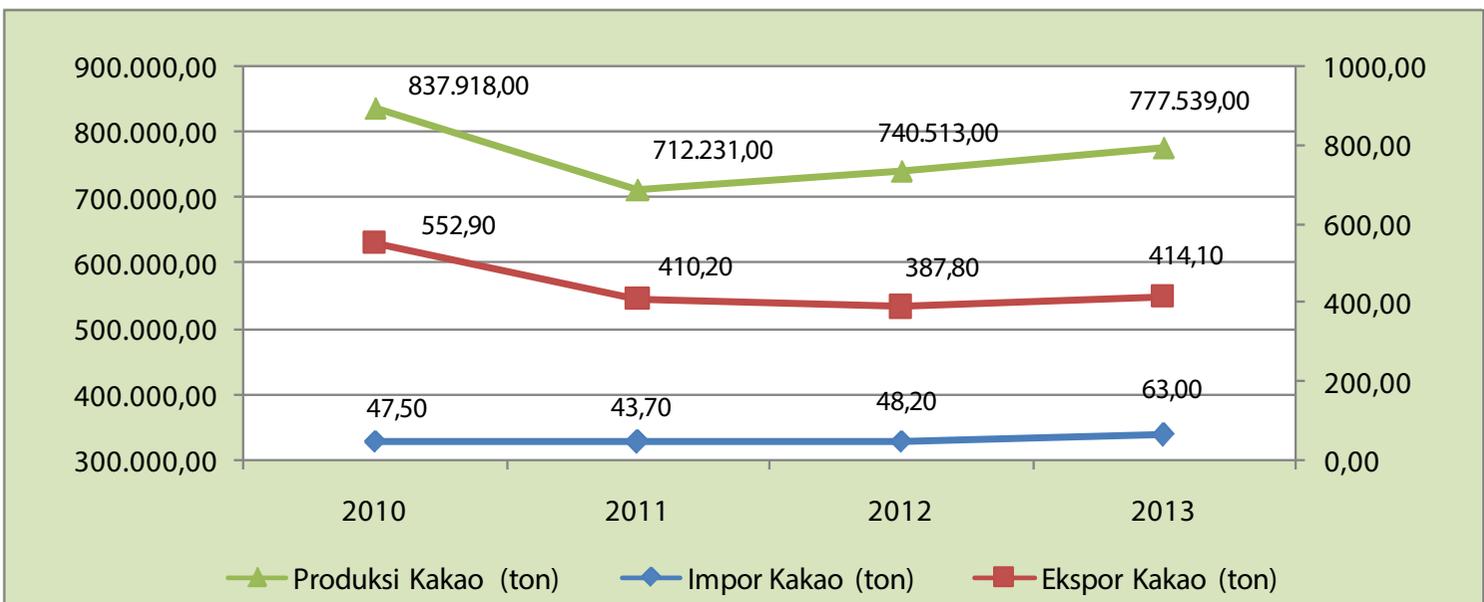


Gambar 39. Penyadap Karet

Kegiatan dukungan tanaman tahunan berkelanjutan meliputi pemberdayaan petani karet berupa Pelatihan Penumbuhan Kebersamaan, Pelatihan Penguatan Kelembagaan dan Pelatihan Pengembangan Usaha, dari tahun 2012 hingga 2014 telah dilatih sebanyak 5.630 orang.

(4) Kakao

Untuk tanaman kakao, rata-rata laju pertumbuhan luas arealnya selama 2010-2013 sebesar 3,78%. Luas areal kakao pada tahun 2012 diperkirakan mencapai 1,73 juta ha dengan produksi 936,26 ribu ton.



Gambar 40. Perkembangan Komoditi Kakao Tahun 2010-2013

Dalam rangka meningkatkan produktivitas kakao dilakukan program Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao (Gernas Kakao) tahun 2009-2013 dengan kegiatan

utamanya adalah peremajaan, rehabilitasi dan intensifikasi. Pelaksanaan Gernas Kakao sudah mencapai cakupan areal 460 ribu hektar(dengan rincian peremajaan seluas 82,5 ribu, rehabilitasi seluas 218,7 ribu dan intensifikasi seluas 158,9 ribu) atau 28% dari luas perkebunan kakao 1,6 juta ha saat ini. Kegiatan peremajaan dan rehabilitasi menggunakan 5 bahan tanam terpilih yang telah dilepas oleh Kementerian Pertanian Indonesia yaitu ICCRI-03, ICCRI-04, Sca-06, Sulawesi 1 dan Sulawesi 2, sedangkan untuk rehabilitasi menggunakan klon Sulawesi 1 dan Sulawesi 2. Dengan menggunakan 5 klon tersebut yang dicampur secara merata, maka potensi daya hasil mencapai 2 ton/ha/tahun dengan ukuran biji antara 1,00-1,10 sehingga kualitas biji kakao yang dihasilkan petani berubah dari biji berukuran kecil menjadi biji berukuran sedang sampai besar.

Gerakan Nasional (Gernas) Kakao

Berdasarkan kajian dampak pelaksanaan Gernas Kakao oleh Tim Independen (Institut Pertanian Stiper Yogyakarta, UGM, IPB dan UNHAS) tahun 2013 diperoleh hasil :

No	Kegiatan	Produktivitas (Kg/Ha)	
		Sebelum Gernas	Sesudah Gernas
1	Peremajaan	150	150 (TM1), 350 (TM 2), 600 (TM 3), 600 (TM 4)
2	Rehabilitasi	350	400 (TM 1), 550 (TM 2), 800 (TM 3), 950 (TM 4)
3	Intensifikasi	400	600



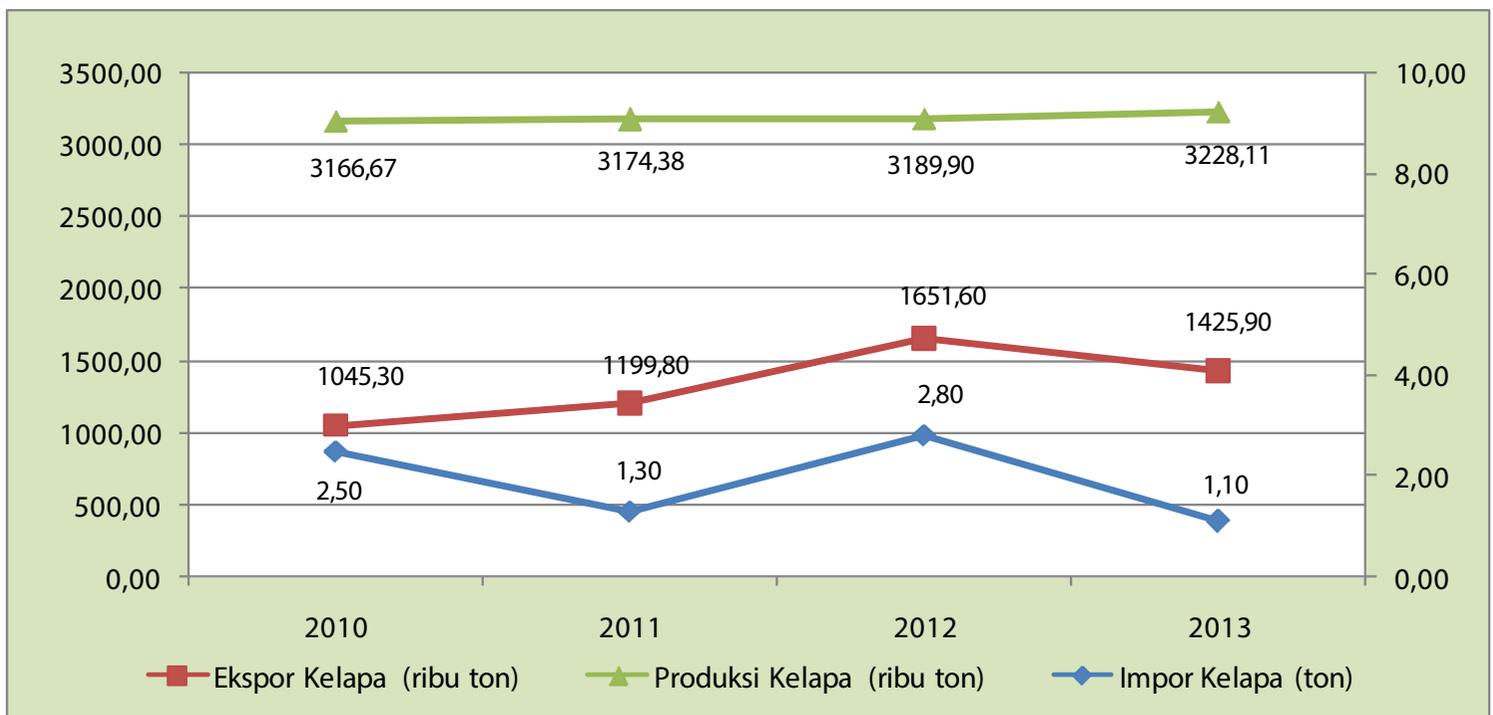
Gambar 41. Pertumbuhan Tanaman Kakao Hasil dari Gernas Kakao

Sasaran produktivitas yang dicapai melalui Gernas Kakao adalah 1,5 ton/ha/tahun. Untuk kegiatan peremajaan, tanaman yang dipelihara dengan baik sesuai dengan tata cara budidaya kakao sesuai anjuran menunjukkan pertumbuhan normal yaitu jagur dan hijau sehat. Kondisi ini teramati di kebun petani yang dikelola dengan baik di Kabupaten Mamuju dan Majene Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Tabanan Provinsi Bali dan Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dibandingkan dengan tanaman sebelumnya, tanaman hasil rehabilitasi menggunakan bahan sambung samping unggul menghasilkan buah dalam jumlah yang lebih banyak, ukuran buahnya lebih besar, jumlah biji per buahnya lebih banyak serta ukuran bijinya lebih besar. Pengaruh intensifikasi sangat beragam, produktivitas biji kakao meningkat menjadi antara 500-1.500 kg biji kering/ha/tahun.

Dalam beberapa kasus, dampak produktivitas dapat mencapai lebih 200% dikarenakan umur tanaman kakao yang masih muda yaitu kurang dari 10 tahun atau tanaman yang diintensifikasi merupakan kakao hasil rehabilitasi swadaya. Beberapa petani menginformasikan produktivitas yang cukup tinggi yaitu 2.500 kg biji kering/tahun/ha pada lahan-lahan kakao sambung samping swadaya yang diintensifikasi.

(5) Kelapa

Rata-rata laju pertumbuhan luas arealtanaman kelapaselama 2010-2013 mengalami kenaikan sebesar 0,42% per tahun, sedangkan produksi kelapa mengalami kenaikan rata-rata 0,64% per tahun. Realisasi luas areal kelapa pada tahun 2012 diperkirakan mencapai 3,79 juta ha dengan produksi 3,18 juta ton. Laju pertumbuhan rata-rata volume ekspor kelapa selama 2004-2012 mengalami penurunan sebesar 0,15% per tahun namun nilai ekspor meningkat rata-rata 19,05% per tahun. Realisasi ekspor komoditi kelapa sampai dengan tahun 2012 telah mencapai volume 692,40 ribu ton dengan nilai US\$ 354,7 juta. Neraca perdagangan untuk komoditi kelapa tahun 2012 telah mencapai US\$ 352,77 juta.



Gambar 42. Perkembangan Komoditi Kelapa Tahun 2010-2013

Untuk memfasilitasi terwujudnya pengembangan usaha perkebunan rakyat, baik untuk pengembangan baru/perluasan dan peremajaan, maka selain pemberian bantuan benih unggul bermutu bersertifikat, pupuk dan pestisida pada tahun pertama melalui sumberdana APBN, petani melakukan perluasan dan peremajaan secara swadaya.

Peningkatan produktivitas kelapa dilakukan dengan cara: (i) Penyempurnaan dan penyesuaian berbagai pedomanteknis pengembangan perkebunan kelapa; (ii) Membina dan mengembangkan sumber benih; dan (iii) Meningkatkan kemampuan pengawasan. Varietas Kelapa telah dilepas sebagai benih bina pada tahun 2010 sebanyak 3 varietas, tahun 2012 sebanyak 1 varietas, tahun 2013 sebanyak 1 varietas.

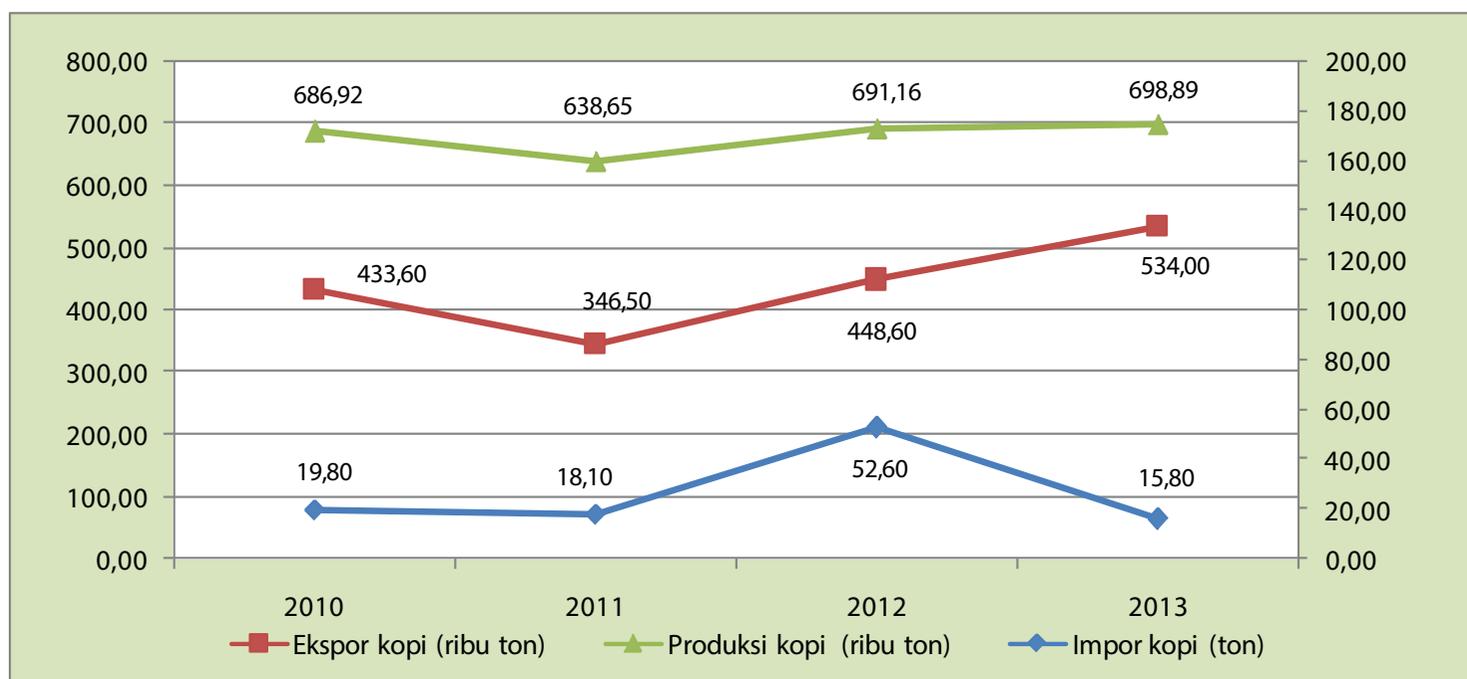
Perluasan dan peremajaan untuk daerah perkotaan/padat penduduk, seperti di Jawa, Bali dan NTB, yang kebun kelapanya tidak monokultur, maka pengembangan kelapa diarahkan dengan

varietas kelapa spesifik yang nilai jualnya tinggi (kelapa aromatik/kopyor/penghasil gula) sehingga diharapkan dapat meningkatkan minat petani. Dengan pertimbangan penerapan praktek pertanian yang baik tidak terjangkau oleh petani, sehingga produktivitas rendah, maka untuk wilayah kelapa monokultur sehampan, peremajaan dan perluasan diarahkan dilakukan perubahan jarak tanam menjadi 16m x 6m, sehingga tersedia lahan untuk pengembangan tanaman pangan secara lestari dan perawatan kebun menjadi lebih baik.

Kegiatan dukungan tanaman tahunan berkelanjutan meliputi pemberdayaan petani kelapa berupa Pelatihan Penumbuhan Kebersamaan, Pelatihan Penguatan Kelembagaan dan Pelatihan Pengembangan Usaha, dari tahun 2012 hingga 2014 telah dilatih sebanyak 7.935 orang.

(6) Kopi

Luas areal tanaman kopi selama 2010-2013 mengalami pertumbuhan sebesar 0,82% sedangkan produksi kopi mengalami kenaikan rata-rata 0,38% per tahun. Laju pertumbuhan rata-rata volume ekspor kopi selama 2010-2013 sebesar 4,54% per tahun. Realisasi ekspor komoditi kopi tahun 2012 telah mencapai volume 464,1ribu ton dengan nilai US\$ 1,31 miliar. Neraca perdagangan untuk komoditi kopi tahun 2012 telah mencapai US\$ 1,18 miliar.



Gambar 43. Perkembangan Komoditas Kopi Tahun 2010-2013

Untuk mendukung percepatan peningkatan produktivitas, produksi dan mutu hasil tanaman kopi nasional serta peningkatan pendapatan masyarakat pekebun kopi dilakukan tindakan antara lain: (1) fasilitasi penyediaan benih unggul, penyediaan sebagian sarana produksi dan alat pertanian kecil, penyiapan pedoman teknis budidaya serta melakukan pembinaan dan pengawasan melalui kegiatan intensifikasi kopi *specialty*, perluasan kopi arabika dan peremajaan kopi robusta.

Kopi *specialty* merupakan jenis kopi yang terbaik citarasanya dan bersifat khas karena itu pasarnya juga khusus. Pangsa pasar kopi spesialti masih terbuka, terutama dengan bergesernya konsumen kopi biasa ke kopi spesialti di Amerika Serikat. Kopi *specialty single origin* Indonesia yang mempunyai reputasi di pasar internasional karena mutu citarasanya, antara lain: Mandheling dan Lintong Coffee (Sumatera Utara); Gayo Mountain Coffee (Aceh); Java Arabica Coffee (Jawa Timur); Bali-Kintamani Coffee (Bali); Toraja dan Kalosi Coffee (Sulawesi Selatan); Flores-Bajawa Coffee (Nusa Tenggara Timur); Baliem Coffee (Papua); Luwak Arabica Coffee; Arabika Ijen Raung (Bondowoso); dan Kopi Robusta Lampung (Lampung Barat).



Gambar 44. Pengembangan Kopi Robusta

Kopi Robusta Lampung di Lampung Barat terbukti mampu mengungkit pertumbuhan perekonomian daerah. Mengiringi pertumbuhan produksi kopinya diikuti dengan menjamurnya industri kecil skala rumah tangga yang turut mengupayakan hadirnya produk turunan kopi yang merupakan icon Kabupaten Lampung Barat. kini selain produk kopi bubuk klasik, kopi organik dan kopi strawberry yang telah lebih dulu lahir sebagai industri produk turunannya, maka sejak tahun 2008 Lampung Barat pun telah menjadi sentra kopi luwak. Beberapa produsen kopi luwak berada pada Kelurahan Way Mengaku, Kecamatan Balik Bukit dengan jarak yang berdampingan. Keadaan ini menjadikan suatu kewajaran bila wilayah ini dijuluki Sentra Produsen Kopi Luwak Liwa. Beberapa produsen telah memiliki izin Dinas Kesehatan dalam bentuk P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga).

Luas areal tanaman kopi di Lampung Barat mencapai 60.000 hektar yang dibudidayakan sekitar 45 kepala keluarga (KK) petani. Produksi kopi di Lampung Barat sekitar 40 ribu – 60 ribu ton per tahun. Tanaman kopi di daerah itu sangat dominan dan menjadikan salah satu pendapatan masyarakat setempat.

Provinsi Lampung hingga sekarang masih menjadi penghasil kopi robusta terbesar di Indonesia. Setiap tahunnya tidak kurang dari 130.000–140.000 ton biji kopi dihasilkan dari 135.477 hektar lahan yang tersebar di sentra-sentra perkopian. Lampung juga mampu mengekspor sekurangnya 150.000–200.000 ton biji kopi per tahun yang dikirim ke Jepang, Amerika Serikat dan Uni Eropa. Hal itu tak terlepas dari posisi Lampung yang berada di kawasan segitiga emas wilayah perkopian Sumatera bagian Selatan yakni Lampung, Bengkulu, dan Sumatera Selatan.



Gambar 46. Pengembangan Kopi di Provinsi Lampung

Pertumbuhan produksi komoditas peternakan selama 2010-2013 cukup baik, antara lain ditunjukkan dengan peningkatan produksi daging sapi 7,82% per tahun dengan estimasi produksi sampai tahun 2014 sebesar 624 ribu ton *meat yield* sapi lokal, daging ayam buras 2,38% per tahun, telur 7,80%, dan susu segar 2,67% per tahun.

Tabel 10. Produksi Komoditas Peternakan Tahun 2010-2013

NO	KOMODITAS	2010	2011	2012	2013 ¹⁾	2014 ²⁾	Pertumbuhan Rata-rata 2010-2013(%)
		(ribu ton)					
1.	Daging Sapi ³⁾	436	485	509	546	624	7,82
2.	Daging Kerbau	36	35	37	40	40	3,68
3.	Daging Kambing/ Domba	114	113	110	113	161	-0,27
4.	Daging Babi	212	225	232	246	247	5,09
5.	Daging Ayam Buras	268	265	267	287	400	2,38
6.	Daging Itik	26	28	30	31	33	6,06
7.	Telur	1.380	1.480	1.629	1.728	1.813	7,80
8.	Susu	909	975	960	982	1.470	2,67

Keterangan: ¹⁾ Angka Sementara, ²⁾ Angka Target, ³⁾ Poduksi berupa karkas dari pematangan

Untuk mencapai swasembada daging sapi, Kementerian Pertanian telah melakukan intensifikasi peternakan yang meliputi optimalisasi Inseminasi Buatan (IB) dan Intensifikasi Kawin Alam (InKA), Swasembada Semen, Pejantan Unggul dan Embrio, Uji Zuriat dan penggemukan sapi, Pengembangan Hijauan Pakan Ternak dan Perluasan Areal Penggembalaan.

(1) Optimalisasi Inseminasi Buatan (IB) dan Intensifikasi Kawin Alam (InKA)

Dalam rangka mendukung pembangunan peternakan, utamanya usaha budidaya ternak ruminansia serta upaya meningkatkan populasi, produksi dan produktivitasnya antara lain ditempuh dengan mengoptimalkan IB dan InKA. Melalui kegiatan IB, penyebaran bibit unggul ternak sapi dapat dilakukan dengan murah, mudah dan cepat, serta diharapkan dapat meningkatkan pendapatan peternak. Teknologi Inseminasi Buatan (IB) merupakan salah satu cara yang efisien dan efektif dalam usaha meningkatkan populasi dan mutu genetik ternak.

Berdasarkan validasi data pelaksanaan IB tahun 2013 diperoleh hasil: realisasi Akseptor 2.346.171 ekor (terjadi kenaikan 6,0% dibandingkan realisasi akseptor tahun 2012 sebanyak 2.205.177 ekor) dengan realisasi kelahiran 1.491.276 ekor. Realisasi kegiatan optimalisasi IB tahun 2014 (sampai Maret 2014): realisasi akseptor sebanyak 521.847 ekor, realisasi kelahiran 309.708 ekor. Akseptor

sapi potong dan kerbau yang dapat di IB berjumlah lebih kurang 2,6 juta ekor dari 4,9 juta betina produktif (sapi dan kerbau).

InKA dilaksanakan mulai tahun 2012 di daerah sumber ternak yang belum mendapat pelayanan IB, dengan jumlah pejantan pemacek sebanyak 6.349 ekor, ditambah pengadaan tahun 2013 sebanyak 2.754 ekor dan tahun 2014 sebanyak 1.075 ekor. Dengan demikian terdapat sebanyak 2,6 juta ekor ternak yang pengembangannya dilaksanakan melalui kawin alam.



Gambar 46. Menteri Pertanian dengan Sapi Tipe Limousin

Inseminasi Buatan (IB)

Pada tahun 2013 pelayanan IB telah menjangkau hampir seluruh wilayah Kabupaten Grobogan yang mencakup 19 Kecamatan. Populasi Sapi Potong di Kabupaten Grobogan sebanyak 197.430 ekor, dengan jumlah sapi betina dewasa 94.766 ekor. Data SP-IB Grobogan menunjukkan bahwa: Jumlah Akseptor: 56.488 ekor; *Conception Rate*: 67,17 %; Jumlah Inseminasi: 60.535 dosis; *Service per Conception*: 1,56; Jumlah Kelahiran: 38.485 ekor.

Pencapaian sasaran pelayanan IB telah berhasil menempatkan Kabupaten Grobogan sebagai salah satu Kabupaten dengan Peringkat Tertinggi Pelaksanaan IB di Jawa Tengah di Tahun 2012. Keberhasilan Inseminasi Buatan di Kabupaten Grobogan tidak lepas dari peran inseminator, yaitu Petugas Inseminasi Buatan yang tersebar di semua Kecamatan di Kabupaten Grobogan.



Gambar 47. Sosialisasi IB di VBC Sapi Potong, Desa Plosorejo, Kecamatan Tawangharjo, Grobogan



Gambar 48. Pemberian Penghargaan kepada Juara I Tingkat Nasional Petugas IB oleh Presiden

(2) Swasembada Semen, Pejantan Unggul dan Embrio

Swasembada Semen

Hasil Sensus Pertanian 2013 menunjukkan bahwa jumlah sapi potong dan sapi perah betina dewasa berjumlah 9.625.197 ekor dengan jumlah akseptor diperkirakan sebanyak 2.649.069 ekor yang 70% diantaranya adalah ternak lokal (sapi bali, sapi peranakan ongole dan sapi madura). Dari jumlah akseptor tersebut jumlah pejantan yang diperlukan sebanyak 402 ekor. Saat ini, jumlah pejantan yang berada di Balai Inseminasi Buatan (BIB) Nasional dan BIB Daerah sudah sebanyak 531 ekor, yang berarti sudah terjadi kelebihan pejantan.



Gambar 49. Sapi Pejantan Unggul Tipe Brahman

Saat ini produksi semen mencapai sekitar 6.800.000 dosis. Hampir 94% dari jumlah tersebut diproduksi oleh BIB Nasional (BBIB Singosari dan BIB Lembang) dan 6% diproduksi oleh BIB Daerah (BIB Aceh, BIB Lampung, BIB Sumatera Barat, BIB Sumatera Utara, BIB Jambi, BIB Bengkulu, BIB Sumatera Selatan, BIB Jawa Tengah, BIB DIY, BIB Universitas Airlangga, BIB Universitas Brawijaya, BIB Bali, BIB NTB, BIB Kalimantan selatan, BIB Kalimantan Timur, BIB Sulawesi Tenggara dan BIB Sulawesi Selatan). Melihat produksi semen beku dari tahun ke tahun selalu melebihi distribusi, maka pada tahun 2012 Indonesia telah dicanangkan swasembada semen beku. Disamping memenuhi kebutuhan dalam negeri BBIB/BIB Nasional telah mampu memenuhi pangsa Internasional diantaranya Myanmar, Kamboja, Afghanistan, Kyrgyztan, Kazakhstan dan Malaysia.

Tabel 11. Produksi dan Distribusi
Semen Beku Balai Besar Inseminasi Buatan/Balai Inseminasi Buatan Nasional

No	UPT	Uraian	Tahun			
			2010	2011	2012	2013
1	BBIB Singosari	Produksi	2.988.884	2.788.088	2.526.568	3.017.063
		Distribusi	2.788.555	2.071.636	2.290.842	1.256.893
2	BIB Lembang	Produksi	2.038.442	2.600.700	2.453.281	2.182.541
		Distribusi	1.892.810	1.602.233	1.540.888	1.455.468
	Total	Produksi	5.027.326	5.388.788	4.979.849	5.199.604
		Distribusi	4.681.365	3.673.869	3.831.730	2.712.361

Swasembada Pejantan Unggul

Kementerian Pertanian memiliki UPT di bidang pembibitan sapi yaitu BET Cipelang, Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BBPTU-HPT) Sapi Perah Baturraden, Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Sapi Potong Padang Mangatas, BPTU-HPT Sapi Dwiguna Sembawa, BPTU-HPT Sapi Bali Pulkan dan BPTU-HPT Sapi Aceh Indrapuri. UPT tersebut mempunyai tugas dan fungsi menghasilkan ternak bibit baik jantan dan betina sehingga berpotensi untuk menggantikan pejantan impor dengan menghasilkan pejantan unggul. Ketersediaan pejantan unggul tersebut dapat terjamin secara kontinu apabila diketahui kebutuhan setiap tahunnya meliputi kekurangan/kelebihan jumlah pejantan unggul; strategi dan program penyediaan pejantan unggul; dan langkah-langkah operasional penyediaan pejantan unggul yang telah tertuang dalam *Road Map* Swasembada Pejantan tahun 2013. Oleh karena itu melalui peran serta *stakeholder* perbibitan pada tahun 2013 Indonesia sudah swasembada pejantan.

Swasembada Embrio

Penerapan teknologi *Transfer Embrio* (TE) atau alih janin merupakan alternatif untuk meningkatkan populasi dan mutu genetik sapi secara cepat. TE merupakan generasi kedua teknologi reproduksi setelah IB. Teknologi IB menyebarkan bibit unggul ternak jantan, sedang pada teknologi TE dapat menyebarkan bibit unggul ternak jantan dan betina. Keuntungan utama yang diperoleh adalah meningkatnya kemampuan reproduksi ternak betina unggul.

(3) Uji Zuriat

Uji zuriat bertujuan menghasilkan bibit pejantan unggul yang cocok dengan kondisi agroklimat di Indonesia, sekaligus upaya mengurangi ketergantungan pada pejantan unggul impor dalam pelaksanaannya diperlukan waktu selama 7 tahun.

Pada tahun 2011 telah terdapat 4 ekor pejantan unggul sapi FH hasil uji zuriat yaitu *Farrel*, *Filmore*, *Bullionary* dan *Formery*. Pada tahun 2012 didapatkan pejantan unggul sapi perah Indonesia sebanyak 4 ekor yaitu *Fokker*, *Flaunt*, *Floean* dan *Hostormsy*. Direncanakan sesuai program tahun 2015 akan di *Launching* kembali sebanyak 8 ekor. Kegiatan ini akan selalu dilakukan dalam upaya untuk *replacement proven bull* sapi perah.

Pejantan unggul tersebut telah dimanfaatkan oleh BBIB Singosari dan BIB Lembang untuk memproduksi semen beku dalam rangka meningkatkan mutu genetik sapi perah Indonesia yang adaptif dengan kondisi lingkungan.

(4) Penggemukan Sapi

Pemberian pakan tambahan terhadap induk sapi potong pra dan post partus/*flushing* untuk menghasilkan bobot lahir pedet sebesar 29 kg, Pertambahan bobot badan harian (pbbh) 0,52 kg/ekor/hari, dan *Estrus Post Partus* (epp) 60 hari. Optimalisasi pemberian pakan pada pedet pasca saph diperoleh rata-rata pbbh sebesar 0,47 kg/ekor/hari. Teknologi yang didiseminasikan

melalui demplot ternak sapi menggunakan inovasi teknologi budidaya sapi bali, inovasi teknologi pengolahan limbah ternak kompos, dan inovasi teknologi pakan.

Inovasi Teknologi Sapi Potong

Kegiatan dilaksanakan di Desa Kanamit Barat Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah dengan basis komoditas sapi potong. Pertambahan bobot badan harian rata-rata meningkat 66,7%, angka kebuntingan rata-rata meningkat 33,3%, peningkatan service per conception (s/c) rata-rata 46%, bobot lahir rata-rata meningkat 33,3% dan penurunan jarak beranak rata-rata sebesar 18,2%. Dampak implementasi teknologi yang telah diimplementasikan di Laboratorium Inovasi telah memberikan keyakinan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau untuk mereplikasikan model dalam skala yang lebih luas, dan kerjasama ini akan diperluas dengan berbagai stakeholders dan pihak lainnya termasuk pihak swasta.



Modifikasi bank pakan diatas palungan



Diseminasi melalui temu lapang

Gambar 50. Inovasi Teknologi Penggemukan Sapi Potong

(5) Pengembangan Hijauan Pakan Ternak dan Perluasan Areal Penggembalaan

Perluasan areal peternakan adalah usaha penambahan baku lahan peternakan (kebun hijauan makanan ternak dan padang penggembalaan) yang dapat dilakukan melalui pembukaan lahan baru dan atau pemanfaatan lahan-lahan yang sementara tidak diusahakan guna meningkatkan produksi hijauan makanan ternak yang berkualitas. Dalam meningkatkan produksi dan produktivitas ternak, ketersediaan dan kontinuitas hijauan makanan ternak sangat diperlukan, untuk itu perlu diwujudkan adanya lahan yang digunakan sebagai kebun hijauan makanan ternak dan padang penggembalaan.

Di Indonesia, hampir semua padang penggembalaan merupakan padang penggembalaan alam yang ditumbuhi rumput alam dan tanaman leguminosa serta tanaman lainnya yang tumbuh secara liar. Fungsi padang penggembalaan alam adalah sebagai tempat yang strategis untuk

tempat aktivitas ternak sapi, kerbau atau lainnya dan menyediakan rumput dan leguminosa (hijauan pakan ternak) dan air secara mudah, murah dan ekonomis sepanjang tahun. Melihat arti penting padang penggembalaan dalam pemeliharaan ternak yang efisien, maka padang penggembalaan harus dikelola sebaik mungkin, sehingga bisa menyediakan pakan secara optimal sepanjang waktu dan secara langsung akan meningkatkan produktivitas ternak.

Pengembangan Peternakan Berbasis Padang Penggembalaan

Pada tahun 2013 dilaksanakan kegiatan Pengembangan peternakan berbasis padang penggembalaan di Keibar, Kabupaten Tambraw, Provinsi Papua Barat. Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan dana *On Top* direktif presiden tahun 2013. Hasil kegiatan meliputi perbaikan padang penggembalaan seluas 1.600 ha yang diperuntukkan untuk lokasi penggembalaan ternak sapi di 16 kelompok. Perbaikan melalui: (1) *improvement* rumput lokal setempat dengan jenis rumput *Brachiaria decumben* (BD) dan penanaman legum pohon Gamal (*Gliricidia sepium*); (2) Penyediaan infrastruktur dasar (pagar luar 64.000 meter, pagar *paddock* 48.000 meter, *shelter*, gudang pakan, sumur dan bak air, *cluster*, sumur, kandang jepit, peralatan mesin pengolah lahan); dan (3) pengadaan sapi induk 1.600 ekor dan jantan 160 ekor untuk penguatan kepemilikan ternak di 16 kelompok.



Gambar 51. Padang Penggembalaan di Keibar, Papua Barat

INOVASI DAN DISEMINASI TEKNOLOGI PERTANIAN

Saat ini sudah banyak tersedia paket teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan oleh petani untuk meningkatkan kuantitas, kualitas dan produktivitas aneka produk pertanian. Berbagai varietas, klon dan bangsa ternak berdaya produksi tinggi; teknologi produksi pupuk dan produk bio; alat dan mesin pertanian; serta aneka teknologi budidaya, pasca panen dan pengolahan hasil pertanian sudah banyak dihasilkan para peneliti di lembaga penelitian di lingkup Kementerian Pertanian.

Selama periode 2010-2013 telah dihasilkan 49 VUB padi dengan produktivitas 8-12 ton/ha, 14 VUB jagung dengan produktivitas 10-13 ton/ha, 2 VUB kedelai 2-3 ton/ha. Teknologi pendukung yang telah dihasilkan untuk meningkatkan produksi pertanian, antara lain: sistem Kalender Tanam (Katam) sebagai pedoman pertanaman padi, jagung dan kedelai; sistem tanam padi Jajar Legowo yang dapat meningkatkan hasil sebesar 13,83%; alat mesin untuk tanam (transplanter) untuk mempercepat waktu dan menurunkan biaya tanam; serta mesin panen padi (combine harvester) yang dapat menurunkan susut hasil hingga 1,87%. Rekapitulasi teknologi yang didiseminasikan Kementerian Pertanian adalah sebagai berikut:

Tabel 12. Rekapitulasi Teknologi yang Didiseminasikan Kementerian Pertanian

No	Uraian	Jumlah
1	Diseminasi paket teknologi pendampingan PTT Padi	32
2	Diseminasi paket teknologi pendampingan PTT Jagung	14
3	Diseminasi paket teknologi pendampingan PTT Kedelai	12
4	Diseminasi paket teknologi pendampingan kawasan agribisnis hortikultura (PKAH)	14
5	Diseminasi paket teknologi pendampingan swasembada daging sapi/kerbau (PSDSK)	24
6	Diseminasi paket teknologi pendampingan program P2T3	11
7	Diseminasi paket teknologi pendampingan Kakao	5
8	Diseminasi paket teknologi pengembangan m-KRPL	33
9	Diseminasi paket teknologi pengembangan m-P3MI	66
10	Pengembangan model inovasi Laboratorium Lapang	12
11	Paket teknologi pengembangan Sistem Integrasi Tanaman-Ternak	10
12	Diseminasi Teknologi Kalender Tanam	33
13	Diseminasi VUB padi	32
14	Demfarm kedelai	32
Total		330

Untuk menyinergikan kegiatan pengkajian dan pengembangan teknologi pertanian yang mempunyai keunggulan di tingkat nasional maka Kementerian Pertanian mendiseminasikan teknologi tersebut ke seluruh Indonesia melalui kelembagaan yang sudah dimiliki oleh Kementerian Pertanian yaitu Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP). Tugas dan fungsi BPTP adalah mengkoordinasikan kegiatan pengkajian dan pengembangan teknologi pertanian yang bersifat spesifik lokasi dan mempercepat pemasyarakatan inovasi teknologi yang telah dihasilkan oleh Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis (UK/UPT) lingkup Badan Litbang Pertanian untuk mengakselerasi pemasyarakatan inovasi teknologi pertanian maupun lembaga penelitian dan pengembangan lain yang ada di Indonesia.

BAB VI. MENINGKATKAN PERAN KELEMBAGAAN PERTANIAN

Dalam rangka meningkatkan kemampuan, keterampilan dan kapasitas, Kementerian Pertanian telah melakukan upaya-upaya sebagai berikut: (1) Memperbanyak jumlah kelompok dan gabungan kelompok tani; (2) Memberikan bimbingan dan pendampingan teknis untuk memperkuat kemampuan baik dari segi aspek budidaya maupun dalam aspek pemasaran; (3) Memperluas jenis kelompok tani sesuai dengan bidang usaha, misalnya kelompok Pengendalian Hama Terpadu, Inseminasi Buatan, Perhimpunan Petani Pemakai Air dan Usaha Pengembangan Jasa Alsin (UPJA); (4) Memperkuat modal usaha bagi kelompok/gabungan kelompok melalui pemberian bantuan modal, dan memperkuat jaringan kelompok tani dengan penyuluh lapangan; dan (5) Meningkatkan kemampuan manajemen kelompok, mencakup aspek budidaya (produksi komoditas), penyediaan prasarana dan sarana produksi serta penanganan pasca panen dan pemasaran hasil pertanian.

Beberapa kelembagaan pertanian yang pengembangannya diprioritaskan selama taun 2010-2014 antara lain:

6.1. Kelembagaan Petani

Kelembagaan petani yaitu Kelompok Tani (Poktan) dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) merupakan salah satu kelembagaan yang diprioritaskan pembinaannya oleh Kementerian Pertanian. Kelompok tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisilingkungan (sosial, ekonomi, sumberdaya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota. Sedangkan Gabungan kelompok tani (Gapoktan) adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.

Kelompok tani pada dasarnya adalah organisasi non formal di perdesaan yang ditumbuhkembangkan “dari, oleh dan untuk petani”, memiliki karakteristik sebagai berikut: (1) saling mengenal, akrab dan saling percaya diantara sesama anggota, (2) mempunyai pandangan dan kepentingan yang sama dalam berusaha tani, (3) memiliki kesamaan dalam tradisi dan atau pemukiman, hamparan usaha, jenis usaha, status ekonomi maupun sosial, bahasa, pendidikan dan ekologi, dan (4) ada pembagian tugas dan tanggung jawab sesama anggotaberdasarkan kesepakatan bersama.

Rekapitulasi kelompok tani dan gabungan kelompok tani per wilayah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 13. Rekapitulasi Kelompoktani dan Gabungan Kelompoktani Per Wilayah

No	Wilayah	Kelompoktani (POKTAN)		Gabungan Kelompoktani (GAPOKTAN)	
		Jumlah Poktan	Jumlah Anggota	Jumlah Gapoktan	Jumlah Anggota
1	Sumatera	106.213	2.099.228	9.209	1.289.366
2	Jawa	107.296	5.962.797	18.054	5.163.939
3	Bali & Nusa Tenggara	20.603	647.915	2.453	453.174
4	Kalimantan	24.460	622.775	3.135	432.705
5	Sulawesi	53.153	931.908	4.407	670.047
6	Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat	6.728	115.757	374	50.996
Total		318.453	10.380.380	37.632	8.060.227

Unsur pengikat kelompoktani adalah adanya kepentingan yang sama diantara para anggotanya, adanya kawasan usaha tani yang menjadi tanggung jawabbersama diantara para anggotanya, adanya kader tani yang berdedikasi untuk menggerakkan parapetani dan kepemimpinannya diterima oleh sesama petanilainnya, adanya kegiatan yang dapat dirasakan manfaatnya olehsekurangnya sebagian besar anggotanya, adanya dorongan atau motivasi dari tokoh masyarakat setempatuntuk menunjang program yang telah ditentukan.

Kelompoktani merupakan wadah belajar mengajar bagi anggotanya guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap serta tumbuh dan berkembangnya kemandirian dalam berusaha tani, sehingga produktivitasnya meningkat, pendapatannya bertambah serta kehidupan yang lebih sejahtera. Kelompok tani adalah tempat untuk memperkuat kerjasama diantara sesama petani dalam kelompoktani dan antar kelompoktani serta dengan pihak lain. Melalui kerjasama ini diharapkan usaha taninya akan lebih efisien serta lebih mampu menghadapi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan. Usahatani yang dilaksanakan oleh masing-masing anggota kelompoktani, secara keseluruhan harus dipandangsebagai satu kesatuan usaha yang dapat dikembangkan untuk mencapai skala ekonomi, baik dipandang dari segi kuantitas, kualitas maupun kontinuitas.

Pengembangan kelompoktani diarahkan pada peningkatan kemampuan setiap kelompoktani dalam melaksanakan fungsinya, peningkatan kemampuan para anggota dalam mengembangkan agribisnis, penguatan kelompoktani menjadi organisasi petani yang kuat dan mandiri. Kelompoktani yang berkembang bergabung ke dalam gabungan kelompoktani (GAPOKTAN). Gapoktan yang kuat dan mandiri dicirikan antara lain: (1) adanya pertemuan/rapat pengurus yang diselenggarakan secara berkala dan berkesinambungan; (2) rencana kerja Gapoktan

disusun secara bersama dan dilaksanakan oleh para pelaksana sesuai dengan kesepakatan bersama dan setiap akhir pelaksanaan dilakukan evaluasi secara partisipasi; (3) memiliki aturan/norma tertulis yang disepakati dan ditaati bersama; (4) memiliki pencatatan/pengadministrasian setiap anggota organisasi yang rapi; (5) memfasilitasi kegiatan-kegiatan usaha bersama di sektor hulu dan hilir; (6) memfasilitasi usaha tani secara komersial dan berorientasi pasar; (7) sebagai sumber serta pelayanan informasi dan teknologi untuk usaha para petani umumnya dan anggota kelompok tani khususnya; (8) adanya jalinan kerjasama antara Gapoktan dengan pihak lain; dan (9) adanya pemupukan modal usaha baik iuran dari anggota atau penyisihan hasil usaha/kegiatan Gapoktan.

Pembinaan kelompok tani diarahkan pada penerapan sistem agribisnis, peningkatan peranan, peran serta petani dan anggota masyarakat pedesaan, peran serta petani dan anggota masyarakat pedesaan lainnya, dengan menumbuhkembangkan kerja sama antar petani dan pihak lainnya yang terkait untuk mengembangkan usahatani. Selain itu pembinaan kelompok tani diharapkan dapat membantu menggali potensi, memecahkan masalah usahatani anggotanya secara lebih efektif, dan memudahkan dalam mengakses informasi, pasar, teknologi, permodalan dan sumber daya lainnya.

Pembinaan Poktan dan Gapoktan dilakukan melalui kegiatan: (1) Penumbuhan dan pengembangan Poktan dan Gapoktan; (2) Pendampingan Penyusunan Rencana Kegiatan Poktan dan Gapoktan; (3) Rembug-rembug Petani/Poktan/Gapoktan di Kecamatan; (4) Forum-forum Penyuluhan Pertanian di Pedesaan; (5) Advokasi Penumbuhan dan Pengembangan POSLUHDES (Pos Penyuluhan Desa); (6) Fasilitasi penilaian Poktan dan Gapoktan berprestasi; (7) Penilaian kelas kemampuan kelompok tani; (8) Penilaian petani berprestasi; dan (9) Pemberdayaan Petani di Luar Lokasi SL-PTT serta Pengawasan dan Pendampingan Penyuluhan di Luar dan di Lokasi SL-PTT Padi, Jagung, Kedelai serta Sentra Produksi Sapi, Tebu dan Hortikultura dalam mendukung Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan.

Salah satu bentuk pembinaan Poktan dan Gapoktan adalah pembinaan dengan dukungan Bank Dunia melalui proyek *Farmer Extension Agriculture and Technology Information* (FEATI) dengan merancang Kelompok Tani sebagai wahana pembelajaran petani dalam pengembangan agribisnis di pedesaan berskala ekonomi dengan kegiatan utama berupa fasilitasi peningkatan akses petani terhadap teknologi, informasi, permodalan, sarana produksi, dan kemitraan usaha yang terkait dengan pengembangan usaha taninya. Kelompok Tani yang dibina dengan metode tersebut disebut *Farmer Managed Extension Activities* (FMA). Untuk mengelola FMA di setiap desa, dibentuk unit yang akan mengelola kegiatan penyuluhan desa yang pengurusnya (Unit Pengelola FMA) dipilih secara demokratis oleh rembug tani desa.

Pembelajaran petani melalui FMA telah memunculkan inisiatif dari petani untuk mengembangkan komoditas unggulan bernilai ekonomi tinggi yang menerapkan prinsip agribisnis. Pembelajaran agribisnis melalui FMA juga telah meningkatkan kapasitas kelembagaan petani. Sampai akhir

Juni 2013, sebanyak 655.613 petani telah mengikuti pembelajaran agribisnis dengan topik yang bervariasi dari sub sektor sesuai kebutuhan pasar dan potensi wilayahnya.



Gambar 52. Demplot FMA



Gambar 53. Benih Padi yang Dihasilkan oleh FMA Beleke

Keberhasilan FMA Membangun Usaha Perbenihan Padi

Sejak tahun 2009, Hamka dan beberapa anggota kelompok tani (20 orang) mengikuti pembinaan oleh BPTP melalui program FEATI tentang ujicoba teknologi padi. Melalui jaringan komunikasidan kerjasama dengan Unit Pengelola Benih Sebar (UPBS) BPTP Nusa Tenggara Barat, pada tahun 2010 memulai agribisnis perbenihan padi. Hasil produksi benih tersebut kemudian dijual ke beberapa kelompok tani. Hamka juga membentuk asosiasi penangkar benih padi. Asosiasi tersebut kini telah mampu memproduksi benih padi sebanyak 145 ton dengan luas lahan 40 ha. Melalui usaha agribisnis perbenihan padi telah terjadi perubahan dalam penerapan teknologi oleh petani padi, terutama penggunaan benih berlabel, penerapan jarak tanam secara teratur, serta penggunaan pupuk sesuai anjuran. Dalam pemasaran benih padi telah mengembangkan jaringan kerjasama pemasaran dengan sejumlah pedagang benih di Kabupaten Lombok Barat, show room BBI dan PT. Pertani.

6.2. Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP)

Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP) adalah Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian yang direkrut oleh Kementerian Pertanian selama kurun waktu tertentu dan melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyuluhan pertanian. Rekrutmen THL-TB Penyuluh Pertanian diarahkan untuk melaksanakan tugas pendampingan dan konsultasi bagi pelaku usaha dalam mengembangkan usaha agribisnisnya, sehingga adopsi teknologi tepat guna dapat berjalan dengan baik yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas, pendapatan, dan kesejahteraan petani beserta keluarganya. Sampai Juli 2014, Kementerian Pertanian telah memfasilitasi 20.814 orang Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TB Penyuluh Pertanian).



Gambar 54. THL-TBPP di lahan SLPTT Padi

Tabel 14. Rekapitulasi Data THL-TB Penyuluh Pertanian Berdasarkan Pendidikan

No	Wilayah	S1	D4	D3	SLTA	TOTAL
1	Sumatera	2.312	296	638	3.519	6.765
2	Jawa	2.886	226	934	3.574	7.620
3	Bali & Nusa Tenggara	568	43	206	899	1.716
4	Kalimantan	393	92	159	838	1.482
5	Sulawesi	676	77	194	1.325	2.272
6	Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat	211	12	75	661	959
Total		7.046	746	2.206	10.816	20.814

Kabar Baik untuk Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP)

Kementerian Pertanian akan mengangkat 10 ribu orang Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP) menjadi Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (P3K) pada tahun 2014. Berdasarkan data yang ada, 20 ribu THL-TBPP telah didata dan diseleksi untuk diangkat menjadi P3K. Seleksi pengangkatan itu akan dilakukan pada bulan Agustus 2014. Penyuluh yang lulus seleksi akan menjadi bagian dari 100.000 formasi pengangkatan pegawai pemerintah yang diusulkan Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi.

Perubahan status THL-TBPP menjadi P3K setara karyawan honorer pemerintahan. P3K akan mendapat gaji sesuai dengan pendidikan terakhir. Untuk P3K lulusan SMA menerima gaji Rp. 1,3 juta/bulan, lulusan Diploma 3 Rp. 1,5 juta/bulan, dan sarjana Rp. 2 juta/bulan yang dibayar Pemerintah Pusat selama 10 bulan. Sedangkan sisanya yang 2 bulan dibayar oleh Pemerintah Daerah yang menggunakan jasa P3K. Hal ini sekaligus menunjukkan kepedulian Pemerintah Daerah terhadap keberlangsungan P3K.



Gambar 55. Penyerahan Penghargaan Kepada Penyuluh Terbaik

6.3. Kelembagaan Perbenihan

Kelembagaan perbenihan di daerah meliputi Produsen Benih seperti: Balai Benih milik Pemerintah Daerah sebagai penghasil benih sumber, BUMN, swasta dan penangkar benih. Di samping itu juga ada Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPSBTPH), yaitu instansi pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam pengawasan mutu benih tanaman, mulai dari proses produksi melalui sistem sertifikasi sampai benih siap diedarkan serta

pengawasan mutu benih yang beredar, serta melakukan observasi dan uji keunggulan dalam rangka pendaftaran varietas. BPSBTPH berkedudukan di tiap propinsi. Sampai dengan tahun 2013 sudah berdiri 33 BPSBTPH.

Kelembagaan Pengawas Mutu Benih selain BPSBTPH juga ada Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu (LSSM) Perbenihanyang berperan memberikan sertifikat sertifikasi sistem mutu kepada perusahaan benih swasta yang memenuhi syarat untuk melakukan sertifikasi sistem mutu secara mandiri.

Muara dari keberhasilan kelembagaan perbenihan adalah terpenuhinya benih unggul, bermutu, dan bersertifikat yang dibutuhkan oleh petani. Sudah banyak benih unggul bermutu dan bersertifikat yang dihasilkan oleh Balai Benih milik pemerintah daerah, BUMN, swasta maupun penangkar benih.



Gambar 55. Benih Kedelai

dan MK II seluas 20 ha. Hasil panen kedelai telah dibeli oleh Pemda untuk keperluan benih program SL-PTT, sehingga model perbenihan kedelai tersebut sudah mampu berkontribusi dalam penyediaan benih sebanyak 22.000 kg pada MK II atau setara 550 ha = 55 unit dari total 4.200 unit untuk program SL-PTT kedelai Kabupaten Bima.

UP-FMA Desa Nggembe juga mendapat kunjungan kerja, antara lain dari Tim ACIAR untuk kegiatan *scalling up* komoditas kedelai di Kabupaten Bima, Penyuluh Swadaya se-Kabupaten Bima sebanyak 60 orang pada acara temu teknologi yang diselenggarakan oleh pengelola FEATI Kabupaten Bima, FMA Kecamatan Donggo, Sape dan Madapangga. Bahkan setelah melakukan kunjungan lapang Ketua FMA Donggo dan Madapangga membeli benih sebanyak 360 kg dan PT. Tani Utama sebanyak 5.000 kg untuk pengembangan di Kabupaten Dompu.

Kelembagaan Perbenihan Kedelai

Pada awalnya petani Desa Nggembe menanam kedelai dari benih asal-asalan dan tidak bersertifikat. Beranjak dari permasalahan tersebut BPTP mengintroduksikan model perbenihan kedelai. Dalam kegiatan tersebut BPSB Kabupaten Bima memfasilitasi sertifikasi benih. Hasilnya yang semula 500 kg/ha menjadi 1.390 kg/ha. Hasil tersebut setelah processing benih menjadi 1.000 kg/ha (bersertifikat) sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan petani dari Rp.885.000,-/ha menjadi Rp.4.985.000,-/ha.

Awal mula uji coba seluas 1 ha pada MK II 2009 dengan menggunakan Varietas Grobogan (label putih), kemudian berkembang pada MH di tanam di lahan kebun 7,15 ha; MK I 2010 menjadi 14 ha

6.4. Kelembagaan Pelayanan Jasa Alat Mesin Pertanian

Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kemampuan Unit Pelayanan Jasa Alat Mesin Pertanian (UPJA) maka pada tahun 2012 dan tahun 2013 dilakukan penguatan terhadap UPJA Pemula dan UPJA Berkembang menuju ke arah kemandirian yaitu dengan kegiatan Pengembangan UPJA Mandiri melalui dana bantuan sosial.

Kegiatan Pengembangan UPJA Mandiri Tahun 2012 dialokasikan kepada 100 unit UPJA di 24 provinsi dan 76 kabupaten, dimana masing masing UPJA mendapat dana sebesar 50 juta rupiah untuk pembelian Hand Traktor, Peralatan Bengkel dan Pompa Air/*Power Thresher*. Kegiatan Pengembangan UPJA Mandiri Tahun 2013 dialokasikan kepada 20 unit UPJA di 16 propinsi dan 20 kabupaten, dimana masing masing UPJA mendapat dana sebesar 250 juta rupiah untuk pembelian paket alat mesin pertanian yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik wilayah dan potensi pengembangan alsintan di wilayah operasional UPJA. Paket alat dan mesin pertanian yang diadakan dapat berupa *Hand Traktor*, Pompa Air (4 inch, 3 inch dan 2 inch), *Power Thresher*, *Paddy Mower*, *Power Weeder*, *Rice Transplanter*, dan Peralatan Bengkel serta pembangunan/perbaikan gudang penyimpanan alsintan.

Kelembagaan Unit Pelayanan Jasa Alat Mesin Pertanian (UPJA)

UPJA Setia Dadi bertempat di Dusun Nusadadi, Desa Bojong, Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Pada awalnya UPJA ini hanya bermodalkan 2 hand traktor hasil pembelian secara mandiri kredit (KSO) pada tahun 2004, lambat-laun menjadi maju. Jumlah hand traktor yang sekarang dikelolamencapai 18 unit. Selain itu juga ada pompa air (5 unit), *power tresher* (5 unit), *dryer* (1 unit), pedal *tresher* (1 unit), cultivator (2 unit), appo (1 unit), alat bengkel (1 unit), padi *mower* (2 unit), granulator (1 unit), mesin tanam (1 unit), *combine harvester* (3 unit), *steam* (3 unit), *rice mill* (1 unit), mesin rumput (1 unit), *power weder* (1 unit), dan *hand sprayer* (1 unit).

Berkembangnya UPJA Setia Dadi hingga mampu menjadi maju seperti sekarang berkat kerja keras serta adanya kemauan antar anggota dan pengurusnya untuk dapat mengembangkan unit usaha yang dijalankan. Hal yang dapat dicontoh dari UPJA Setia Dadi bagi UPJA lainnya adalah kemauan untuk mentrasfer ilmunya kepada masyarakat umum. Dengan adanya UPJA Setia Dadi, wilayah di Desa Bojong memiliki hasil panen yang meningkat.

Seiring waktu, jumlah lembaga UPJA semakin bertambah dan mulai ditata sebagaimana mestinya, sehingga muncul beberapa UPJA yang profesional dalam menjalankan sistem kegiatan layanan jasa alsintan.



Gambar 57. Unit Pelayanan Jasa Alat Mesin Pertanian

6.5. Kelembagaan Petani Pemakai Air

Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) adalah kelembagaan yang ditumbuhkan oleh petani yang mendapat manfaat secara langsung dari pengelolaan air pada jaringan irigasi, air permukaan, embung/dam parit dan air tanah. P3A yang dimaksud dalam peraturan ini juga termasuk kelembagaan Kelompok tani ternak, perkebunan, dan hortikultura yang memanfaatkan air irigasi/air tanah dangkal/air permukaan dan air hasil konservasi/embung.

Pembinaan dan pemberdayaan P3A telah dan akan diwujudkan dalam beberapa kegiatan yaitu: (a) Pengelolaan Irigasi Partisipatif (PIP); dan (b) Penyusunan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) tentang Pembinaan dan Pemberdayaan P3A.

Kegiatan Pengelolaan irigasi Partisipatif (PIP) ini dilakukan secara massal dengan sebaran realisasi sebagai berikut:

Tabel 15. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan PIP Tahun 2010-2014.

TAHUN	LOKASI		REALISASI (UNIT)					LUAS LAYANAN (Ha)
	PRO VINSI	KABU PATEN	TANAMAN PANGAN	HORTI KULTURA	PETER NAKAN	PERKE BUNAN	JUMLAH TOTAL/ UNIT	
2010	22	125	133	0	3	0	136	6.800
2011	25	208	518	134	4	0	656	32.800
2012	25	194	297	0	0	0	297	20.790
2013	25	243	515	98	49	89	751	45.000
2014	30	237	500	0	0	0	500	30.000
TOTAL	127	1.007	1.963	232	56	89	2.340	135.390

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa luas layanan PIP mengalami peningkatan sejalan dengan meningkat nya jumlah propinsi/kabupaten yang ikut sertamulai tahun 2011, luas layanan untuk kegiatan PIP meningkat tajam dan setelah itu cenderung berfluktuasi sampai tahun 2014. Peningkatan ini disebabkan pemerintah mulai menggalakkan sistim partisipatif dalam pembangunan pertanian, untuk menjamin keberlanjutan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan pertanian.

Keberhasilan Kegiatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (PIP)

PIP adalah kegiatan rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani dan rehabilitasi Jaringan Irigasi Desa, pembuatan boks bagi, bangunan talang, dapat memberikan dampak yang baik bagi petani, diantaranya:

- Peningkatan dan pemberdayaan P3A serta dinamisasi dalam wujud kebersamaan dan tanggung jawab, hal ini terlihat dari partisipasi petani terhadap pembangunan jaringan irigasi yaitu dalam bentuk tenaga yang tidak dibayar. Disamping itu juga beberapa lokasi realisasi jaringan irigasi yang dibangun dapat melebihi kegiatan yang sudah direncanakan.
- Peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani didalam pengelolaan irigasi secara partisipatif, yaitu petani bisa melaksanakan rehabilitasi jaringan/saluran irigasi yang ada secara sederhana, mulai dari perencanaan awal (penyusunan RUKK) sampai dengan pelaksanaan di lapangan, bahkan jika dimungkinkan sampai pada operasional dan pemeliharannya.
- Kegiatan Pengembangan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (PIP) dapat meningkatkan luas areal tanam sebagai akibat dari bertambahnya luas layanan jaringan irigasi yang telah diperbaiki maupun hasil dari pembangunan jaringan irigasi/infrastruktur yang baru, sehingga pasokan air lebih lancar baik dari segi waktu, ruang, jumlah maupun mutu.
- Karena meningkatnya luas layanan lahan yang di iri, diharapkan maka akan terjadi peningkatan intensitas pertanaman (IP), dari laporan daerah di beberapa lokasi terjadi peningkatan IP sampai dengan 100 % dari IP semula.
- Tersedianya layanan air yang lebih baik dan berkesinambungan, maka terjadi juga peningkatan produktivitas dan produksi.

- Adanya peningkatan produktivitas dan produksi, maka terjadi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani dari hasil usahatani.
- Dengan terbangunnya dan terehabilitasinya jaringan irigasi tingkat tersier/jaringan irigasi desa di daerah melalui kegiatan PIP sejak tahun 2006 s/d 2014 dapat mengairi lahan di daerah irigasi kurang lebih seluas 160.950 Ha



Gambar 58. Kegiatan Fisik Pengelolaan Irigasi Partisipatif (PIP)

Sebuah catatan sejarah yang sangat membanggakan, ketika bangsa Indonesia mencapai swasembada beras pada tahun 1984. Sebuah prestasi dari hasil kerja keras seluruh komponen bangsa yang menghantar masyarakatnya pada kondisi ketahanan pangan yang mapan. Namun sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan tuntutan kebutuhan pangan yang semakin besar, ketergantungan hampir sebagian besar masyarakat kepada beras sebagai pangan pokok berpotensi mengancam ketahanan pangan nasional.

Menjadi ironis, ketika bangsa yang begitu kaya sumber daya alam dan subur tanahnya mengalami kekurangan pangan. Padahal secara teoritis, Indonesia terkenal sebagai negara terkaya kedua di dunia setelah Brazil dalam keanekaragaman hayati, bahkan data Kehati menunjukkan 51% bahan pangan ASEAN ada di Indonesia. Inilah tantangan yang harus dijadikan sebagai peluang untuk mengoptimalkan sumberdaya yang ada dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri.

Untuk itu, selama 5 tahun (2010-2014), Kementerian Pertanian telah menjadikan upaya diversifikasi pangan sebagai salah satu target dari 4 target sukses yang telah dicanangkan sejak awal 2010. Ada 4 upaya pokok dalam mengembangkan diversifikasi pangan, yaitu: meningkatkan keragaman komoditas pangan; menganekaragamkan konsumsi pangan penduduk, mengembangkan pengolahan pangan lokal dan mempertahankan kearifan lokal.

7.1. Meningkatkan Keragaman Komoditas Pangan

Penganekaragaman konsumsi pangan atau dikenal juga dengan istilah diversifikasi pangan adalah upaya membudayakan pola konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman untuk hidup sehat, aktif dan produktif. Pola konsumsi pangan penduduk Indonesia masih terdapat ketimpangan yang ditandai dengan masih tingginya konsumsi padi-padian terutama beras dan masih rendahnya konsumsi pangan hewani, umbi-umbian, serta sayur dan buah. Kualitas konsumsi pangan masyarakat yang ditunjukkan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) masih belum mencapai kondisi ideal; dan diperlukan upaya untuk menganekaragamkan konsumsi pangan masyarakat menuju skor PPH yang ideal.

Menyadari hal tersebut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal. Perpres ini mengamanatkan bahwa untuk mewujudkan penganekaragaman pangan diperlukan berbagai upaya secara sistematis dan terintegrasi. Perpres ini sudah ditindaklanjuti, dengan Peraturan Menteri Pertanian No.43 Tahun 2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) Berbasis Sumberdaya Lokal sebagai

acuan yang lebih operasional dalam implementasinya.

Sebagai implementasi dari Perpres dan Permentan tersebut, Kementerian Pertanian pada tahun 2010 meluncurkan program P2KP untuk mempercepat diversifikasi pangan dan memperkuat ketahanan pangan masyarakat.



Secara umum fungsi pekarangan:

- Sumber pangan keluarga, seperti sayur-sayuran, umbi-umbian, buah-buahan serta ternak dan ikan.
- Sumber obat-obatan atau apotik hidup.
- Sumber bumbu, rempah masakan.
- Sumber pupuk organik.
- Sumber keindahan/Eстетika.

Gambar 59. Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)

Selanjutnya, sejak tahun 2010, P2KP disempurnakan pendekatannya. Pengembangan pertanian berkelanjutan, antara lain dengan membangun kebun bibit, mengutamakan sumber daya lokal disertai pemanfaatan pengetahuan lokal, sehingga kelestarian alampun tetap terjaga. Implementasi konsep inilah yang dimaksud dengan KRPL.

KRPL adalah konsep kawasan yang secara optimal memanfaatkan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi keluarga secara berkelanjutan. Pelaksanaan kegiatan KRPL di tingkat desa dengan sasaran kelompok wanita yang mempunyai peran besar dalam penentuan pola konsumsi pangan rumah tangga. Dengan pemberdayaan ibu rumah tangga secara intensif terjadi peningkatan pengetahuan pola konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) yang akhirnya terjadi perubahan pola pikir dan perilaku konsumsi pangan.

Kementerian Pertanian telah mengembangkan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) sebanyak lebih dari 12.000 unit yang tersebar di seluruh provinsi. Potensi lahan pekarangan Indonesia yang mencapai 10,3 juta ha sangat potensial untuk mewujudkan kemandirian pangan keluarga. Melalui pengembangan KRPL tersebut, setiap rumah tangga masyarakat mampu mengurangi pengeluarannya sebesar Rp 825.000,-/rumah tangga/bulan. Pengembangan dalam kawasan juga ditujukan untuk memberikan nilai ekonomi masyarakat yang lebih tinggi. Produk komoditas baik sayuran, pangan lokal seperti aneka umbi, tanaman obat keluarga (TOGA), ternak unggas, kelinci serta jenis ternak lainnya selain untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat juga untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya.



Gambar 60.
Pemanfaatan Pekarangan Rumah untuk KRPL

Pada dasarnya memanfaatkan pekarangan melalui Konsep KRPL adalah pekerjaan yang mudah dan menyenangkan karena :

- Semua anggota kelompok maupun keluarga dapat membantu mengelola pekarangan.
- Pengaturan tanaman di pekarangan merupakan kegiatan yang tidak sulit.
- Dengan pergiliran tanaman yang baik, bahan makanan dapat dihasilkan secara terus-menerus.
- Kotoran ternak dapat digunakan sebagai pupuk tanaman dan sisa tanaman dapat digunakan sebagai makanan ternak dan ikan.
- Pengaturan tanaman di pekarangan menambah keindahan rumah sekaligus memperbaiki lingkungan hidup.
- Hidup sehat dan sejahtera dapat diwujudkan apabila setiap warga mengkonsumsi pangan sehat dan bergizi.

Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)

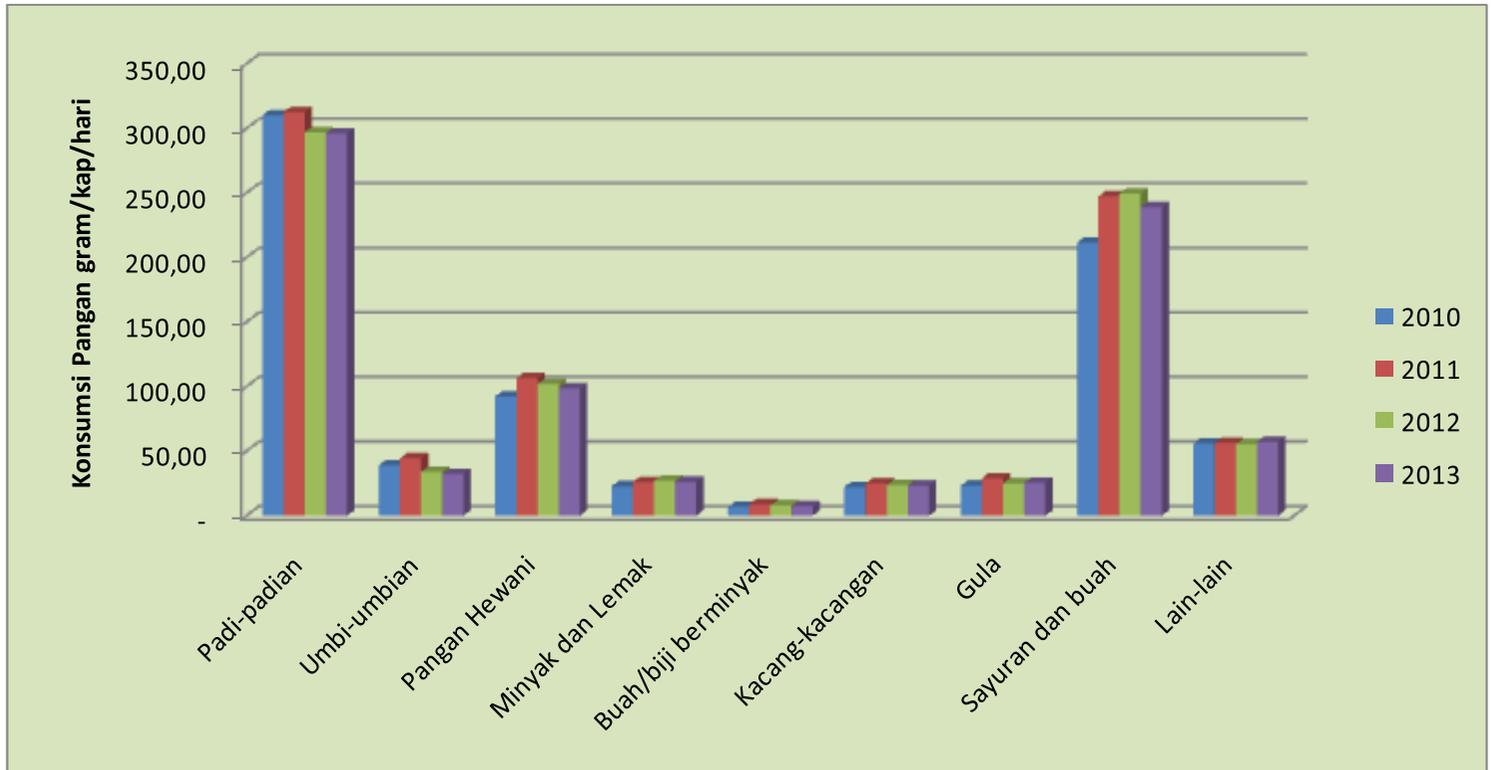
KRPL di Desa Kayen, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur sudah dikenal oleh masyarakat sejak diluncurkan oleh Presiden SBY pada tahun 2011. Jenis tanaman yang dibudidayakan di KRPL adalah terong, cabe rawit, bawang merah, tomat, kemangi, kenikir, kacang panjang di bedengan, tanaman kacang tanah dalam polybag, dan juga diperkenalkan tanaman hijauan pakan ternak (HPT) berupa daun gamal dan lamtoro. Selain itu, program KRPL telah memberikan bantuan ternak kambing. Kepemilikan ternak kambing per RPL sekitar 4-6 ekor. Perguliran kambing telah berjalan dan menjangkau hingga luar dusun. Sumber pendapatan warga bertambah dari penjualan kotoran ternak kambing dengan harga Rp 10.000/karung. Kegiatan pascapanen berupa pembuatan kripik pisang, sukun, talas dan lain-lain juga dilakukan. Bahkan pasarnya sudah menjangkau sekolah-sekolah dengan pengemasan produk yang harganya bersahabat dengan uang saku anak sekolah. Satu prestasi lain yang patut diacungi jempol adalah keberhasilan dalam menciptakan aliran difusi inovasi ke desa tetangga.



Gambar 61. KRPL Kayen dan Olahan Kripik Sukun

7.2. Menganekaragamkan Konsumsi Pangan Penduduk

Konsumsi pangan penduduk per kapita per hari di tingkat rumah tangga dilihat dari masing-masing kelompok pangan menunjukkan hal yang belum beragam dan bergizi seimbang. Konsumsi kelompok pangan padi-padian mengalami fluktuasi namun cenderung mengalami penurunan dari tahun 2010-2013. Walau demikian, penurunan tersebut masih melebihi konsumsi ideal. Di sisi lain, konsumsi kelompok pangan umbi-umbian, pangan hewani, kacang-kacangan serta sayur dan buah masih lebih rendah dibandingkan konsumsi ideal.

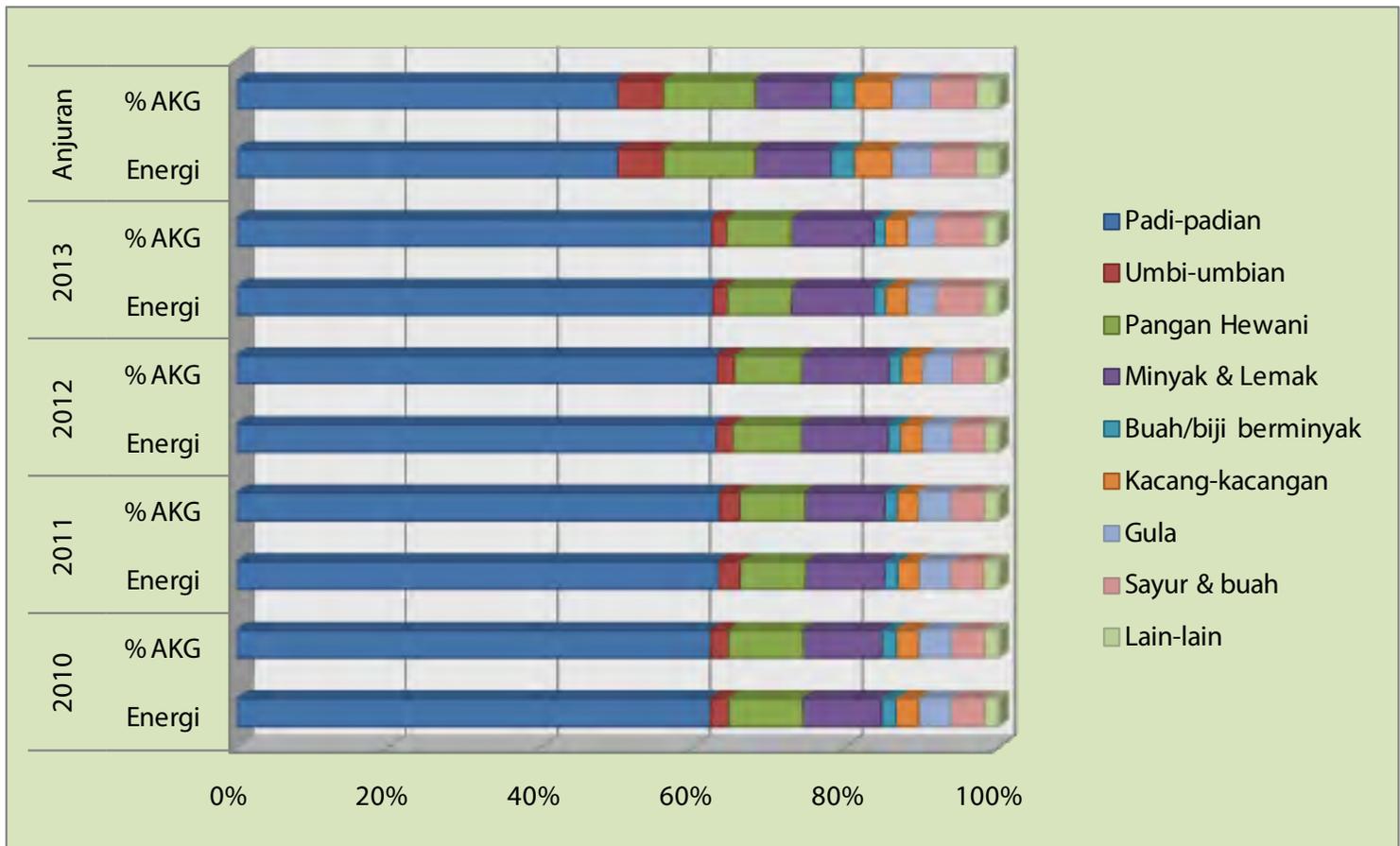


Gambar 62. Perkembangan Konsumsi Kelompok Pangan Tahun 2010-2013

Secara umum pangan sumber karbohidrat yang dominan dikonsumsi oleh penduduk Indonesia adalah beras. Hal ini disebabkan karena beras dihasilkan hampir di seluruh wilayah nusantara serta praktis dan ekonomis. Selain itu, budaya makan dan citra status sosial masyarakat di mana sebagian besar masyarakat masih beranggapan bahwa pangan pokok sumber karbohidrat yang bahannya berasal dari selain beras diidentikkan dengan kemiskinan, menyebabkan tingkat konsumsi beras semakin meningkat. Meningkatnya tingkat konsumsi beras juga disebabkan menurunnya jumlah penduduk miskin yang beralih dari golongan rendah ke golongan menengah yang sebagian besar pendapatannya diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan pokok terutama beras.

Jika dilihat dari kuantitas konsumsi pangan yang diukur melalui Angka Kecukupan Energi, pada tahun 2010-2013 secara umum masih di bawah konsumsi ideal. Hanya kelompok pangan padi-padian yang telah melebihi konsumsi ideal (1.000 kkal/kap/hari). Konsumsi kelompok pangan

umbi-umbian, pangan hewani, kacang-kacangan serta sayur dan buah masih lebih rendah dibandingkan konsumsi ideal.



Gambar 63. Perkembangan Konsumsi Energi Tahun 2010-2013

Salah satu indikator konsumsi pangan secara kualitatif dapat diukur dengan pencapaian skor PPH. Sejalan dengan kuantitas konsumsi pangan yang belum dapat memenuhi kecukupan yang dianjurkan, maka kualitas konsumsi pangan berfluktuasi antar tahun dan masih belum mencapai 100 sesuai dengan PPH ideal. Selama periode 2011-2013 kualitas konsumsi pangan penduduk terus mengalami penurunan dari 77,3 pada tahun 2011 menjadi 75,4 pada tahun 2012 dan pada tahun 2013 menjadi 73,5. Untuk meningkatkan skor PPH diperlukan usaha yang optimal dan paralel antara ketersediaan pangan, akses pangan dan perubahan pola konsumsi pangan masyarakat mengarah pada pola anjuran PPH.

7.3. Mengembangkan Pengolahan Pangan Lokal

Pengembangan pengolahan pangan lokal dilakukan dengan mengubah bentuk asli pangan lokal dan memperkaya nilai gizinya guna meningkatkan citra pangan lokal. Pendekatan ini lebih diarahkan pada segmen masyarakat tertentu yang menyesuaikan dengan pola hidup yang praktis penyajian dan pengolahannya.

(1) Pengolahan Tepung Kasava

Aneka tepung komoditas lokal non beras untuk substitusi terigu yang potensial adalah tepung kasava termodifikasi atau tepung kasava Bimo (*Biological Modified Cassava Flour*). Keunggulan teknologi Starter Bimo-CF adalah lama fermentasi 12 jam, harga lebih murah, penggunaan lebih sederhana, cukup satu tahap aplikasi, ketersediaan cukup sehingga dapat diperoleh dengan mudah. Formula starter tersebut telah dipatenkan.



Gambar 64. Produk Tepung Kasava Bimo dan Starter Bimo-CF

Starter Bimo-CF telah diadopsi oleh PT. Multi Prima Sejahtera (PT. MPS Tbk.). Dalam memproduksi tepung kasava Bimo, PT. MPS bekerjasama dengan PT. United Pangan Nusantara (Lampung Utara) dan usaha skala kecil yang dilakukan oleh masyarakat yang tersebar di Purwokerto, Wonogiri, Kebumen, Magelang, Salatiga, Ungaran, Wonosari, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Riau, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Jawa Timur. Pemerintah mendorong pertumbuhan industri Tepung Kasava Bimo dengan melibatkan kerjasama antara lembaga penelitian dan dunia swasta. Kerjasama dengan Badan Litbang Pertanian diperoleh teknologi unggul produksi Tepung Kasava Bimo yang optimal untuk mendukung proses produksi.

Sejalan dengan produksi Tepung Kasava Bimo oleh mitra PT. MPS Tbk., beberapa permintaan telah mengalir baik dalam skala kecil (kurang dari 100 kg) hingga skala sedang (500-600 ton) per bulan. Permintaan skala kecil dilakukan oleh industri olahan pangan skala kecil seperti pabrik roti "Hanna Cake" di Depok dan pabrik kue brownis "Mr. Brown" di Bogor. Sedangkan permintaan skala sedang dilakukan oleh UD Metroco yang berdomisili di Lampung.

Pengembangan Model Agroindustri (MAI) pengolahan tepung kasava Bimo juga dilakukan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Pengelolaan MAI dilakukan oleh Pengurus Cabang PP Muslimat NU Pati, Jawa Tengah yang melibatkan anggota dan masyarakat sekitar MAI. Skala produksi masih kecil yaitu sekitar 10-12 ton bahan baku segar. Kelembagaan yang diintroduksikan untuk mendukung model produksi tepung kasava Bimo di Pati meliputi: a) Kelembagaan penyediaan bahan baku, b) Kelembagaan produksi, c) Kelembagaan pemasaran, d) Kelembagaan pemanfaatan tepung, dan e) Kelembagaan pengembangan produk tepung kasava Bimo.

Pendampingan teknologi terus dilakukan secara aktif oleh BB-Pascapanen. Pendampingan dilakukan dengan tujuan agar produksi dapat berjalan dengan baik dan dapat menghasilkan produk tepung kasava Bimo yang berkualitas. Pendampingan teknologi juga dilakukan dengan mengadakan pelatihan pemanfaatan tepung kasava Bimo menjadi produk olahan yang diminati masyarakat serta mempunyai peluang untuk dikomersialkan.

(2) Pengolahan Jagung

Jagung merupakan komoditas yang potensial sebagai pangan alternatif dan dapat diolah menjadi berbagai produk pangan. Melalui teknologi bioproses, produk pangan dari jagung dapat ditingkatkan mutu dan nilai tambahnya. Kandungan kimia jagung cukup baik untuk dijadikan bahan pangan, yang terdiri atas 54,1-71,7% pati, 11,1-26,6% protein, 5,3-19,6% lemak, 2,6-9,5% serat, dan 1,4-2,1% abu.

Teknologi fermentasi telah diimplementasikan dalam pengolahan beras jagung. Di Jawa Tengah, beras jagung dibuat dengan cara perendaman dalam air selama tiga hari. Selama proses ini terjadi fermentasi spontan yang memberikan kontribusi dalam pengembangan tekstur, rasa, keamanan pangan, nilai gizi pada pangan berbasis jagung, dan pengurangan faktor anti-nutrisi. Kelemahan cara tradisional ini adalah bahwa pertumbuhan mikrobia tidak terkendali, sehingga sering menghasilkan rasa asam, yang tidak disenangi oleh konsumen. Inovasi teknologi beras jagung dengan penambahan starter mikrobia (bakteri asam laktat dan khamir) dapat mempercepat proses dari tiga hari menjadi sehari, dan kualitas beras jagung yang dihasilkan meningkat, nilai cerna lebih tinggi, dan waktu tanak lebih cepat. Jagung setelah disimpan selama tiga bulan mengalami kerusakan karena terkontaminasi aflatoksin (>50 ppb). Beras jagung yang difermentasi dapat terhindar dari aflatoksin selama proses penyimpanan yang tepat, dan tahan disimpan hingga dua tahun. Teknologi diversifikasi olahan jagung telah di adopsi di beberapa sentra produksi jagung, antara lain di Jawa Tengah, Jawa Timur, NTT dan Gorontalo.

(3) Teknologi Fortifikasi Produk Pangan Darurat Berbasis Tepung Ubi Jalar

Produk *snack bar* berbasis tepung ubi jalar dan kacang-kacangan ditujukan sebagai produk pangan darurat untuk menanggulangi kelaparan dan kekurangan gizi masyarakat. Produk ini memiliki kalori tinggi dan nilai gizi yang cukup serta umur simpan relatif panjang.

Pada tanggal 28 Oktober 2012 BB-Pascapanen berhasil me-launching produk *snack bars* dalam acara bertajuk "Telo Mart, Produk K-Telo & Telo Bars dan Deklarasi Masyarakat Ubi Jalar Indonesia

(Muji)" di PT. Repoeblik Telo di Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Teknologi fortifikasi *snack bars* yang dihasilkan Balitbangtan telah diuji produksi melalui kerjasama dengan Sentra Pengembangan Agribisnis Terpadu (SPAT) di Kabupaten Pasuruan.

Kesepakatan kerjasama penelitian dengan mitra industri ditindaklanjuti dengan penandatanganan Naskah Kesepakatan Kerjasama (MoU) yang dilakukan antara Kepala BB-Pascapanen dan Direktur SPAT. Tujuan kerjasama adalah untuk mengembangkan produk pangan darurat *snack bars* ubi jalar di pabrik pengolahan pangan SPAT, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. *Snack bars* ubi jalar telah menjadi alternatif bantuan pangan di daerah bencana yang diberikan oleh Balitbangtan, antara lain pasca erupsi Gunung Sinabung.



Gambar 66. Peluncuran Produk Snackbars di Kabupaten Malang, Jawa Timur

(4) Pengolahan Sorgum

Sorgum merupakan komoditas sereal yang belum banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia. Padahal nilai gizi sorgum tidak kalah dengan beras. Bahkan sorgum mengandung protein (8-12%) setara dengan terigu atau lebih tinggi dibandingkan dengan beras (6-10%), dan kandungan lemaknya (2-6%) lebih tinggi dibandingkan dengan beras (0,5-1,5%). Balitbangtan telah menghasilkan berbagai varietas sorgum yang produktivitasnya cukup tinggi (2,5-6,0 ton/ha) dan dapat dibudidayakan di segala jenis tanah, termasuk di lahan marginal.

Inovasi teknologi diversifikasi olahan sorgum meliputi produk olahan setengah jadi dan produk olahan jadi. Produk olahan setengah jadi yang dimaksud ialah pengolahan biji sorgum menjadi beras sorgum, pembuatan tepung dan pati sorgum. Sedangkan produk olahan jadi ialah hasil olahan yang siap dikonsumsi.

Produk Olahan Sorgum Setengah Jadi

Beras sorgum diproses dengan cara menggiling atau menyosoh biji sorgum hingga kulitnya terpisahkan. Penyosohan sorgum merupakan kendala khusus yang dihadapi dalam pengolahan komoditas ini. Hal ini karena kulit sorgum cukup keras dan susah dihilangkan. Apabila kulit sorgum tidak dihilangkan, terutama pada biji yang mempunyai kulit berwarna gelap, maka rasa produk olahannya akan pahit. Cara tradisional pembuatan beras sorgum yaitu membasahi biji dengan air agar teksturnya melunak, kemudian ditumbuk, lalu di tampi untuk menghilangkan kulit bijinya. Cara ini kurang efisien dan banyak biji sorgum yang hancur. Untuk mengatasi kendala tersebut, dapat digunakan alat penyosoh abrasif.



Gambar 67. Produk Olahan Sorgum Setengah Jadi (Sorgum sosoh, dan Tepung sorgum)

Tepung merupakan bentuk olahan setengah jadi yang sangat dianjurkan, karena luwes, mudah dicampur dan difortifikasi untuk meningkatkan mutu gizinya, awet serta hemat ruang penyimpanan dan distribusi. Sorgum sosoh juga dapat diproses menjadi pati. Pati sorgum mempunyai tekstur spesifik dan dapat berfungsi sebagai pelembut dalam pengolahan aneka *cake*.

Produk Olahan Jadi Berbasis Beras Sorgum

Beras sorgum atau dhal secara tradisional diolah menjadi nasi, dan dikonsumsi sebagaimana makanan pokok menggunakan lauk-pauk dan sayuran. Dalam pengembangan diversifikasi pangan lokal, nasi sorgum juga dapat dikombinasikan dengan bahan sumber karbohidrat lain menjadi nasi "kasorgung", yaitu nasi yang terbuat dari bahan kasava-sorgum-jagung. Sorgum ketan (waxy sorghum) dapat diolah menjadi tape, dan dapat dilanjutkan menjadi brem padat. Sorgum ketan juga dapat dibuat makanan kudapan tradisional seperti lempur, wajik, jadah, getas

dan bubur. Sorgum jenis ini di pasar tradisional, terutama di Jawa Tengah dan DI Yogyakarta biasa dijual bersama-sama dengan tiwul, gatot, ketan dan cenil.

Produk Olahan Berbasis Tepung Sorgum

Dalam bentuk tepung, sorgum dapat diolah menjadi aneka kue basah dan kue kering serta makanan tradisional. Kue basah yang dimaksud ialah aneka cake dan bolu, sedangkan makanan tradisional basah, antara lain klepon, jenang, nagasari, dan wingko. Kue kering yang dimaksud ialah aneka cookies, kue gapit dan simping. Tepung sorgum berpeluang sebagai substitusi dalam pembuatan produk makanan berbasis terigu. Kemampuan substitusinya terhadap terigu untuk pembuatan roti mencapai 20-25%, untuk cake 40-50% dan kue kering 70-100%. Untuk menghasilkan mie basah yang baik, penggunaan tepung sorgum dapat mencapai 30%. Tepung sorgum juga bisa diolah menjadi sirup.

Produk Sorgum Instan

Biji sorgum sosoh memiliki tekstur lebih keras dibandingkan dengan sereal lain (beras, jagung, gandum). Oleh karena itu dalam pembuatan nasi sorgum memerlukan waktu yang lebih lama. Berdasarkan pertimbangan tersebut Balitbangtan mengembangkan produk sorgum instan. Produk olahan sorgum yang memiliki prospek untuk dikembangkan adalah produk olah berbentuk produk instan, antara lain nasi instan, bubur instan atau sejenis sereal siap santap yang biasa dikonsumsi untuk sarapan, dimana produk-produk tersebut lebih mudah disajikan.



Gambar 68. Olahan Nasi Sorgum Instan

Nasi sorgum instan mengandung energi sebesar 403 kkal/100 g, air sekitar 8,8%, protein 11 %, lemak 0,7%, abu 0,2%, karbohidrat 88 %, amilosa 28,4%, serat pangan larut 3,3%, serat pangan tidak larut 6,5%, tanin 0,65 dan daya cerna pati 61,9%. Nasi sorgum yang telah diseduh bisa dibuat nasi sorgum goreng, nasi kuning, dan nasi uduk. Adapun bubur sorgum instan mengandung sekitar 7,78% protein, karbohidrat 84,5 %, lemak 6,66% serat pangan 9,07 % dan daya cerna pati 77,97%, serta energi 429 kkal/100 g.



Gambar 69. Olahan Bubur Sorgum Instan (Serpihan Bubur Sorgum Instan, Bubur Sorgum yang telah Diformulasi dengan Gula dan Susu, dan Bubur Sorgum Siap Diseduh).

(5) Pengolahan Tepung Sukun

Berdasarkan kandungan karbohidrat dan nilai gizinya, buah sukun dapat digunakan sebagai sumber pangan lokal. Produksi buah sukun dapat mencapai 50-150 buah/tanaman. Paling sedikit setiap tanaman dapat menghasilkan 25 buah dengan rata-rata 200-300 buah per musim. Untuk setiap hektar lahan dapat menghasilkan buah sukun sebanyak 16-32 ton.

Bobot buah sukun rata-rata 1.500 g/buah, dengan bobot daging buah yang dapat dimakan sekitar 1.350 g. Konsumsi beras rata-rata perkapita untuk sekali makan sebanyak 150 g (= 117 g karbohidrat, kadar karbohidrat beras sekitar 78%). Kandungan karbohidrat buah sukun 27%, berarti satu buah sukun dengan bobot daging 1.350 g mengandung karbohidrat sebesar 365 g. Jadi satu buah sukun dapat dikonsumsi sebagai pengganti beras untuk 3-4 orang. Sukun merupakan buah klimaterik, sehingga setelah dipanen harus segera dimanfaatkan. Masa konsumsi buah sukun maksimal 4 hari setelah dipetik.

Berdasarkan kadar karbohidrat yang cukup tinggi (27,12%), buah sukun berpeluang untuk diolah menjadi tepung. Pemanfaatan tepung sukun menjadi makanan olahan dapat mensubstitusi penggunaan terigu sampai 50 hingga 100% tergantung jenis produknya. Inovasi teknologi tepung sukun ini telah diadopsi di beberapa kabupaten, antara lain Cilacap, Kepulauan Seribu dan Bone.

7.4. Mempertahankan Kearifan Lokal

Pola konsumsi pangan lokal yang ada di masyarakat adalah hal sangat bijaksana untuk dipertahankan baik dari sisi kesehatan maupun pelestarian budaya. Beberapa kearifan lokal pangan nusantara adalah sebagai berikut:

(1) Ubi Kayu (*Manihot utilissima* atau *Manihot esculenta crantz*).

Beberapa kearifan lokal pangan nusantara yang berbahan dasar ubi kayu antara lain:

- **Rasi** adalah makanan pokok sehari-hari khas masyarakat Cirendeu, Jawa Barat. Rasi merupakan olahan ampas ubi kayu yang dijadikan butir-butir seperti nasi setelah melewati proses penepungan dan pengeringan/penjemuran.
- **Beras Aruk** adalah makanan khas desa Tempilang, Bangka Belitung pengganti beras yang terbuat dari ubi kayu, berbentuk butiran kecil yang memiliki rasa dan tekstur seperti nasi.
- **Beras Siger** adalah makanan khas daerah Lampung. Bentuknya hampir menyerupai aruk dan sedikit berwarna cerah.



Gambar 70. "Thiwul" Pangan Nusantara Berbahan Dasar Ubi Kayu

- **Embal** merupakan makanan khas daerah Maluku Tenggara yang terbuat dari ampas singkong yang telah dikeringkan. Bentuk akhirnya berupa lempengan dan butiran.
- **Mie Mocaf** sama dengan teknologi pengolahan mie lainnya, namun bedanya terletak pada bahan dasar untuk membuat mie yaitu tepung singkong yang telah di fermentasi.
- **Kabuto** adalah makanan pokok khas masyarakat Muna yang dibuat dari ubi kayu dan disebut juga dengan sebutan *wikau maombo* oleh masyarakat Buton. *Kabuto* dibuat secara tradisional dengan cara penjemuran, dilanjutkan proses fermentasi setelah itu dikeringkan.
- **Thiwul** adalah makanan pokok masyarakat Kabupaten Gunung Kidul, DI Yogyakarta dan beberapa kabupaten di Jawa Timur seperti Nganjuk, Kediri, Trenggalek, dan Tulung Agung.

- **Jeppa** merupakan makanan utama khas suku Bugis Mandar di Pulau Laut Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Jeppa merupakan makanan utama suku-suku tersebut sebagai bekalnya untuk melaut (nelayan).
- **Kasuami** adalah makanan lokal untuk masyarakat Buton daratan dan kepulauan. Jenis kasuami mentah dibuat dari ubi kayu pahit (*Manihot esculenta Crantz*) yang diparut dan diperas airnya sehingga berbentuk padat. Produk ini biasanya dijual dengan nama kaopi.

(2) Jagung

Beberapa produk jagung antara lain :

- **Tepung Jagung**. Jagung dapat diolah menjadi tepung. Tepung jagung dihasilkan dari

- penggilingan jagung sedangkan tepung maezena dihasilkan dari pengolahan pati jagung.
- **Nasi Jagung.** Konsumsi jagung sebagai pangan pokok masyarakat Jawa dan Madura biasa disajikan dalam bentuk Nasi Jagung (perpaduan antara nasi dengan jagung).
 - **Binthe** (jagung) merupakan makanan khas masyarakat Gorontalo yang biasa disebut dengan Binthe Biluhuta. Masyarakat Gorontalo mengkonsumsi Binthe dengan cara dibubur. Binthe disajikan tidak melalui penghalusan melainkan direbus dalam bentuk bulat-bulat.
 - **Mie Jagung** dapat digolongkan sebagai makanan pokok dan makanan tambahan. Mie jagung adalah produk makanan kering yang terbuat dari tepung jagung dan bahan tambahan lainnya.
 - **Bassang** adalah merupakan jenis makanan tradisional khas Sulawesi Selatan yang terbuat dari jagung.

(3) Sagu

Sagu adalah butiran atau tepung yang diperoleh dari teras batang pohon sagu atau rumbia. Beberapa produk sagu sebagai makanan pokok adalah sebagai berikut :

- **Papeda** atau bubur sagu, merupakan makanan pokok masyarakat Maluku dan Papua. Papeda dibuat dari tepung sagu. Papeda biasanya disantap bersama kuah kuning, yang terbuat dari ikan tongkol atau ikan mubara dan dibumbui kunyit dan jeruk nipis.
- **Kapurung** adalah makanan khas Sulawesi Selatan utamanya di Kabupaten Luwu, Luwu Utara dan Kota Palopo yang berbahan baku sagu. Kapurung terbuat dari tepung sagu yang umumnya divariasikan dengan berbagai jenis sayuran serta lauk.
- **Sinonggi** atau Songgi adalah makanan pokok masyarakat di Kota Kendari, Konawe dan Konawe Selatan seperti papeda dan penyajiannya dengan ikan dan sayuran.
- **Gobak Sagu** adalah makanan pokok masyarakat di Kepulauan Meranti terbuat dari tepung sagu yang penampilannya seperti Kapurung disajikan langsung dicampur dengan sayuran dan lauk pauk.



Gambar 71. "Papeda" Pangan Nusantara Berbahan Dasar Sagu

BAGIAN II

MENINGKATKAN NILAI TAMBAH, DAYA SAING, DAN EKSPOR

Peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor adalah termasuk salah satu target sukses pembangunan pertanian Kementerian Pertanian. Berbagai usaha agribisnis di perdesaan telah dibangun untuk menumbuhkan industri hilir pertanian yang berbasis sumberdaya lokal dengan inovasi teknologi dan manajemen agribisnis produk-produk yang dihasilkan dan dikembangkan, sehingga memiliki nilai tambah dan daya saing untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal, nasional, regional dan internasional.

Upaya peningkatan produksi komoditas pertanian dan diversifikasi, Kementerian Pertanian selama 5 tahun (2010-2014) secara konsisten dan terus menerus berupaya meningkatkan daya saing mulai dari meningkatkan mutu hasil, meningkatkan nilai tambah dengan mengembangkan agroindustri perdesaan, seperti mengembangkan pengolahan berbagai komoditas pertanian dan terus memberikan pelayanan informasi pasar domestik dan internasional sampai mencari terobosan ekspor untuk mencapai target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pertanian. Secara lebih jelas, pengembangan agroindustri di perdesaan oleh Kementerian Pertanian selama periode 2010-2014 dapat dilihat sebagaimana gambar berikut:



Gambar 72. Pengembangan Agroindustri di Perdesaan Periode 2010-2014

8.1. Kebijakan Standarisasi Produk Pertanian

Pembangunan pertanian dihadapkan pada perdagangan dunia yang semakin bebas. Menyikapi hal itu maka Indonesia harus siap untuk bersaing di pasar dalam negeri dan internasional, karena hanya dengan daya saing yang tinggi produk Indonesia dapat bertahan. Salah satu kegiatan yang penting dalam menciptakan daya saing adalah dengan menerapkan standar secara konsisten yang didukung oleh kebijakan pemerintah dalam bentuk regulasi dan program terkait. Tujuan standarisasi pertanian adalah :

- Meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya baik untuk keselamatan, keamanan, kesehatan maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- Membantu kelancaran perdagangan;
- Mewujudkan persaingan usaha yang sehat dalam perdagangan

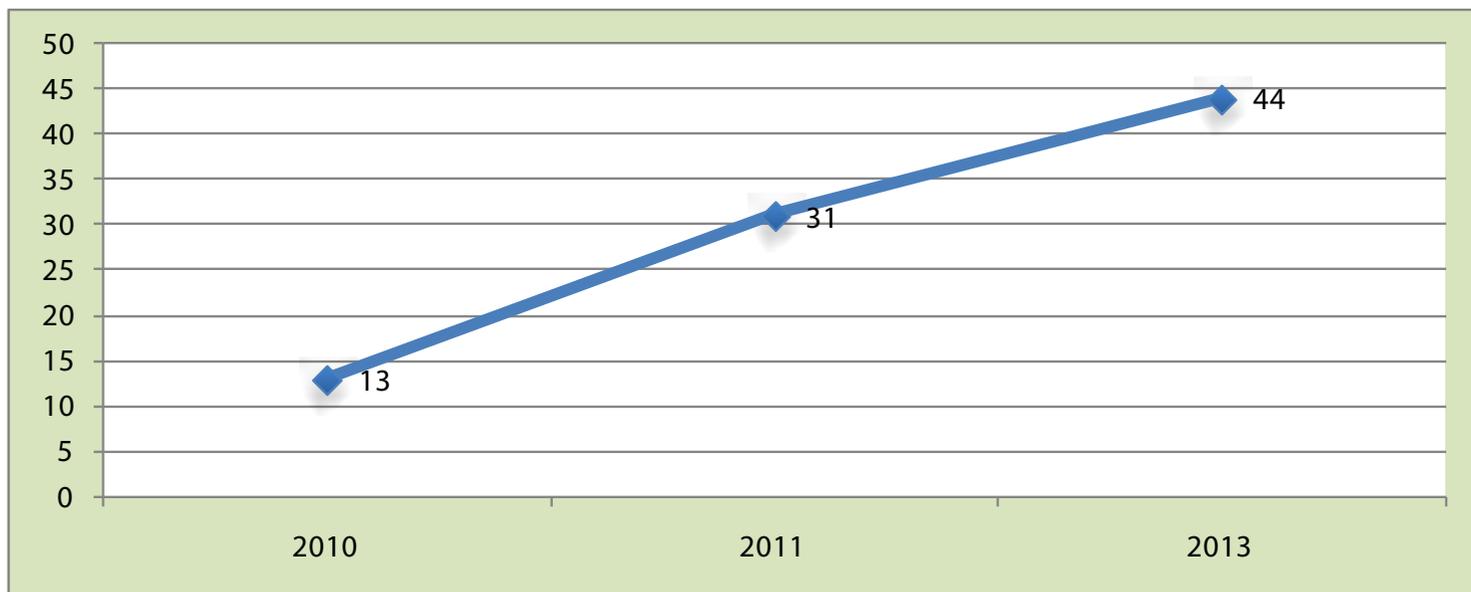
Selama tahun 2010-2013, Kementerian Pertanian telah menerbitkan sebanyak 88 Standar Nasional Indonesia (SNI) di sektor pertanian. SNI ini mencakup sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan.

Tabel 16. Jumlah SNI Sektor Pertanian yang Diterbitkan Selama Tahun 2010-2013

Tahun	Tanaman Pangan				Hortikultura		Perkebunan			Peternakan					Non komoditi	Total
	Pupuk & Pestisida	Produk Segar	Alat dan Mesin	Metode Uji	Benih	Produk Segar	Benih	Produk Segar	Produk Olahan	Bibit	Pakan	Produk Segar	Alat dan Mesin	Metode uji		
2010	1	-	8	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	13
2011	-	-	7	1	-	-	-	1	2	2	12	1	5	-	-	31
2013	-	1	5	-	-	10	-	5	-	11	10	-	1	-	1	44
Total	1	1	20	1	0	10	0	7	3	13	22	1	6	2	1	88

Penerapan SNI masih bersifat sukarela (*voluntary*) namun bisa menjadi wajib bila berkaitan dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan kelestarian lingkungan hidup. Penerapan SNI secara wajib ditetapkan melalui regulasi teknis oleh Kementerian Pertanian sebagai berikut :

1. Keputusan Menteri Pertanian No. 03/Kpts/KB.410/1/2003 tentang Penerapan Secara Wajib SNI Gula Kristal Mentah (SNI 01-3140.1-2001);
2. Peraturan Menteri Pertanian No.68/Permentan/OT.140/G/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Gula Kristal Putih Secara Wajib.



Gambar 73. Jumlah SNI Sektor Pertanian yang Diterbitkan 2010-2013

Upaya yang dilakukan untuk mendukung kebijakan tersebut salah satunya adalah memfasilitasi sistem manajemen mutu pada ISO 9001:2008 pada 4 pabrik gula yaitu:

Tabel 17. Penerapan ISO 9001:2008 di 4 Pabrik Gula

No	Perusahaan/BUMN	Pabrik Gula	Lokasi
1	PT. Madubaru	PG. Madukismo	DIY
2	PT. Kebon Agung	PG. Trangkil	Jawa Tengah
3	PTPN IX	PG. Gondang Baru	Jawa Tengah
4	PTPN VII	PG. Bunga Mayang	Lampung

Dengan diterapkannya ISO 9001;2008 pada ke-empat pabrik gula tersebut maka pabrik gula tersebut akan lebih mudah memperoleh Sertifikat Produk Pengguna Tanda SNI (SPPT-SNI) karena salah satu persyaratan untuk mendapatkan SPPT-SNI adalah diterapkannya sistem jaminan mutu berdasarkan ISO 9001:2008.

Untuk mendukung pengembangan mutu dan standarisasi bidang pertanian diperlukan juga kerjasama dan harmonisasi standarisasi, baik bilateral maupun regional. Harmonisasi dan kerjasama yang telah dilakukan antara lain:

(1) Kerjasama *Trade Support Program (TSP II)*

Dalam rangka memfasilitasi perdagangan produk Indonesia ke negara tujuan ekspor termasuk Uni Eropa maka melalui kerjasama teknis Indonesia dengan Uni Eropa diselenggarakan *Trade Support Program* dengan Kementerian Perdagangan sebagai *Focal Point* dari pihak Indonesia.

Tujuan pelaksanaan *TSP II* adalah mendorong *Export Quality Infrastructure (EQI)* Indonesia dalam meningkatkan mutu dan pengawasannya sehingga dapat memenuhi persyaratan mutu produk Indonesia di negara tujuan ekspor melalui:

- Peningkatan koordinasi dan transparansi dalam penerapan sistem manajemen mutu untuk akses pasar internasional;
- Peningkatan infrastruktur mutu dan standarisasi untuk mendukung Indonesia dalam meningkatkan akses terhadap pasar Internasional.

(2) Harmonisasi

Harmonisasi standar dan regulasi teknis bertujuan untuk meningkatkan kesesuaian dengan standar dan regulasi internasional maupun persyaratan mitra dagang sehingga dapat meningkatkan daya saing produk pertanian Indonesia di pasar domestik maupun internasional, serta meningkatkan pelayanan dan perlindungan terhadap konsumen dan produsen di Indonesia. Harmonisasi standar dilaksanakan melalui partisipasi aktif Indonesia di forum regional yaitu *ASEAN* dan *APEC* serta forum internasional yaitu *Codex Alimentarius* dan *ISO*. Harmonisasi standar di tingkat *ASEAN* utamanya untuk menyiapkan produk pertanian memasuki Masyarakat Ekonomi *ASEAN (MEA)* pada tahun 2015.



Gambar 74. Menteri Pertanian meninjau Alat Mesin Pertanian

Selama periode pembangunan pertanian tahun 2010-2013 Indonesia telah berpartisipasi aktif dalam harmonisasi standar di tingkat ASEAN untuk 39 standar Batas Maksimum Residu (BMR) pestisida dan 19 standar produk segar pertanian, standar regional Asia untuk pertanian organik (*Asian Regional Organic Standard/AROS*) serta standar internasional Codex untuk rambutan dan *Maximum Residue Limits (MRLs)* pestisida *betasiflutrin* pada kubis dan *tiametoksam* pada jeruk. Harmonisasi penerapan standar internasional Pangan Organik, *Global GAP* dan *Sustainable Cocoa* telah dilakukan terhadap gapoktan di provinsi Sumatera Barat, Jambi, Banten, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta dan Jawa Timur untuk komoditi kayu manis, kakao, gula aren, salak, sayuran, pisang dan mangga. Produk tersebut telah diterima di pasar internasional seperti Uni Eropa, Singapura, Tiongkok dan Amerika.

Tabel 18. Harmonisasi Standar Bidang Pertanian Tingkat ASEAN 2010-2013

No	Tahun	Jumlah Harmonisasi Standar Produk Pangan		Jumlah Harmonisasi Standar BNR Pestisida	
		Ditetapkan	Kumulatif	Ditetapkan	Kumulatif
1	2010	4	4	13	13
2	2011	5	9	8	21
3	2012	5	14	12	33
4	2013	5	19	6	39

8.2. Standarisasi Mutu Produk Pertanian

8.2.1. Penerapan Sistem Jaminan Mutu Hasil Pertanian

Dalam upaya meningkatkan daya saing produk hasil pertanian serta menyediakan pangan yang aman dikonsumsi, maka penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan merupakan hal yang mendasar. Menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan berarti mampu menghasilkan produk pertanian yang bermutu dan aman dikonsumsi oleh masyarakat.



Gambar 75. Produk bersertifikat organik

Program Penerapan Sistem Jaminan Mutu Hasil Pertanian merupakan serangkaian kegiatan berupa pembinaan/pengawasan penerapan sistem kepada poktan/gapoktan/petugas provinsi, mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI). Output kegiatan adalah adanya jaminan mutu dan keamanan pangan berupa registrasi atau sertifikasi produk pertanian.

Pembinaan penerapan Sistem Jaminan Mutu Keamanan Pangan (SJMKP) terbagi dalam: Organik serta Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan (pangan dan non pangan).

(1) Organik

Selama periode 2009-2014 telah dilakukan pembinaan sistem pertanian organik dan sertifikasi organik kepada sejumlah pelaku usaha/poktan/gapoktan.



Gambar 76. Produk bersertifikat Prima 3

Tabel 19. Pembinaan Sistem Pertanian Organik dan Sertifikasi Organik 2009-2014

No	Program		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	Pembinaan Pertanian Organik (pelaku usaha/poktan/gapoktan)	A*)	10	30	48	58	47	45
		B**)	-	-	-	3	2	3
2	Sertifikasi Organik (pelaku usaha/poktan/gapoktan)	A	3	9	18	34	38	Sedang proses
		B	-	-	-	1	2	Sedang proses

Keterangan:

*) Mengacu SNI Pangan Organik

***) Mengacu standar internasional Uni Eropa, Jepang/JAS dan Amerika Serikat/NOP

(2) Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan

Pembinaan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan juga telah dilakukan terhadap pelaku usaha/poktan/gapoktan selama tahun 2010-2014.

Tabel 20. Pembinaan Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan Periode 2010-2014 (Pelaku Usaha/Poktan/Gapoktan)

No	Sub Sektor	2010	2011	2012	2013	2014
1	Tanaman Pangan dan Hortikultura	38	131	140	50	114
2	Perkebunan	25	121	200	24	(proses, data s/d Juli 2014)
3	Peternakan	25	80	13	29	
Total		88	332	353	103	114

10.2.2. Pengawasan Jaminan Mutu di Rantai Produksi dan Distribusi



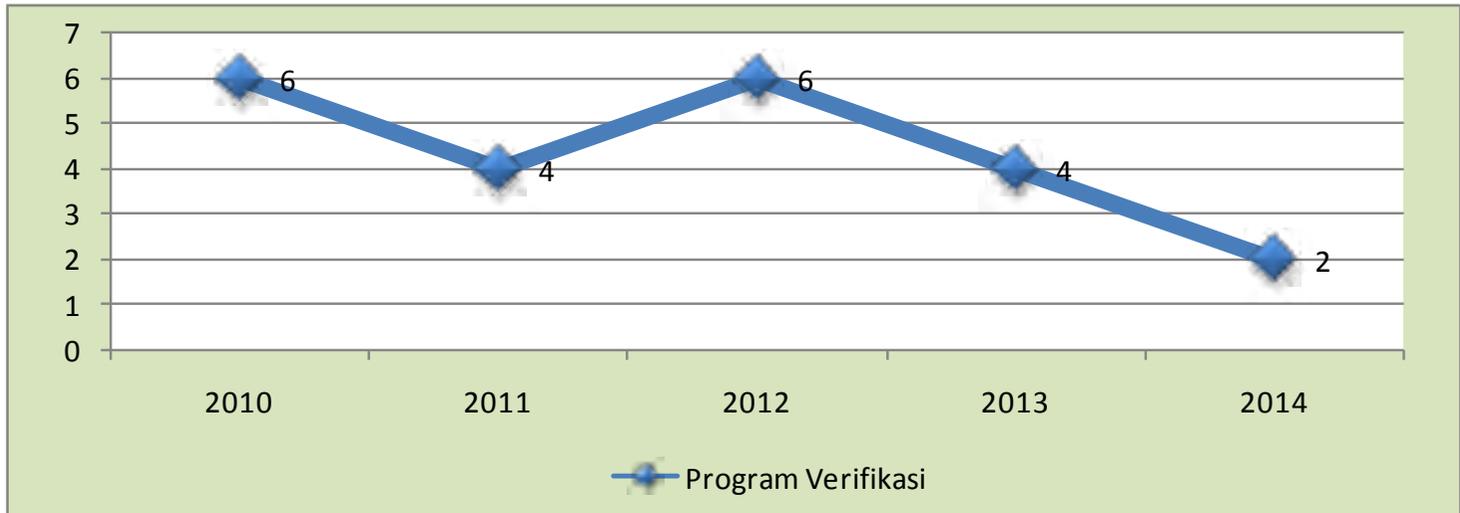
Gambar 77. Produk Bersertifikat Jaminan Varietas

Untuk meningkatkan daya saing produk hasil pertanian serta menyediakan pangan yang aman dikonsumsi, maka pengawasan terhadap penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan harus dilaksanakan untuk menegajawantahkan perundangan yang terkait dengan keamanan pangan. Otoritas Kompeten Keamanan Pangan (OKKP) merupakan infrastruktur pengawasan mutu dan keamanan pangan produk pertanian yang berada di pusat dan di daerah. Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat (OKKP-P) berkedudukan di Kementerian Pertanian. Dalam melaksanakan tugas, OKKP-P bertanggung jawab dan wajib melaporkan kepada Menteri Pertanian. Otoritas Kompeten Keamanan Pangan bertugas

melakukan pengawasan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan hasil pertanian di luar tempat pemasukan dan pengeluaran. Pengawasan mencakup 3 (tiga) hal:

1. Pengawasan oleh OKKP-P terhadap lembaga pengawas daerah yaitu OKKP-D;
2. Pengawasan terhadap pelaku usaha berupa registrasi (Produk Dalam/PD dan Produk Luar/PL, *Packing House/PH*) dan sertifikasi;
3. Pengawasan produk pertanian yang beredar.

Selama periode 2010 - 2014, OKKP-P telah melakukan kegiatan verifikasi terhadap OKKP-D sebagaimana gambar berikut:



Gambar 78. Pengawasan OKKP-P kepada OKKP-D Periode 2010-2014

Pada tahun 2010-2014 juga telah dilakukan kegiatan pengawasan terhadap pelaku usaha berupa registrasi (PD dan PL, PH) dan sertifikasi seperti pada tabel berikut:

Tabel 21. Kegiatan Pengawasan Terhadap Pelaku Usaha Tahun 2010-2014

No	Program	2009	2010	2011	2012	2013	2014 (s/d Juni)	Total
1	Registrasi Produk Dalam (PD)	30	41	48	95	145	51	410
2	Registrasi Produk Luar (PL)	-	4	3	1	9	11	28
3	Registrasi <i>Packing House</i> (rumah kemas)	2	3	-	1	4	2	12
4	Sertifikasi prima 3	21	52	95	158	176	61	563
5	Sertifikasi prima 2	-	-	-	1	3	-	4
6	Registrasi Unit Pengolahan dan Pemasaran Bahan Olah Karet/Bokar (UPPB Bokar)	-	-	-	10	33	10	53
TOTAL		53	100	146	266	370	135	1070

Alat dan mesin pertanian (alsintan) merupakan salah satu faktor pendukung dalam upaya peningkatan produksi selama proses produksi, menekan susut hasil selama proses panen dan penanganan pasca panen serta berperan dalam peningkatan nilai tambah melalui proses pengolahan hasil pertanian. Melalui penggunaan alsintan yang tepat dan bermutu akan diperoleh mutu hasil sesuai standar yang berlaku bahkan diperoleh peningkatan nilai tambah hasil pertanian yang mempunyai daya saing tinggi.

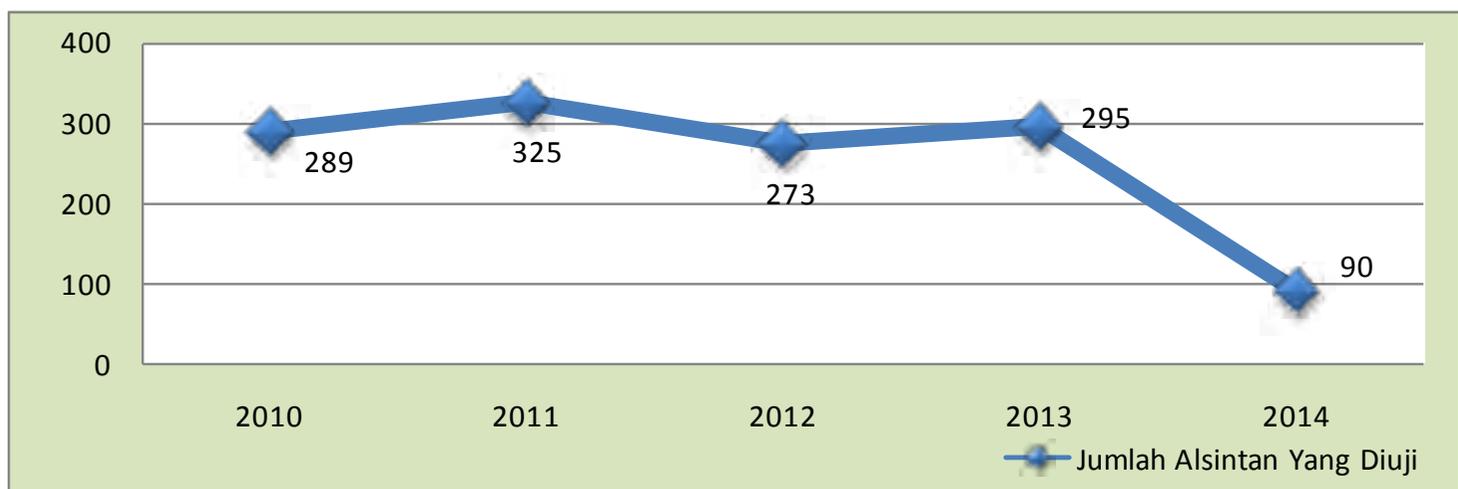


Gambar 79. Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan

Tabel 22. Jumlah Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT) SNI dari Lembaga Sertifikasi Produk (LS-Pro) Alsintan, Balai Pengujian Mutu Alsintan (BPMA), tahun 2010-2013

No	Jenis Alsintan	2010	2011	2012	2013	Total
1	Pompa Air	5 model	11 model	-	5 model	21 model
2	Traktor Roda 2	5 model	16 model	3 model	3 model	27 model
3	Power Thresher	1 model	4 model	-	1 model	6 model
4	Sprayer Gendong Semi Otomatis	-	3 model	-	-	3 model
5	Paddy Reaper	-	1 model	-	-	1 model
Jumlah		11 model	35 model	3 model	9 model	58 model

Kementerian Pertanian juga melakukan pengujian dan sertifikasi alsintan terhadap produk alsintan yang dihasilkan oleh produsen agar mutu produk alsintan yang beredar terjamin mutunya dan dapat melindungi konsumen serta produksinya mengikuti standar ISO yang berlaku.



Ket: Untuk Tahun 2014, perkembangan sampai Bulan Mei

Gambar 80. Hasil Pengujian Alsintan oleh Laboratorium BPMA

9.1. Pengolahan Beras

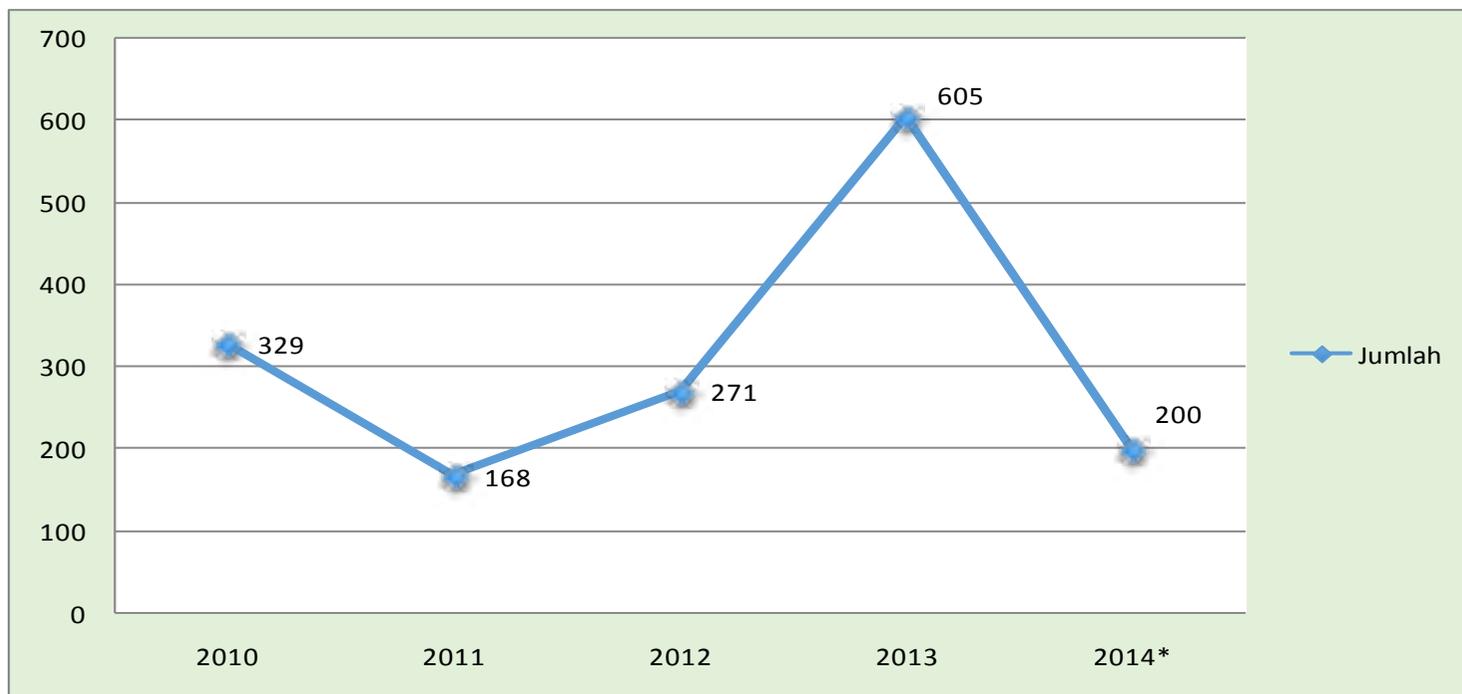
Pengolahan beras bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dari komoditas padi, misalnya sisa dari penggilingan padi yaitu ada menir untuk bahan pangan, bekatul untuk bahan pangan dan pakan ternak, jerami untuk pakan ternak dan pupuk organik ditambah dengan dekomposer, sekam untuk bahan bakar. Pengolahan beras juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas beras.



Gambar 81. Menteri Pertanian bersama dengan Menko Perekonomian dan Menteri Perdagangan inspeksi ke Pasar Induk Beras Cipinang

Salah satu permasalahan dalam upaya peningkatan produksi beras adalah rendahnya mutu dan rendemen beras terutama pada penggilingan padi kecil. Berdasarkan survey BPS tahun 2005-2007 diketahui tingkat kehilangan hasil dalam proses penggilingan (gabah menjadi beras siap konsumsi) mencapai angka 3%. Kehilangan hasil jika dikonversikan ke produksi beras nasional cukup tinggi. Oleh karena itu perlu dilakukan perbaikan teknologi untuk memperbaiki kinerja penggilingan padi. Kementerian Pertanian membuat program Revitalisasi *Rice Milling Unit* (RMU) yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja penggilingan padi yang dapat diukur melalui peningkatan rendemen di penggilingan dan peningkatan mutu beras.

Revitalisasi yang telah dilakukan adalah dengan cara pengembangan penggilingan padi baru serta memberikan fasilitasi alat berupa *polisher, cleaner, separator* kepada unit-unit penggilingan. Sampai dengan tahun 2014 telah dilakukan revitalisasi Penggilingan Padi Kecil (PPK) sebanyak 1.373 unit yang tersebar di wilayah sentra produksi padi.



* Keterangan: Tahun 2014 dalam proses pengadaan

Gambar 82. Sebaran Alat Penggilingan Padi Tahun 2010-2014

Pengembangan Agroindustri Perdesaan PENGOLAHAN BERAS

Gapoktan Sidomulyo - Penerima bantuan Revitalisasi Penggilingan Padi TA 2012 dan 2013
Alamat : Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta.

Bantuan Revitalisasi Penggilingan Padi TA 2012 dan 2013 digunakan untuk membeli peralatan penggilingan padi berupa *husker, polisher elevator, destoner* dan rehab bangunan untuk ruang pengolahan dan pengemasan. Dengan adanya bantuan ini telah meningkatkan rendemen sebesar 3 % ($\pm 62\%$ menjadi rata-rata $\pm 65\%$) dan menurunkan *broken* rata-rata sebesar 5% ($\pm 15\%$ menjadi $\pm 10\%$).

Saat ini Gapoktan Sidomulyo sudah melakukan kerjasama dengan PT. Swasembada Organik yang merupakan *supplier* beras untuk *Kentucky Fried Chicken* (KFC). Beras produksi Gapoktan Sidomulyo mengisi pasar KFC di wilayah Jabodetabek. Pengiriman beras ke KFC dilakukan 3 kali dalam seminggu dimana setiap kali pengiriman sebanyak 7 ton. Kriteria beras yang ditetapkan : beras premium, minimal 90% beras utuh, presentase patahan maksimal 10%, bebas dari pasir, kerikil, beras hitam. Selain dengan KFC, Gapoktan Sidmulyo juga bekerjasama dengan PT Nestle dengan memasok beras merah dan beras organik ke PT Nestle yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan bubur bayi.

9.2. Pengolahan *Modified Cassava Flour* (MOCAF)

Pengembangan agroindustri tepung lokal sudah dimulai sejak tahun 2009, sampai dengan tahun 2010 telah dihasilkan 65 UPH yang memproduksi 8.125 ton tepung, pada tahun 2011 dihasilkan 23 UPH dengan produksi 2.875 ton, tahun 2012 dihasilkan 32 UPH dengan produksi 4.000 ton tepung, tahun 2013 dihasilkan 56 UPH dengan produksi 7.000 ton. Total kumulatif tepung yang dihasilkan sejak tahun 2009-2013 menjadi 22.000 ton terdiri dari 62 UPH MOCAF (7.750 ton) dan sisanya 134 UPH atau 16.750 ton (tapioka, *cassava*, tepung sagu, tepung ubi jalar). Dengan demikian capaian target kinerja pada tahun 2013 sebesar 40,74%. Guna mencapai target sebesar 54.000 ton pada akhir tahun 2014, maka selama tahun 2014 harus dibangun 256 UPH yang akan menghasilkan produksi sebesar 32.000 ton.



Gambar 83. Pengolahan MOCAF



Pengembangan Agroindustri Perdesaan PENGOLAHAN TEPUNG MOCAF

Kelompok Tani Aster

Alamat: Jl Taruna Rt 12 Rw 6 Desa Sijuk, Kec Sijuk, Kab Belitong. penerima bantuan sarana pengolah tepung pada tahun 2012 yaitu renovasi bangunan dan paket alsintan terdiri dari mesin penyawut, mesin pamarut, mesin pengayak, hummer mill, go back, mesin pengering/*dryer* kabinet, timbangan, mesin jahit karung, *foot sealer*, dan kereta dorong.

Kelompok Aster mengolah MOCAF dengan kapasitas 150 kg per hari, sebagian besar MOCAF ini diserap oleh anggota kelompok sendiri untuk dibuat bermacam-macam kue, pelaku usaha, juga dijual ke pasar tani di Belitong dan Belitong Timur.

9.3. Pengolahan Bahan Olah Karet Rakyat (BOKAR) Bersih

Karet merupakan salah satu komoditi perkebunan strategis, baik untuk sumber devisa negara, kesempatan kerja, pendorong pertumbuhan ekonomi sentra-sentra baru di wilayah sekitar perkebunan karet, maupun pelestarian lingkungan dan sumber daya hayati. Tanaman ini menghasilkan getah karet (lateks) yang dapat diperdagangkan di masyarakat berupa Bahan Olah Karet Rakyat (BOKAR) diantaranya lateks segar, *sit angin*, *sit asap*, *slab*, dan *lump*.

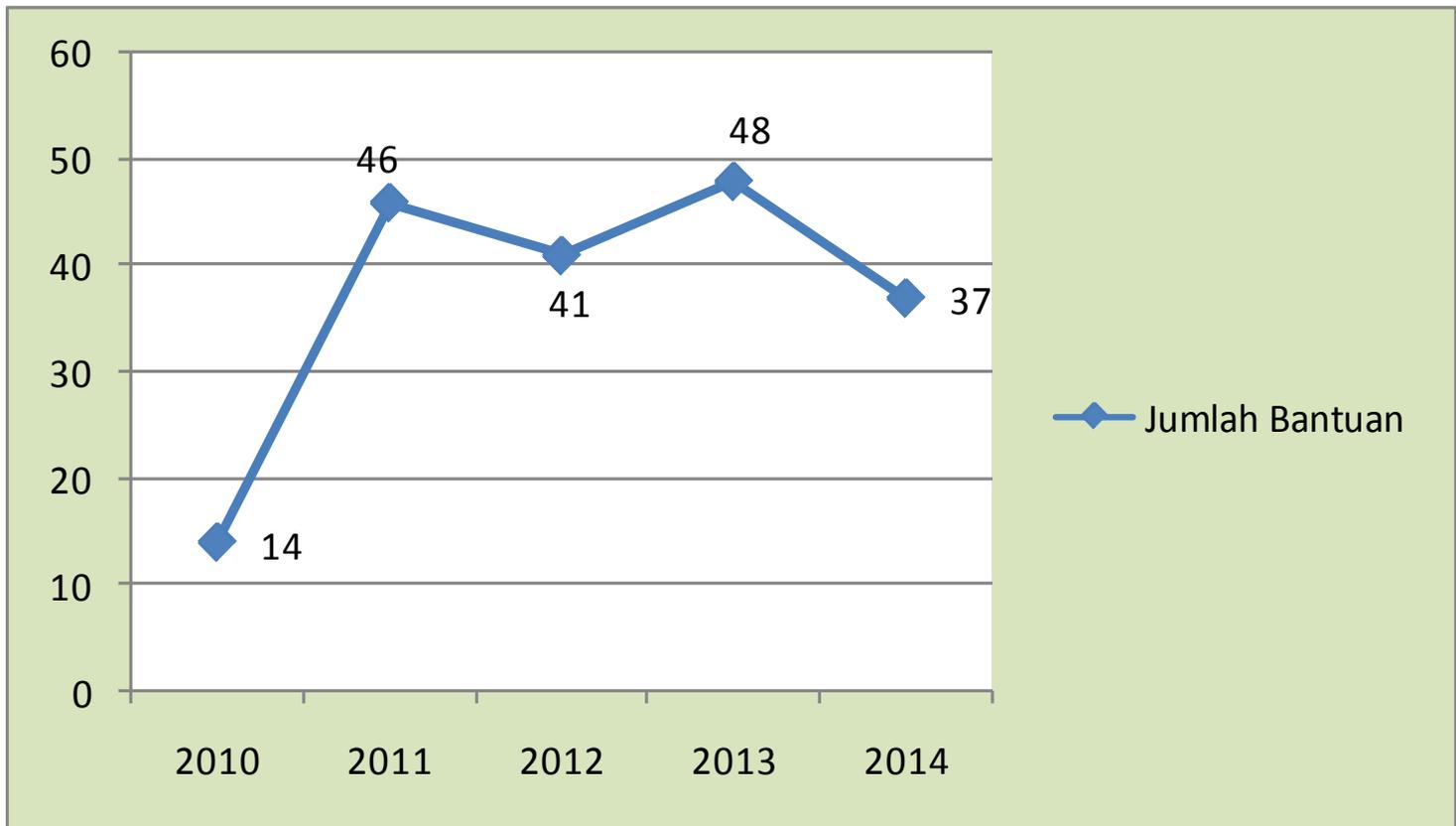


Gambar 84. Komoditas Karet

Untuk menghasilkan BOKAR bersih, Kementerian Pertanian telah melaksanakan upaya sebagai berikut:

1. Fasilitasi Sarana Pengolahan BOKAR Bersih

Fasilitasi bantuan peralatan pengolah BOKAR pada periode 2010-2014 sampai saat ini masih dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian. Pada tahun 2010, jumlah fasilitasi bantuan sebanyak 14 paket, sedangkan pada tahun 2014 jumlahnya meningkat menjadi 37 paket.



Gambar 85. Fasilitasi Bantuan Peralatan Pengolah BOKAR Tahun 2010-2014

2. Menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian tentang BOKAR Bersih

Kementerian Pertanian menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 38/Permentan/OT.149/8/2008 Tentang Pedoman Pengolahan dan Pemasaran Bahan Olah Karet (BOKAR), yang selanjutnya untuk mendukung program BOKAR bersih tersebut, Kementerian Perdagangan menindaklanjuti dengan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan No.53/M-Dag/Per/10/2009 Tentang Pengawasan Mutu Bahan Olah Komoditi Ekspor *Standard Indonesian Rubber* yang Diperdagangkan.

3. Pencanangan “Gerakan Nasional BOKAR Bersih” (GNBB)

Gerakan Nasional BOKAR Bersih (GNBB) merupakan kegiatan yang bersifat nasional, yang bertujuan mewujudkan keinginan maupun cita-cita bersama terhadap produk olah karet yang dikelola, sebagai produk karet yang bersih dan berkualitas sesuai dengan standar/baku mutu baik yang ditetapkan pemerintah dan pasar.

4. Rapat Koordinasi BOKAR Bersih

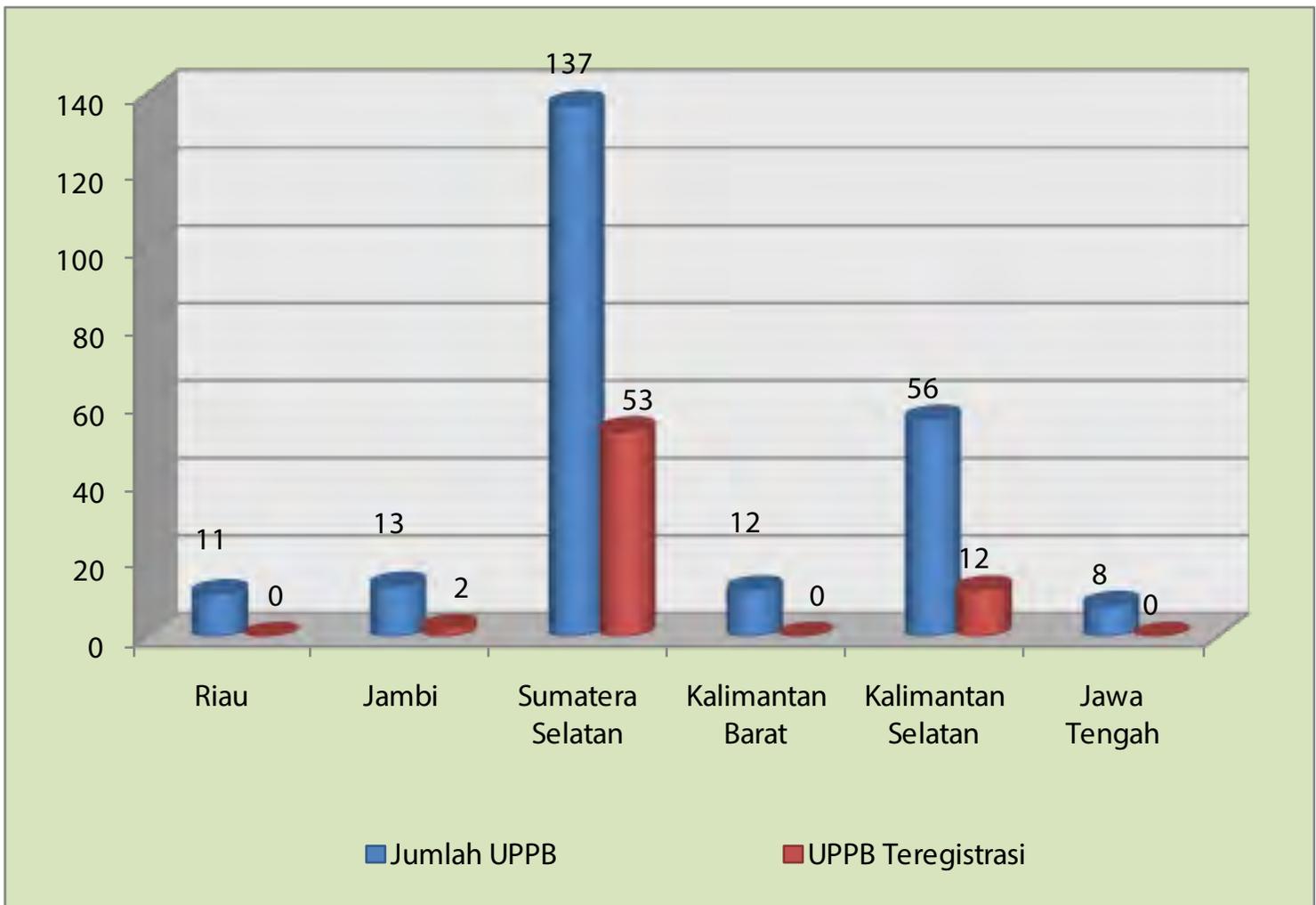
- Diputuskan untuk membuat model Unit Pengolahan dan Pemasaran BOKAR (UPPB) Bersih di 5 Provinsi yang akan dikerjakan secara terintegrasi oleh *stakeholder* terkait, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun swasta. Adapun 5 (lima) provinsi yang dijadikan sentra karet adalah : 1) Riau, 2) Sumatera Selatan, 3) Jambi, 4) Kalimantan Selatan dan 5) Kalimantan Barat.

- Pemerintah daerah diminta untuk menyusun regulasi daerah agar kedua peraturan kementerian dimaksud dapat berjalan efektif di daerah masing-masing.
- Menumbuhkembangkan sekaligus meregistrasi UPPB.

5. Evaluasi Pengolahan BOKAR bersih

Untuk mengevaluasi perkembangan kegiatan terintegrasi di 5 provinsi model, telah dilakukan pertemuan pada tahun 2014 dengan hasil sebagai berikut :

- Perkembangan UPPB saat ini sudah terbentuk sebanyak 237 unit. Dari jumlah tersebut sudah terregistrasi sebanyak 67 unit, yaitu : Sumatera Selatan sebanyak 53 unit, Kalimantan Selatan sebanyak 12 unit, dan Jambi sebanyak 2 unit.



Gambar 86. Pertumbuhan UPPB Sampai Tahun 2014

- Sebagai implementasi Peraturan Menteri Perdagangan No.53/M-Dag/Per/10/2009, saat ini sudah terregistrasi 600 pedagang di Provinsi Kalimantan Selatan.
- Perkembangan penyusunan peraturan daerah terkait BOKAR bersih adalah :
 - Provinsi Kalimantan Selatan menerbitkan Peraturan Daerah.
 - Provinsi Kalimantan Barat menerbitkan Peraturan Gubernur.

Pengembangan Agroindustri Perdesaan PENGOLAHAN BAHAN OLAH KARET (BOKAR)



Unit Pengolahan Pemasaran BOKAR (UPPB) Bangun Sahabat berdiri pada tahun 2011, merupakan salah satu UPPB yang memperoleh fasilitasi bantuan pengolahan BOKAR dari Kementerian Pertanian. Alamat: Desa Mandikapau Timur, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.

Fasilitasi bantuan yang diberikan oleh Kementerian Pertanian berupa gudang saprodi (tahun 2010), Paket sarana pengolahan *sit asap* (tahun 2013) yaitu satu unit alat pengolahan *sit asap*, rumah asap, gudang sortasi dan gudang penyimpanan.

UPPB Bangun Sahabat dapat menghasilkan BOKAR sebanyak 134.212 Kg/bulan. Poduk yang dihasilkan oleh UPPB ini berupa *lump* mangkok dan *sit asap*. Saat ini, *lump* bersih yang dihasilkan petani dibeli oleh UPPB ini dengan harga Rp. 6.000-Rp. 6.500,-/kg. Sedangkan *lump* kotor dihargai oleh pedagang pengumpul dengan harga Rp. 5.000,-/kg. Dengan adanya UPPB ini, petani mendapatkan selisih harga Rp. 1.000-1.500/kg, sehingga pendapatan petani meningkat sekitar 20-30 %. Sementara itu, *sit asap* yang dihasilkan petani dibeli oleh UPPB dengan harga Rp. 20.000/kg. Dengan pengolahan *sit asap* ini, petani pun mendapatkan nilai tambah yang cukup besar.



9.4. Pengolahan Kakao

Berbagai upaya untuk meningkatkan mutu biji kakao telah dilakukan, mulai dari pembinaan budidaya tanaman, penanganan pasca panen dengan penekanan pada perlakuan fermentasi biji kakao serta penerapan sistem jaminan mutu, agar sesuai dengan standar mutu SNI 2323 – 2010 Biji Kakao, mulai dari penyusunan regulasi terkait perkerajaan Indonesia, penyusunan pedoman teknis pengolahan kakao, penguatan kelembagaan petani berbasis agribisnis melalui Sekolah Lapang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (SLPPHP), bimbingan teknis dan pengawalan penanganan pengolahan kakao, penyediaan fasilitator mutu kakao dan pengawas mutu kakao, penyiapan kelembagaan pengawas mutu kakao (Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah) serta fasilitasi sarana dan prasarana pengolahan kakao fermentasi.



Gambar 87. Pengembangan Kakao

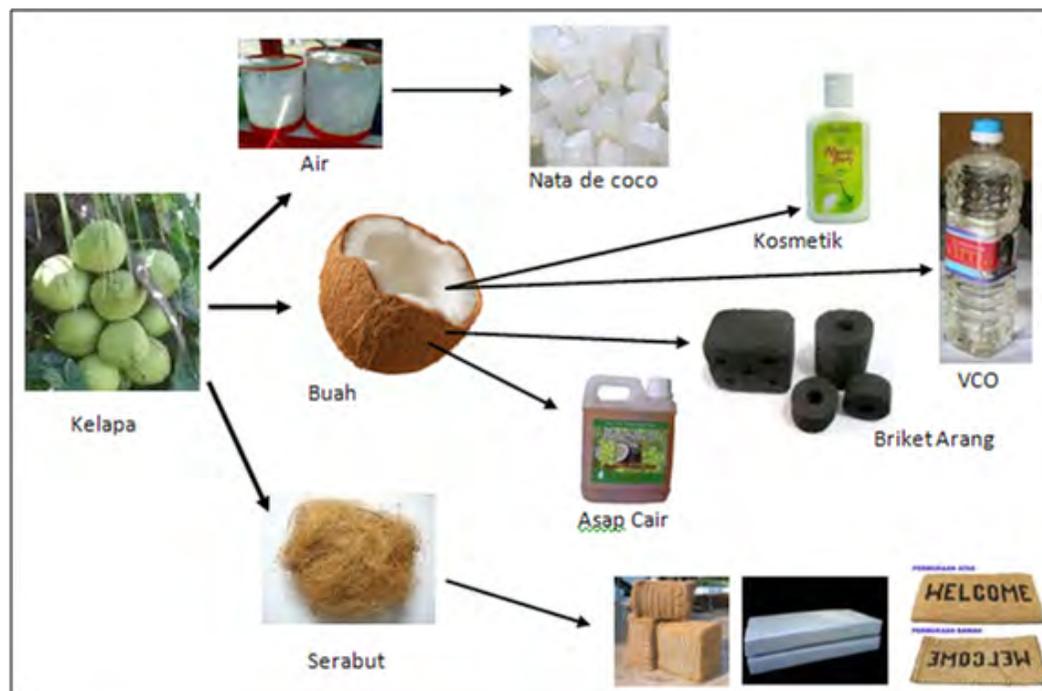
Terkait upaya peningkatan mutu biji kakao tersebut, Kementerian Pertanian pada tahun 2014 sudah mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 67 tahun 2014 tentang Persyaratan Mutu dan Pemasaran Biji Kakao untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah biji kakao Indonesia; mendukung pengembangan industri berbahan baku kakao dalam negeri; memberikan perlindungan pada konsumen dari peredaran biji kakao yang tidak memenuhi persyaratan mutu; meningkatkan pendapatan petani kakao; dan mempermudah penelusuran kembali kemungkinan terjadinya penyimpangan produksi dan peredaran melalui suatu skim yang mudah dan murah namun memiliki tujuan yang sama yaitu menghasilkan biji kakao fermentasi sesuai SNI. Upaya yang telah dilakukan untuk mendukung Peraturan Menteri Pertanian No. 67 tahun 2014 tersebut antara lain melalui analisis kesesuaian mutu biji kakao dengan SNI, serta pengalokasian dana dekonsentrasi untuk pembinaan kepada ketua kelompok petani/pelaku usaha kakao, pembina dan pengawas mutu di beberapa daerah sentra produksi kakao Indonesia dalam bentuk *capacity building* pengujian mutu kakao sesuai SNI.



Gambar 88. Proses Pengolahan Kakao Fermentasi

9.5. Pengolahan Kelapa

Potensi komoditi kelapa Indonesia sangat besar, yang ditandai dengan luasan perkebunan kelapa yang cukup besar, yaitu sekitar 3,712 juta Ha. Sebagian besar merupakan perkebunan rakyat yaitu 3.585.792 Ha (96,6 %) sisanya milik negara yaitu 4,669 (0,7 %) dan swasta yaitu 66,189 Ha (2,7 %). Oleh karena itu agroindustri kelapa memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan. Pengembangan Agroindustri Kelapa sebagai sumber minyak nabati, sumber pendapatan bagi keluarga petani, sumber devisa negara, penyedia lapangan kerja, pemicu dan pemacu pertumbuhan sentra-sentra ekonomi baru, serta sebagai pendorong tumbuh dan berkembangnya industri hilir berbasis minyak kelapa dan produk ikutannya di Indonesia.



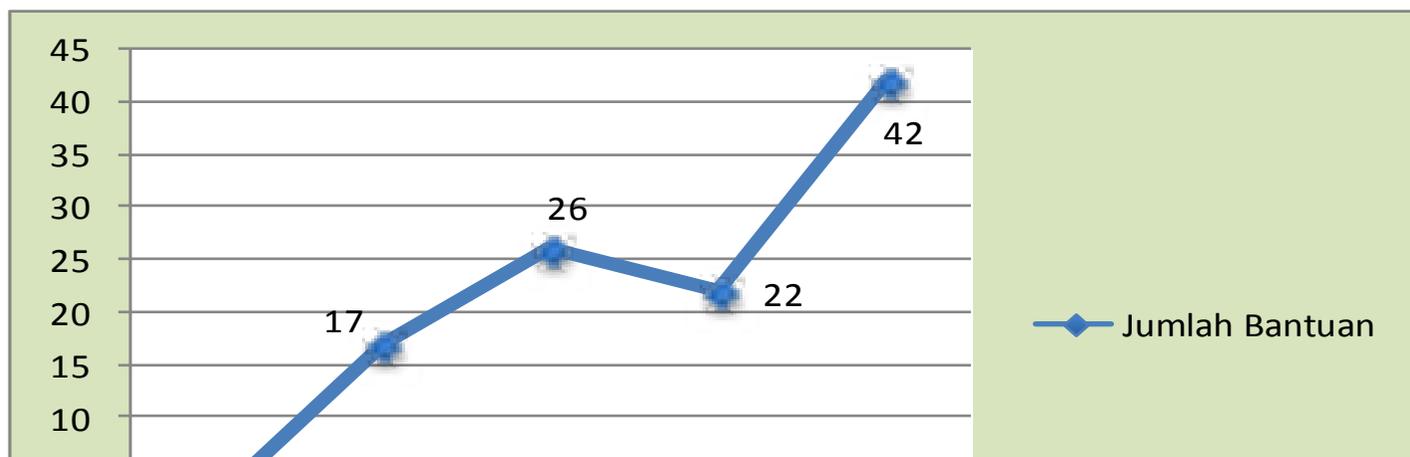
Gambar 90. Produk Olahan Kelapa

Sekitar 65 % produksi kelapa di Indonesia digunakan untuk memenuhi kebutuhan domestik, sisanya diekspor dalam bentuk kelapa butir dan olahan. Dengan mengembangkan agroindustri pedesaan berbasis kelapa dapat meningkatkan nilai tambah ditingkat petani melalui pengolahan produk utama berbentuk VCO, Minyak Goreng, ataupun produk sampingnya seperti *Nata de Coco*, Asap Cair, Sabut dan Arang aktif/Briket. Daya saing produk kelapa dan turunannya pada saat ini terletak pada industri hilirnya, tidak lagi pada produk primer, di mana nilai tambah (*added value*) dalam negeri yang dapat tercipta pada produk hilir dapat berlipat ganda daripada produk primernya. Usaha produk hilir saat ini terus berkembang dan memiliki kelayakan yang tinggi baik untuk usaha kecil, menengah maupun besar. Pada gilirannya industri hilir menjadi lokomotif industri hulu. Peluang dalam usaha agribisnis perkelapaan mencakup beberapa hal yang berkaitan dengan aspek teknis, ekonomis, ekologis, dan politik antara lain pangsa pasar dunia yang relatif mapan untuk produk minyak kelapa dan kecenderungan harga minyak kelapa lebih stabil dibandingkan dengan CPO. Potensi untuk pengembangan produk (*product development*) cukup luas dan terbuka, sehingga akan memperluas segmen pasar. Lahan diantara pertanaman kelapa berpotensi untuk diversifikasi usaha, sehingga pengembangan cabang usaha tani lainnya dalam areal yang sama akan dapat meningkatkan produktivitas usahatani. Tersedianya teknologi tepat guna, baik pada subsistem hulu, *on farm*, dan hilir (benih/bibit unggul lokal, sistem usaha tani yang lebih efisien, pengolahan kelapa terpadu, dan lain sebagainya), yang dapat mendukung usaha diversifikasi produk, sekaligus meningkatkan efisiensi pemanfaatan bahan olah (*zero waste*), dan membuka peluang bagi petani untuk mendapatkan nilai tambah.

Dari komoditi kelapa, selain dagingnya, ada pula kelapa yang diambil niranya untuk diolah menjadi gula kelapa. Usaha pengolahan gula kelapa ini cukup berkembang pesat di Indonesia. Adapun strategi dan langkah untuk mewujudkan agroindustri kelapa adalah dengan:

(1) Fasilitasi Alat dan Mesin Pengolahan Hasil Kelapa.

Jumlah fasilitasi alat dan mesin yang telah dilaksanakan Kementerian Pertanian hingga saat ini untuk pengolahan kelapa, baik produk utama maupun produk samping dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 91. Fasilitasi Bantuan Peralatan Pengolahan Kelapa Tahun 2010-2014

(2) Bimbingan Teknis Agroindustri Kelapa.

Kegiatan bimbingan teknis bertujuan untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan dalam penanganan dan pengolahan yang baik dan benar pada industri pengolahan berbasis kelompok yang menjadi cikal bakal kontribusi untuk memasuki pasar bebas *ASEAN Economic Community* (AEC) 2015.



Gambar 92. Proses Produksi Gula Kelapa

Pengembangan Agroindustri Perdesaan **PENGOLAHAN GULA KELAPA**

Dengan masuknya bantuan dari Pemerintah Daerah dan Kementerian Pertanian pada tahun 2012, berupa peralatan dan gedung penyimpanan kepada Gapoktan Legen Ardi Raharja, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, perajin gula di Banyumas mempunyai posisi tawar karena mampu meningkatkan kualitas gulanya.

Melalui penyaluran bantuan mesin pengolah dari pemerintah, petani penderes gula dapat meningkatkan pendapatannya, melalui inovasi baru berupa pembuatan gula kelapa kristal.

Pada awalnya harga gula kelapa hanya Rp. 5000/kg, namun dengan mengolahnya menjadi gula kristal, harganya mencapai Rp. 9000/kg. Produksi gula kelapa asal Banyumas ini bisa mencapai sebesar 172.742,76 kg/hari pada tahun 2013. Produk gula kelapa kristal ini tidak hanya dipasarkan di dalam negeri, namun sudah diekspor ke Singapura, Jepang, Korea, Belanda, Jerman, Timur Tengah dan AS. Gula jenis ini banyak diminati di luar negeri, khususnya Jerman dan Jepang untuk industri perhotelan, supermarket, dan juga pabrik kecap.

(3) Fasilitasi kemitraan dengan pelaku usaha swasta di bidang perkelapaan.

Pengembangan UPH, teknologi dan pemasaran merupakan hal yang sangat menentukan. Untuk itu Kementerian Pertanian telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) antara unit-unit hasil pengolahan agroindustri kelapa di Jawa Tengah (Kabupaten Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Kebumen dan Purworejo) dengan *PT. The Improvement* sebagai mitra pengembangan teknologi dengan pendekatan *zero waste* dan dengan *CV. Sumber Rejeki* sebagai mitra pemasaran.



Pengembangan Agroindustri Perdesaan PENGOLAHAN GULA KELAPA

KUB Tiwi Manunggal berlokasi di Kabupaten Kulonprogo, D.I. Yogyakarta. Mendapat bantuan fasilitasi dari Kementerian Pertanian berupa peralatan dan bangunan penyimpanan.

Pada awalnya kelompok ini terdiri dari 10 pengepul gula kelapa yang berorientasi pada penjualan saja. Dengan pengolahan gula Kristal ini, maka tenaga kerja yang terserap semakin banyak. Pada saat ini kelompok ini memiliki anggota 110 orang yang terdiri dari 10 unit usaha. Produk gula kelapa KUB Tiwi Manunggal saat ini sudah memiliki nilai jual yang tinggi, karena telah memiliki sertifikat organik.

Saat ini produk gula kristal yang dihasilkan mencapai 15 ton per bulan dan sebagian besar produk di ekspor ke berbagai negara.

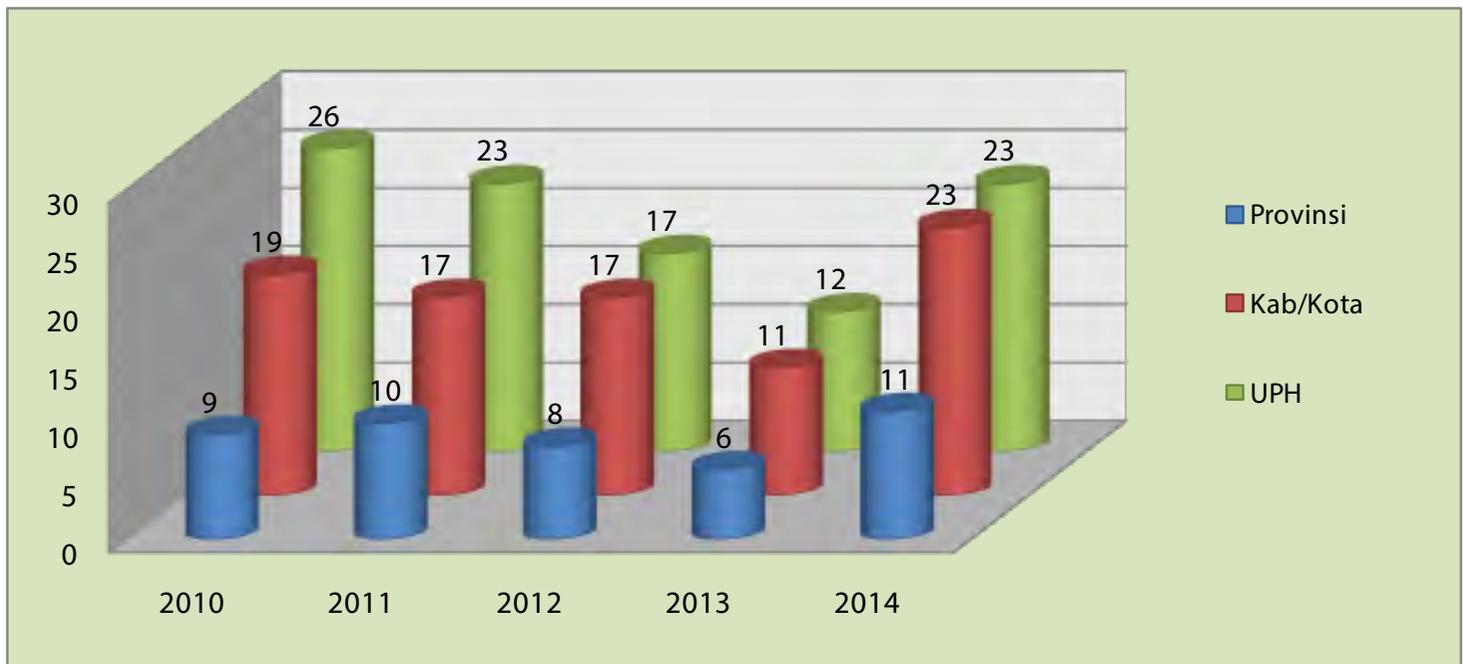
9.6. Pengolahan Susu

Menghadapi persaingan global khususnya *Asean Economic Community (AEC) 2015*, peningkatan daya saing susu menjadi sangat penting disamping juga mendorong berbagai sumber daya lokal yang dapat mensubstitusi produk susu impor. Daerah sentra produksi susu sapi seperti Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat dengan total kontribusi terhadap produksi susu sapi nasional sebesar 98% menempatkan agroindustri susu di perdesaan sebagai suatu gerakan nasional yang melibatkan seluruh lembaga pemerintah dan non pemerintah, para pakar, lembaga masyarakat serta praktisi bisnis. Untuk daerah di luar Jawa yang memiliki potensi pengembangan pakan dan modal, yang memiliki potensi ternak perah lainnya seperti kerbau, kambing dan kuda terus dikembangkan untuk meningkatkan produksi susu nasional.



Gambar 93. Menteri Pertanian dan Wakil Menteri Pertanian pada acara Hari Susu Nusantara 2014 di Makassar

Dalam upaya mendukung pengembangan usaha persusuan, Kementerian Pertanian pada tahun 2010-2014 telah memberikan fasilitasi teknologi peralatan pengolahan susu kepada kelompok/gabungan kelompok peternak sebanyak 101 Unit Pengolahan Hasil (UPH) tersebar 87 Kabupaten/Kota di 33 provinsi di seluruh Indonesia, berupa peralatan pengolahan susu *pasteurisasi*, *yoghurt*, keju, es krim, kerupuk susu, *steak* susu, sabun susu, permen/karamel susu, dodol susu dan peralatan pendukungnya seperti *cooling* unit, peralatan uji kualitas susu, *transfer tank* dan lain-lain.



Gambar 94. Penyebaran Fasilitas Peralatan Pengolahan Susu Tahun 2010-2014

Pengembangan Agroindustri Perdesaan PENGOLAHAN SUSU

Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)
Sejahtera dan LKM Mikro Sejahtera

Alamat: Cimangkok, Kab Sukabumi, Jawa Barat. Unit-unit usaha yang dikelola:

1. **Unit produksi susu segar**, Aset yang dikelola -> Sapi perah 400 ekor, dengan usaha yang dihasilkan: Susu segar, Makanan ternak (konsentrat dan hijauan), Pelayanan teknis kesehatan hewan
2. **Unit simpan pinjam**, dengan usaha yang yang dikelol: Tabungan, Usaha simpan pinjam
3. **Unit Usaha Otonom (UO) Warung Serba Ada** menjual: Obat-obatan, Sembako
4. **Unit pengolahan hasil**, dengan usaha yang dihasilkan: Susu *pasteurisasi*, Yoghurt, Karamel, Produk olahan susu lainnya dengan merek HASMILK



Pengembangan Agroindustri Perdesaan PENGOLAHAN SUSU

KUPS Serba Susu Lembang dibentuk pada tahun 2009. Dengan jumlah tenaga kerja 25 orang.
Jenis usaha : peternakan sapi perah, pengolahan susu, dan pemasaran hasil olahan susu.

Kelompok ini bergerak di bidang usaha pengolahan pangan berbahan baku susu dengan merek dagang SERBA SUSU LEMBANG, dengan produk yang dihasilkan antara lain:

kolostrum, susu *pasteurisasi* literan/botolan, *yoghurt* botol, es krim susu/es krim *yoghurt*/es mambo *yoghurt*, permen susu, dodol susu, nougat susu, kerupuk susu/rempeyek susu/stik susu, *pie* susu, puding susu, *klapertaart*, donat susu/nastar susu/bagelen.

Dalam perjalanan usahanya, KUPS Serba Susu Lembang telah berhasil menoreh sejumlah prestasi dan penghargaan baik tingkat provinsi maupun tingkat nasional, diantaranya:

- Peringkat 1 inovasi pemasaran hasil peternakan tingkat provinsi Jawa Barat
- Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara tingkat Nasional
- Penghargaan produk pertanian berdaya saing 2013 (peringkat 3 besar nasional kategori inovasi produk pertanian)
- Penghargaan produk pertanian berdaya saing 2013 (peringkat 3 besar nasional kategori inovasi pemasaran peternakan)



BAB X. PENERAPAN *GOOD AGRICULTURAL PRACTICES (GAP)*

Sektor pertanian dapat dijadikan basis pengembangan ekonomi rakyat yang berpotensi tinggi dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas (*growth with equity*). Sumber-sumber pertumbuhan pertanian ke depan dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi permintaan (*demand side*) dan sisi penawaran (*supply side*). Sumber pertumbuhan pertanian dari sisi permintaan ditentukan oleh jumlah penduduk dan laju pertumbuhan, pendapatan, preferensi konsumen, serta tumbuhnya pasar modern dan pasar tradisional. Produk-produk pertanian yang sebagian merupakan produk bernilai ekonomi tinggi (*high value products*) seperti produk beras berkualitas (beras premium, beras kepala, dan beras kristal), produk-produk perkebunan beserta produk turunannya, produk-produk hortikultura, produk-produk peternakan, maka semakin tinggi pendapatan semakin tinggi pula permintaan terhadap produk-produk pertanian berkualitas tersebut. Upaya peningkatan daya saing produk-produk pertanian dapat dilakukan melalui penerapan *Good Agricultural Practices (GAP)*.



Gambar 95. Menteri Pertanian Beserta Istri Meninjau Kebun Jeruk

10.1. Meningkatkan Daya Saing Melalui GAP

Untuk meningkatkan produktivitas, menekan kehilangan hasil, dan memperbaiki mutu produk-produk pertanian berkualitas dapat dilakukan dengan penerapan GAP. Sebagai ilustrasi peningkatan produktivitas dan mutu hasil beras untuk menghasilkan produk berkualitas

dilakukan dengan menerapkan sistem manajemen mutu melalui proses GAP, GPHP (*Good Post Harvesting Practices*) dan GMP (*Good Manufacturing Practices*) untuk menghasilkan produk-produk pertanian berkualitas.

10.2. Mengembangkan Produk Pertanian Ramah Lingkungan

Pendekatan pembangunan *Green Agriculture* atau pertanian berkelanjutan atau berwawasan lingkungan, salah satunya adalah penerapan sistem pertanian organik. Ada berbagai alasan pertanian organik menjadi kebijakan pertanian unggulan atau pendekatan penghidupan berkelanjutan diantaranya: perbaikan sumber daya alam, perbaikan sumber daya sosial, perbaikan sumber daya ekonomi, dan perbaikan sumber daya infrastruktur.



Gambar 96. Contoh Produk Pertanian Organik

Seiring dengan meningkatnya luas lahan pertanian organik di Indonesia, perkembangan produksi dan pemasaran produk pertanian organik di Indonesia juga mengalami peningkatan. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian telah mencanangkan program *Go Organic 2010* dengan slogan *Back to Nature*. Perkembangan ini ditandai dengan semakin banyaknya model pemasaran alternatif di berbagai kota yang menjual produk organik dan organisasi non-pemerintah pendamping petani yang mengembangkan pertanian organik, kelompok petani, atau perusahaan swasta yang bergerak di pertanian organik. Perkembangan permintaan akan produk pertanian organik di Indonesia setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan.

(1) Lembaga Sertifikasi Organik (LSO)

Seiring dengan makin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pangan organik, diperlukan ketersediaan pangan organik yang sudah disertifikasi. Dalam rangka penerapan pangan organik dilakukan pembinaan dengan cara melaksanakan sosialisasi Standar Nasional Indonesia (SNI) Sistem Pangan Organik, bimbingan teknis kepada pelaku usaha, pendampingan penyusunan dokumen mutu dan penerapannya, audit internal, monitoring dan evaluasi. Sebagai pedoman pelaksanaan pengembangan pangan organik telah disusun regulasi teknis pengawasan pangan organik dan pedoman sistem penjaminan organik. Pelaku usaha yang telah menerapkan sistem pangan organik, disertifikasi oleh LSO dan berhak untuk mendapatkan sertifikasi sebagai bukti penerapan sistem pangan organik dan juga berhak menggunakan logo pangan organik. Sampai dengan tahun 2013 telah terbentuk 8 LSO yang telah diverifikasi oleh Otoritas Kompeten Pangan Organik (OKPO), yaitu: PT Sucofindo International Certification Services, PT Mutu Agung Lestari, LeSOS, PERSADA, LSO Sumatera Barat, INOFICE, BIOCert Indonesia; dan *Sustainable Development Services* (SDS).

(2) Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO)

Terkait dengan pengembangan kelapa sawit nasional sebagai pertanian ramah lingkungan, hal terpenting adalah bagaimana meningkatkan kredibilitas produk sawit dari sisi pengelolaan sistem keberlanjutan (*sustainability*). Seiring dengan hal itu, saat ini telah diperkenalkan prinsip dan kriteria *Roundtable Sustainable Palm Oil* (RSPO).



Gambar 97.

Menteri Pertanian menghadiri acara Konferensi Internasional Kelapa Sawit 2014 di Bali

Puluhan perusahaan di Indonesia mendapat sertifikasi RSPO, walaupun sifat pemenuhan RSPO adalah sukarela (*voluntary*). RSPO merupakan standar yang dibuat berdasarkan kesepakatan/*roundtable* para pemangku kepentingan seperti konsumen, produsen dan LSM lingkungan internasional. RSPO yang bersekretariat di Kuala Lumpur, Malaysia, menjadi wadah komunikasi para pihak berkepentingan untuk menyamakan persepsi tentang konsep keberlanjutan (*sustainability*).

(3) *Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO)*

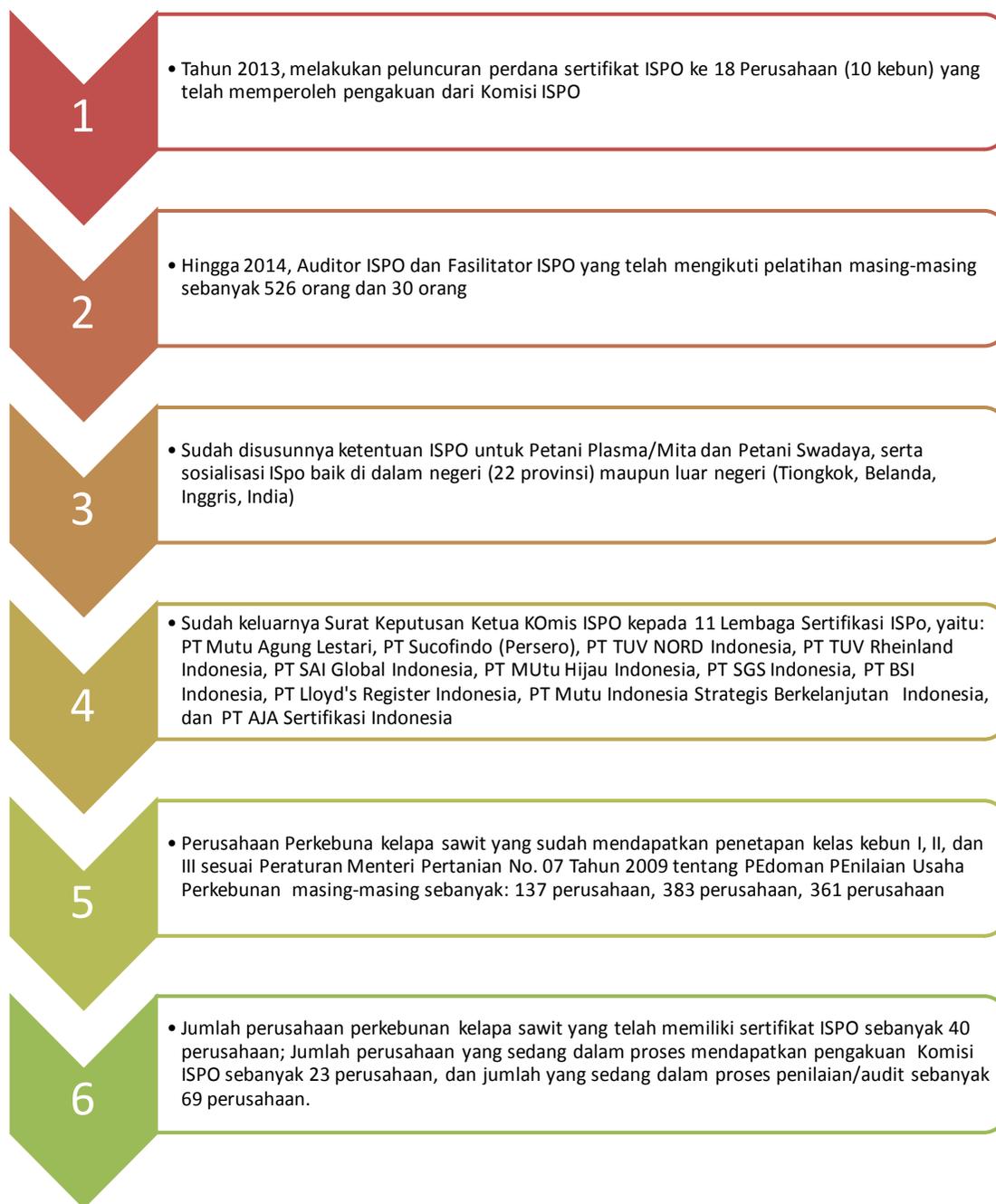
Prinsip dan kriteria ISPO muncul sebagai inisiatif dari pemerintah atas kesadaran/deklarasi bahwa pengelolaan sumberdaya alam termasuk perkebunan kelapa sawit harus dilakukan secara berkelanjutan (*sustainable*). Secara garis besar, pedoman ISPO didasarkan pada 4 hal, yaitu kepatuhan hukum, kelayakan usaha, pengelolaan lingkungan dan hubungan sosial.



Gambar 98. Petani Kelapa Sawit

Kunci utama suksesnya implementasi ISPO adalah komitmen pemilik/*top manajemen* perkebunan. Memenuhi kewajiban menerapkan ISPO sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian No. 19//Permentan/OT.140/3/2011 tentang ISPO untuk perusahaan perkebunan, bahwa Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit dalam waktu paling lambat sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 harus sudah melaksanakan usaha sesuai dengan ketentuan Peraturan ISPO.

Terkait percepatan implementasi ISPO tersebut, Kementerian Pertanian sejak tahun 2010-2014 telah melaksanakan berbagai upaya seperti ditunjukkan berikut:



Gambar 99. Upaya Percepatan Implementasi ISPO 2010-2014

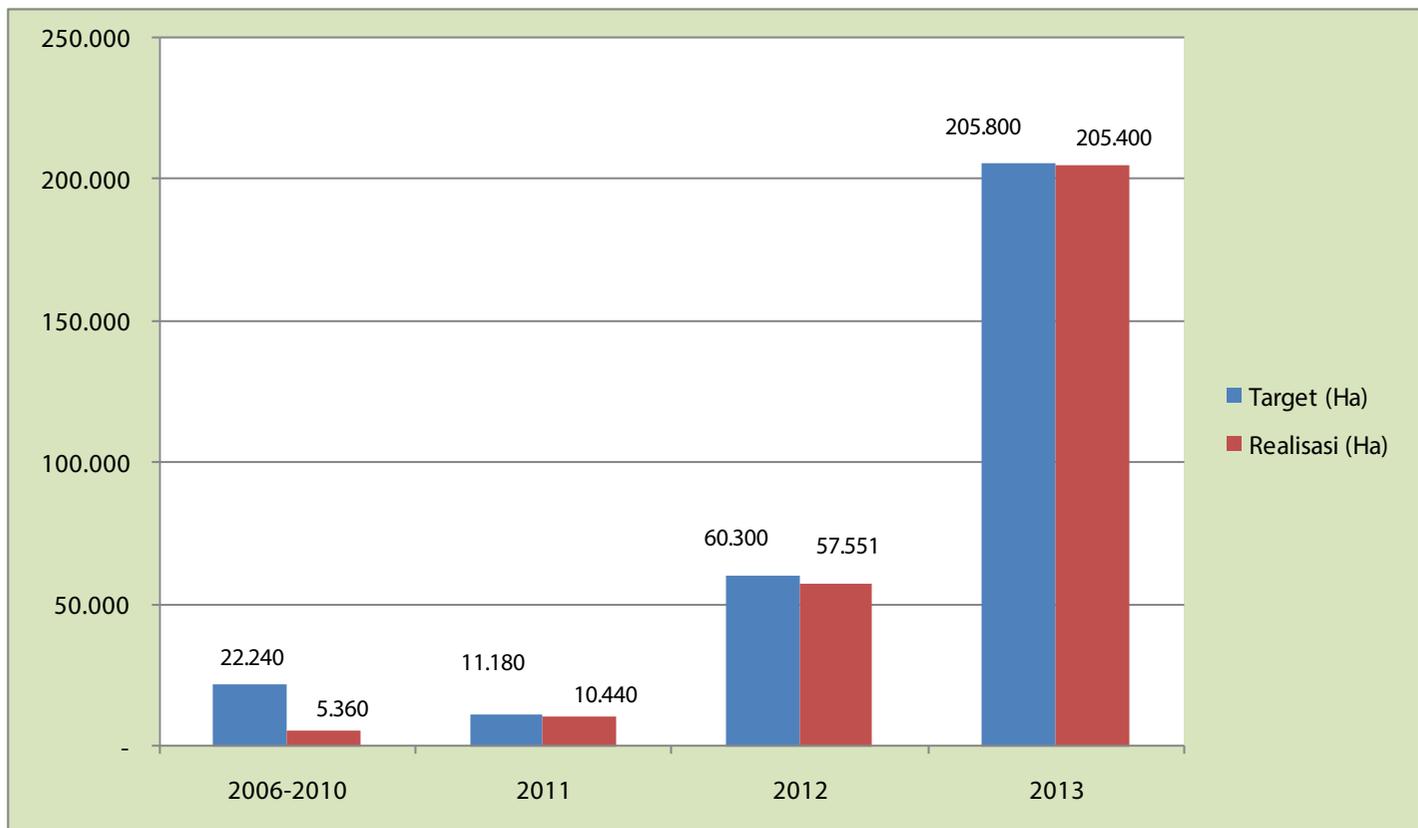
(4) Pengembangan *System of Rice Intensification* (SRI)

Metode SRI merupakan teknik budidaya padi yang mengubah cara penanaman, pengelolaan tanah, air dan unsur hara dalam tanah. Dari berbagai hasil penelitian, ternyata perubahan cara tanam dengan SRI dapat meningkatkan hasil produksi sekaligus dapat menghemat benih dan juga hemat air.



Gambar 100. Prinsip Dasar *System of Rice Intensification* (SRI)

Beberapa kelebihan dalam bertanam padi melalui metode SRI: (1) hemat waktu karena ditanam bibit muda sehingga waktu panen lebih awal; (2) hemat biaya kebutuhan benih karena tidak membutuhkan biaya pencabutan bibit sehingga mengurangi tenaga dan biaya tanam; (3) jarak penanaman yang lebar, minimal 25 x 25 cm, satu bibit per titik; (4) penghematan sarana produksi (saprodi) padi karena hanya ditanam 1 lubang 1 bibit; (5) tanaman hemat air dengan pola pengairan berselang dan macak-macak; (6) produksi meningkat; (7) ramah lingkungan karena tidak menggunakan bahan kimia dan digantikan dengan menggunakan pupuk organik dan pestisida nabati sehingga unsur hara tanah dapat mengalami perbaikan; (8) harga jual lebih mahal dari beras anorganik.



Gambar 101. Target dan Realisasi Pengembangan Metode SRI 2006-2013

Selama periode tahun 2006-2010 kegiatan Pengembangan Metode SRI telah terealisasi 5.360 Ha. Pada Tahun 2011, Pengembangan Metode SRI terealisasi seluas 10.440 Ha. Pada tahun 2012 terealisasi seluas 57.551 Ha. Dan pada tahun 2013 terealisasi sebesar 205.400 Ha.



Keberhasilan Metode *System of Rice Intensification (SRI)*

Desa Wanasari, Tabanan, Bali mendapatkan bantuan SRI Tahun Anggaran 2013 sebanyak 3 paket atau 60 Ha. Hasil panen meningkat dari sebelum menggunakan SRI, sebelum menggunakan SRI hasil panen (GKP) sebesar 7,2 ton/Ha, setelah menggunakan SRI meningkat menjadi 8,82 ton/Ha. Replikasi kegiatan SRI sudah dilakukan dengan swadana dari petani, Subak Gunggungun pun mau melanjutkan dengan SRI walaupun tidak mendapat bantuan dari Kementerian Pertanian. Seiring dengan meningkatnya hasil panen padi, maka kesejahteraan petani juga meningkat.



Komunitas Ngawi *Organic Center* (KNOC)

Komunitas Ngawi *Organic Center* (KNOC) telah berhasil melakukan ekspor padi organik dari kegiatan penanaman padi menggunakan metode SRI. Hasil SRI merupakan padi yang ramah lingkungan karena tidak menggunakan bahan kimia dan digantikan dengan menggunakan pupuk organik dan pestisida nabati.

(5) Pengendalian Hama Terpadu

Pengendalian Hama Terpadu (PHT) atau *Integrated Pest Management* (IPM) menjadi amanat Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman sebagai jiwa perlindungan tanaman, sedangkan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) ramah lingkungan menjadi amanah Undang-Undang No. 13 tahun 2010 tentang Hortikultura. Pengendalian OPT yang ramah lingkungan merujuk kepada penggunaan sarana hortikultura yang pengelolaannya haruslah ramah lingkungan.



Gambar 102. Menteri Pertanian Memanen Cabai

Konsep PHT merupakan komponen integral dari sistem pertanian berkelanjutan yang tujuannya bukan hanya mengendalikan populasi hama saja, tetapi juga meningkatkan produksi dan kualitas produksi serta meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan petani.

Dalam upaya perlindungan tanaman dan pengamanan produksi tanaman pangan dari gangguan OPT dan Dampak Perubahan Iklim (DPI), Kementerian Pertanian telah melaksanakan kegiatan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) dan Sekolah Lapang Iklim (SLI) secara berkelanjutan.

Prinsip pelaksanaan SLPHT dan SLI

Melakukan pemberdayaan petani dan mampu merubah perilaku menuju perilaku yang lebih baik dalam melakukan budidaya tanaman sehat dengan memanfaatkan musuh alami dan agensia hayati dalam pelaksanaan SLPHT serta pemanfaatan informasi iklim dalam pelaksanaan SLI, sehingga petani dapat menjadi mandiri.



Pelaksanaan SLPHT pada Kelompok Tani Pangudi Bogo

Kelompok tani Pangudi Bogo beralamat di Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali merupakan salah satu kelompok tani alumni SLPHT yang telah berhasil mengembangkan kegiatan PHT. Beberapa upaya pemasyarakatan PHT yang dilakukan yaitu berupa penyebaran informasi teknologi melalui jaringan kelompok tani serta pelatihan-pelatihan/magang yang diadakan oleh kelompok.



Para petani binaan kelompok Pangudi Bogo telah merasakan manfaat dari hasil pengembangan PHT, baik itu teknologi, sarana produksi (pupuk organik) maupun kelembagaan kelompok yang semakin solid. Pada bulan Oktober tahun 2011 sudah mendapatkan sertifikasi organik dan pendapatan petani meningkat, karena beras organik yang dihasilkan dijual langsung ke konsumen sehingga dapat memutus rantai pemasaran. Selain itu produk beras organik yang dihasilkan sudah mampu menembus pasar ekspor ke Belgia.

Pengembangan PHT di Pangudi Bogo terbukti meningkatkan nilai tambah bagi petani, karena sarana produksi yang merupakan komponen utama dalam berusaha tani dapat dibuat sendiri oleh kelompok. Sedangkan hasil yang berupa produk Beras Organik didistribusikan langsung ke konsumen lokal, dan diekspor ke Belgia melalui Asosiasi Petani Padi Organik Boyolali (APPOLI). Kelompok Tani Pangudi Bogo juga berperan sebagai lumbung pangan yang dapat menampung hasil panen petani. Dampak positif lainnya adalah meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pola hidup back to nature, sehingga permintaan produk Beras Organik meningkat dan petani semakin bersemangat.

10.3. Meningkatkan Keamanan Pangan

Sesuai dengan kewenangan Kementerian Pertanian yang diamanatkan dalam PP No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Pangan, Mutu dan Gizi Pangan, Menteri Pertanian berwenang mengatur, membina dan/atau mengawasi kegiatan atau proses produksi pangan dan peredaran pangan segar. Untuk itu berbagai aspek perlu dipersiapkan dalam rangka membangun sistem keamanan pangan tersebut, antara lain aspek kelembagaan yang berfungsi melaksanakan pengawasan keamanan pangan terhadap produk segar hasil pertanian baik tingkat pusat maupun daerah.

Infrastruktur mutu yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar hasil pertanian adalah Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat dan Daerah (OKKP-P/OKKP-D), Otoritas Kompeten Pertanian Organik (OKPO) dan Laboratorium Penguji.

(1) Otoritas Kompeten Keamanan Pangan (OKKP Pusat dan OKKP Daerah)

Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat (OKKP-P) sesuai Peraturan Menteri Pertanian nomor 20/Permentan/OT.140/2/2010 berkedudukan pada Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian. OKKP-P menjalankan tugas dan fungsi sesuai yang diamanahkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan. Dalam penerapannya OKKP-P menjabarkan amanah tersebut dengan melaksanakan tugas Verifikasi Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D), pendaftaran pangan segar asal luar negeri/PL yang beredar, Sertifikasi Prima 1 dan Sistem Mutu HACCP.

Kelembagaan OKKP-D dibentuk dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur di 33 Provinsi di Indonesia. OKKP-D dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga pengawas produk segar hasil pertanian setelah diverifikasi kelayakan dan kompetensinya oleh OKKP-P, yang artinya dapat melakukan penilaian sertifikasi, registrasi, pemberian rekomendasi keamanan pangan sesuai standar acuan.

(2) Otoritas Kompeten Pertanian Organik (OKPO)

Otoritas Kompeten Pangan Organik (OKPO) adalah institusi pemerintah yang mempunyai kewenangan atau kekuatan untuk melakukan pengawasan pangan segar organik yang dimasukkan dan/atau beredar di wilayah Indonesia. OKPO berada di bawah Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, diketuai oleh Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.

Merujuk pada Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) No. HK.00.06.52.0100 tahun 2008 tentang Pengawasan Pangan Olahan Organik, maka untuk setiap izin edar Merek Luar (ML) produk olahan organik impor harus melampirkan rekomendasi *Jaminan Integritas Produk Organik* (JIPO) yang dikeluarkan oleh OKPO. Sejak tahun 2009 sampai tahun 2014 OKPO telah menerbitkan 106 rekomendasi JIPO.

Tabel 23. Daftar Produk Olahan Organik Impor yang Mendapat Rekomendasi OKPO Tahun 2010-2014

No	Komoditas	Tahun					Total
		2010	2011	2012	2013	2014	
1	Susu dan Olahannya	2	2	1	4	5	18
2	Sari kedelai	-	-	1	-	-	1
3	Teh	-	2	-	2	-	5
4	Kopi	-	-	1	1	-	2
5	Jus	1	4	1	1	1	10
6	Bubur instan	-	1	-	1	-	4
7	Bubur bayi	2	1	-	1	-	5
8	Pasta	1	-	2	2	1	7
9	Cuka (apel, balsem)	1	0	2	1	2	8
10	Madu	-	2	1	1	-	6
11	Sereal	-	1	2	1	3	12
12	Kismis	-	1	-	-	1	2
13	Mie gandum	-	1	-	-	-	1
14	Minyak (kelapa sawit, ikan, zaitun)	2	-	2	2	2	10
15	Rempah-rempahan	-	-	1	-	-	2
16	Penyedap rasa	1	-	-	-	-	2
17	<i>Snack</i>	-	1	1	-	1	3
Total		10	16	15	17	16	106



Unit Pelayanan Perizinan Terpadu

"Pelayanan OKKP-D dalam Pemberian Sertifikasi Prima dan pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan"



Penghargaan Ketahanan Pangan 2010 sebagai Lembaga Pengawas Mutu OKKP-D Berprestasi

Gambar 103. Capaian Pelaksanaan Kegiatan OKKP-D

Tabel 24. Keragaan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Tahun 2010-2014

No	Otoritas Kompeten Keamanan Pangan (OKKP)	Nomor Verifikasi	Hasil Kinerja						RE
			Prima		Registrasi				
			2	3	PD	PL	RK		
I. Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat (OKKP-P)									
	OKKP-Pusat	--	--	--	143	28	12	--	
II. Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D)									
A. Sudah Verifikasi									
1	OKKP-D Provinsi D.I. Yogyakarta	OKKP-P-LSP-001	3	35	22	--	--	--	
2	OKKP-D Provinsi Jawa Tengah	OKKP-P-LSP-002	1	41	36	--	--	--	
3	OKKP-D Provinsi Jawa Timur	OKKP-PLSP-003	--	79	99	--	1	279	
4	OKKP-D Provinsi Sulawesi Selatan	OKKP-P-LSP-004	1	11	45	--	--	--	
5	OKKP-D Provinsi Kalimantan Selatan	OKKP-P-LSP-005	--	3	--	--	--	--	
6	OKKP-D Provinsi Bangka Belitung	OKKP-P-LSP-006	--	7	--	--	--	--	
7	OKKP-D Provinsi Lampung	OKKP-P-LSP-007	--	48	2	--	--	--	
8	OKKP-D Provinsi Sumatera Utara	OKKP-P-LSP-008	--	11	--	--	--	--	
9	OKKP-D Provinsi Jambi	OKKP-P-LSP-009	--	15	--	--	--	--	
10	OKKP-D Provinsi Jawa Barat	OKKP-P-LSP-010	--	147	106	--	--	--	
11	OKKP-D Provinsi Sumatera Barat	OKKP-P-LSP-011	--	100	2	--	--	--	
12	OKKP-D Provinsi Sumatera Selatan	OKKP-P-LSP-012	--	6	--	--	--	--	
13	OKKP-D Provinsi Riau	OKKP-P-LSP-013	--	6	--	--	--	--	
14	OKKP-D Provinsi Nusa Tenggara Barat	OKKP-P-LSP-014	--	18	--	--	--	--	
15	OKKP-D Provinsi Sulawesi Tengah	OKKP-P-LSP-015	--	10	--	--	--	--	
16	OKKP-D Provinsi Banten	OKKP-P-LSP-016	--	4	--	--	--	--	
17	OKKP-D Provinsi Nusa Tenggara Timur	OKKP-P-LSP-017	--	4	--	--	--	--	
18	OKKP-D Provinsi Bali	OKKP-P-LSP-018	--	8	--	--	--	--	
19	OKKP-D Provinsi Kalimantan Timur	OKKP-P-LSP-019	--	13	--	--	--	--	
20	OKKP-D Provinsi Bengkulu	OKKP-P-LSP-020	--	7	--	--	--	--	
21	OKKP-D Kalimantan Tengah	OKKP-P-LSP-021	--	2	--	--	--	--	
22	OKKP-D Sulawesi Tenggara	OKKP-P-LSP-022	--	2	--	--	--	--	
B. Tahap Proses Verifikasi									
Sebanyak 6 OKKP-D (OKKP-D DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Gorontalo, dan Maluku)									
C. Tahap Persiapan Verifikasi									
Sebanyak 5 OKKP-D (OKKP-D Aceh, Kepulauan Riau, Maluku Utara, Papua Barat dan Papua)									

Keterangan:

PD : Produk Dalam

PL : Produk Luar

RK: Rumah Kemas

RE : Rekomendasi Ekspor

Catatan:

- 23 OKKP-D berada pada Badan Ketahanan Pangan Daerah dan 10 pada Dinas Pertanian Provinsi;
- 7 OKKP-D telah menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas/Badan (OKKP-D Sumatera Barat, Lampung, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara), 4 OKKP-D dalam persiapan menjadi UPTB/D.

(3) Laboratorium Pengujian

Laboratorium pengujian adalah instansi/lembaga yang dilengkapi dengan peralatan dan bahan-bahan berdasarkan metode keilmuan tertentu untuk melakukan percobaan ilmiah, penelitian, praktek pembelajaran, kegiatan pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi bahan tertentu.

Tabel 25. Laboratorium Pengujian Berdasarkan Ruang Lingkup Pengujian

No	Laboratorium	Status Laboratorium		Jumlah	Keterangan
		Akreditasi	Belum Akreditasi		
1	Residu Pestisida	19	4	23	1 laboratorium proses akreditasi
2	Logam berat	7	1	8	-
3	Mikotoksin	7	1	8	1 laboratorium proses akreditasi
4	Mikrobiologi	25	70	95	4 laboratorium proses akreditasi

Dalam persiapan menghadapi harmonisasi pangan (*prepared foodstuff*) ASEAN, maka ASEAN Consultative Committee on Standard Quality-Product Working Group on Prepared Foodstuff (ACCSQ-PFPWG) telah menyepakati akan membentuk *Asean Food Reference Laboratory* (AFRL) yang berfungsi sebagai laboratorium acuan untuk pengujian produk pangan di ASEAN. Untuk mendukung pembentukan AFRL, Indonesia telah berkomitmen membentuk jejaring laboratorium pengujian produk pangan dengan laboratorium di beberapa Kementerian dalam wadah *Jejaring Laboratorium Pengujian Pangan Indonesia* (JLPPI).

JLPPI menjadi sebuah forum yang memadukan kemampuan seluruh laboratorium pengujian pangan dalam negeri untuk mendukung perdagangan pangan nasional, regional, dan global, serta mendukung kesiapan laboratorium pengujian pangan menghadapi pasar. JLPPI terdiri dari jejaring laboratorium Kementerian Pertanian, jejaring laboratorium Kementerian Perindustrian, jejaring laboratorium Kementerian Perdagangan, jejaring laboratorium Kementerian Kelautan dan Perikanan, jejaring laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan serta jejaring laboratorium swasta.

Menindaklanjuti hal tersebut Kementerian Pertanian membentuk Jejaring Laboratorium Pengujian Pangan Lingkup Kementerian Pertanian yang terdiri atas jejaring laboratorium Badan Litbang Pertanian, jejaring laboratorium Ditjen Tanaman Pangan, jejaring laboratorium Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, jejaring laboratorium Ditjen Perkebunan dan jejaring laboratorium Badan Karantina Pertanian. Peningkatan kompetensi personel laboratorium dapat mendukung pencapaian status akreditasi dari laboratorium sehingga laboratorium menjadi kompeten dan kredibel. Kredibilitas laboratorium sangat diperlukan dalam hal:

- Validitas hasil uji suatu produk lebih terjamin

- Membatasi masuknya produk segar hasil pertanian ke Indonesia
- Membendung agresifitas negara lain melalui persyaratan kandungan residu pestisida minimal pada produk unggulan nasional.

Tabel 26. Laboratorium Pengujian Lingkup Eselon I Kementerian Pertanian

No	Laboratorium	Status Laboratorium		Jumlah	Keterangan
		Akreditasi	Belum Akreditasi		
1	Tanaman Pangan dan Hortikultura	25	110	135	-
2	Perkebunan	3	38	41	-
3	Peternakan	18	137	155	3 laboratorium proses akreditasi
4	Badan Karantina Pertanian	10	41	51	2 laboratorium proses akreditasi
5	Badan Litbang Pertanian	35	134	169	13 laboratorium proses akreditasi
Total		91	460	551	18 laboratorium proses akreditasi

Fungsi laboratorium pengujian antara lain: menghapus hambatan non tarif melalui data hasil pengujian, menghindari pengulangan pengujian, memberikan kepastian keamanan pangan produk hasil pertanian. Sampai tahun 2014 ada 551 laboratorium laboratorium pengujian yang terdapat di Kementerian Pertanian, dengan rincian: 91 laboratorium sudah akreditasi dan 460 belum akreditasi (18 laboratorium dalam proses akreditasi).

10.4. Mengembangkan GAP Untuk Keberlanjutan Pertanian

Kementerian Pertanian dalam kurun waktu 2010-2014 telah mengimplementasi berbagai strategi pembangunan pertanian dalam rangka mencapai pembangunan pertanian berkelanjutan, melalui upaya peningkatan produksi, produktivitas, mutu dan nilai mutu pada berbagai kawasan pengembangan dengan penerapan budidaya pertanian yang baik (*Good Agricultural Practices=GAP*) serta penerapan *Standard Operational Procedure (SOP)*. Penerapan GAP oleh Kementerian Pertanian selama ini memiliki multi tujuan yang ingin dicapai, diantaranya adalah : (a) pencapaian produksi yang ditargetkan pada semua sub sektor termasuk tanaman pangan, perkebunan, peternakan, hortikultura, (b) memenuhi kualitas produksi yang diharapkan yang sesuai dengan standar yang dipersyaratkan secara nasional maupun internasional, misalnya kandungan pengawet, pewarna, zat aditif, (c) memenuhi standar proses yang tidak menyebabkan eksternalitas terhadap lingkungan, misalnya menggunakan standar *organic product, standard SOP (ISO, ISPO, LCA)*.



Gambar 104. Penerapan GAP Tanaman Sayuran dan Buah di Kebun Percobaan Berastagi, Badan Litbang Pertanian

Oleh karena itu, penerapan GAP disektor pertanian telah dilakukan mulai dari *on farm* yaitu penerapan teknik budidaya usahatani, pada proses pengolahan yang menghasilkan produk berkualitas dan ramah lingkungan, serta pada tahap pasca panen. Tujuan akhir dari penerapan GAP di Kementerian Pertanian juga diselaraskan dengan upaya swasembada berkelanjutan baik untuk beras, jagung, kedelai, gula, daging sapi, hortikultura, dan peningkatan daya saing komoditas pertanian.

(1) Penerapan GAP Dalam Upaya Swasembada Beras Berkelanjutan

Penerapan GAP dan SOP dalam rangka upaya-upaya yang dilakukan dalam mencapai sasaran produksi padi antara lain melalui:

- Penciptaan varietas benih unggul bermutu, di mana telah dilepas varietas padi sebanyak 36 varietas (padi hibrida 8 varietas, padi sawah 8 varietas dan padi gogo 4 varietas, dan lainnya). Juga telah dilakukan introduksi varietas benih unggul padi baru sebanyak 7 varietas dan penerapan berbagai paket teknologi spesifik lokasi.
- Pelaksanaan Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Tepadu telah dilakukan pada 124.898 kelompok tani dengan cakupan areal 2,8 juta hektar, lebih tinggi dari kegiatan SL-PTT tahun 2010 yang dilakukan pada 112 ribu kelompok tani dengan cakupan areal 2,5 juta hektar dan penerapan Integrasi Tanaman Padi dan Ternak (SITT) dalam rangka peningkatan produksi padi dengan mengembalikan kondisi lahan sawah dengan memasukkan pupuk organik dari ternak.
- Penyaluran pupuk bersubsidi sebanyak 9,75 juta ton (lebih tinggi dibandingkan tahun 2010 sebesar 9,48 juta ton) dan penyaluran bantuan benih unggul bermutu padi tahun 2011 sebesar 65.054 ton untuk pertanaman seluas 2,64 juta hektar (lebih tinggi dibandingkan tahun 2010 sebesar 61.976 ton untuk pertanaman seluas 2,61 juta hektar).
- Penyaluran Cadangan Benih Nasional (CBN) padi tahun 2011 sebanyak 28.998 ton untuk pertanaman seluas 880 ribu hektar (lebih tinggi dibandingkan tahun 2010 sebesar 6.328 ton untuk pertanaman seluas 253 ribu hektar).
- Pengendalian serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) padi, di mana luas areal yang

terserang hanya 666,30 ribu hektar, lebih kecil dibandingkan tahun 2010 seluas 682,7 ribu hektar. Aspek GAP yang digunakan adalah dengan menerapkan OPT dengan menggunakan agen hayati yang ada dilokasi setempat, sehingga diharapkan kondisi lingkungan dan keseimbangan alam tetap terjaga.

- Upaya intensifikasi melalui gerakan peningkatan produksi pangan berbasis korporasi (GP3K) yang dilaksanakan oleh BUMN seluas 570 ribu hektar.
- Perluasan areal pertanaman padi melalui pencetakan lahan sawah seluas 49.646 hektar, peningkatan indeks pertanaman padi melalui *System of Rice Intensification* (SRI) sebanyak 599 paket, pengembangan jaringan irigasi untuk mengairi areal seluas 238.854 hektar, dan pengembangan mekanisasi melalui penyebaran alat dan mesin pertanian (618 unit traktor dan 380 unit pompa air serta penguatan Unit Pelayanan Jasa Alsintan/UPJA sebanyak 2.517 paket).
- Penurunan kehilangan hasil telah dilakukan bantuan sarana pasca panen sebanyak 423 unit, terdiri dari *power thresher*, *paddy mower*, *dryer* dan alat lainnya.
- Penyuluhan dan pendampingan telah dilakukan fasilitasi operasional penyuluh kepada 51.167 tenaga penyuluh serta menggerakkan tenaga pendamping/pengawasan teknologi pada sebagian besar (60 %) lokasi SL-PTT.

(2) Penerapan GAP Dalam Upaya Swasembada Kedelai



Gambar 105. Menteri Pertanian Melakukan Panen Raya Kedelai 2013 di Kabupaten Lombok Tengah, NTB

Penerapan GAP terkait dengan upaya swasembada kedelai adalah penerapan teknologi dan SOP dalam kerangka penciptaan dan penelitian varietas unggul, dimana telah dihasilkan lebih dari 11 varietas unggul baru kedelai dengan jumlah logistik benih kedelai lebih dari 16,3 ton benih sumber. SOP penyediaan logistik benih kedelai diterapkan dengan model pendekatan Jalur Benih Antar Lapang dan Antar Musim (JABALSIM).

(3) Penerapan GAP Dalam Upaya Swasembada Gula dan Produksi Perkebunan

Dalam upaya peningkatan dan swasembada gula, Kementerian Pertanian telah berupaya menerapkan GAP dan SOP, terutama pada penyiapan bibit tebu yang unggul dan berkualitas, melalui teknik perbanyak mata calon bibit unggul melalui pembangunan Kebun Bibit Desa (KBD) dalam rangka menerapkan teknik bongkar ratoon. Selain itu, teknologi mekanisasinya juga telah diterapkan untuk mempercepat pelaksanaan program tersebut. Penyediaan bibit unggul melalui pembangunan KBD tebu seluas 760 hektar, perluasan areal tanaman tebu rakyat 2.043 hektar, demplot penerapan teknologi budidaya double kinerja tebu 205 hektar, pemberdayaan petani tebu (pelatihan) untuk 129 kelompok tani, penataan varietas dan pengembangan warung tebu masing-masing 32 hektar. Selain itu melalui dana guliran telah dilakukan bongkar ratoon kebun tebu rakyat dengan dana yang dimanfaatkan sebesar Rp. 369 miliar.



Gambar 106. Menteri Pertanian melakukan pencaanangan Model Percepatan Penerapan Teknologi Tebu Terpadu (MP2T3) 2013 di Pati, Jawa Tengah.

Penerapan GAP pada Tanaman Tebu JURING GANDA MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS DAN RENDEMEN TEBU



Penerapan sistem tanam juring ganda mampu meningkatkan produktivitas sebesar 83,8% dari sistem tanam juring tunggal sebagai akibat adanya peningkatan faktor juring pada juring ganda pkp rapat, jumlah batang per m juring sebesar 62,7% (terutama pada perlakuan bibit ganda) dan bobot batang per tanaman sebesar 7,8% (Tabel 1). Peningkatan jumlah batang per m juring pada sistem tanam juring ganda terjadi sebagai akibat adanya penggunaan jumlah bibit bagal dua kali lipat dari sistem tanam juring tunggal. Adapun peningkatan bobot batang per tanaman disebabkan oleh adanya peningkatan panjang batang sebesar 2,7% dan bobot per meter batang sebesar 4,9% akibat penerapan sistem tanam juring ganda.

Peningkatan panjang batang dan bobot per meter batang disebabkan oleh adanya peningkatan distribusi cahaya dalam tajuk sebesar 20,1% dari sistem tanam juring tunggal. Peningkatan distribusi cahaya dalam tajuk tersebut berpengaruh terhadap peningkatan laju fotosintesis kanopi tanaman sehingga akumulasi bahan

kering semakin tinggi. Kondisi yang demikian menyebabkan bobot batang per tanaman yang dihasilkan sistem tanam juring ganda lebih besar dibandingkan dengan sistem tanam juring tunggal.

(4) Penerapan GAP Dalam Upaya Swasembada Daging Sapi

Pada upaya pencapaian swasembada daging sapi, GAP juga dilaksanakan pada salah satu kegiatan peningkatan produksi daging sapi lokal, diantaranya adalah:

- pengaturan pengendalian impor,
- perbaikan distribusi sapi dari daerah produsen ke konsumen,
- penyelamatan sapi betina produktif,
- Optimalisasi Rumah Potong Hewan,
- Optimalisasi inseminasi buatan dan kawin alam,
- Penanganan gangguan reproduksi, dan
- Peningkatan produktivitas melalui penerapan *Good Farming Practices* (GFP) dan tunda potong. Untuk akselerasi peningkatan produksi daging sapi tahun 2011, telah diterbitkan 25/Permentan/OT.140/4/2011 tentang Unit Manajemen Program Swasembada Daging Sapi dan Kerbau 2014.



Gambar 107. Menteri Pertanian meninjau peternakan sapi

(5) Penerapan GAP Dalam Upaya Peningkatan Produksi Hortikultura

Upaya untuk meningkatkan produksi melalui *demand driven* adalah meningkatkan posisi tawar komoditas hortikultura untuk pasar internasional, misalnya manggis, mangga, bawang merah, cabe merah dan anggrek. Upaya-upaya yang dilaksanakan dalam pengembangan manggis dan mangga antara lain melalui perbaikan mutu melalui penerapan *Good Agricultural Practices* (GAP), registrasi kebun dan Sekolah Lapang GAP (SL-GAP). Pedoman budidaya yang baik atau GAP adalah standar yang diterapkan dalam budidaya hortikultura, mencakup perbaikan proses produksi menjadi ramah lingkungan, peningkatan kualitas produksi sesuai standar, penelusuran balik (*traceability*) dan peningkatan daya saing. Penerapan GAP dinyatakan dengan pemberian nomor registrasi sesuai hasil penilaian pada kebun/lahan usaha. Untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan GAP dilakukan Sekolah Lapang GAP di lokasi kawasan hortikultura.



Salah satu lokasi pelaksanaan GAP hortikultura, khususnya dalam komoditas tanaman obat adalah pengembangan kawasan tanaman obat oleh Gapoktan Kemuning Jaya di Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kementerian Pertanian memberikan fasilitasi sarana budidaya dan pasca panen tanaman obat kepada Gapoktan. Melalui penerapan GAP, menunjukkan adanya peningkatan kualitas hasil produksi tanaman obat yang dihasilkan oleh gapoktan, usaha tani yang ramah lingkungan serta berdaya saing. Gapoktan Kemuning Jaya saat ini telah menjalin kemitraan dengan PT. Soho Industri Farmasi melalui penangkaran benih dan pengolahan tanaman obat menjadi produk olahan tanaman obat siap konsumsi yang sudah mendapat ijin dari Badan POM.

PENGEMBANGAN JERUK SIEM MADU VARIETAS GUNUNG OMEH



Untuk menumbuhkan serta mengembangkan kawasan-kawasan pengembangan Jeruk, Kementerian Pertanian telah memfasilitasi dana APBN di sentra-sentra utama Jeruk. Salah satu sentra Pengembangan Jeruk adalah Kabupaten Agam (Sumatera Barat).

Datuk Bandaro Manih dengan kelompok tani Amanah yang dipimpinya, merupakan salah satu kelompok tani yang berhasil dalam pengembangan komoditas Jeruk khususnya Jeruk Siem Madu varietas Gunung Omeh. Kelompok Tani Amanah yang dipimpinya menerima penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara dari Presiden Republik Indonesia tahun 2013. Kelompok Tani Amanah berlokasi di Jorong Koto Gadang Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam.

Total Area Pengembangan Jeruk di Lereng Gunung Merapi sampai dengan tahun 2013 sudah mencapai 47 Ha dikembangkan secara organik dengan memanfaatkan kompos dari ternak sapi dan kambing. Jeruk Siem Organik yang diproduksi oleh Kelompok Tani ini mempunyai pangsa pasar khusus keluarga dokter dengan kebutuhan rata-rata 40-50 kg/minggu yang dibeli dengan harga Rp. 25.000/kg.

Budidaya Tanaman Jeruk sudah menerapkan GAP/ SOP. Saat ini sudah 18 Kebun Jeruk yang memperoleh registrasi kebun GAP dari pemerintah dengan luas 10,85 Ha dan memperoleh prima 3 dari OKKPD. Produksi Jeruk Kelompok Tani Amanah saat ini sebanyak 18,5 Ton tahun 2011 dan 30 Ton tahun 2012 dengan produktivitas 15-25 kg/ pohon.

Penerapan GAP Dalam Upaya Peningkatan Produksi Salak

GAP PENGEMBANGAN KEBUN SALAK

Salah satu keberhasilan pelaksanaan SL GAP dapat dilihat dari keberhasilan pengembangan kebun salak di Kabupaten Sleman. Varietas salak yang dikembangkan di sentra ini adalah Pondoh, Gading, Manggala dan Madu. Lokasi sentra pengembangan salak di Kecamatan Tempel, Turi dan Pakem. Kabupaten Sleman telah bermitra dengan eksportir untuk memenuhi pasar ekspor khususnya Cina. Petani salak di Kabupaten Sleman telah bermitra dengan PT. Agung Mustika Selaras, PT. Escorindo Jasa Prima dan CV. Sumber Buah. Dampak yang diperoleh dari pengembangan sentra salak yaitu: a) Berkembangnya usaha agribisnis salak pondoh berupa pembibitan, produksi dan pemasaran; b) Berkembangnya usaha pengolahan; dan c) Berkembangnya usaha pendukung seperti kios saprodi, peralatan panen dan pasca panen (pengemasan) dan jasa transportasi.

Haji Musrin merupakan champion dalam pengembangan komoditas Salak untuk mendukung ketahanan pangan di Indonesia. Beliau menerima penghargaan ketahanan pangan dari Presiden Republik Indonesia. Beliau juga menerima penghargaan dari Presiden Republik Indonesia untuk kategori kelompok usaha terbaik. Lokasi Pertanaman Salak Haji Musrin dan Kelompok taninya dilaksanakan di Dusun Trumpon, Desa Merdikorejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Untuk mengembangkan usahanya Pak Musrin dan kelompok taninya disamping membudidayakan serta memasarkan salak pondoh juga menjalankan usaha budidaya ikan dan unggas dan bermitra dengan telkomsel untuk pengembangan internet serta usaha travel wisata untuk pengembangan wisata agro salak pondoh.

Kinerja yang telah dilaksanakan di lokasi pengembangan salak antara lain: a) Registrasi kebun dan sertifikasi Prima, kelompok tani sudah berkembang dengan baik dan telah bergerak ke arah pemasaran; b) perencanaan produksi; c) pencatatan budidaya (*traceability*); dan d) *packing house* yang diregistrasi. Penerapan SOP dan registrasi juga telah dilakukan.

Kebun salak yang telah diregistrasi tersebut telah memenuhi persyaratan telah menerapkan prinsip – prinsip GAP terutama pada aspek keamanan pangan dan sistem pencatatan yang memungkinkan dilakukannya penelusuran balik/ *traceability*.



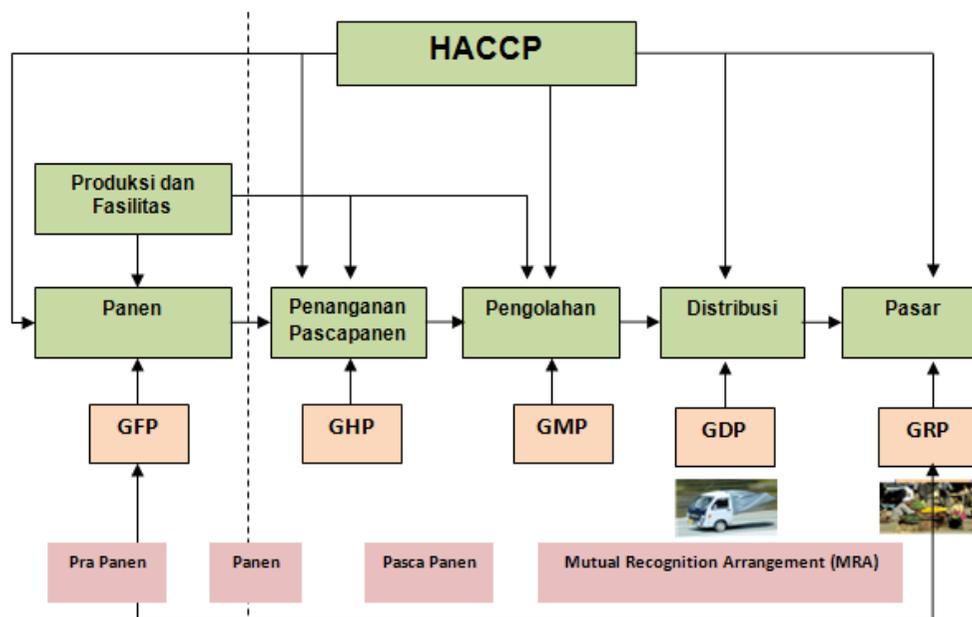
(6) Penerapan Good Manufacturing Practices (GMP)



Gambar 108. Menteri Pertanian meninjau industri benih padi bersertifikat

Penggilingan padi merupakan titik sentral dari agroindustri padi. Penerapan sistem manajemen mutu melalui *Good Manufacturing Practices* (GMP) pada penggilingan padi terpadu berguna untuk menjaga konsistensi produksi, mutu dan efisiensi proses penggilingan padi, sehingga dapat menghasilkan produk beras berlabel SNI untuk jaminan mutu dan ekspor. *Good manufacturing Practices* (GMP) yang diterapkan dalam model agroindustri padi terpadu yang dibangun di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan mengikuti skema pada **Gambar 109**, Penerapan sistem manajemen mutu dengan *Good manufacturing Practices* (GMP) pada penggilingan padi terpadu mengacu kepada SNI 19.9001-2001 dan metodologi PDCA (*Plan-Do-Check-Action*), sedangkan bahan bakunya diperoleh dari budidaya yang menerapkan GAP dan penanganan pasca panennya menerapkan

GHP. *Launching* inovasi Model Agroindustri Padi Terpadu dilakukan pada tahun 2003 bersama Bupati Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Selanjutnya pada tahun 2012, model ini dikembangkan di Sulawesi Selatan oleh Gubernur Sulawesi Selatan di Kabupaten Pinrang.



Gambar 109. Penerapan sistem manajemen mutu dengan *Good Manufacturing Practices* (GMP) pada penggilingan padi terpadu

11.1. Meningkatkan Akses Petani Terhadap Pasar

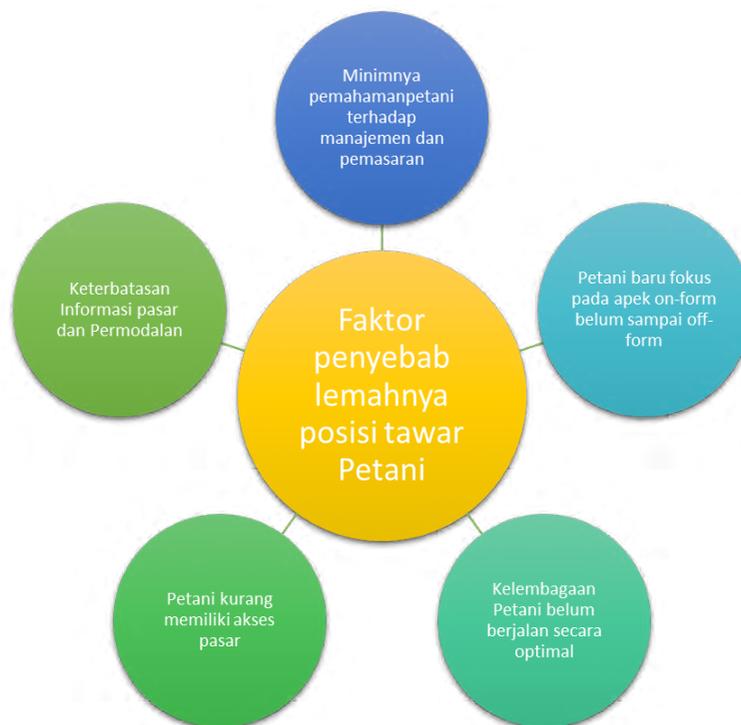
Bagi dunia pertanian Indonesia saat ini, penerapan konsep pemasaran adalah hal yang harus dilakukan baik untuk produk segar maupun produk olahannya dan berlaku untuk semua komoditas baik tanaman pangan, hortikultura, perkebunan maupun peternakan. Penerapan konsep pemasaran dilakukan dalam rangka menghadapi tantangan global dan memberikan tingkat kesejahteraan yang semakin baik bagi pelaku ekonomi yang terlibat di dalamnya. Khusus untuk pemasaran domestik hasil pertanian beberapa hal telah diidentifikasi sebagai kebutuhan yang perlu disusun langkah aksinya agar pemasaran hasil pertanian menjadi lebih transparan, berkeadilan akhirnya lebih berpihak kepada produsen yang umumnya merupakan kantong kemiskinan rakyat Indonesia. Hal-hal tersebut antara lain mencakup perlu adanya kebijakan harga dan tataniaga bagi komoditas strategis, adanya upaya pengembangan pasar dan promosi komoditas unggulan yang prospektif, penyediaan sarana dan pengembangan kelembagaan pasar sehingga pasar produsen semakin modern dan akses kepada pasar yang lebih luas, adanya pengembangan kerjasama dan kemitraan baik antar pelaku maupun dalam kawasan, terakhir perlunya dukungan analisis dan informasi pasar yang memberikan nilai tambah bagi pelaku yang berbasis pada teknologi informasi yang semakin maju.



Gambar 110. Menteri Pertanian Beserta Menteri Perdagangan Berdialog dengan Petani Bawang Merah

Permasalahan mendasar yang sering dihadapi oleh petani/kelompok tani saat ini adalah

lemahnya posisi tawar petani. Faktor penyebab lemahnya posisi tawar petani dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 111. Faktor Penyebab Lemahnya Posisi Tawar Petani

Terkait hal tersebut, salah satu solusi krusial yang perlu ditempuh dalam mengatasi permasalahan di atas adalah melalui revitalisasi peran kelembagaan petani, antara lain: kelompok tani/gabungan kelompok tani, lembaga tenaga kerja, kelembagaan input, kelembagaan output, kelembagaan penyuluh dan kelembagaan permodalan. Melalui revitalisasi peran kelembagaan petani, para petani dapat dikoordinir dan dihimpun dalam satu wadah untuk membangun gerakan ekonomi, menyusun rencana produksi terpadu, serta menyusun rencana pemasaran terpadu, sehingga posisi tawar petani dapat meningkat serta dapat menunjang aktivitas pembangunan pertanian di perdesaan. Upaya meningkatkan posisi tawar petani dapat dilakukan melalui upaya berikut:

- Menghimpun petani dalam satu wadah gerakan ekonomi, dengan upaya penghimpunan modal, produksi, dan pemasaran.
- Penyusunan rencana produksi terpadu dengan upaya: penghematan biaya dalam pemenuhan faktor produksi dan kemudahan dalam pengelolaan produksi.
- Penyusunan rencana pemasaran produk pertanian terpadu, dengan upaya: menigkis jaringan tengkulak yang menekan posisi tawar petani dalam penentuan harga.

11.2. Mengembangkan Jejaring Pasar Domestik

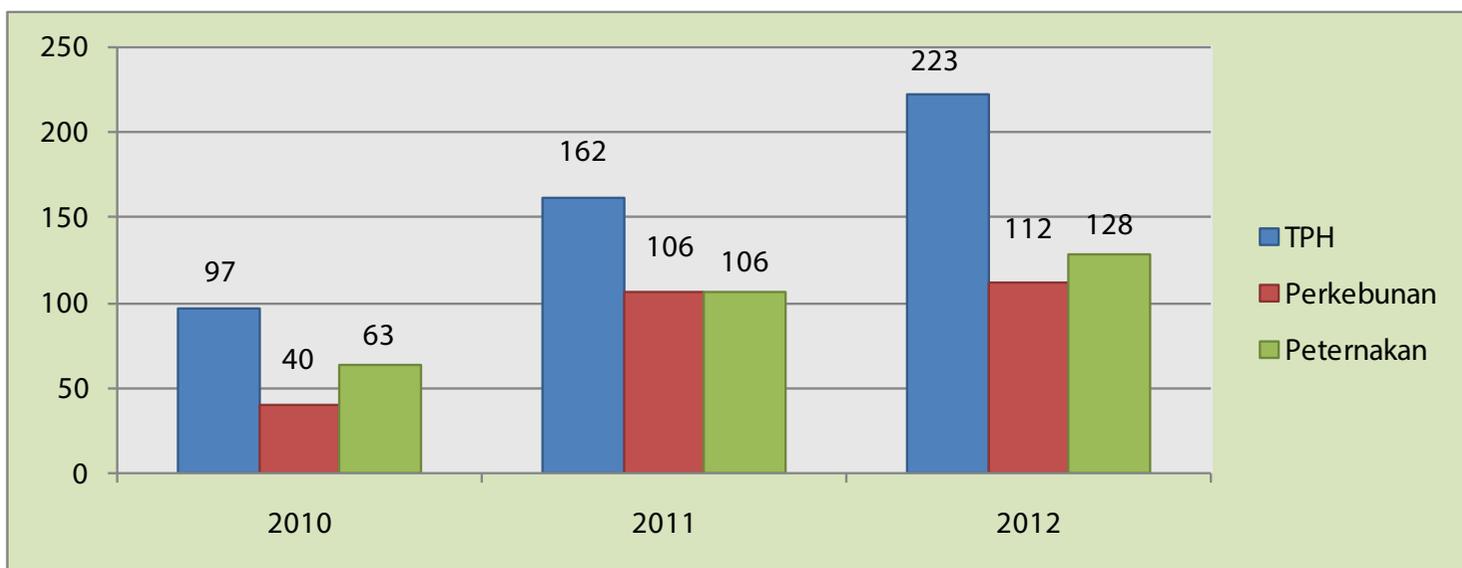
Kebijakan pengembangan pasar domestik merupakan salah satu sarana vital dalam menunjang pembangunan pertanian. Pengembangan pasar domestik dilakukan dengan: (1) Pengembangan sarana dan kelembagaan pasar yaitu: Sub Terminal Agribisnis, Pasar Tani, Pasar Ternak, Unit

Pemasaran Poktan Gapoktan, dan Pasar lelang; (2) Pemantauan dan stabilisasi harga; (3) Advokasi dan penguatan akses pasar domestik; dan (4) Pelayanan Informasi Pasar. Dalam upaya menghubungkan petani dengan pasar, Kementerian Pertanian telah mengembangkan Pelayanan Informasi Pasar (PIP). Unit pelayanan informasi pasar komoditas pertanian berlokasi di kabupaten/kota sebagai sentra produksi dan ibukota Provinsi sebagai sentra grosir/eceran. Sampai tahun 2012 telah dikembangkan 463 unit PIP.



Gambar 112. Menteri Pertanian Mengunjungi Pameran

Jenis informasi yang diinformasikan mulai dari harga, *supply-demand*, data *supplier*, biaya usaha tani dan analisisnya, biaya pemasaran dan analisisnya, serta analisa pemasaran komoditas unggulan.



Gambar 113. Perkembangan Lokasi Pelayanan Informasi Pasar Tahun 2010-2012

Pengembangan pemasaran komoditas pertanian akan sangat terkait dengan pengembangan akses pasar dan jaringan pemasaran. Berkaitan dengan hal tersebut dalam rangka mengembangkan akses pasar komoditas pertanian oleh para petani telah difasilitasi kerjasama pemasaran antara gapoktan dengan pelaku pasar (*supplier*, industri pengolahan, *supermarket*, eksportir).

Pengembangan jaringan pemasaran terus dikembangkan pada periode 2010 – 2014 dalam rangka membuka akses pemasaran komoditas pertanian sebagaimana seperti pada Tabel berikut:

Tabel 27. Kerjasama Pemasaran Produk Pertanian Tahun 2010 - 2014

No	Komoditi	Poktan/Gapoktan	Pembeli/Pelaku Pasar	Provinsi	Tahun
1	Sayuran	Kelompok tani Mardi Santoso Kabupaten Semarang	PT. Alamanda Utama Sejati	Jawa Tengah	2010
2	Minyak atsiri	Gapoktam Nilam Kabupaten Pasaman	PT. Djasulawangi	Sumatera Barat	2010
3	Minyak atsiri	Gapoktan Sumber Rejeki Kabupaten Boyolali	PT. Djasulawangi	Jawa Tengah	2010
4	Minyak atsiri	Gapoktan Tani Pulus Wangi Kabupaten Garut	PT. Djasulawangi	Jawa Barat	2010
5	Chips ubi kayu fermentasi	CV. Madina Kabupaten Trenggalek	CV. Fajar Bersaudara	Jawa Timur	2010
6	Salak pondoh super	Asosiasi Petani Salak Sleman Prima Sembada Kabupaten Sleman	PT. Midi Utama Indonesia	DI. Yogyakarta	2010
7	Buah dan sayuran	Gapoktan Bina Usaha dan Gapoktan Green Organik Kota Depok	PT. Midi Utama Indonesia	Jawa Barat	2010
8	Cabai merah segar dan cabai kering	Poktan Karya Tani Kabupaten Majalengka, Gapoktan Kawung Hegar Kabupaten Tasikmalaya, Koperasi Cigarit, Poktan Sirih liksa dan Poktan Mekar Tani II Kabupaten Garut, serta Gapoktan Karang Sari Kabupaten Ciamis	PT. Ipasar Indonesia dan PT. Bumi Prima Lestari	Jawa Barat	2011
9	Cabai merah segar dan cabai kering	AACI (Asosiasi Agribisnis Cabai Indonesia) cabang Jawa Timur	Pasar Induk Tanah Tinggi dan PT. Bumi Prima Lestari	Jawa Timur	2011
10	Manggis	Asosiasi Petani Manggis Sumbar	PT. Agung Mustika Selaras	Sumatera Barat	2012
11	Manggis	ASPUMA Kabupaten Bogor, Gapoktan Pecusen Kabupaten Banyuwangi, Gapoktan Krida Mulya Kabupaten Ciamis dan Gapoktan Artamukti Kabupaten Tasikmalaya	PT. Agung Mustika Selaras dan PT. Alamanda	Jawa Barat	2012
12	Kakao fermentasi	AKFI (Asosiasi Kakao Fermentasi Indonesia)	PT. Bumi Tangerang	Sulawesi Tengah	2012
13	Jagung untuk SRG	Gapoktan Bangun Bersama dan Gapoktan Bangun Desa Kabupaten Lombok Timur	Koperasi Selaras	NTB	2013

Di samping pengembangan pemasaran melalui kontrak kerjasama langsung antara poktan/ gapoktan dengan pelaku pasar, juga dikembangkan akses pemasaran melalui pasar lelang produk pertanian dan pengembangan Sistem Resi Gudang (SRG). Dalam rangka pengembangan pemasaran melalui pasar lelang dan SRG, telah dilakukan sosialisasi ke petani, dinas terkait di daerah dan pelaku usaha di daerah-daerah sentra produksi.

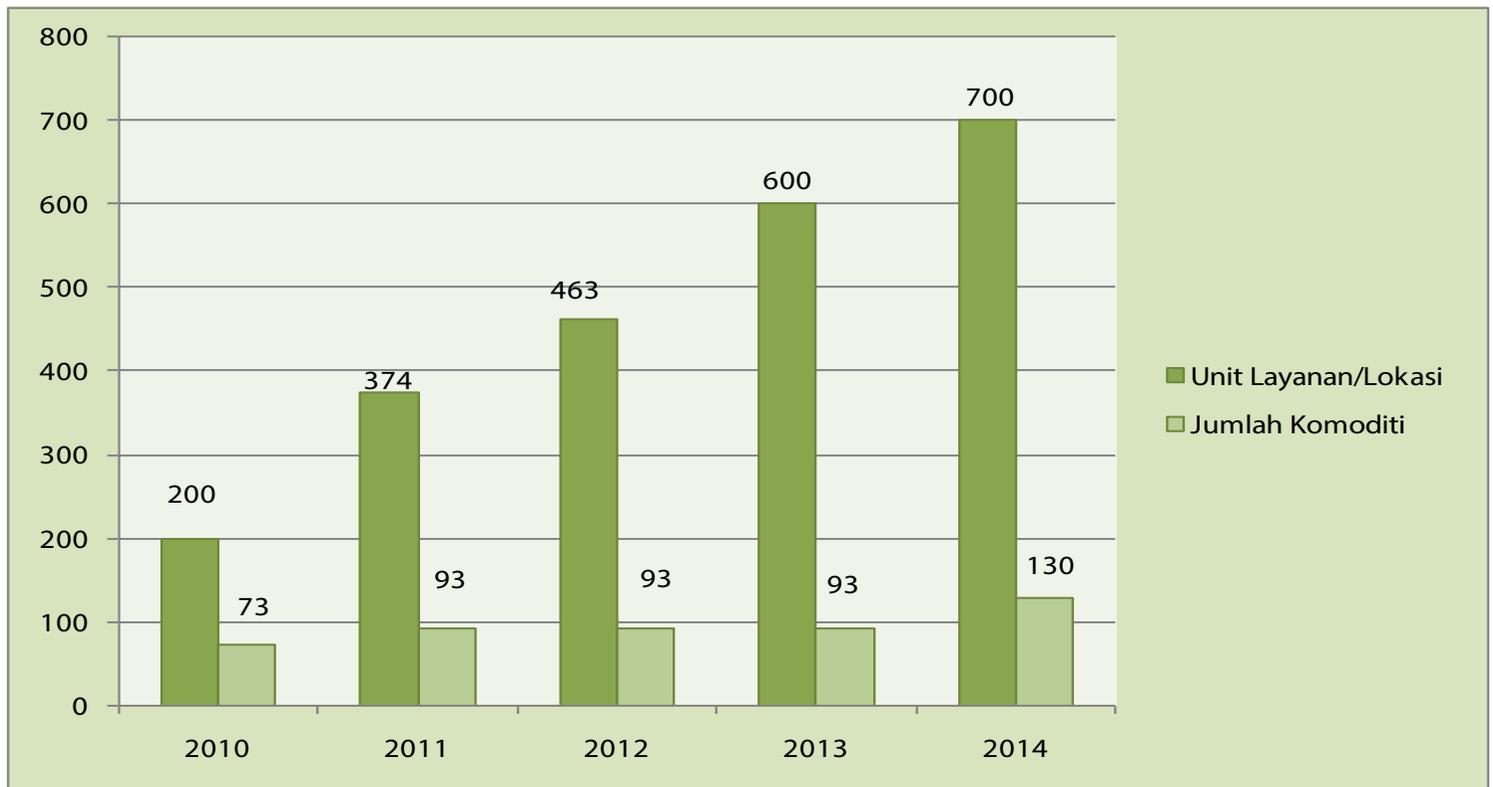
11.2.1. Pengembangan Informasi Pasar (PIP)

Sistem informasi pemasaran yang cepat, tepat, akurat, lengkap, kontinyu dan up to date merupakan instrumen yang vital serta memegang peranan yang amat penting bagi para pelaku agribisnis untuk membuat suatu keputusan bagi usaha agribisnisnya supaya memperoleh hasil yang optimal.

Sejak tahun 2005 sampai dengan saat ini, kegiatan PIP dari seluruh sub sektor pertanian yang meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan dikoordinasikan oleh Kementerian Pertanian. Metode PIP yang dikembangkan pada periode ini berupa pengiriman informasi pasar/harga komoditas pertanian oleh petugas PIP melalui sistem SMS yang dikirim secara harian dan langsung ditayangkan pada internet/website Kementerian Pertanian.

Cakupan Komoditi dan Lokasi

Komoditas yang ditangani dalam pengembangan PIP Kementerian Pertanian antara lain meliputi: tanaman pangan (padi dan palawija), hortikultura (sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan biofarmaka), perkebunan, dan peternakan yang secara bertahap telah dilaksanakan dari tahun 2010-2014 dapat dilihat sebagaimana gambar berikut:



Gambar 114. Perkembangan Pelayanan Informasi Pasar 2010-2014

Penyebarluasan Informasi Pasar

Penyebarluasan informasi pasar dilakukan melalui:

- *HP Life Tools*
- Siaran radio (RRI Pro-3 FM gelombang 88.8 setiap hari pukul 18.05 WIB)
- Siaran televisi (TVRI pada acara Berita Malam setiap hari Selasa, Rabu, Kamis pukul 19.00-20.00 WIB)
- Internet/Website Kementerian Pertanian
- SMS dua arah *short code* 9747
- Media cetak : Tabloid Sinar Tani dan Media Perkebunan
- Buletin Informasi Pasar (beredar setiap bulan)
- Sistem GPRS : *pip.deptan.go.id*

Sasaran Pengguna dan Pemanfaat

Pengguna PIP yang teridentifikasi baik secara formal maupun informal adalah sebagai berikut :

- Kementerian Pertanian dan Instansi terkait sebagai bahan acuan dalam pengambilan kebijakan di bidang pertanian.
- Kementerian Perdagangan, Bank Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Kantor Menko Perekonomian digunakan sebagai salah satu basis data.
- Dinas Lingkup Pertanian Kabupaten dan Provinsi, sebagai acuan dalam rapat Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
- Nokia dan PT. Synovate digunakan sebagai sumber data pada pelayanan dan aplikasi Nokia Life Tools.
- Petani dan kelompok Tani untuk meningkatkan bargaining position sebelum menjual produk serta sebagai acuan dalam merencanakan pola tanam.
- Pelaku usaha di bidang pertanian sebagai acuan dalam perencanaan pola usaha.
- Peneliti dan mahasiswa, sebagai salah satu bahan penelitian.

11.2.2. Pasar Tani, Sub Terminal Agribisnis dan Pasar Ternak

Pasar Tani

Menginjak tahun ke-5 Pasar Tani mulai dikenal perkembangannya di lingkungan Kementerian Pertanian maupun di luar Kementerian Pertanian, seperti: Kementerian Perdagangan, Kementerian Dalam Negeri, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi DKI Jakarta, TNI, Kantor Bulog Jakarta Utara, IPB, Masyarakat Agribisnis Indonesia (MAI), dan Carrefour Lebak Bulus. Hal ini dibuktikan dengan



Harga Rerata Produsen/Eceran (Rp/Kg)	
Tanggal: Tgl 5 Agustus 2014	
GKP	= 3.860
GKG	= 4.650
Beras Medium	= 7.440/8.915
Kedelai	= 7.425/10.648
Jagung	= 2.900/6.163
Bawang Merah	= 12.429/26.678
Cabe Merah Besar	= 6.167/18.960
Cabe Merah Keriting	= 3.788/19.336
Cabe Rawit Merah	= 8.167/27.897
Daging Sapi	= 36.900/102.703
Daging Ayam Broiler	= 16.900/31.026
Telur Ayam Ras	= 16.163/20.738

Peningkatan Harga Tertinggi dibanding Kemarin: Tingkat Produsen Cabe Rawit Merah +13.95%
Penurunan Harga Tertinggi Tingkat Produsen: Tingkat Produsen Cabe Merah Besar -11.90% (Sumber: Ditjen PPHP)

Gambar 115. Contoh Penyebarluasan Informasi Pasar melalui *website* Kementan

undangan dan permintaan Gelar Pasar Tani dari instansi tersebut dalam event-event tertentu yang dilaksanakan.



Gambar 116. Menko Perekonomian dan Menteri Pertanian meninjau *stand* produk pertanian nusantara

Sampai dengan tahun 2013, Kementerian Pertanian telah memfasilitasi sarana dan kelembagaan Pasar Tani sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) Pasar Tani di 29 Provinsi di Indonesia.



Gambar 117. Menteri Pertanian meninjau pameran hortikultura

Bentuk nyata kegiatan Pasar Tani berupa Gelar Pasar Tani dengan menampilkan produk pertanian segar dan olahan dari petani dan dijual langsung kepada konsumen. Kegiatan ini diselenggarakan di dalam maupun di luar kantor pusat Kementerian Pertanian. Selama tahun 2013 Kementerian Pertanian telah memfasilitasi lebih kurang 50 kelompok tani/Gapoktan/pemasar hasil pertanian untuk berperan aktif dalam kegiatan Gelar Pasar Tani. Melalui kegiatan Gelar Pasar Tani, para petani dapat merasakan langsung manfaatnya, baik dari sisi pendapatan yang meningkat maupun dalam perluasan jaringan dan akses pasar.

SUB TERMINAL AGRIBISNIS (STA)



Pembangunan STA di Indonesia sampai tahun 2013 berjumlah 66 STA/TA yang terdiri dari 64 STA dan 2 TA. Berbagai upaya telah dilakukan khususnya dalam pembinaan, penguatan kelembagaan, penyediaan sarana dan prasarana, pendampingan serta perluasan jaringan pemasaran di STA. Hasil dari pembinaan yang simultan dan terus menerus telah banyak membuahkan hasil positif bagi kemajuan di STA yaitu dengan semakin banyaknya STA yang mampu menembus jaringan pemasaran di Pasar Swalayan, antara lain: STA Rancamaya Bogor yang telah menjalin kemitraan dengan Giant melalui aneka buah-buahan Nusantara (jambu batu kristal, manggis dan pepaya kalina), STA Bukit Sari Buah Tabanan yang telah menjalin kemitraan dengan Carrefour melalui komoditas manggis, STA Cigombong-Cianjur telah menjalin kemitraan dengan Yogya Department Store dengan komoditas unggulan sayuran dataran tinggi serta STA Panumbangan Ciamis yang telah menjalin kemitraan dengan PT Heinz ABC sebagai pemasok komoditas cabai merah besar dan cabai merah keriting. Para pengelola STA binaan Kementerian Pertanian telah membentuk suatu forum sebagai wadah dalam menyatukan misi dan visi pengembangan pasar STA, yang diberi nama Forum Komunikasi STA (FORKASTA) yang telah berhasil menjalin kerjasama dengan eksportir manggis, pada saat manggis Indonesia ditolak pengirimannya ke Tiongkok.

PASAR TERNAK



Pembangunan Pasar Ternak di Indonesia sampai tahun 2013 berjumlah 157 Pasar Ternak di 30 Provinsi yang tersebar di 157 kabupaten/kota.

Diantara Pasar Ternak yang sudah difasilitasi, Pasar Ternak yang dipandang sudah berhasil mengelola pasar adalah Pasar Ternak Kota Mataram dan Pasar Ternak Masbagik, Nusa Tenggara Barat, Pasar Ternak Ambarketawang Gamping Sleman, Yogyakarta, Pasar ternak Ciwareng Purwakarta Jawa Barat serta Pasar Ternak Terpadu Ciamis, Jawa Barat.

11.2.3. Promosi Dalam Negeri

Promosi dalam negeri ditujukan untuk mendorong peningkatan akses produk pertanian untuk pasar dalam negeri dan ekspor sekaligus meningkatkan apresiasi masyarakat dan menanamkan kebanggaan terhadap produk dalam negeri. Untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan melalui berbagai kegiatan yaitu pameran, audio visual, talkshow/dialog interaktif, temu usaha dan lomba.

Pameran produk pertanian di dalam negeri sudah dilakukan sejak tahun 2001 dan diselenggarakan di Jakarta dan beberapa kota besar di Indonesia. Pameran yang dilakukan ada yang bersifat umum produk pertanian atau multi *product* dan ada yang spesifik komoditi. Pameran bertujuan:

- Mempromosikan potensi produk unggulan daerah dan sarana pendukung pertanian.
- Menjalin kesepakatan bisnis dan kemitraan
- Memperkenalkan produk inovatif yang memiliki prospek pasar
- Mensosialisasikan hasil teknologi dan penelitian.
- Mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah melalui tukar menukar informasi.

Pameran pada umumnya diikuti juga dengan berbagai kegiatan lainnya seperti *talkshow*, temu bisnis (*buyer meet seller*) dan sosialisasi manfaat produk. Beberapa pameran yang dipandang cukup sukses adalah sebagai berikut :

(1) *Agro and Food Expo*

Agro and Food Expo merupakan pameran produk pertanian yang pertama diinisiasi oleh Kementerian Pertanian bersama PT Wahyu Promo Citra pada tahun 2001. Tujuan pameran adalah untuk mempromosikan produk unggulan daerah terpusat pada suatu event yang sehingga peserta pameran dan pengunjung dapat berinteraksi secara optimal. Pemilihan lokasi pameran di Jakarta dengan pertimbangan merupakan pusat kegiatan bisnis.



Gambar 118. Menteri Pertanian Membuka Acara Agro And Food Expo 2013

Keberhasilan pameran yang diadakan sejak tahun 2001 sampai tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- Transaksi langsung yang dihasilkan mulai tahun 2006 sampai 2014 tercatat Rp. 8.449.775.000 dan transaksi tidak langsung sebesar Rp. 271.033.405.000.
- Peserta pameran semula hanya Dinas yang mendapat alokasi dana Dekon, kemudian diikuti oleh Dinas Kabupaten dengan sumber pendanaan dari APBD.
- Melalui tema yang diusung setiap tahunnya, dapat dipromosikan produk-produk secara lebih fokus seperti, jamu dan rempah, organik dan *specialty product*, Indikasi Geografis, Ketahanan Pangan dan berbagai produk bersertifikasi.
- Pelaku usaha dan masyarakat sudah mengenali pameran ini sebagai agenda tahunan promosi terbesar produk pertanian di Jakarta.

(2) Surabaya Agribusiness Matching and Expo (SAMEX)

Surabaya Agribusiness Matching and Expo adalah kegiatan pameran tahunan yang diinisiasi oleh Kementerian Pertanian dan dilaksanakan bekerjasama dengan PT. Fery Agung Corindotama (Feraco). Dilaksanakan sejak tahun 2002 dengan nama *Indonesia Agribusiness Expo*. Kegiatan pendukung dalam SAMEX adalah: pasar Lelang Komoditi Agribisnis, *Talkshow* pertanian, Presentasi promosi produk unggulan maupun teknologinya.



Gambar 119. Acara SAMEX 2013

Beberapa hasil yang dinilai cukup baik dari penyelenggaraan pameran ini adalah:

- Pada tahun 2011, pasar lelang komoditi pertanian menghasilkan transaksi yaitu mencapai Rp 7,5 Milyar.

(3) Batam Agribusiness Matching and Expo (BATAMEX)

BATAMEX merupakan pameran produk pertanian yang pertama diinisiasi oleh Kementerian Pertanian bersama PT Fery Agung Corindotama pada tahun 2006 untuk memanfaatkan Batam yang letaknya strategis untuk akses bisnis dan perdagangan dengan Malaysia, Singapura dan Thailand. Tujuan BATAMEX ini adalah untuk mempromosikan produk unggulan daerah kawasan Tengah dan Barat Indonesia agar mendapatkan akses pasar/ekspor ke negara tetangga. Kegiatan pendukung dalam BATAMEX: *Business Matching*, *Talkshow* pertanian dan presentasi promosi produk unggulan maupun teknologi.



Gambar 120. Acara BATAMEX 2011

Beberapa hasil yang dinilai cukup baik dari penyelenggaraan pameran ini adalah:

- Permintaan terhadap Tape Ubi Kayu (singkong) yang kering (*dry*) sebanyak 25 ton per bulan oleh *Global Business Opportunities (GBO)* Singapura. Jumlah tape (singkong) kering sebanyak satu kontainer tersebut rencananya akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan Tiongkok.
- Disamping hal tersebut diatas, melalui HKTI Provinsi Kepulauan Riau, juga terdapat permintaan sabut kelapa sebanyak 100 – 150 ton per bulan oleh GBO Tiongkok
- Koperasi Penguatan Ekonomi Perempuan (KPEP) berencana akan membuka outlet minuman kesehatan (*herbal drink*) asli Indonesia seperti Bir Pletok (minuman asli Betawi yang berasal dari bahan rempah-rempah – non alkohol dan Kopi Pinang dari Kabupaten OKU Selatan, Sumsel. Melalui outlet ini diharapkan KPEP dapat membantu melakukan pemasaran bagi produsen skala kecil menengah termasuk membina sesuai dengan keinginan pasar. Hal ini dilakukan mengingat besarnya potensi pasar khususnya Singapore terhadap komoditas ini.
- Pada Batam Agribusiness Expo 2011, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo yang berhasil menggaet Investor dari negara Filipina yaitu *Director Cagayan Corn Product Corporation Filipina* untuk pengembangan jagung hibrida dengan dengan nilai total peluang investasi sebesar Rp. 20,3 Milyar.

(4) Agrinex Expo



Gambar 121. AGRINEX Expo 2014

Pameran Agrinex Expo dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya. Kegiatan promosi ini telah diselenggarakan sejak tahun 2007. Kegiatan tersebut merupakan kerjasama Institut Pertanian Bogor dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan dan PT. Performax. Kepesertaan Kementerian Pertanian dalam pameran ini merupakan momen strategis untuk mensosialisasikan program yang dikembangkan oleh Kementerian Pertanian setiap tahunnya agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat antara lain hasil-hasil penelitian dan pengembangan teknologi pertanian.

11.3. Mengembangkan Jejaring Pasar Internasional

Pengembangan pemasaran internasional dimaksudkan untuk melakukan percepatan pertumbuhan nilai ekspor, memperlambat laju impor baik dalam bentuk segar maupun olahan sehingga mendorong pertumbuhan surplus neraca perdagangan produk pertanian antara lain melalui kebijakan pencitraan produk yang lebih baik, meningkatkan akses pasar dan perlindungan produk dalam negeri dari dampak persaingan global.



Gambar 122 Menteri Pertanian melepas ekspor Markisa ke Singapura tahun 2014

Kebijakan utama yang telah dilakukan dalam pengembangan pemasaran internasional adalah membuka akses pasar seluas-luasnya melalui advokasi, negosiasi, promosi dan kerjasama pemasaran baik di tingkat global/multilateral, regional maupun bilateral serta kerjasama komoditi.

Upaya percepatan dan peningkatan akses ekspor difokuskan pada beberapa komoditas utama yang memiliki daya saing di pasar global, antara lain Komoditi Perkebunan (Kelapa Sawit, Kakao, Kopi, Karet, Minyak Atsiri), dan Komoditi Hortikultura (Buah, Sayur, Tanaman Hias, dan Biofarmaka). Selain pasar utama yang selama ini menjadi andalan tujuan ekspor seperti Eropa, Amerika Serikat, Jepang, Singapura, Malaysia dan Negara Asean lainnya, juga telah dikembangkan akses pasar ke berbagai Negara di Timur Tengah dan Arab Saudi, Tiongkok, Korea, India, Bangladesh dan Eropa Timur.

Dalam rangka meningkatkan ekspor dan pembukaan akses pasar bagi produk pertanian Indonesia, Kementerian Pertanian terus berupaya berpartisipasi aktif dalam berbagai forum perundingan Internasional baik melalui forum bilateral, multilateral, regional maupun perundingan dalam bidang kerjasama komoditi. Melalui forum tersebut, Kementerian Pertanian memperjuangkan agar produk pertanian Indonesia dapat dibuka akses pasarnya di negara tujuan ekspor. Beberapa komoditi pertanian Indonesia yang telah berhasil dibuka akses pasarnya diantaranya:

(1) Pembukaan Akses Pasar ekspor Manggis di Australia

Setelah cukup lama bernegosiasi, akhirnya Pemerintah Australia menyetujui pembukaan akses buah manggis Indonesia. Ekspor perdana manggis ke Australia telah diresmikan oleh Menteri Pertanian RI pada 27 November 2012.



Gambar 123. Menteri Pertanian melakukan launching ekspor perdana manggis ke Australia

(2) Pembukaan Akses pasar ekspor Manggis ke New Zealand

Atas hasil negosiasi yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian dengan pemerintah New Zealand, akhirnya pada bulan November 2013, New Zealand secara resmi telah membuka akses pasarnya untuk manggis Indonesia yang ditandai dengan penandatanganan protokol Ekspor manggis Indonesia ke New Zealand pada bulan November 2013.

(3) Pembukaan akses pasar CPO di Pakistan

Setelah cukup lama melakukan negosiasi dalam kerangka RI – Pakistan *Preferential Tariff Agreement* (PTA), kedua negara telah sepakat dan menandatangani PTA Agreement pada tanggal 3 Februari 2012. Dengan ditandatanganinya PTA tersebut, maka secara resmi CPO Indonesia mendapatkan perlakuan tarif yang sama dengan CPO Malaysia yang berlaku efektif sejak September 2013. CPO Indonesia di Pakistan mendapatkan perlakuan tarif yang sama dengan CPO asal Malaysia.

(4) Akselerasi ekspor buah dan sayuran ke Singapura.

Dibawah kerangka kerjasama Indonesia - Singapura *Agribusiness Working Group* yang di bentuk pada tahun 2010, Indonesia telah berhasil mengekspor berbagai jenis buah dan sayuran ke pasar Singapura. Pasar Singapura sendiri dapat dijadikan sebagai benchmark ekspor kualitas sayur dan buah berorientasi ekspor. Beberapa kegiatan ekspor ke Singapura yang telah dilaksanakan diantaranya:

- *Launching* Ekspor sayuran dari Kabupaten Karo, Sumut



Gambar 124. Menteri Pertanian melakukan *launching* ekspor sayuran tahun 2011 dari Provinsi Sumatera Utara ke SIngapura

Pada bulan Maret 2011, Indonesia telah berhasil melakukan ekspor sayuran ke Singapura yang berasal dari gapoktan di Sumatera Utara khususnya dari Kabupaten Karo dan Kabupaten Simalungun. Peresmian ekspor dilakukan oleh Menteri Pertanian dan Gubernur Provinsi Sumatera Utara.

- Peresmian Ekspor buah dan sayuran dari Jawa Tengah

Pada bulan Februari dan Juni 2012, Indonesia telah berhasil melakukan ekspor buah dan sayuran ke Singapura dari Jawa Tengah. Buah dan sayur yang diekspor berasal dari gapoktan-gapoktan yang tersebar di wilayah provinsi Jawa Tengah.



Gambar 125. Wakil Menteri Pertanian melakukan *launching* ekspor hortikultura tahun 2011 dari Provinsi Jawa Tengah ke Singapura

- Ekspor buah dan sayuran dari Sumatera Utara.



Gambar 126. *Lauching* ekspor Pisang dari Deli Serdang, Sumatera Utara ke Singapura tahun 2012

Pada tanggal 20 Juni 2012, Sumatera Utara kembali melakukan acara pelepasan ekspor buah dan sayuran ke Singapura. Buah dan sayur yang diekspor berasal dari gapoktan – gapoktan di Kabupaten Deli Serdang. Pelepasan dilakukan oleh Menteri Pertanian RI.

- **Ekspor Bunga Melati dari Kabupaten Tegal**

Pada tanggal 26 maret 2014, telah dilakukan pelepasan ekspor bunga melati dari Gapoktan - gapoktan yang berasal dari Kabupaten Tegal ke Singapura. Pelepasan dilakukan oleh Menteri Pertanian bersama dengan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Bupati Kabupaten Tegal.



Gambar 127. Menteri Pertanian melepas ekspor bunga Melati dari Tegal, Jawa Tengah ke Singapura

- **Pelepasan Ekspor Markisa dari Sulawesi Selatan ke Singapura.**

Indonesia telah berhasil mengekspor markisa dataran rendah ke Singapura dari Sulawesi Selatan. Ekspor perdana dilakukan pada bulan Desember 2013. Hal ini merupakan tindak lanjut dari hasil penyelenggaraan kegiatan in Store Marketing 2013 di Singapura. Pada bulan Juni 2014, Menteri Pertanian meresmikan pelepasan ekspor buah markisa ke Singapura yang ke 50 kalinya. Markisa yang diekspor berasal dari gapoktan di Kabupaten Jeneponto.



Gambar 128. Pelepasan ekspor Markisa ke Singapura

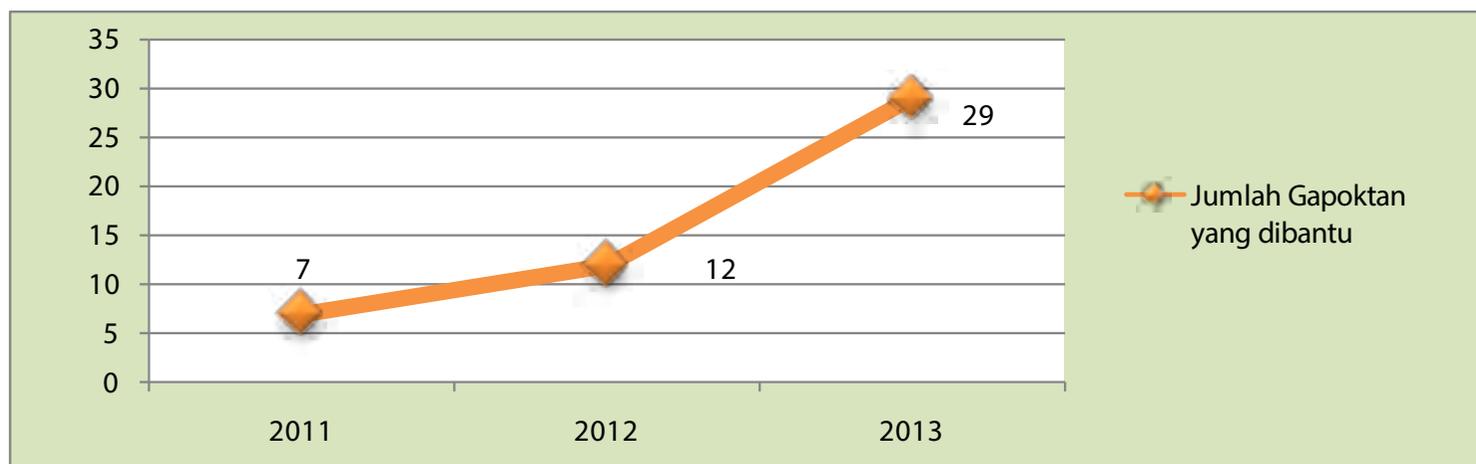
Selain komoditi - komoditi diatas, beberapa komoditi lainnya yang saat ini masih diperjuangkan oleh Indonesia untuk dapat dibuka akses pasarnya di negara tujuan ekspor diantaranya:

- Pembukaan akses pasar salak di Australia dimana saat ini protokol ekspornya masih dalam tahap konsultasi publik di Australia dan diharapkan pada tahun 2014 ekspor salak ke Australia dapat terealisasi.
- Pembukaan akses pasar mangga dan salak di New Zealand. Mangga dan salak merupakan target prioritas pembukaan akses pasar selanjutnya di New Zealand. Atas negosiasi yang dilakukan Kementerian Pertanian. New Zealand telah menyatakan kesediaannya untuk memfasilitasi pembukaan akses pasar produk pertanian Indonesia yang tertuang di dalam *MoU on Agriculture* yang ditandatangani pada April 2012.

Selain berpartisipasi aktif didalam berbagai forum perundingan Internasional, Kementerian Pertanian juga berupaya untuk melakukan pembenahan di dalam negeri terkait dengan sistem/ jaringan pemasaran komoditi pertanian untuk ekspor. Salah satu hal yang menjadi fokus Kementerian Pertanian adalah dengan memfasilitasi gapoktan dalam rangka meningkatkan kualitas dan mutu produk pertanian untuk ekspor serta menyederhanakan sistem distribusi pemasaran untuk ekspor dimana gapoktan sebagai pemasok dimitrakan dengan eksportir sebagai pemasar untuk memasarkan ke negara tujuan ekspor.

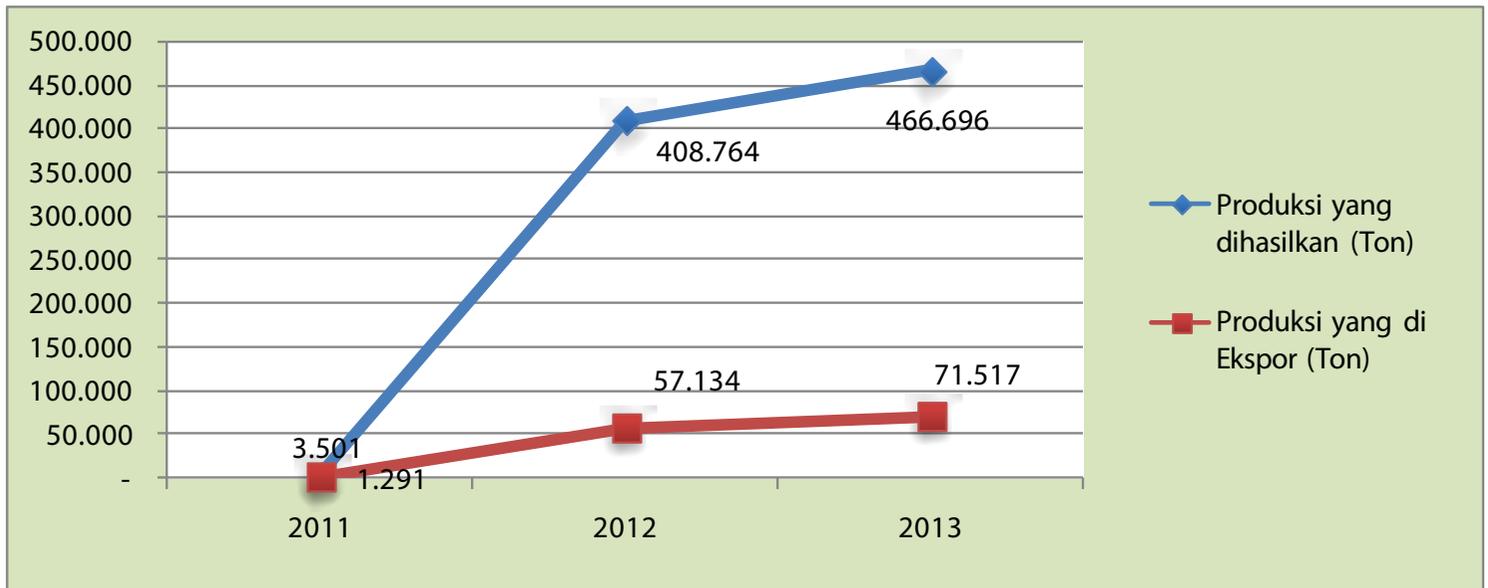
Sejak tahun 2011 sampai dengan 2013 telah dilaksanakan program akselerasi peningkatan ekspor komoditi pertanian salah satunya fasilitasi insentif teknologi berupa pembangunan dan pengembangan rumah kemas/rumah pengolahan dan peralatan serta penunjang lainnya diperuntukkan bagi produk sayuran dan buah serta kopi dengan tujuan ekspor.

Selain itu Kementerian Pertanian melakukan kegiatan Akselerasi Peningkatan Ekspor Hortikultura ke Singapura di 7 provinsi sentra penghasil buah dan sayur dan Akselerasi Peningkatan Ekspor Komoditi Pertanian di 6 provinsi. Perkembangan jumlah gapoktan yang mendapatkan fasilitasi sejak tahun 2011 – 2013 dapat dilihat pada **Gambar** di bawah ini:



Gambar 129. Perkembangan Jumlah Gapoktan Berorientasi Ekspor 2011-2013

Pada tahun 2011, jumlah gapoktan berorientasi ekspor yang difasilitasi sebanyak 7 gapoktan selanjutnya pada tahun 2012 meningkat menjadi 12 gapoktan dan 29 gapoktan pada tahun 2013.



Gambar 130. Perkembangan Volume Produksi dan Ekspor Pada Gapoktan Berorientasi Ekspor 2011-2013

Perkembangan volume produksi dan ekspor yang dicapai oleh gapoktan yang difasilitasi sejak tahun 2011 – 2013 mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 total produksi komoditi pertanian yang dihasilkan oleh gapoktan berorientasi ekspor mencapai 408.764 ton atau meningkat sebesar 14,17% dari tahun 2012. Sedangkan ekspornya pada tahun 2013 mencapai 71.517 ton atau meningkat sebesar 25,17% dari tahun 2012.

Beberapa gapoktan berorientasi ekspor yang memiliki kinerja yang baik diantaranya:

- Gapoktan Wargi Panggupay



Gambar 131. Kegiatan usaha tani Gapoktan Wargi Panggupay

Berdiri pada tahun 2009, berlokasi di Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Gapoktan bergerak dalam bidang Agribisnis yang beranggotakan 35 kelompok tani produktif. Saat ini Gapoktan Warga Punggupay telah menjalin kerja sama dan Kemitraan dengan Eksportir PT Alamanda Sejati Utama, Fortuna Agro Mandiri (*Farm/MultiFresh*) dan beberapa *suplier supermarket*. Jenis komoditi yang diusahakan oleh Gapoktan Warga Punggupay untuk pasar ekspor dan pasar dalam negeri antara lain: *baby buncis*, buncis super, brokoli dan kyuri. Total rata-rata pemasaran dan permintaan hasil produksi dari Gapoktan Warga Punggupay sebanyak 4.050 Kg/hari.

- **Kelompok Tani Dewa Family**

Kelompok tani Dewa Family berlokasi di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Saat ini jumlah anggota kelompok adalah sebanyak 30 orang. Komoditi utama yang dihasilkan oleh Kelompok Tani Dewa Family adalah cabe dan paprika dengan luas areal 5,3 ha. Beberapa jenis paprika yang ditanam dan dipasarkan oleh Kelompok Tani Dewa Family adalah: paprika kuning varietas Sunny (20%), paprika orange varietas Magno, paprika Hijau, paprika merah varietas Chang. Dalam memasarkan produknya untuk ekspor, Kelompok Tani Dewa Family bermitra dengan PT. Alamanda Sejati Utama sebanyak 3 ton/minggu atau 500 kg/hari. Sedangkan untuk pasar lokal Kelompok Tani Dewa Family bermitra dengan Hoka-Hoka Bento (2 ton/ minggu, paprika hijau) serta ke PT. Saung Mirwan, Kemfarm & Bimandiri.



Gambar 132. Kegiatan usaha tani Kelompok Tani Dewa Family

- **Kelompok Agribisnis Ubi Cilembu Pelopor (KAUCP)**

Kelompok Agribisnis Ubi Cilembu Pelopor berdiri pada tahun 2012 yang berlokasi di Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang. Saat ini Kelompok Agribisnis Ubi Cilembu Pelopor beranggotakan sebanyak 107 kelompok tani. Komoditi yang diusahakan Kelompok adalah ubi cilembu dengan produktivitas rata-rata 15 ton/minggu untuk pasar ekspor, serta 35-40 ton/minggu untuk pasar domestik. Dalam hal pemasaran ekspor, Kelompok Agribisnis Ubi Cilembu Pelopor bermitra dengan PT. Alamanda Sejati Utama. Sarana yang dimiliki oleh Kelompok

Agribisnis Ubi Cilembu Pelopor dalam mendukung usaha taninya: oven, mesin pencuci ubi jalar, sarana transportasi.



Gambar 133. Kegiatan usaha tani Kelompok Agribisnis Ubi Cilembu Pelopor

- Paguyuban Mitra Turindo

Paguyuban Mitra Turindo didirikan oleh para petani yang berada di Dusun Kembangmulyo, Desa. Girikerto Kecamatan Turi Kabupaten Sleman pada 17 Juni 2009 dimana komoditi yang diusahakan oleh Paguyuban Mitra Turindo adalah salak. Dalam memasarkan produknya untuk ekspor, Paguyuban Mitra Turindo telah bermitra dengan PT. Agung Mustika Selaras (PT. AMS) sejak Agustus 2009 dan hingga bulan Maret 2012 telah melakukan pengiriman salak register ke Tiongkok dengan total volume 1,425,742 kg, dan tingkat kerusakan hanya 1,54%. Paguyuban Mitra Turindo selain melakukan perannya sebagai lembaga pemasaran, juga membantu melakukan pembinaan khususnya kepada Kelompok Tani di Kecamatan Turi yang sedang melakukan tahapan menuju arah *register*.



Gambar 134. Kegiatan usaha tani Salak Paguyuban Mitra Turindo

Dalam upaya meningkatkan pengembangan jejaring pasar internasional, Kementerian Pertanian telah melakukan program akselerasi ekspor khususnya ekspor buah dan sayuran ke Singapura. Untuk mencapai hasil yang diharapkan, telah dilaksanakan berbagai kegiatan diantaranya melalui kegiatan *In-Store Marketing* di Singapura. Kegiatan tersebut merupakan hasil kesepakatan yang dicapai dalam kerangka bilateral Indonesia - Singapura *Agribusiness Working Group Meeting*. Kegiatan *In-Store Marketing* yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2013 diantaranya:

- *In-Store Marketing* di *Pasir Panjang Wholesale Center (PPWC)*

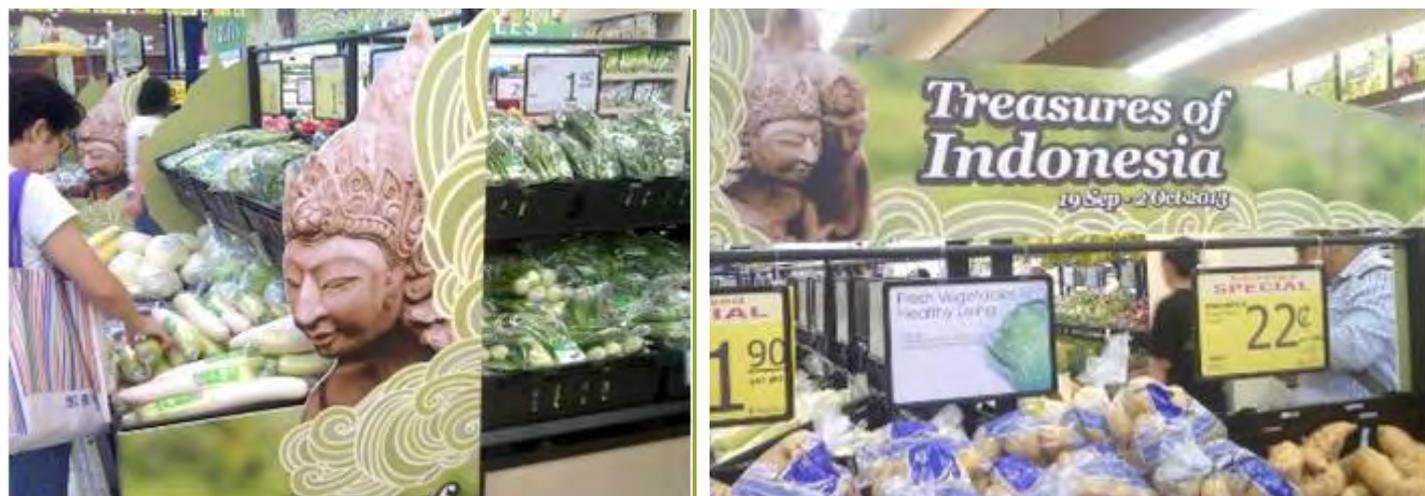
Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2013 dan dihadiri oleh pelaku usaha/ importir buah dan sayuran di Singapura.



Gambar 135. *In-Store Marketing* Pasir Panjang Wholesale Center

- *In-Store Marketing* di *NTUC Fair Price*.

Kegiatan dilaksanakan pada bulan September 2013. *NTUC Fair Price Co-operative Ltd* merupakan jaringan retail terbesar di Singapura, hingga saat ini memiliki 230 *outlet* yang tersebar di seluruh Singapura.



Gambar 136. *In-Store Marketing* NTUC Fair Price

- *In-Store Marketing di Supermarket Giant Singapura*

Kegiatan dilaksanakan pada bulan Oktober 2013 di *Giant* Singapura. *Giant* merupakan salah satu jaringan *supermarket* terbesar di Singapura.



Gambar 137. *In-Store Marketing di Supermarket Giant Singapura*

Kegiatan lain yang dilakukan dalam upaya pengembangan pasar internasional dan peningkatan daya saing bagi produk pertanian Indonesia adalah Pengembangan Indikasi Geografis.

Perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia diatur dalam : Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Merek. Berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tersebut, Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.

Di sektor pertanian, Indikasi Geografis diperlukan sebagai salah satu instrumen proteksi dan pematenan produk-produk pertanian yang khas dari suatu daerah/wilayah tertentu di Indonesia. Melalui Indikasi Geografis diharapkan kualitas khas dari produk pertanian Indonesia yang dihasilkan oleh suatu daerah atau wilayah dapat menjadi daya saing untuk meningkatkan pemasaran dan melindungi produk pertanian yang bersangkutan dari pemalsuan.

Dalam rangka Pengembangan Produk Indikasi Geografis sektor Pertanian antara lain telah dilakukan:

1. Nota Kesepahaman (*MoU*) antara tiga Kementerian yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pertanian dengan No:05/Mentan/*MoU*/PC.110/4/2011 tentang Pengembangan Potensi Produk Indikasi Geografis Bidang Pertanian.
2. Sampai dengan Juni 2014 telah tersertifikasi Indikasi Geografis untuk 23 produk pertanian. Proses sertifikasi dilakukan melalui fasilitasi Kementerian Pertanian maupun Pemerintah Daerah (APBD). Ke-23 produk pertanian bersertifikat Indikasi Geografis dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 28. Produk Pertanian yang Telah Memiliki Sertifikat Indikasi Geografis

No	Provinsi	Produk Pertanian yang Telah Bersertifikasi Indikasi Geografis
1	Aceh	Kopi Arabika Gayo dan Minyak Nilam Aceh
2	Kepulauan Bangka Belitung	Lada Putih Muntok
3	Lampung	Kopi Robusta Lampung
4	Jawa Barat	Kopi Arabika <i>Java Preanger</i> , Ubi Cilembu Sumedang, Tembakau Mole Sumedang, dan Tembakau Hitam Sumedang
5	Jawa Tengah	Purwoceng Dieng, Carica Dieng, dan Tembakau Srinthil Temanggung
6	D.I. Yogyakarta	Salak Pondoh Sleman dan Gula Kelapa Kulon Progo
7	Jawa Timur	Kopi Ijen Raung
8	Bali	Kopi Arabika Kintamani dan Mete Kubu
9	NTB	Susu Kuda Sumbawa dan Kangkung Lombok
10	NTT	Kopi Arabika Flores Bajawa
11	Kalimantan Timur	Beras Adan Krayan
12	Sulawesi Selatan	Kopi Arabika Kalosi Enrekang dan Kopi Arabika Toraja
13	Maluku	Vanili Kepulauan Alor



Gambar 145. Produk Indikasi Geografis Pertanian Indonesia

Keikutsertaan
Kementerian Pertanian
Pada Pameran Internasional
di Beberapa Negara



Pameran *International Livestock, Dairy, Meat Processing and Aquaculture Exposition (ILDEX)* di Vietnam



Pameran *Salon du Chocolat - Chocolate Showcase* di Paris



Pameran *Biofach* di Jerman



Pameran *Malaysia International Halal Showcase (MIHAS)* di Malaysia



12.1. Meningkatkan Peluang Usaha

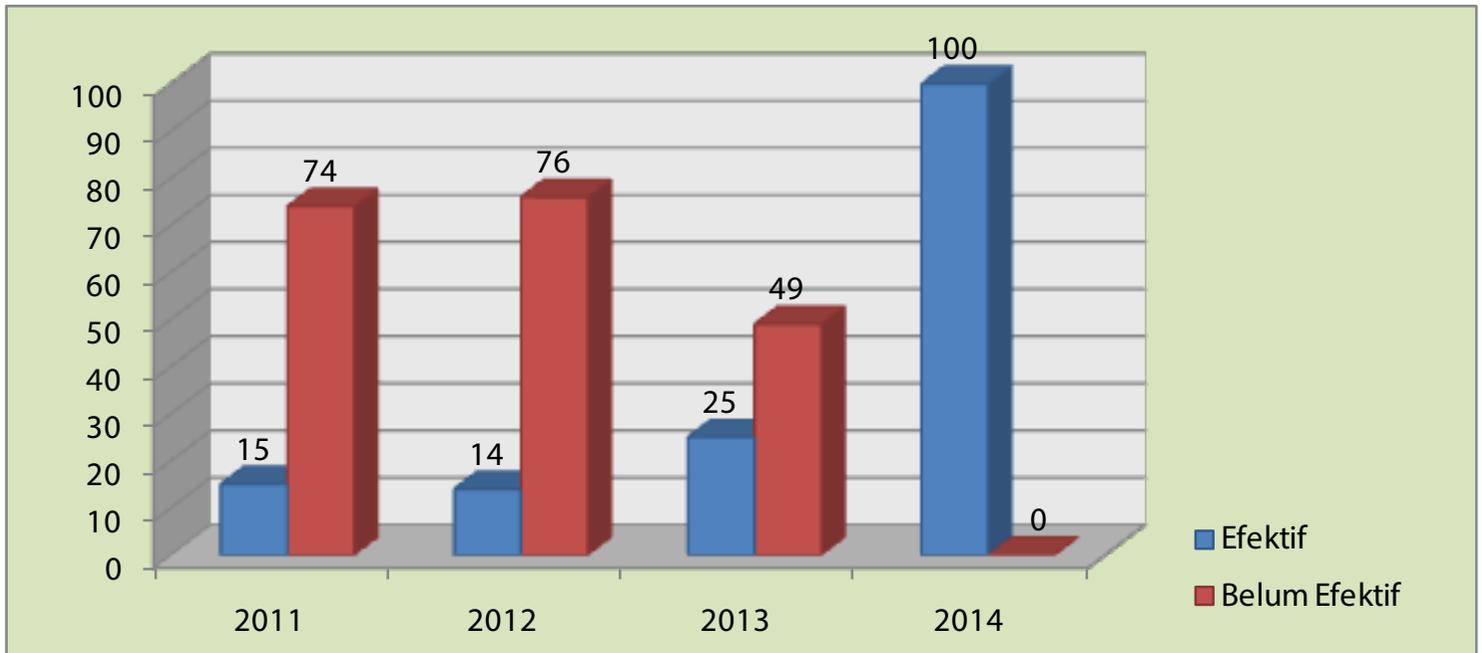
12.1.1. Menumbuhkan Kemitraan Usaha

Kemitraan ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dan peranan usaha kecil sebagai usaha yang tangguh, mandiri dan memperkuat perekonomian nasional. Kemitraan usaha dalam bidang pertanian merupakan salah satu bentuk jalinan kerjasama antar berbagai pihak dalam pengembangan usaha agribisnis untuk mewujudkan pertanian modern yang berorientasi agribisnis, mampu meningkatkan pendapatan melalui peningkatan nilai tambah dan daya saing serta mampu meningkatkan kualitas sumberdaya pengelolaan seperti petani/Kelompok Tani/Gapoktan dan Koperasi.



Gambar 139. Menteri Pertanian menghadiri acara penandatanganan Nota Kesepahaman bidang pertanian Indonesia - Malaysia

Untuk keberhasilan kemitraan usaha agribisnis dalam perekonomian dewasa ini membutuhkan adanya suatu rekayasa kelembagaan yang berorientasi pada efisiensi pengelolaan sumberdaya dan peningkatan posisi tawar petani. Bentuk institusi yang relevan untuk maksud tersebut adalah Kelompok Tani/Gapoktan dan Koperasi Tani. Di samping itu, peran pemerintah penting dalam menciptakan kondisi yang kondusif guna berkembangnya kemitraan yang harmonis melalui penyusunan regulasi dan deregulasi, menyediakan fasilitas prasarana dan sarana, permodalan, manajemen, teknologi dan rekayasa rancang bangun kemitraan. Terkait hal tersebut, sejak tahun 2011 telah dilakukan upaya menumbuhkan kemitraan melalui kegiatan temu usaha dengan keragaan hasil sebagai berikut :



Gambar 140. Keragaan Penumbuhan Kemitraan Melalui Temu Usaha

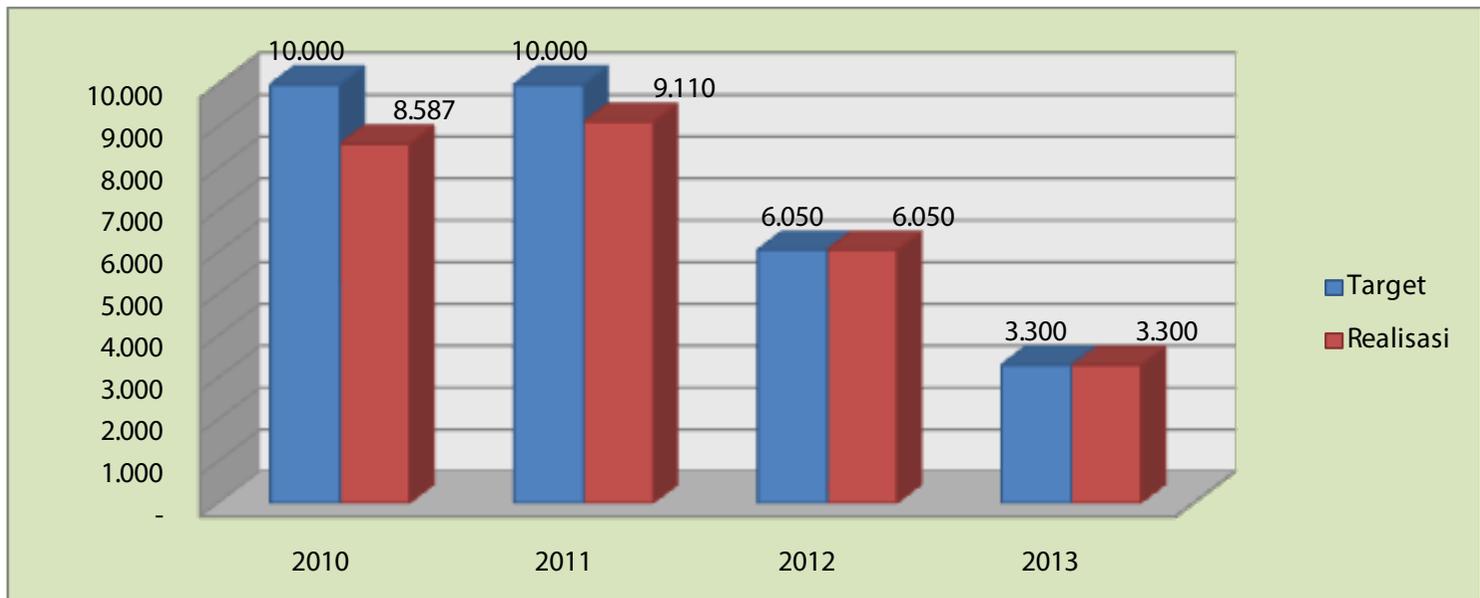
12.1.2. Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)

Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) merupakan program terobosan dari Kementerian Pertanian untuk menanggulangi kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, sekaligus mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah pusat dan daerah serta kesenjangan antar subsektor.

Kegiatan PUAP bertujuan untuk : (1) Mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui penumbuhan dan pengembangan kegiatan usaha agribisnis di perdesaan sesuai dengan potensi wilayah; (2) Meningkatkan kemampuan pelaku usaha agribisnis, Pengurus Gapoktan, Penyuluh dan Penyelia Mitra Tani; (3) Memberdayakan kelembagaan petani dan ekonomi perdesaan untuk pengembangan kegiatan usaha agribisnis; dan (4) Meningkatkan fungsi kelembagaan ekonomi petani menjadi jejaring atau mitra lembaga keuangan dalam rangka akses ke permodalan.

Adapun sasaran dari kegiatan PUAP adalah : (1) Berkembangnya usaha agribisnis di desa terutama desa miskin terjangkau sesuai dengan potensi pertanian desa; (2) Berkembangnya Gapoktan yang dimiliki dan dikelola oleh petani untuk menjadi kelembagaan ekonomi; (3) Meningkatnya kesejahteraan rumah tangga tani miskin, petani/peternak (pemilik dan/atau penggarap) skala kecil, buruh tani; dan (4) Berkembangnya usaha agribisnis petani yang mempunyai siklus usaha harian, mingguan, maupun musiman.

Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PUAP disalurkan melalui Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) selaku kelembagaan tani yang berfungsi sebagai pelaksana PUAP. Program Pemberdayaan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) dilaksanakan oleh petani (pemilik dan/atau penggarap), buruh tani dan rumah tangga tani miskin di perdesaan melalui koordinasi Gapoktan sebagai lembaga yang dimiliki dan dikelola oleh petani.



Gambar 141. Target dan Realisasi Desa/Gapoktan PUAP 2010-2013

PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERDESAAN (PUAP)



Gapoktan Tunas Berduri beralamat di Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Riau Pada tahun 2008, Gapoktan Tunas Berduri menerima BLM-PUAP.

Saat ini, Gapoktan Tunas Berduri telah memiliki usaha simpan pinjam yang diikuti oleh anggota Gapoktan, maupun anggota diluar Gapoktan. Usaha simpan pinjam yang dilakukan sudah baik dimana adanya administrasi dan aturan yang jelas yang tertuang dalam AD/ART Gapoktan. Pengenalan teknologi pasca panen nanas, sebagai komoditas unggulan desa Kuala Nenas.

Melimpahnya hasil panen nanas, membuat petani harus kreatif dalam mensiasatinya, sehingga tidak mengalami kerugian. Salah satunya adalah dengan pengolahan pasca panen dari nanas menjadi keripik nanas, selai nanas, sirup nanas dan lain-lain, sehingga secara tidak langsung mampu meningkatkan pendapatan petani yang tergabung dalam program PUAP tersebut.

Saat ini, produk-produk olahan dari Gapoktan Tunas Berduri telah berkembang dengan baik, dimana keripik nanas produksi Desa Kualu Nenas telah menjangkau pasar internasional, yaitu Malaysia dan Arab Saudi.

PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERDESAAN (PUAP)

Pada awal berdiri Gapoktan Maju yang beralamat di Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan bersama hanya yang terdiri dari 12 kelompok tani dan seluruh anggota yang tergabung didalamnya adalah 699 orang. Namun saat ini jumlah kelompok tani adalah 13 kelompok, sehingga jumlah anggota menjadi 738 orang. Beberapa inovasi teknologi yang dikembangkan Gapoktan Maju Bersama adalah ternak sapi dengan jenis sapi yang dikembangkan adalah Brahma Cross ex impor Australia, teknologi yang dikembangkan adalah pembuatan pakan sentrat, pembuatan biogas dan

teknologi IB (Inseminasi Buatan). Inovasi komoditas hortikultura adalah penanaman cabe jenis Primasit, Lado, Rimbun dan Jenis Lokal, kemudian percobaan penanaman Melon Japonika, Timun Hercules, Jagung Hibrida.



Kegiatan penggemukan sapi Gapoktan Maju Bersama

12.1.3. Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3)

Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3) adalah lembaga yang terorganisir secara formal, tumbuh dan berkembang secara mandiri di masyarakat dengan kegiatan utama meningkatkan gerakan moral melalui kegiatan pendidikan, sosial dan keagamaan, serta meningkatkan keterampilan masyarakat melalui kegiatan agribisnis yang dikelola secara mandiri dan atau bermitra dengan petani atau kelompok tani di wilayahnya, antara lain: lembaga Pondok Pesantren. Dalam perkembangan selanjutnya yang difasilitasi meliputi: seminari, paroki, pasraman, gereja, subak, dan vihara yang mempunyai potensi agribisnis dan strategis melalui kegiatan pendidikan moral dan sosial di dalam masyarakat, serta mempunyai kekuatan dan potensi untuk dikembangkan sebagai penggerak pembangunan perdesaan.

Melalui LM3, Kementerian Pertanian terus mengembangkan usaha agribisnis yang telah dirintis dengan memberdayakan sumber daya manusia, penguatan kelembagaan, fasilitasi bantuan sosial penguatan modal usaha agribisnis, dan pendampingan. Pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis LM3 dilakukan secara terpadu mulai dari proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi yang didasarkan pada indikator kinerja, sehingga program pembangunan agribisnis dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel. Pemberdayaan

LM3 dimaksudkan untuk mengatasi rendahnya penguasaan teknologi dan manajemen serta lemahnya SDM dan kelembagaan LM3, sedangkan fasilitasi dana bantuan sosial penguatan modal LM3 dimaksudkan untuk mengatasi masalah dalam pengembangan usaha agribisnis di LM3, seperti keterbatasan modal untuk pengembangan usaha hulu, budidaya, hilir dan jasa penunjang.

Pola pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis LM3 ini dapat merangsang tumbuh dan berkembangnya usaha agribisnis di perdesaan. Pengelola LM3 diarahkan agar mampu memilih usaha yang produktif guna menunjang target utama pembangunan pertanian, meliputi: swasembada (kedelai, gula, dan daging sapi) dan swasembada berkelanjutan (padi dan jagung); peningkatan diversifikasi pangan; peningkatan nilai tambah, daya saing, dan ekspor; serta peningkatan kesejahteraan petani.

Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3) Pondok Pesantren Sunan Drajat

Salah satu usaha Pondok Pesantren Sunan Drajat (PPSD) adalah bidang peternakan. Unit usaha peternakan berada di areal seluas 20 hektar. PPSD memiliki unit usaha penggemukan kambing dan sapi. Saat ini ada sekitar 100 ekor sapi dan sekitar 500 ekor kambing. Kemudian, kotoran ternak dicampur dengan kangkung dan rumput gajah yang telah dikeringkan, untuk pupuk. Membutuhkan 20-40 ton kangkung per bulan. Peternakan ini bekerjasama dengan PT Agrindo.



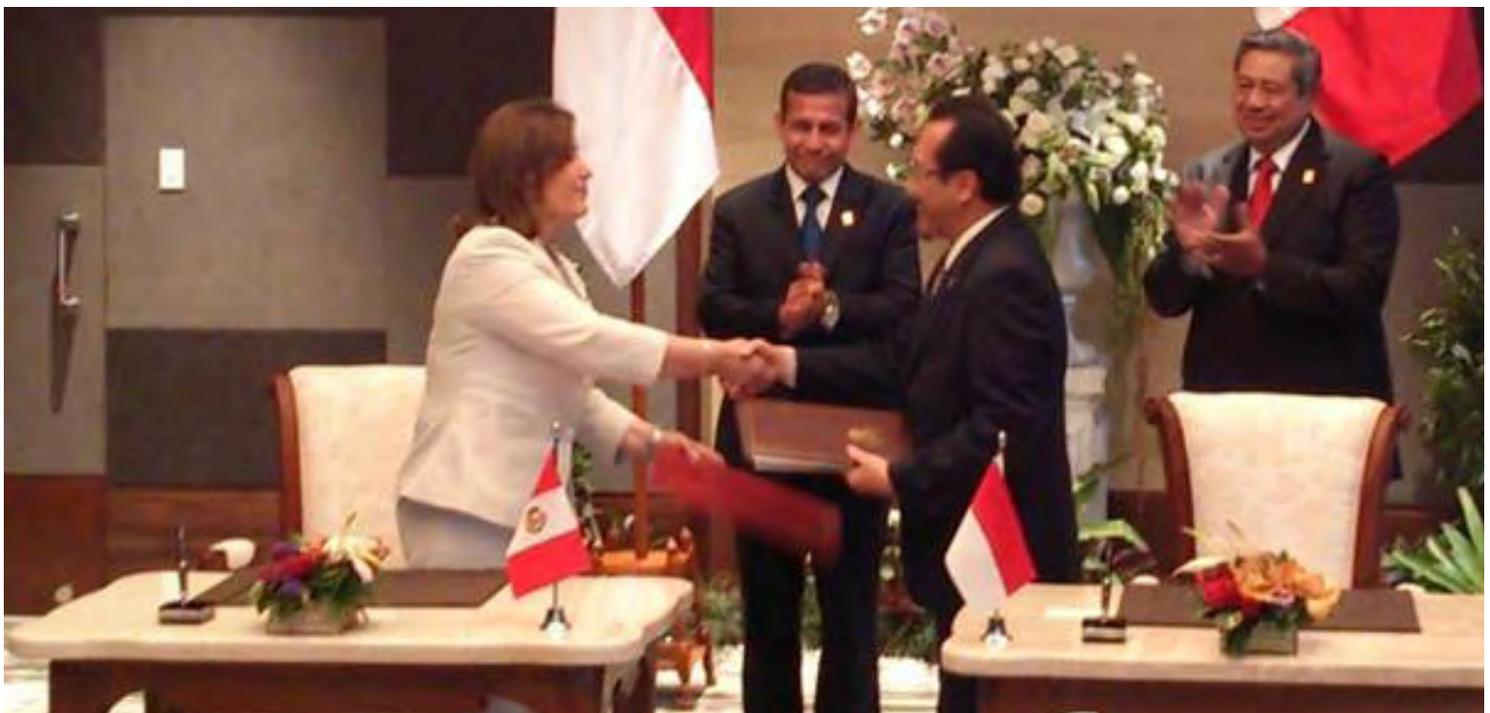
Selain usaha di bidang peternakan, PPSD mengembangkan budidaya kemiri sunan yang bisa hidup ratusan tahun. Kemiri ini dimanfaatkan untuk energi alternatif pengganti bahan bakar minyak (BBM). Kandungan minyak kemiri sunan lebih banyak daripada buah jarak dan kelapa sawit. PPSD juga menanam mengkudu dan buahnya dimanfaatkan untuk obat herbal (Javanoni). Ada 100 hektar lahan untuk mengkudu ini.

Pada tahun 2006 PPSD mendapat bantuan dari program LM3 (Lembaga Mandiri Mengakar di Masyarakat) Kementerian Pertanian sebesar Rp 230 juta. Bantuan ini dibelikan 34 ekor sapi, dan sekarang sudah berkembang menjadi 55 ekor. Tahun 2011 PPSD kembali menerima bantuan dari Kementerian Pertanian sebesar Rp 100 juta. Kali ini bantuan untuk program LM3 Model. Dengan bantuan ini PPSD menggelar sejumlah pelatihan pertanian. Peserta pelatihan dari dalam pondok pesantren sendiri.

12.2. Meningkatkan Layanan Investasi di Sektor Pertanian

Investasi di sektor pertanian mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hal ini ditandai dengan semakin baiknya peringkat investasi Indonesia yang diberikan oleh berbagai lembaga pemeringkat internasional (*Investment Grade* oleh *Fitch Rating*, *Moody's* dan *Rating and Investment Information Inc.* dari Jepang) dan semakin meningkatnya investasi dari Penanaman Modal Asing (PMA) di sektor pertanian primer dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 15,43% per tahun.

Pengembangan investasi pertanian Indonesia diarahkan untuk : 1) usaha primer/budidaya (*land based*) di Indonesia Timur (Kalimantan, Sulawesi, Papua), dengan tujuan untuk menghasilkan produk pangan segar (konsumsi langsung) serta menghasilkan bahan baku industri-agro; 2) usaha pengolahan hasil/hilirisasi produk pertanian di Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi, dengan tujuan memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri dan luar negeri serta substitusi impor; 3) meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian (produk pangan segar) dengan karakteristik yang sesuai dengan tuntutan konsumen untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri dan substitusi impor; 4) harus lebih ditujukan terutama terhadap produk bernilai tambah (olahan) baik pada pasar ekspor tradisional maupun pasar baru (perluasan pasar).



Gambar 142. Menteri Pertanian menandatangani Nota Kesepahaman bidang pertanian Indonesia - Peru

Oleh karena itu, peran serta swasta dan BUMN dalam memanfaatkan peluang investasi serta menciptakan peluang bisnis nasional sangat diharapkan di tengah krisis global saat ini; 5) tidak hanya terkonsentrasi pada daerah-daerah yang telah berkembang dan mempunyai infrastruktur yang sudah cukup memadai seperti di pulau Jawa dan Bali, tetapi lebih diarahkan untuk

pengembangan di luar pulau Jawa dan Bali, khususnya dalam rangka mendukung program pemerintah.

Pameran Khusus untuk Investasi

Pameran investasi yang bertujuan untuk:

- Sebagai sarana untuk menyebarkan potensi dan peluang investasi serta berbagai kebijakan/regulasi investasi pertanian.
- Mendorong dan merangsang masuknya investasi dan menarik para investor agar bersedia untuk menginvestasikan modalnya di bidang pertanian.
- Meningkatkan volume perdagangan produk-produk unggulan berbagai daerah di pasar dalam negeri dan luar negeri.

Beberapa pameran investasi di dalam dan luar negeri yang telah dilaksanakan adalah:

(1) *Annual Investment Meeting (AIM)*

Penyelenggaraan Kegiatan *Annual Investment Meeting (AIM)* yang dilaksanakan pada tanggal 10-12 Mei 2011 di Dubai merupakan kegiatan promosi investasi berskala Internasional yang meliputi multi sektor dan diikuti oleh 40 negara. Agenda kegiatan meliputi pameran/promosi investasi, stand paviliun Indonesia menampilkan berbagai informasi investasi di segala sektor yang ada di Indonesia dan menampilkan berbagai produk unggulan atau sample produk. Kegiatan lainnya yang diadakan dalam bentuk forum temu bisnis, workshop, forum investasi, dll.

Stand paviliun Indonesia dikoordinir oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan diisi oleh BKPM, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perdagangan. Sedangkan pemerintah daerah yang terlibat antara lain: Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Sedangkan Badan Usaha Milik Negara yang terlibat antara PTPN III Sumatera Utara dan swasta yang terlibat adalah CV. Agrinusa. Selain itu Kementerian Perdagangan melalui perwakilannya di Dubai yaitu *Indonesia Promotion Trade Center (IPTC)* telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan pameran tersebut.

Respon pengunjung pameran sangat antusias dan beberapa pengunjung tertarik untuk menjalin kerjasama perdagangan minyak atsiri, produk kelapa olahan, kopi dan jagung, selain itu ada beberapa pengunjung berkeinginan berinvestasi di bidang perkebunan kelapa sawit dan pengolahan CPO.

(2) *The 2nd Jogja Titex (Trade-Investment And Tourism Expo 2011)*.

Kementerian Pertanian telah berpartisipasi dalam kegiatan *The 2nd TITEX (Trade Investment and Tourism Expo)* di Yogyakarta pada tanggal 18-22 Mei 2011.

(3) *Batam Investrade Expo 2011*

"*Investrade Expo & Forum 2011*" telah diselenggarakan pada tanggal 27 – 30 Oktober 2011, di Mega Mall Batam Center, Batam Provinsi Kepulauan Riau. Peserta "*Investrade Expo & Forum 2011*" sebanyak 28 stand terdiri dari Instansi Pemerintah dan Non Pemerintah.

12.3. Pelayanan Perizinan Pertanian

Pelayanan Perizinan Pertanian oleh Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PPVTPP) meliputi: Pendaftaran Pestisida, Perizinan Pupuk, Pemasukan dan Pengeluaran Benih, Rekomendasi Impor Produk Hortikultura, dan Rekomendasi Persetujuan Peternakan.

Realisasi perizinan pupuk dan pestisida selama periode 2013 - bulan Mei 2014 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 29. Jumlah Perizinan Pupuk dan Pestisida 2013 - 2014

NO	JENIS PERIZINAN	2013		2014*	
		JUMLAH PERMOHONAN	PENERBITAN NOMOR PENDAFTARAN	JUMLAH PERMOHONAN	PENERBITAN NOMOR PENDAFTARAN
A. PERIZINAN PUPUK					
1	Pendaftaran Pupuk Anorganik	348	189	182	63
2	Pendaftaran Pupuk Organik	198	100	107	37
B. PERIZINAN PESTISIDA					
1	Pendaftaran Izin Tetap Baru	367	457	76	37
2	Pendaftaran Izin Tetap Ulang	424	518	202	85
3	Pendaftaran Izin Tetap Ekspor	34	60	28	1
4	Pendaftaran Izin Tetap Bahan Teknis	34	37	26	6
5	Pendaftaran Izin Perluasan Penggunaan	115	148	25	21
6	Pendaftaran Izin Sementara	2	8	3	1
7	Pendaftaran Izin Percobaan	477	421	323	209

Perizinan benih tanaman bertujuan untuk menjamin kelestarian sumber daya genetik, meningkatkan keragaman genetik dan menjaga keamanan hayati, menjamin ketersediaan benih secara berkesinambungan, menumbuhkembangkan industri benih di dalam negeri serta untuk meningkatkan devisa. Permohonan perizinan benih tanaman dari tahun ke tahun jumlahnya

hampir sama, untuk Penerbitan Surat Izin Pemasukan/Pengeluaran Benih Tanaman tahun 2013 sampai dengan bulan Mei 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 30. Penerbitan Surat Izin Pemasukan/Pengeluaran Benih Tanaman 2013 - Mei 2014

NO	JENIS PERIZINAN	2013			2014*		
		PENERBITAN SIP/P			PENERBITAN SIP/P		
		JUMLAH SIP/P	VOLUME		JUMLAH SIP/P	VOLUME	
			(KG)	(BIBIT)		(KG)	(BIBIT)
A. PEMASUKAN							
1	Benih Tanaman Hortikultura	309	16.009.681	14.449.267	133	2.911.298	5.212.388
2	Benih Tanaman Pangan	67	5.714.859	-	25	1.933.120	-
3	Benih Tanaman Perkebunan	46	2.028.057	8.320.750	15	299.000	1.100.000
4	Benih untuk Penelitian & SDG	87	19.401	71.451	29	1.609,18	29.650
5	Benih Rumput Pakan Ternak	6	18.600	-	1	2.920	-
	JUMLAH	515	23.790.598	22.841.468	203	5.147.947,18	6.342.038
B. PENGELUARAN							
1	Benih Tanaman Hortikultura	481	9.347.400	247.866.487	199	2.264.738	50.282.126
2	Benih Tanaman Pangan	58	4.644.853	-	29	1.104.354	-
3	Benih Tanaman Perkebunan	23	181.500	3.785.500	12	720.000	2.452.000
4	Benih untuk Penelitian & SDG	24	891	3.170	14	136	40.800
5	Benih Rumput Pakan Ternak	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	586	14.174.644	251.655.157	254	4.089.228	52.774.926

Rekomendasi Persetujuan Peternakan meliputi Rekomendasi Persetujuan Pemasukan (RPP), Tanda daftar untuk pakan ternak dan Izin Usaha Obat Hewan. RPP Ternak ke dalam dan keluar wilayah RI dimaksudkan dalam rangka memenuhi kebutuhan daging di dalam negeri untuk menunjang swasembada daging. Apabila kebutuhan daging asal ternak potong di dalam negeri sudah tercukupi, dapat dilakukan pengeluaran ternak potong dari wilayah negara Republik Indonesia. Sampai dengan bulan Mei 2014, jumlah rekomendasi persetujuan pemasukan/pengeluaran peternakan adalah sebagai berikut:

Tabel 31. Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pemasukan/Pengeluaran Peternakan
Periode 2013-Mei 2014

No	JENIS PERMOHONAN	TAHUN 2012		TAHUN 2013		TAHUN 2014 (sd. BULAN MEI)	
		Permo honan	Pener bitan	Permo honan	Pener bitan	Permo honan	Pener bitan
A	PEMASUKAN						
1	Pemasukan Karkas, Daging & Jeroan	498	435	46	35		
2	Rekomendasi Teknis Kesmavet (KDJ)	-	-	320	289		
3	Pemasukan Ternak Potong Sapi	77	70	-	-		
4	Rekomendasi Teknis Keswan (Sapi Siap Potong)	-	-	26	24		
5	Pemasukan Ternak Potong Kerbau	3	3	-	-		
6	Pemasukan Bibit Ternak Sapi	31	20	6	4	3	-
7	Pemasukan Bibit Ternak Kerbau	-	-	-	-	-	-
8	Pemasukan Bibit Ternak Kambing	1	1	1	1	-	-
9	Pemasukan Bibit Ternak Kuda	-	-	-	-	-	-
10	Pemasukan Bibit Ternak DOC	51	47	62	56	22	26
11	Pemasukan Bibit Ternak DOD	2	1	3	1	2	1
12	Pemasukan Bibit Ternak Kelinci	2	2	1	1	-	-
13	Pemasukan Benih Ternak Semen	14	11	17	14	4	3
14	Pemasukan Benih Ternak HE (Telur Tetas)	22	22	10	10	5	4
	JUMLAH A	701	612	492	435	36	34
B	PENGELUARAN						
15	Pengeluaran Ternak Potong Kambing	1	1	2	1		
16	Pengeluaran Ternak Potong Domba	-	-	1	1		
17	Pengeluaran Ternak Potong Kuda	-	-	1	-		
	JUMLAH B	1	1	4	2	-	-
C	LAIN-LAIN						
18	Pendaftaran Pakan Ternak	256	201	235	226	80	77
19	Izin Usaha Obat Hewan	25	22	26	20	3	-
	JUMLAH C	281	223	261	246	83	77

Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) bertujuan untuk memberikan kepastian dalam pelayanan pemberian RIPH bagi perusahaan yang melakukan impor produk hortikultura dan jaminan keamanan pangan produk hortikultura yang diimpor. RIPH produk segar pada tahun 2012 terealisasi sebanyak 1.695 rekomendasi dan meningkat menjadi 2.484 pada tahun 2013 (46,54%). Sehubungan dengan Peraturan Menteri Pertanian No. 47/Permentan/OT.140/4/2013 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura dan Peraturan Kementerian Perdagangan No. 16/M-DAG/PER/4/2013 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura, maka sejak April 2013, prosedur pengajuan permohonan RIPH sudah tidak melalui PPVTPP, tetapi melalui Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pengembangan Hasil Pertanian (Ditjen P2HP) dengan Sistem *On-line*.



Gambar 143. Menteri Pertanian bersama Menteri Perdagangan melakukan panen cabai merah

Tabel 32. Permohonan dan Penerbitan RIPH Per Jenis Komoditi 2012 – 2013

No.	Komoditi	Periode I (Oktober-Desember 2012)				Periode II (Januari-Juni 2013)			
		Permohonan		RIPH Yang Terbit		Permohonan		RIPH Yang Terbit	
		Jumlah Surat	Volume (Kg)	Jumlah SK	Volume (Kg)	Jumlah Surat	Volume (Kg)	Jumlah SK	Volume (Kg)
1.	Anggur	339	14.268.851.738	328	146.675.556	416	2.650.015.760	418	33.248.000
2.	Apel	336	2.853.057.928	343	36.906.405	382	5.008.913.298	446	98.713.000
3.	Bawang Bombay	89	111.765.800	87	2.838.303	283	7.208.293.000	257	24.110.000
4.	Bawang Merah	35	80.786.000	34	18.379.181	358	4.690.691.300	378	58.411.300
5.	Bawang Putih	119	681.312.207	113	59.973.858	145	4.890.030.000	161	159.990.000
6.	Brokoli	7	403.200	7	403.200	-	-	-	-
7.	Bunga Kol	3	2.002.000	3	1.003.000	-	-	-	-
8.	Cabai	32	122.678.180	27	2.490.812	-	-	-	-
9.	Durian	61	733.689.532	60	1.215.136	-	-	-	-
10.	Jeruk	100	181.532.430	100	13.365.227	301	1.888.516.200	284	16.486.000
11.	Jeruk Lemon	47	47.720.560	45	4.412.886	263	936.456.520	51	1.039.000
12.	Jeruk Mandarin	223	882.669.540	218	21.018.794	307	4.428.071.000	344	94.300.000
13.	Jeruk Oranges	80	113.165.830	75	4.570.620	-	-	-	-
14.	Jeruk Pamele	22	53.326.000	19	579.928	13	20.207.000	8	85.000
15.	Kentang	21	25.255.000	22	20.793.870	46	993.759.000	-	-
16.	Lengkeng	85	1.385.905.853	85	14.471.802	131	2.902.059.292	137	25.007.000
17.	Mangga	31	4.135.500	-	-	-	-	-	-
18.	Melon	20	1.703.500	19	8.725	-	-	-	-
19.	Pisang	3	1.523.900	3	207.916	-	-	-	-
20.	Wortel	104	494.981.931	107	13.052.068	-	-	-	-
TOTAL		1.757	22.046.466.628	1.695	362.367.287	2.645	35.617.012.370	2.484	511.389.300

BAGIAN III

MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN PETANI

Peningkatan kesejahteraan petani merupakan salah satu target sukses Kementerian Pertanian pada Kabinet Indonesia Bersatu II disamping tiga target sukses lainnya, yaitu: (1) Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan; (2) Peningkatan Diversifikasi Pangan dan (3) Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, dan Ekspor Produk Pertanian.

Definisi kesejahteraan memiliki makna yang sangat luas, bukan hanya ditunjukkan dari indikator ekonomi yang dalam hal ini diwakili dengan pendapatan, tetapi juga terkait pemenuhan kebutuhan individu dari indikator non ekonomi atau indikator sosial lainnya, seperti tingkat pendidikan, kecukupan kebutuhan perumahan, kualitas pelayanan kesehatan, keamanan dan sebagainya.

Definisi kesejahteraan seringkali direduksi menjadi indikator ekonomi dan indikator non ekonomi, yaitu sebatas terpenuhinya kebutuhan fisik dasar minimal seperti sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan. Namun mengingat masih sangat luasnya indikator-indikator lainnya (sosial, budaya dan keamanan) yang merupakan indikator pendukung kesejahteraan maka indikator kesejahteraan petani seringkali lebih disederhanakan melalui pendekatan indikator ekonomi, khususnya oleh variabel pendapatan. Peningkatan kesejahteraan identik dengan peningkatan pendapatan untuk memperbaiki/meningkatkan kebutuhan konsumsi. Dengan demikian peningkatan kesejahteraan dapat ditempuh melalui upaya untuk meningkatkan pendapatan dan atau meningkatkan kebutuhan konsumsi rumahtangga. Secara garis besar indikator kesejahteraan petani terkait dengan dua aspek penting kebijakan, yaitu kebijakan untuk meningkatkan sebesar besarnya pendapatan rumahtangga petani, dan kebijakan untuk sedapat mungkin menekan biaya/pengeluaran rumahtangga petani.

Walaupun demikian tidak selalu upaya peningkatan pendapatan petani secara otomatis diikuti dengan peningkatan kesejahteraan petani, karena kesejahteraan petani juga tergantung pada nilai pengeluaran yang harus dibelanjakan keluarga petani serta faktor-faktor non-finansial seperti faktor sosial budaya. Walaupun demikian, sisi pendapatan petani merupakan sisi yang terkait secara langsung dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Pertanian. Oleh karena itu, dalam kerangka peningkatan kesejahteraan petani, prioritas utama Kementerian Pertanian adalah upaya meningkatkan pendapatan petani.

BAB XIII. PENINGKATAN PENDAPATAN PETANI

Pembangunan pertanian berperan dalam mengentaskan penduduk dari kemiskinan, mengurangi kesenjangan pendapatan antardaerah dan antargolongan masyarakat, serta dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal. Pendapatan petani yang makin meningkat akan mendorong peningkatan permintaan dalam negeri terhadap hasil industri dan jasa. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan pertanian memegang peranan yang penting dalam pembangunan ekonomi terutama untuk meningkatkan taraf hidup petani sebagai kelompok masyarakat yang terbesar, di samping mendukung pertumbuhan industri.

Pendapatan petani per kapita adalah pendapatan yang diterima oleh setiap petani dalam suatu negara selama kurun waktu satu tahun, atau ditentukan oleh besarnya total pendapatan sektor pertanian dan jumlah petani. Pendapatan per kapita petani dihitung dengan membagi Produk Domestik Bruto (PDB) per subsektor/sektor pertanian dengan jumlah petani pada masing-masing sub sektor/sektor pertanian. Data PDB diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), sementara data jumlah petani diperoleh dari estimasi berdasarkan proyeksi angkatan kerja per sub sektor (Proyeksi Pusdatin) dikalikan dengan proporsi angkatan kerja yang diperoleh dari Proyeksi Penduduk BPS tahun 2010-2035.

Tabel 33. Perkembangan Pendapatan Petani per Kapita, 2010–2013

Sub Sektor/Sektor	Pendapatan Petani Per Kapita (Rp Juta/Kap/Tahun) ¹⁾				
	2010	2011	2012	2013	Rata-rata Pertumbuhan 2010-2013
Tanaman Pangan	4,50	5,06	5,56	5,77	
(%)	(7,55) ²⁾	(12,34)	(9,83)	(3,87)	8,68
Perkebunan	2,59	2,71	2,64	2,78	
(%)	(0,55)	(4,74)	(-2,63)	(5,24)	2,45
Peternakan	6,10	6,33	6,58	6,87	
(%)	(3,56)	(3,87)	(3,85)	(4,39)	4,04
Pertanian Sempit ³⁾	4,08	4,43	4,62	4,81	
(%)	(4,88)	(8,70)	(4,31)	(4,10)	5,71

Sumber : BPS, diolah

Keterangan :

1. Pendapatan per kapita dihitung dengan membagi PDB harga konstan 2000 tahun bersangkutan dengan jumlah petani pada masing-masing sub sektor. Penentuan jumlah petani sebagai pembagi PDB, dihitung dari perkalian proyeksi angkatan kerja per sub sektor (Proyeksi Pusdatin) dengan proporsi angkatan kerja (BPS, Proyeksi Penduduk 2010-2035)
2. Angka dalam kurung menunjukkan perkembangan dari tahun sebelumnya.
3. Pertanian Sempit terdiri dari sub sektor tanaman pangan, peternakan dan perkebunan.

Pendapatan petani per kapita meningkat menjadi Rp. 4,81 juta/kapita/tahun pada tahun 2013 atau meningkat 4,10% dibandingkan tahun 2012. Pada tahun 2012, rata-rata pendapatan petani per kapita adalah sebesar Rp. 4,62 juta/kapita/tahun. Jika dicermati pada tiap-tiap sub sektor, pendapatan petani per kapita tertinggi pada tahun 2013 adalah pada sub sektor peternakan sebesar Rp. 6,87 juta/kapita/tahun, diikuti berturut-turut oleh subsektor tanaman pangan (Rp. 5,77 juta/kapita/tahun) dan perkebunan (Rp. 2,78 juta/kapita/tahun).

Pertumbuhan pendapatan petani per kapita menunjukkan angka yang positif. Rata-rata pertumbuhan pendapatan petani terbesar diperoleh dari sub sektor tanaman pangan (8,68%), sedangkan rata-rata pertumbuhan petani yang terendah berasal dari sub sektor perkebunan (2,45%). Hal ini disebabkan karena turunnya harga komoditas perkebunan pada tahun 2012 yang mengakibatkan turunnya pendapatan petani sub sektor perkebunan.

13.1. Peningkatan Kapasitas SDM Petani

Petani merupakan sumberdaya yang sangat vital karena merupakan pelaku utama pembangunan, terutama pembangunan sektor pertanian. Tanpa pelaku yang handal dan berkompeten, maka pembangunan pertanian tidak dapat berjalan secara optimal.

Tabel 34. Jumlah Petani Menurut Sub Sektor dan Jenis Kelamin Hasil ST2013 (jiwa)

Sektor/Subsektor	Laki-laki	%	Perempuan	%	Jumlah
Sektor Pertanian	24.362.157	76,84	7.343.180	23,16	31.705.337
Tanaman Pangan	16.096.457	78,91	4.302.682	21,09	20.399.139
Hortikultura	9.342.562	78,17	2.608.427	21,83	11.950.989
Perkebunan	11.729.886	83,09	2.386.579	16,91	14.116.465
Peternakan	11.080.280	75,18	3.658.009	24,82	14.738.289
Pertanian lainnya (Perikanan & Kehutanan)	8.231.180	86,96	1.233.969	13,04	9.465.149

Petani di Indonesia didominasi oleh laki-laki, dimana dari 31,70 juta petani terdapat 24,36 juta petani berjenis kelamin laki-laki atau sebesar 76,84 persen. Dominasi petani laki-laki di sektor pertanian terjadi di semua subsektor Pertanian. Persentase petani laki-laki tertinggi terdapat di subsektor perkebunan sedangkan yang terendah pada sub sektor peternakan.

Jika dilihat dari jumlah rumah tangga usaha pertanian, lebih dari 50 persen rumah tangga pertanian di Indonesia dengan petani utama berada pada kelompok usia 35-45 tahun, namun masih ada lebih dari 30 persen yang berusia tua yaitu di atas 54 tahun. Sedangkan persentase rumah tangga dengan petani utama berumur kurang dari 35 tahun hanya 12,87 persen saja.

Tabel 35. Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian
Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Petani Utama Hasil ST2013

Kelompok Umur Petani Utama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
	(000)	(000)	(000)	%
< 15	2,84	0,46	3,30	0,01
15-24	208,91	21,03	229,94	0,88
25-34	2.939,89	189,75	3.129,64	11,97
35-44	6.378,80	506,30	6.885,10	26,34
45-54	6.524,57	800,97	7.325,54	28,03
55-64	4.440,90	789,00	5.229,90	20,01
≥ 65	2.640,05	691,99	3.332,04	12,75
Jumlah	23.135,96	2.999,50	26.135,46	
%	88,52	11,48		

Perkembangan jumlah tenaga kerja pertanian berdasarkan tingkat pendidikan periode 2010-2014 secara umum terjadi penurunan pada tenaga kerja dengan tingkat pendidikan SD ke bawah dan SLTP. Sedangkan yang berpendidikan SLTA dan perguruan tinggi memperlihatkan perkembangan yang cukup signifikan. Rincian secara lengkap pada Tabel berikut.

Tabel 36. Tenaga Kerja Pertanian Berdasarkan Pendidikan, Tahun 2010-2014

Tingkat Pendidikan	2010	2011	2012	2013 *)	2014 *)	% Rerata Pertum- buhan
Tdk/Blm Pernah Sekolah	3.720.759	4.084.419	3.853.975	3.822.587	3.793.009	0,64
Tdk/Blm Tamat SD	10.280.728	9.099.513	8.720.555	8.623.101	8.545.870	-4,42
SD	14.884.127	14.200.235	14.424.887	14.267.540	14.160.864	-1,21
SLTP	6.281.776	5.650.885	5.669.157	5.611.958	5.575.574	-2,84
SLTA	3.311.859	3.301.781	3.463.964	3.430.421	3.404.602	0,72
Perguruan Tinggi	219.794	205.139	296.712	292.593	289.230	8,86
Jumlah	38.699.043	36.541.972	36.429.250	36.048.200	35.769.148	-1,93

Sumber: BPS, diolah kembali oleh Pusdatin dan PPSDMP

*) Proyeksi (diolah oleh Pusdatin)

Komposisi tenaga kerja berdasarkan pendidikan pada tahun 2014 adalah sebagai berikut Tidak/Belum Pernah Sekolah sebanyak 3,79 Juta orang (10,60 %), Tidak/Belum Tamat SD sebanyak 8,45 juta orang (23,90 %), Pendidikan SD sebanyak 14 15 juta orang (39,57 %), SLTP sebanyak 5 57 juta orang (15,58 %), SLTA sebanyak 3 41 juta orang (9,54%), dan Perguruan Tinggi sebanyak 0,28

juta orang (0,81 %). Dengan demikian maka tenaga kerja di sektor pertanian masih didominasi oleh tingkat pendidikan SD ke bawah yaitu sebanyak 74,07 persen, hal ini merupakan salah satu penyebab rendahnya produktivitas tenaga kerja pertanian.

Untuk meningkatkan kapasitas SDM Petani, kebijakan yang dilakukan Kementerian Pertanian pertanian difokuskan pada:

- Peningkatan kemampuan dan kemandirian petani untuk mengoptimalkan usahanya secara berkelanjutan.
- Fasilitasi dan mendorong kemampuan petani untuk dapat mengakses berbagai peluang usaha dan sumberdaya dalam memperkuat/mempertanggung usaha taninya.
- Penumbuhan kebersamaan dan pengembangan kemampuan petani dalam mengelola kelembagaan petani dan kelembagaan usaha serta menjalin kemitraan.

(1) Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya (P4S)

Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S) merupakan lembaga pelatihan petani yaitu lembaga pelatihan/permagangan pertanian dan perdesaan yang didirikan, dimiliki dan dikelola oleh petani secara swadaya, baik perorangan maupun kelompok. P4S tumbuh secara swadaya dengan dilatarbelakangi oleh motivasi petani atau pelaku usaha agribisnis yang sukses dalam usahanya serta untuk membagi pengalaman dan kiat-kiat keberhasilannya kepada sesama petani melalui proses pelatihan dan permagangan di bidang pertanian/perdesaan. Kehadiran P4S yang merupakan refleksi tumbuhnya kesadaran dan tanggungjawab petani akan pembangunan pertanian pada umumnya dan pengembangan sumberdaya petani pada khususnya.

Keberhasilan petani pendiri maupun pengelola P4S dalam usahatannya secara langsung akan mengundang rasa ingin tahu petani akan kiat-kiat keberhasilan yang diterapkan sang pendiri P4S. Sifat kepeloporan, keteladan, dan rasa ingin berbagi ilmu dan pengalaman menjadikan P4S tempat yang nyaman untuk belajar, berlatih, dan magang bagi petani.

Kelembagaan P4S berfungsi untuk mempercepat penyebaran informasi teknologi di bidang pertanian/agribisnis dan perdesaan melalui pelaksanaan pelatihan/ permagangan bagi masyarakat tani di sekitarnya. Selain itu, P4S juga diharapkan dapat berfungsi menyediakan informasi agribisnis dan jasa konsultasi agribisnis bagi petani/ pelaku usaha disekitarnya. Keberadaan Kelembagaan P4S diperkuat dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 03/Permentan/PP.140/1/2014 tanggal 29 Januari 2014 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya.

Pembinaan P4S berdasarkan Permentan 03 tahun 2010 merupakan serangkaian kegiatan yang meliputi penumbuhan, pengembangan, serta klasifikasi dan sertifikasi. Penumbuhan P4S dilakukan melalui tahapan identifikasi potensi dan registrasi, yang dilakukan oleh kelembagaan yang menangani penyuluhan di Kabupaten/ Kota. Pengembangan P4S merupakan serangkaian kegiatan pembinaan melalui bimbingan dan pelatihan oleh Pembina untuk meningkatkan kapasitas P4S dalam melaksanakan pelatihan/permagangan.

Tabel 37. Klasifikasi P4S Secara Nasional

NO	PROVINSI	KLASIFIKASI			JUMLAH
		Madya	Pemula	Utama	
1	Bali	10	11		21
2	NAD	3	2	2	7
3	Sumatera Utara	6	2	1	9
4	Sumatera Barat	14	27	1	42
5	Sumatera Selatan	3	7		10
6	Riau	2	2	1	5
7	Jambi	7	11		18
8	Bangka Belitung	2	5		7
9	Lampung	3	23		26
10	Banten	12	27	1	40
11	Bengkulu		5		5
12	DI. Yogyakarta	18	33	4	55
13	DKI Jakarta	8	17		25
14	Gorontalo	2	4		6
15	Jambi	7	11		18
16	Jawa Barat	67	102	9	178
17	Jawa Tengah	50	52	2	104
18	Jawa Timur	42	71	1	114
19	Kalimantan Barat	5	10	1	16
20	Kalimantan Selatan	7	11		18
21	Kalimantan Tengah	3	10	1	14
22	Kalimantan Timur	12	13		25
23	Kepulauan Riau		1		1
24	Maluku		3		3
25	Maluku Utara	2	2		4
26	Nusa Tenggara Barat	19	13	2	34
27	Nusa Tenggara Timur	48	20	5	73
28	Papua		3		3
29	Papua Barat		3		3
30	Sulawesi Barat	3	5		8
31	Sulawesi Selatan	11	29		40
32	Sulawesi Tengah	5	8		13
33	Sulawesi Tenggara	5	15		20
34	Sulawesi Utara	5	11		16
Total		374	558	31	963

Guna pemetaan pembinaan, maka P4S diklasifikasikan menjadi 3 kelas, yaitu kelas pemula, kelas madya, dan kelas utama. Sertifikasi diberikan kepada P4S yang memiliki persyaratan standar minimal sesuai dengan Permentan 03 tahun 2010. Pembinaan, pengembangan dan klasifikasi serta sertifikasi dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang oleh instansi yang menangani penyuluhan di Kabupaten/Kota dan Provinsi, UPT Pelatihan Pertanian Pusat, FK-P4S, dan BPPSDMP. Jumlah P4S seluruh Indonesia sampai dengan awal tahun 2014 sebanyak 963 P4S, dengan rincian: 31 P4S kelas Utama, 374 P4S kelas Madya dan 558 P4S kelas Pemula.

Selain bimbingan teknis, metodologi pertanian, dan metodologi diklat, Kementerian Pertanian juga memberikan bantuan sarana prasarana untuk mendukung terlaksananya diklat/magang yang berkualitas di P4S. Bantuan sarana prasarana bersumber dari dana APBN, dan CF-SKR (*Counterpart Fund-Second Kennedy Round*).

Keberadaan P4S telah dirasakan manfaatnya oleh petani/masyarakat sekitarnya atau oleh petani antar kabupaten dan provinsi. Bahkan keberadaan P4S telah dipercaya oleh lembaga internasional seperti *JICA (Japan International Cooperation Agency)*, *ASEAN (Association South East Asian Nation)*, dan *FAO (Food and Agricultural Organization)* sebagai penyedia biaya dengan peserta berasal dari Negara ASEAN, Asia Pasifik dan Afrika.

P4S Mekar Tani Jaya



Gambar 144.
Usaha P4S Mekar Tani Jaya

P4S Mekar Tani Jayaberdomisili di Jl. Cibeunying No. 85 Rt 02/ 10, Desa Cibodas, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, diketuai oleh Doyo Mulyo Iskandar

P4S ini sudah bergerak di bidang ekspor. Dalam bidang agribisnis pelaksanaannya di usahakan secara kolektif (berkelompok). Jenis usahanya antara lain sayuran eksklusif, peternakan, dan tanaman hias.

Sarana dan prasarana P4S ini sudah cukup memadai seperti ruang sekretariat, perpustakaan, ruang kelas, ruang tamu, asrama, lahan percontohan, dan lahan praktek lapang.

Hal yang terkesan di P4S ini adalah kerjasama masyarakat sekitar, dan kemitraannya seperti kebun petani mitra adalah lahan perkebunan yang dikelola langsung oleh kelompok tani dan lahan milik pribadi/perorangan seluas 18.2 ha. Kemitraan selain dengan petani dan kelompok tani sekitar juga dengan purnabakti indosat, purna bakti Bank Mandiri, Purna Bahkti Telkom dengan lahan seluas 42 ha.

P4S Merapi Farma Herbal

P4S Merapi Farma Herbal berlokasi di Jl. Kaliurang KM. 21,5 Sidorejo, Desa Hargobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta diketuai oleh Sidik Raharjo. Berdasarkan klasifikasi yang telah dilakukan, P4S ini tergolong kelas utama I antara lain karena sudah berbadan hukum dengan bentuk CV, dan mempunyai mitra usaha dengan klinik pengobatan tradisional, petani tanaman obat, pabrik jamu tradisional yang berlokasi di Yogyakarta. Sarana dan prasarana pelatihan yang memadai berupa luas usaha yang dimiliki berupa seluas 5000 m², koleksi tanaman obat 300 pot, laboratorium 1 unit, tempat produksi 3000 m², pengeringan 3 unit, outlet 170 buah dan audiovisual aid 1 buah. Fasilitas akomodasi yang memadai, dan fasilitas SDM yang dipersiapkan untuk menangani pelatihan ini secara profesional berkerjasama dengan perguruan tinggi setempat sebagai nara sumber yang sesuai dengan tututan pelatihan.

Farmaka merupakan usaha unggulan yang telah menjadi contoh petani disekitarnya antara lain: pembibitan dan budidaya tanaman obat, penjualan simplisia bahan jamu, wisata agro dan pelatihan tanaman obat, produksi jamu dan penjualan jamu godhok.

Sedangkan jenis pelatihan/permagangan yang pernah dilaksanakan antara lain: wisata bisnis obat tradisional, pengenalan tanaman obat, pengolahan jamu instan, pengelolaan pasca panen tanaman obat, dan studi banding dengan dinas pertanian.



Gambar 145. Kebun Tanaman Obat

(2) Program Magang Bagi Petani Muda Indonesia Di Jepang

Magang di Jepang adalah suatu program pengiriman petani muda Indonesia ke Jepang untuk belajar, berlatih, dan menimba pengalaman beragribisnis di Jepang. Melalui program ini petani muda dapat mempelajari teknik pertanian yang maju, manajemen pertanian, distribusi/pemasaran dan pemrosesan hasil pertanian serta peran dan arti kelompok tani di Jepang. Selain itu kegiatan magang dilakukan untuk mendidik petani muda agar berwawasan luas dan setelah pulang dapat menjadi petani pemimpin yang aktif menggerakkan daerah masing-masing dalam rangka mempromosikan modernisasi pertanian serta memperbaiki usahanya sendiri serta dapat menumbuhkembangkan etos kerja bagi pemagang dan lingkungan usahanya.



Gambar 146 . Pelatihan Peserta Magang Jepang di BBPP Lembang

Magang bagi petani muda di bidang pertanian di Jepang yang dilaksanakan oleh Badan PPSDMP telah dilaksanakan sejak tahun 1984 bekerjasama dengan 3 (tiga) Asosiasi Petani Jepang yaitu *Japan Agricultural Exchange Council di Tokyo (JAEC)*, *International Agricultural Exchange Association di Gunma (IAEA)*, dan *Niigata Agricultural Exchange Council di Niigata (NAEC)* dengan sistem permagangan murni dengan tahapan proses permagangan meliputi pra permagangan di Indonesia, permagangan di Jepang dan pembinaan lanjutan di Indonesia dengan durasi permagangan selama 8 bulan sampai dengan 1 tahun. Peserta dikategorikan sebagai kenshusei atau trainee (peserta latihan).

Peserta magang tinggal di rumah petani Jepang dan sehari-hari bekerja dengan petani tersebut. Selain aktivitas sehari-hari yang mengikuti pola kerja petani induk semang, peserta mendapat

kesempatan untuk melakukan kunjungan dan presentasi secara berkala, seperti studi banding ke petani bunga, bisnis yang dibangun oleh *Japan Agriculture Cooperative (JA Coop)*, pabrik kemasan, teknik pengolahan limbah, peternakan sapi dan ayam, pabrik pengolahan susu, belajar manajemen dasar gaya Jepang. Peserta magang akan mendapat sertifikat dari pemerintah Jepang (prefecture) sebagai tanda keberhasilan program.

Sejak tahun 2010, Kementerian Pertanian melaksanakan kerjasama permagangan dengan IAEA Gunma dan KIA Kumamoto dengan skema *Technical Internship Training Program (TITP)*. Durasi permagangan selama 1 sampai 2 tahun.

Untuk kerjasama dengan JAEC peserta dikategorikan sebagai kenshusei dengan uang saku bersih sekitar 40.000 Yen per bulan. Sementara untuk TITP pada tahun pertama peserta dikategorikan sebagai kenshusei sedangkan pada tahun kedua dan atau ketiga, disebut sebagai *jitshusei* (pemegang) dengan gaji bersih sekitar 80.000 Yen per bulan belum termasuk honor lembur.



Gambar 147. Pembekalan Peserta Magang Jepang

Alumni magang yang ditugaskan BPPSDMP membentuk organisasi Ikatan Alumni Magang Jepang (IKAMAJA) yang mewadahi kegiatan alumni di Indonesia dan saat ini alumni berjumlah 1141 orang (1984 – 2013).

Peningkatan dari segi pendapatan alumni magang Jepang setelah mengikuti program Magang Jepang cukup signifikan, sebagaimana hasil evaluasi yang telah diolah memberikan informasi dan gambaran yang cukup bagus dari perkembangan alumni dan perubahan management pertaniannya. Kondisi ini dapat digambarkan dari pernyataan alumni yang menyatakan bahwa program magang Jepang ini bermanfaat (69%) karena yang menarik saat magang Jepang prosentase yang paling besar yaitu semangat dalam bekerja (77%). Serta dari segi tingkat pendapatannya paling tinggi dari alumni yang berasal dari Fukui dan Niigata rata-rata pendapatannya per bulannya + 7 juta per orang yang mayoritasnya hasil pendapatan mereka berasal dari Hortikultura, yang tingkat pendapatannya dibawah Fukui dan Niigata yaitu prefektur Tokyo + 4 juta per bulan per orang yang mayoritas tingkat pendapatannya berasal dari bidang Perkebunan sedangkan yang paling rendah Kumamoto dan Gunma rata-rata per orang 1.5 – 2.8 juta per bulan. Namun hasil pengolahan data tersebut diambil kesimpulan berdasarkan rata-rata walaupun jika dilihat masing-masing alumni ada alumni dari Gunma memperoleh tingkat prosentase pendapatan yang tinggi pula.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara kinerja sebelum dengan kinerja sesudah, di mana kinerja sesudah lebih baik dari kinerja sebelum. Sehingga dapat disimpulkan bahwa program magang Jepang mampu meningkatkan kinerja petani. Indikator kinerja petani dilihat dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam berusahatani. Keberhasilan alumni magang Jepang dalam penyebarluasan ilmu dan teknologi pertanian yang diperoleh sesudah magang Jepang yaitu dengan cara merintis dan aktif di kelembagaan pertanian, seperti; Kelompok Tani, Gapoktan, KTNA, dan P4S. Tingkat prosentase yang paling tinggi diantara alumni magang Jepang yaitu jabatan di Kelompok tani yang sangat beragam.

Program magang Jepang telah menghasilkan lebih dari 1.164 alumni yang tersebar di seluruh Indonesia selama hampir tiga dekade. Indonesia dan berbagai asosiasi petani Jepang sejak 1984 telah bekerjasama di bidang pengembangan pertanian dalam program magang petani muda. Peserta program ini tinggal dan belajar di bawah bimbingan induk semang petani Jepang selama kurun waktu delapan bulan sampai dengan dua tahun.

Setelah kembali dari mengikuti program magang di Jepang, para alumni melanjutkan usahatani di daerah asal masing-masing dengan menerapkan pengetahuan dan keterampilan serta etos kerja yang diperoleh selama magang di Jepang. Disamping itu, para alumni diharapkan untuk menyebarluaskan pengetahuan dan keterampilannya dalam berusahatani, sehingga mampu menjadi contoh yang baik bagi petani di sekitarnya.

Beberapa kesuksesan yang telah dicapai oleh alumni, antara lain: 1) mendirikan P4S; 2) menjadi Ketua Kelompok KTNA Provinsi/Kabupaten /Kota di wilayah masing-masing; 3) menjadi pengusaha yang berhasil menjalin kemitraan dengan perusahaan pemasok input pertanian/ pemasaran produk/penyedia jasa perbankan, baik nasional dan internasional; 4) menjadi motor penggerak petani di daerahnya untuk maju bersama-sama.

Sukses Mengembangkan Agribisnis Sayuran Jepang

Agus Ali Nurdin mengelola usaha budidaya sayuran Jepang dengan mendirikan Okiagaru Farm bersama Mujafar Priono dan Yuki pada tahun 2009 di Cisarua, Bogor dengan modal pinjaman dari Pembiayaan Mandiri Pedesaan. Pemasaran sayurannya khusus untuk restoran dan swalayan Jepang di Bandung dan Jakarta yaitu Sushi Tei Restaurant (Bandung), Yoshinoya Restaurant (Jakarta), Bazara Restaurant (Jakarta), PT. AEON Swalayan (Jakarta), *Japan Restaurant Organization (JRO)*. Untuk kebutuhan sayuran yang tidak dimiliki oleh Okiagaru Farm, Agus dan timnya bermitra dengan beberapa alumni magang Jepang dalam pengadaannya seperti Zainal di Lembang yang menyiapkan paprika, selada dan asparagus yang banyak dibutuhkan oleh restoran Jepang. Adapun keberhasilannya dalam pemasaran sayuran ke restoran Jepang karena tidak terlepas dari kemahiran berkomunikasi dalam bahasa Jepang yang didapatnya selama magang di Jepang dan aktif mencari pasar melalui internet selain itu kurangnya persaingan dalam pensuplay sayuran Jepang di pasaran.

(3) Sarjana Membangun Desa (SMD)

SMD merupakan pemberdayaan dan fasilitasi kelompok tani ternak dengan menempatkan lulusan Perguruan Tinggi bidang ilmu Peternakan dan Kedokteran Hewan, guna mengatasi kendala rendahnya kualitas SDM petani peternak di pedesaan melalui transfer ilmu pengetahuan dan teknologi, kreativitas yang berwawasan agribisnis baik di hulu maupun hilir.

Pada periode tahun 2007-2012 telah difasilitasi 2.719 kelompok yang tersebar di 32 provinsi. Sampai saat ini masih terus aktif melakukan usaha peternakan sebanyak 2.719 kelompok di 32 provinsi untuk menumbuhkan minat wirausaha. Pada tahun 2014 difasilitasi SMD-WP (Sarjana Membangun Desa-Wirausaha Pendamping) yang melaksanakan bimbingan dan pendampingan kelompok tani ternak untuk mengatasi terbatasnya kualitas SDM tani ternak di pedesaan.

Tabel 38. SMD yang Telah Difasilitasi Tahun 2010-2012

NO	JENIS TERNAK	JUMLAH SMD			JUMLAH
		2010	2011	2012	
1	Sapi potong	360	402	225	987
2	Sapi perah	30	28	50	108
3	Kerbau	10	28	15	53
4	Kambing/domba	200	124	120	444
5	Unggas lokal	80	124	80	284
6	Kelinci	20	-	12	32
JUMLAH		700	706	502	1.908

Pengembangan usaha dan kelembagaan peternak terus dilakukan oleh Sarjana Membangun Desa dari waktu ke waktu, di antaranya dengan pembentukan Asosiasi Sarjana Membangun Desa di

tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional. Wadah ini terus bersinergi, membangun komunikasi antar SMD, saling bertukar informasi, memperkuat usaha, serta membangun jaringan antar SMD. Eksistensi SMD semakin dirasakan manfaatnya dengan terus memperkuat kelembagaan peternak melalui perkoperasian SMD di tingkat kabupaten dan Provinsi untuk meningkatkan skala usaha dan bisnis, melalui pemanfaatan dana lembaga-lembaga keuangan/perbankan.

Para SMD dan kelompoknya telah banyak yang berhasil mengembangkan usahanya yang secara langsung telah memberikan perubahan pola usaha dalam kelompok dan bahkan secara tidak langsung telah memberikan warna dan support dalam peternakan nasional, khususnya pada komoditas sapi potong. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan oleh SMD diantaranya meliputi:

- Mitra pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan sub sektor Peternakan, baik di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat.
- Penerapan good farming practices pada kelompok tani ternak.
- Pengembangan usaha perbibitan ternak, usaha penggemukan, pengolahan pakan, dan perdagangan ternak.
- Memfasilitasi kelompok tani ternak untuk mengakses sumber-sumber pembiayaan usaha peternakan, baik dana perbankan maupun swasta.
- Menarik investasi swasta dan perorangan untuk berinvestasi pada kegiatan *on farm*.
- Membentuk jaringan usaha pemasaran, baik ternak hidup maupun daging dan olahannya.
- Meningkatkan pendapatan peternak melalui kreasi pengolahan hasil ternak ataupun limbah ternak.
- Membentuk kelembagaan usaha peternak menjadi usaha berbadan hukum seperti Koperasi, CV dan PT.

Perkembangan SMD secara umum menunjukkan kemajuan yang sangat baik, yang ditunjukkan oleh usaha yang semakin berkembang, kelompok binaan bertambah, nilai asset meningkat, serta jaringan bisnis yang lebih luas.

Tabel 39. SMD yang Berhasil Mengembangkan Usahanya

No.	Nama	Jenis Komoditas	Lokasi
1	Drh. Suparto	Sapi Potong	Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur
2	Ernawati, S.Pt	Sapi Perah	Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat
3	Cahyo Tri Panuntun, S.Pt	Kambing	Kabupaten Jepara, provinsi Jawa Tengah
4	Siti Zunainah, S.Pt	Kambing Perah	Kota Pekanbaru, Provinsi Riau
5	Agus Sholehul Huda, S.Pt	Unggas	Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur
6	Nengsih Komalasari, S.Pt	Kelinci	Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Timur

Meskipun belum melalui penilaian yang komprehensif, beberapa SMD mendapat apresiasi banyak pihak berkat perkembangan usaha dan dampak yang disumbangkan untuk pengembangan

peternakan di lingkungan usahanya, menstimulasi tumbuhnya jaringan bisnis SMD, baik lokal maupun antar provinsi, serta terbangunnya kerjasama dengan pelaku usaha lainnya. Selain itu, juga dikembangkan tempat magang bagi calon peternak/peternak lainnya pada kelompok yang telah dikategorikan layak menjadi P4S (Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya). Di antara SMD dan kelompok binaan yang telah berhasil masuk dalam kelompok P4S adalah drh Oon Furqon, dan Febrisa Nofika Sari, S.Pt..

Upaya pengembangan usaha dan kelembagaannya SMD terus diupayakan baik secara formal dan informal, dengan terus meningkatkan koordinasi dan membangun komunikasi antar SMD, perbankan (BI, BRI dan Bank Mandiri), perkoperasian (Kementerian Koperasi) dan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) di Kementerian UMKM dan Koperasi. Dengan upaya ini diharapkan mampu mengungkit pengembangan usaha dan kelembagaan, SMD serta kelompok binaannya, semakin lebih cepat menjadi usaha mandiri.

Keberhasilan Kelompok Tani Ternak Gunungrejo Makmur II Dalam Manajemen Pemeliharaan Sapi Potong

Kelompok Tani Ternak Gunungrejo Makmur II memperoleh bantuan dana APBN melalui program Sarjana Membangun Desa (SMD) dengan pendampingan sarjananya yaitu Drh. Suparto. Dana yang diperoleh dari Kementerian Pertanian adalah sebesar Rp. 300.000.000,- (Tigatus juta rupiah) untuk mengembangkan kelompok ternak sapi potong, dengan modal awal 34 ekor sapi potong.



Gambar 148. Pengembangan Kelompok Ternak Sapi oleh SMD

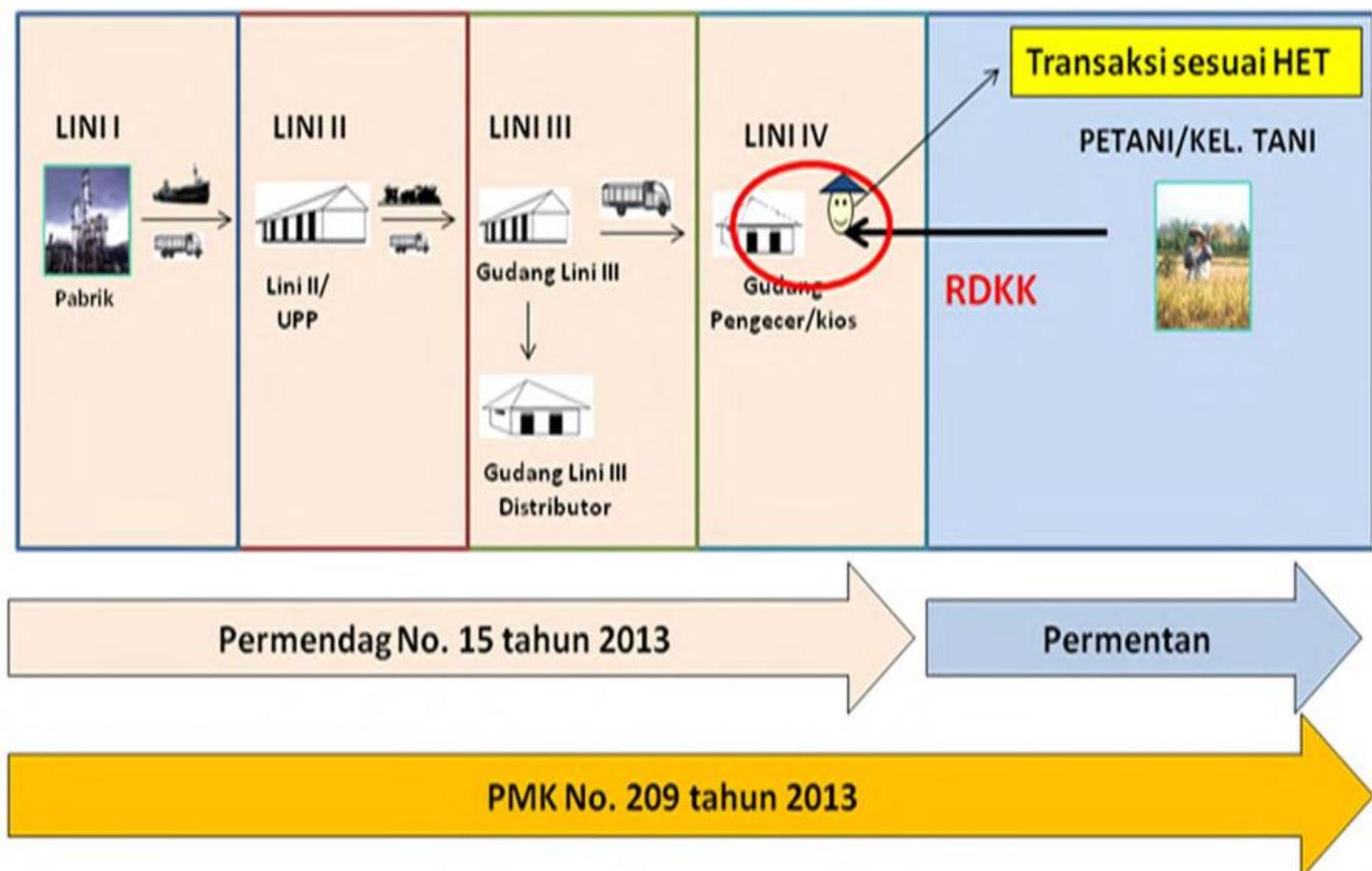
Sebelum dibentuk Kelompok Tani Ternak Gunungrejo Makmur II, kebanyakan warga desa biasanya menjadi buruh ternak dengan sistem "Gado" yaitu memelihara beberapa ekor sapi milik juragan. Sebagai imbalannya, mereka mendapatkan bagi hasil sebesar 50% dari harga jual sapi. Dengan sistem baru di kelompok Gunungrejo Makmur II, mereka memperoleh bagi hasil lebih tinggi, yakni sebesar 70% sedang dalam sistem gado, mereka biasanya hanya memperoleh penghasilan rata-rata 500 ribu per bulan. Tapi sejak bergabung dengan kelompok binaan itu, mereka bisa memperoleh penghasilan rata-rata Rp. 1 juta sebulan. Melalui Kelompok Tani Ternak Gunungrejo Makmur II, para peternak dapat menjual sapi langsung ke Rumah Potong Hewan (RPH) atau konsumen di Jakarta, tidak lagi lewat makelar. Kondisi ini berdampak positif bagi perolehan keuntungan yang otomatis menjadi lebih besar, karena rantai penjualan lebih pendek.

Setelah lima tahun program SMD berjalan, jumlah sapi mencapai 258 ekor dengan nilai aset sekitar Rp. 2 miliar yang dinikmati oleh 60 orang anggota. Sebagian besar warga yang dulu hanya menjadi buruh ternak, kini menjadi peternak mandiri, dengan anggota kelompok tani ternak yang berasal dari desa-desa lain sekitar Desa Gunungrejo.

13.2. Penyediaan Subsidi Sarana Produksi Pertanian

Dalam konteks pertanian, pupuk dan benih berperan strategis dalam peningkatan produksi, produktivitas komoditas pertanian, pendapatan petani dan kontribusinya dalam membangun ketahanan pangan nasional. Oleh karena itu, pupuk dan benih sangat diutamakan penggunaannya oleh petani dalam kegiatan usahatani. Dengan peran yang sangat strategis tersebut, pemerintah sangat berkepentingan di dalam pengaturan pengadaan dan distribusinya sehingga pupuk dan benih dapat diterima petani sesuai azas 6 (enam) tepat, yaitu: tepat jenis, jumlah, tempat, waktu, mutu, dan harga.

Proses penyaluran pupuk bersubsidi diawali dengan usulan dari kelompok tani. Kelompok tani merencanakan kebutuhan sarana produksinya (pupuk bersubsidi) melalui penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang didampingi petugas lapangan. RDKK tersebut direkap secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan pusat sebagai salah satu pertimbangan dalam perencanaan kebutuhan pupuk secara nasional. Untuk menjamin ketepatan sasaran dalam penyaluran pupuk bersubsidi; maka RDKK dijadikan instrumen dalam penyaluran pupuk bersubsidi oleh kios/pengecer resmi kepada petani/kelompok tani.



Gambar 149. Mekanisme Penyediaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Mekanisme penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh BUMN Pelaksana dalam hal ini PT. Pupuk Indonesia (Persero) berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2013, PT Pupuk Indonesia bertanggungjawab atas pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di dalam negeri untuk sektor pertanian secara nasional sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat mulai dari Lini I sampai dengan Lini IV. Rantai penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan secara berjenjang oleh Produsen, Distributor dan Pengecer, dimana Distributor bertanggungjawab atas penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan prinsip 6 (enam) Tepat mulai dari Lini III sampai dengan Lini IV di wilayah tanggungjawabnya dan Pengecer bertanggungjawab atas penyaluran pupuk bersubsidi kepada Petani/Kelompok tani di lokasi kios pengecer, yang selanjutnya penyaluran kepada petani/kelompok tani dilaksanakan dengan sistem tertutup (menggunakan RDKK) dengan Harga Eceran Tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

Upaya pengawalan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani/kelompok tani dilakukan melalui penguatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di tingkat provinsi dan kabupaten/kota baik perubahan struktur maupun peningkatan koordinasi KP3 serta melakukan uji coba pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi dengan melibatkan peran Pemerintah Daerah dalam melakukan pengecekan terhadap dukungan (kelengkapan dan legalitas) administrasi pengadaan dan penyaluran di tingkat kios/pengecer terhadap volume pupuk yang disalurkan.

Kementerian Pertanian sebagai pelaku utama di dalam pelaksanaan kebijakan subsidi pupuk berperan penting di dalam: (1) Penetapan alokasi kebutuhan pupuk dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk (HET) bersubsidi per tahunnya; (2) Penetapan produsen pupuk bersubsidi (bersama kementerian BUMN) dan menilai kebenaran data/dokumen pembayaran subsidi pupuk yang diajukan oleh produsen; dan (3) Penyaluran dana subsidi kepada produsen pupuk. Sementara itu, di dalam distribusi pupuk, Kementerian Perdagangan sangat berperan di dalam menetapkan mekanisme pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi, serta melakukan pengawasan di dalam pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi.

Tabel 40. Alokasi Anggaran Subsidi Pupuk Kementerian Pertanian Tahun 2010-2014 (Rp Juta)

NO	Jenis Subsidi	2010	2011	2012	2013	2014
1	PSO ¹⁾	14.750.662	15.562.534	13.958.484	15.828.706	18.047.250
2	BLP ²⁾	1.610.000	405.000	405.000		
Jumlah		16.360.662	15.967.534	14.363.484	15.828.706	18.047.250

Keterangan: 1) PSO = *Public Service Obligation*; 2) BLP = Bantuan Langsung Pupuk.

Rata-rata realisasi penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2010-2013 adalah 87,85%. Persentase realisasi subsidi pupuk tertinggi sebesar 102,87% pada tahun 2012 sedangkan dan persentase realisasi terendah pada tahun 2010 sebesar 77,61%.

Tabel 41. Perkembangan Realisasi Subsidi Pupuk 2010-2014

Tahun	Alokasi (Ton)	Realisasi (Ton)	%
2010	9.480.749	7.358.000	77,61
2011	9.733.224	8.397.134	86,27
2012	10.528.920	8.913.290	84,66
2013	8.611.050	8.858.365	102,87
2014 *	7.778.000	3.906.018	50,22

Catatan *) Realisasi penyaluran s.d. Mei 2014

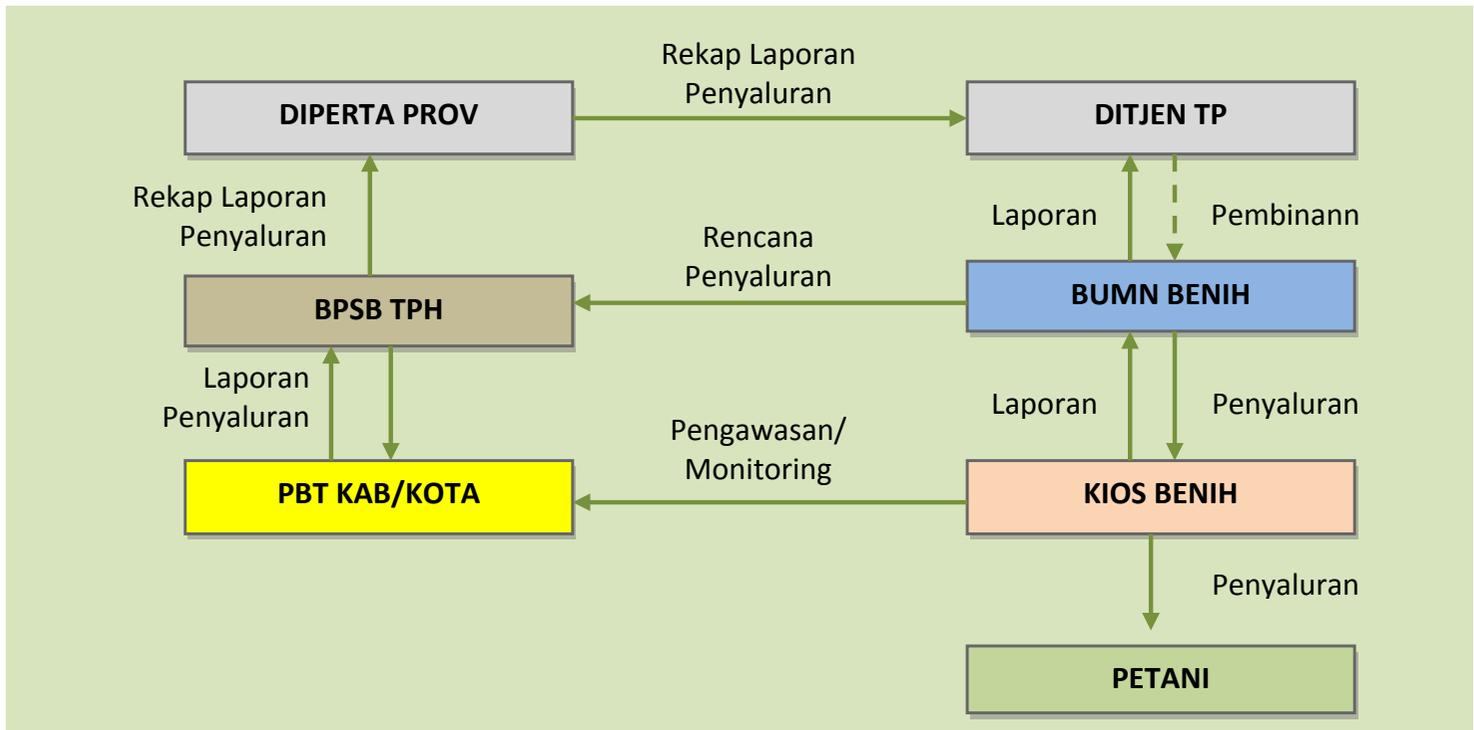
Sebagaimana pupuk, benih juga merupakan sarana produksi penting yang penggunaannya perlu terus didorong agar petani menggunakan benih unggul dalam usahatannya. Untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pemakaian benih bagi petani, maka disediakan subsidi dalam bentuk subsidi tidak langsung (subsidi harga) dan subsidi langsung. Subsidi langsung benih dilaksanakan dalam bentuk Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) dan Cadangan Benih Nasional (CBN). Subsidi benih meningkat dari Rp 1,56 Triliun pada tahun 2010 menjadi Rp 1,74 triliun di tahun 2012.

Tabel 42. Alokasi Anggaran Subsidi Benih Kementerian Pertanian 2010-2014 (Rp Juta)

NO	JENIS SUBSIDI	2010	2011	2012	2013	2014
1	Subsidi Harga	98.960	91.109	129.499	1.454.150	1.564.800
2	CBN	275.073	503.814	319.250		
3	BLBU	1.189.490	1.116.461	1.247.250		
JUMLAH		1.563.523	1.711.384	1.743.346	1.454.150	1.564.800

Bantuan dan atau subsidi benih varietas unggul bermutu diberikan kepada petani dalam rangka penyebarluasan penerapan paket teknologi (PTT), penggantian varietas, penggantian benih akibat gagal panen (puso) yang disebabkan oleh serangan OPT maupun dampak perubahan iklim (banjir dan kekeringan), dengan mekanisme yang telah ada. Penggunaan benih varietas unggul bermutu akan lebih menjamin peningkatan produktivitas. Selain subsidi harga, juga diperlukan subsidi langsung seperti hibah benih kepada petani yang ditimpa bencana alam.

Mekanisme penyaluran (termasuk pengawasan dan pelaporan) benih bersubsidi selengkapnya diperlihatkan pada Gambar berikut. BUMN produsen (pabrik) benih yang ditunjuk pemerintah, yaitu PT Sang Hyang Seri (Persero) dan PT Pertani (Persero), diberi tugas memproduksi benih sesuai dengan kebutuhan. Benih tersebut didistribusikan melalui kios-kios yang ada, dan petani atau kelompok tani dapat membeli sesuai dengan harga penyerahan (HP). Volume benih yang disalurkan oleh BUMN ke kios-kios diperiksa dan diawasi oleh Pengawas Benih Tanaman (PBT) setempat. Untuk memudahkan proses distribusi benih bersubsidi, benih tersebut diharapkan dapat diproduksi di daerah tersebut dengan melibatkan penangkar benih yang ada di lokasi setempat.



Gambar 105. Mekanisme Penyaluran Benih Bersubsidi

13.3. Stabilisasi Harga Pangan

Rantai tata niaga perdagangan hampir seluruh produk pertanian primer relatif panjang dan dikuasai oleh pedagang perantara, pedagang pengumpul dan pedagang besar, sehingga margin harga antara produk di tingkat usahatani (produsen) dengan di tingkat konsumen relatif tinggi, sehingga petani adalah pihak yang paling menderita apabila terjadi resiko kegagalan pasar (*market failure*). Produk pertanian sebagian besar bersifat musiman, sehingga harga produk pertanian sangat berfluktuasi, harga rendah (jatuh) pada saat panen raya dan cenderung meningkat pada saat tidak panen. Kondisi tersebut mengharuskan Pemerintah untuk menjaga stabilisasi harga, baik ditingkat petani maupun konsumen. Beberapa kebijakan yang telah dibuat Pemerintah terkait stabilisasi harga adalah penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah/Beras, Harga Beli Pemerintah (HPP) dan Harga Jual Pemerintah (HJP) Kedelai, dan Harga Referensi Bawang Merah dan Cabai Merah.

13.3.1. Stabilisasi Harga Gabah-Beras Melalui Penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP)

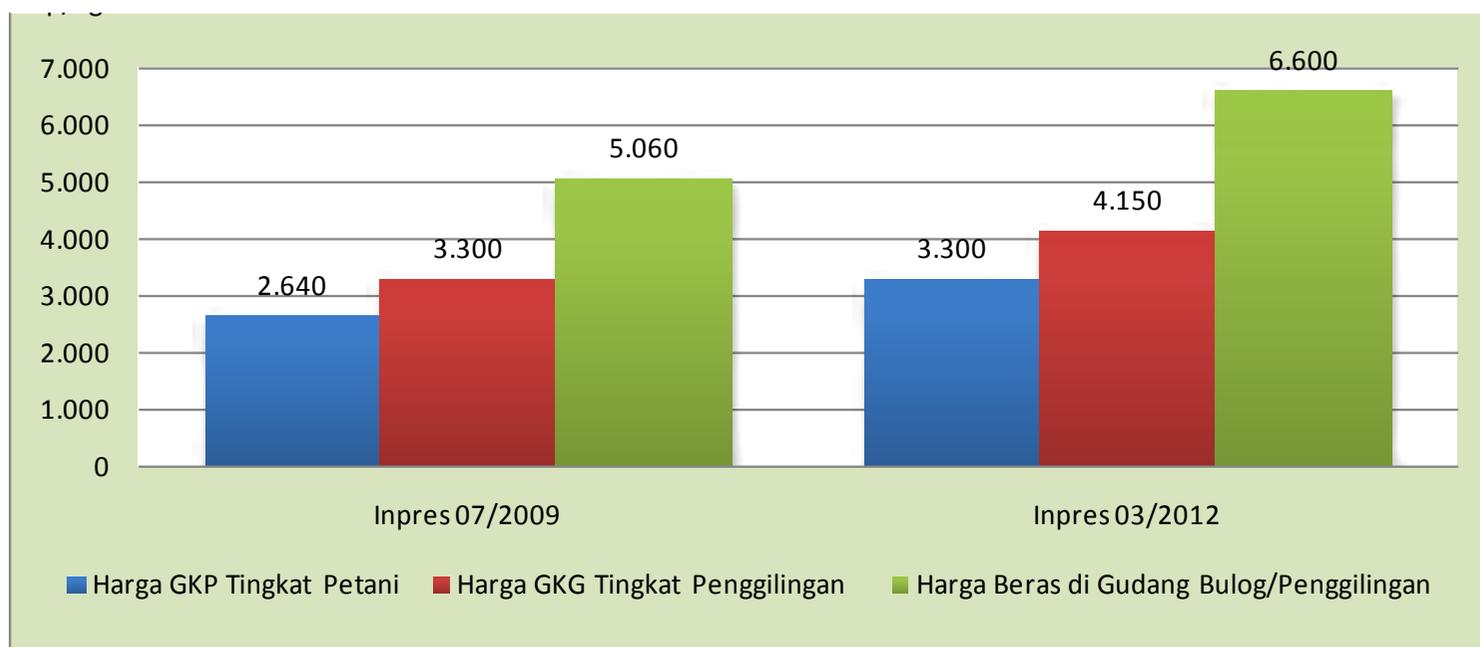
Gabah-Beras

Komoditas padi mempunyai karakteristik yang khas, yaitu ditanam serentak pada waktu tertentu, sehingga pada masa panen terjadi kelebihan pasokan namun pada masa paceklik terjadi kelangkaan pasokan. Untuk itu Pemerintah (dengan Inpres) sejak tahun 2005 mengembangkan insentif harga melalui penetapan HPP (Harga Pembelian Pemerintah), yang merupakan bagian dari Kebijakan Perberasan, dimana pemerintah melalui Perum Bulog membeli gabah sejumlah tertentu dengan harga relatif tinggi, untuk meningkatkan sentimen harga gabah di pasaran

terutama pada masa panen. Sebagai instrument, kebijakan HPP tergolong sebagai kebijakan insentif harga. Semangat yang terkandung dalam kebijakan ini adalah untuk melindungi dari anjloknya harga pada saat masa panen.

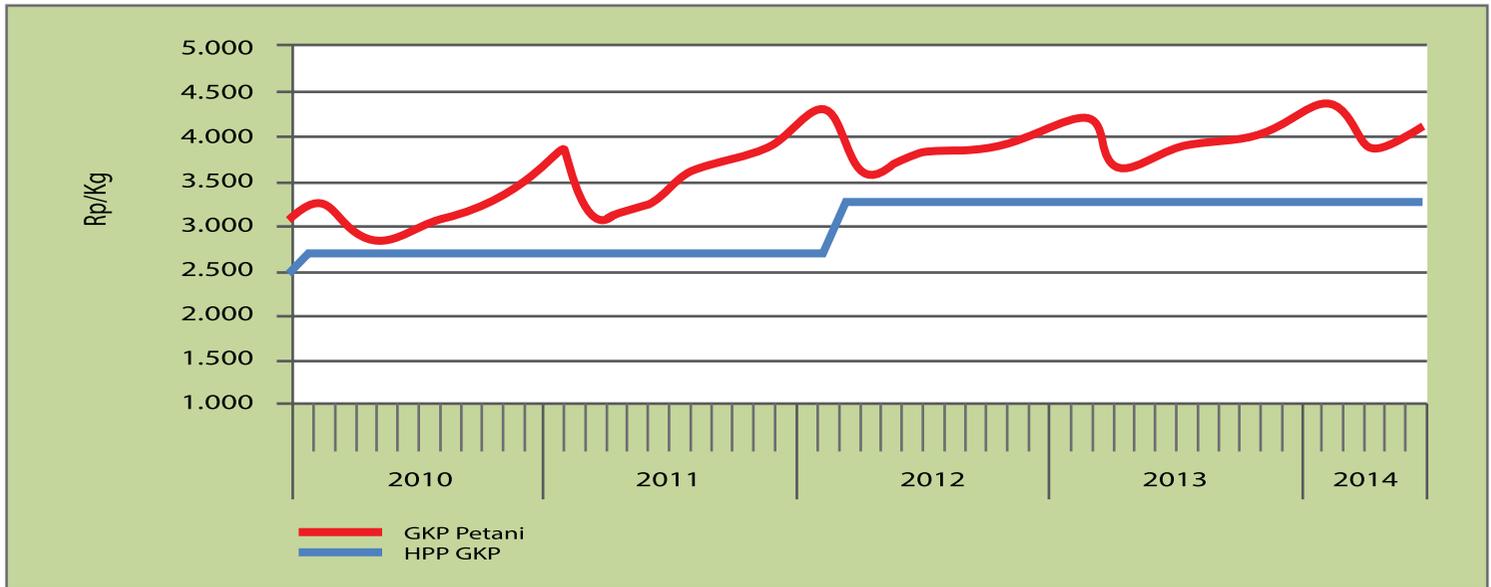
Kementerian Pertanian berperan aktif dalam menyusun kebijakan stabilitas harga pangan khususnya untuk komoditas beras, yaitu melalui kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah/beras dalam Kebijakan Perberasan yang pertama kali dituangkan melalui Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2002. Sejak tahun 2009, telah terjadi 2 kali perubahan kebijakan perberasan yang ditetapkan melalui: (a) Inpres No. 7 Tahun 2009 (mulai Januari 2010-Februari 2012); dan (b) Inpres No. 03 Tahun 2012 (April 2012-Sekarang).

Perubahan Inpres kebijakan perberasan juga terkait dengan perubahan besaran HPP gabah/beras, yang didasarkan oleh beberapa pertimbangan, antara lain: (1) adanya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang berdampak pada kenaikan harga eceran tertinggi (HET) pupuk; (2) kondisi harga gabah/beras di petani/masyarakat jauh di atas HPP; serta (3) upaya mengantisipasi tingginya harga beras dunia.



Gambar 151. Perkembangan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah-Beras pada Inpres Kebijakan Perberasan Tahun 2009-2012

Kenaikan BBM berdampak pada meningkatnya biaya usaha tani padi sehingga berpengaruh terhadap penurunan pendapatan petani. Kondisi harga gabah/beras yang jauh diatas HPP bisa menyebabkan harga turun/jatuh dari harga di tingkat pasar, terutama pada saat panen raya sehingga akan merugikan petani. Dengan adanya perubahan dan peningkatan HPP gabah/beras, maka diharapkan dapat meningkatkan pendapatan petani, sekaligus untuk meminimalisir kejadian harga jatuh/turun pada saat panen raya.



Sumber: GKP (BPS) dan HPP GKP (BKP)

Gambar 152. Perkembangan Harga GKP dan HPP GKP Tahun 2010-2014

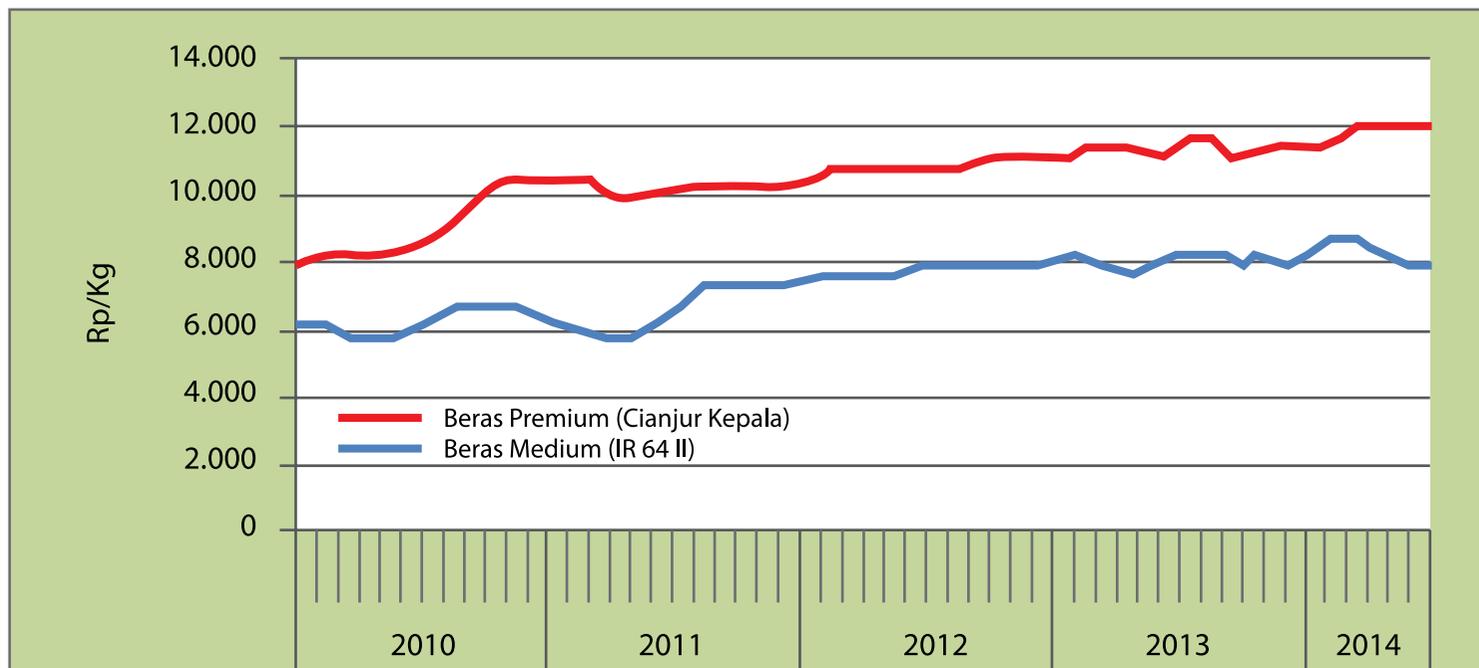
Pola perkembangan harga GKP di petani Harga Gabah Kering Panen (GKP) tingkat petani selama tahun 2010-Juni 2014 memiliki pola yang sama. Pada umumnya, selama musim panen raya (Februari-April), harga gabah cenderung turun bahkan anjlok namun tidak sampai di bawah HPP. Selama lima tahun terakhir, perkembangan harga GKP tingkat petani semakin stabil, hingga tahun 2014 koefisien variasi (CV) tahun 2014 hanya sebesar 4,4%, dengan harga GKP di petani hingga tahun 2014 (Juni), berkisar Rp 3.936/kg–Rp 4.423/kg.

Tabel 43. Perkembangan Harga GKP Tingkat Petani Tahun 2010-2014

Tahun	Harga di Tingkat Petani (Rp/kg)	% Perubahan terhadap HPP	CV	Insiden di Bawah HPP (%)
2010	3.123	18,3	8,0	10,9
2011	3.595	36,2	9,9	4,5
2012	3.948	25,0	5,3	4,2
2013	4.005	21,4	5,2	4,2
2014*)	4.412	27,5	4,4	1,6

Sumber: BPS, *) s.d Juni 2014

Pola perkembangan harga beras kualitas premium di tingkat grosir lima tahun terakhir dari tahun 2010-2014 cenderung stabil ($CV < 2\%$) kecuali tahun 2010 yang cenderung fluktuatif ($CV = 10,5\%$). Tren perkembangan harga beras premium dari tahun-ke tahun mengalami kenaikan harga dan harga cenderung turun pada saat musim panen (Maret-Mei), sementara itu pada MK (musim kemarau) harga mulai naik lagi. Hal ini dikarenakan panen raya padi di sebagian besar daerah sentra padi terjadi pada bulan Februari hingga Maret.



Sumber : PIBC diolah BKP

Gambar 153. Perkembangan Harga Beras Dalam Negeri Tingkat Grosir Tahun 2010-2014

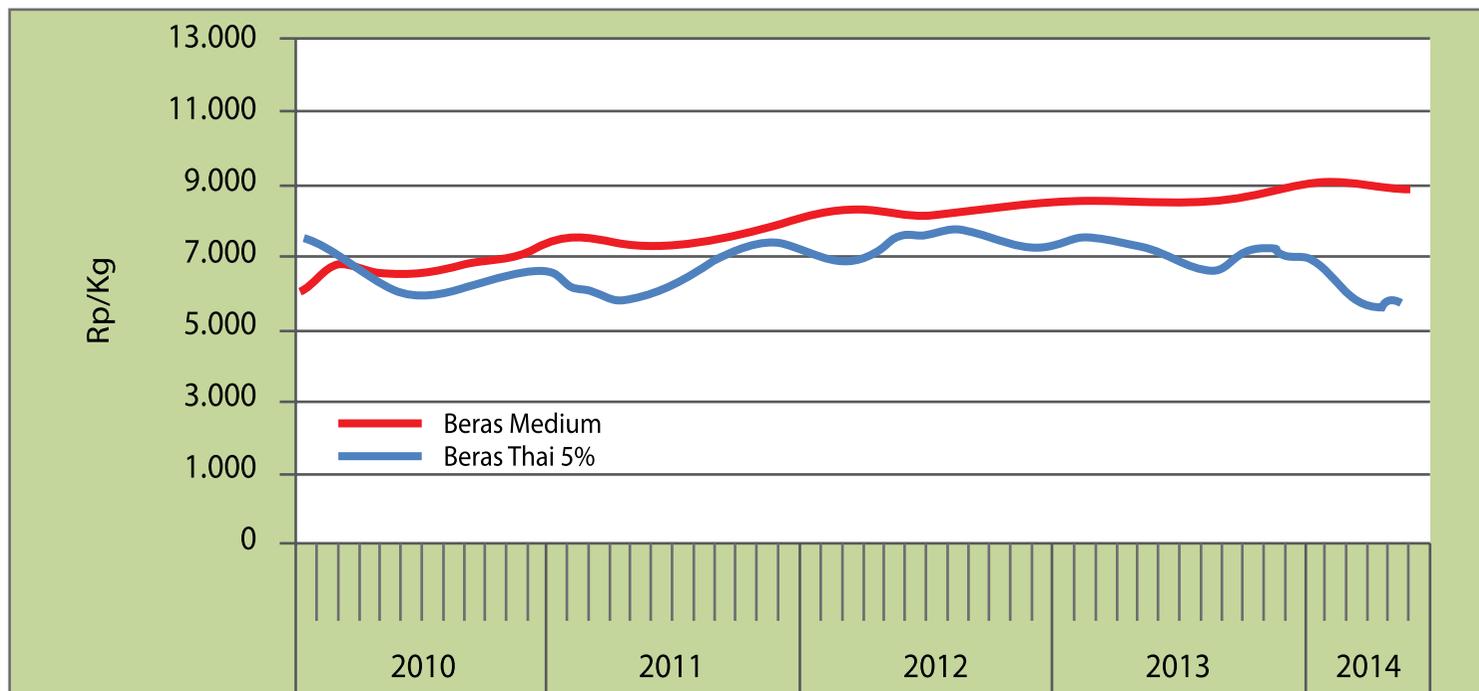
Pola perkembangan harga beras medium di tingkat grosir dari tahun 2010-2014 memiliki pola yang berbeda dari harga beras premium. Pola perkembangan harga tahun 2011, 2013 dan 2014 cenderung sama yaitu cenderung stabil ($CV < 5\%$), sedangkan tahun 2010 sama dengan tahun 2011 yaitu cenderung fluktuatif ($CV 5,7\%$ dan $9,0\%$). Sedangkan, tren perkembangan harga beras medium dari tahun ke tahun memiliki tren yang sama dengan beras premium yaitu harga cenderung naik dari tahun ke tahun.

Tabel 44. Perkembangan Harga Beras Dalam Negeri Tingkat Grosir Tahun 2010 -2014

Tahun	Beras (Rp/Kg)		Koefesien Variasi (CV)(%)	
	Premium	Medium	Premium	Medium
2010	8.890	6.175	10,5	5,7
2011	10.144	6.580	1,3	9,0
2012	10.716	7.652	1,8	2,0
2013	11.244	7.914	1,6	2,1
2014*)	11.769	8.187	2,7	3,8

Sumber: PIBC, *) s.d Juni 2014

Perkembangan harga beras luar negeri (Thai 5%) selama periode 2010-2014 (April 2014) cenderung lebih fluktuatif dibandingkan dengan harga beras dalam negeri (beras medium). Tren perkembangan harga beras dalam negeri mulai awal tahun 2010 hingga April 2014 memiliki tren naik dan harga beras selalu lebih tinggi dibanding harga beras luar negeri, dengan rata-rata harga beras dalam negeri selama tahun 2010-April 2014 sebesar Rp. 7.843/kg atau 19,85% di atas harga beras luar negeri (Thai 5%).



Sumber: Beras Medium (Kemendag), Beras Thai 5% (World Bank diolah BKP)

Gambar 154. Perkembangan Harga Beras Dalam Negeri dan Internasional Tahun 2010 – 2014

Perkembangan harga beras kualitas IR (IR I, IR II, IR III) di tingkat grosir dari tahun 2010-2014 semakin stabil. Perkembangan harga beras kualitas IR pada tahun 2012, 2013 dan 2014 cenderung lebih stabil ($CV < 5\%$) jika dibandingkan dengan tahun 2011 dan 2010 ($CV > 5\%$). Sedangkan, tren perkembangan harga beras kualitas IR (IR I, IR II, IR III) dari tahun - ketahun memiliki tren yang sama yaitu harga cenderung naik dari tahun ke tahun.

Tabel 45. Perkembangan Harga Beras Kualitas IR di PIBC Tahun 2010-2014

Tahun	Harga (Rp/Kg)			Koefisien Variasi (CV)(%)		
	IR-64 I	IR-64 II	IR-64 III	IR-64 I	IR-64 II	IR-64 III
2010	6.701	6.179	5.603	6,4	5,8	7,5
2011	7.234	6.580	6.138	6,6	9,0	8,4
2012	8.321	7.652	7.067	1,3	2,0	3,8
2013	8.459	7.914	7.200	1,9	2,1	2,9
2014*)	8.831	8.187	7.621	2,3	3,8	4,4

Sumber: PIBC, *) s.d Juni 2014

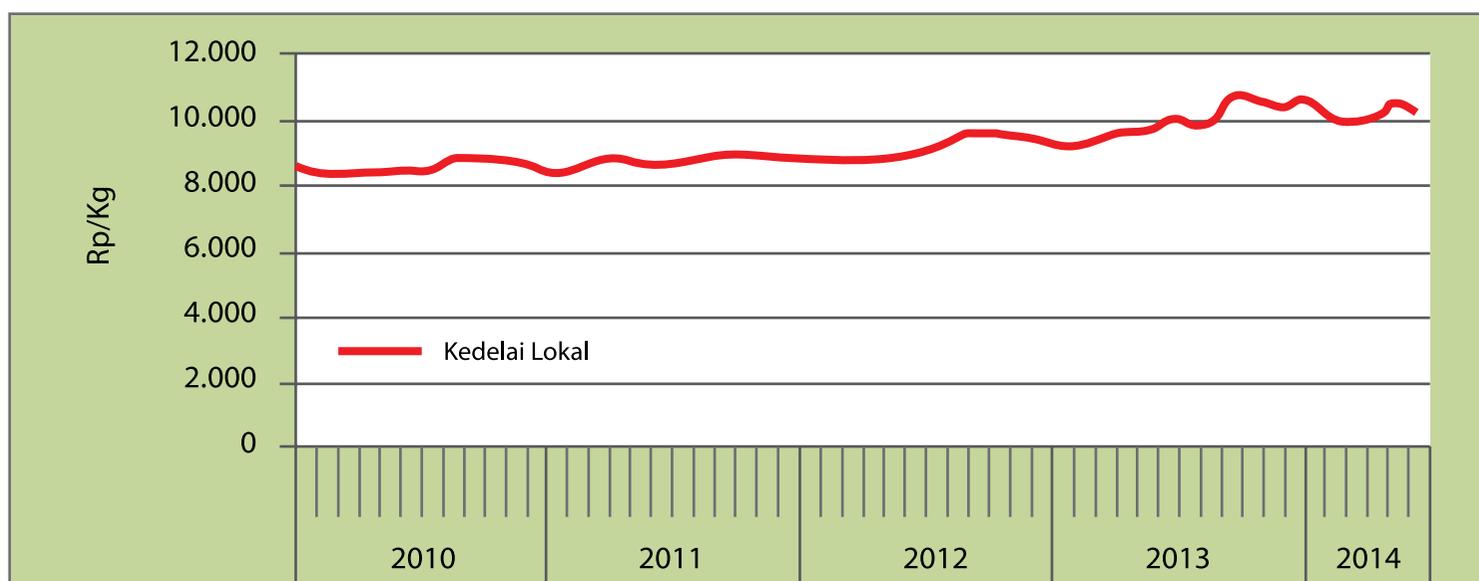
13.3.2. Stabilisasi Harga Kedelai (SHK) Melalui Penetapan Harga Beli Pemerintah (HBP) dan Harga Jual Petani (HJP) Kedelai

Sejak pertengahan tahun 2012 harga kedelai dalam negeri melonjak naik di pasaran dalam negeri dan menimbulkan gejolak harga kedelai di masyarakat. Harga kedelai tingkat eceran yang sebelumnya berada pada kisaran Rp 8.000/kg, sejak Juli 2012 naik hingga di atas kisaran Rp

9.000/kg. Dalam mengatasi situasi tersebut, pemerintah berupaya menstabilkan harga kedelai dengan mengeluarkan kebijakan program stabilisasi harga kedelai (SHK).

Pada tanggal 8 Mei 2013 telah ditetapkan Perpres No. 23/2013 tentang penugasan Perum Bulog menjadi stabilisator harga kedelai. Melalui program stabilisasi harga kedelai, pemerintah berupaya mengatur tataniaga kedelai melalui pembelian kedelai kepada petani dengan harga tertentu dan menjualnya kepada pengrajin tahu/tempe dengan harga tertentu.

Program Stabilisasi Harga Kedelai (SHK) bertujuan untuk stabilisasi harga beli kedelai di tingkat petani dan stabilisasi harga jual kedelai di tingkat pengrajin tahu/tempe secara bersamaan yang dilakukan dengan mengatur: (1) Pembelian kedelai dari kelompok tani, gabungan kelompok tani atau koperasi tani dengan harga, jumlah, dan waktu tertentu serta wilayah yang ditetapkan; (2) Impor kedelai; dan (3) Penjualan kedelai kepada pengrajin tahu/tempe dengan harga, jumlah, dan waktu tertentu serta di lokasi yang ditetapkan.



Sumber: Kemendag diolah BKP (s.d Juni 2014)

Gambar 155. Perkembangan Harga Kedelai Dalam Negeri periode 2010-2014

Dalam penyusunan, penentuan, dan pengambilan kebijakan stabilisasi harga pangan kedelai, Kementerian Pertanian terlibat sebagai anggota Tim SHK. Tugas Tim SHK antara lain merekomendasikan penetapan jumlah serta waktu pembelian dan penjualan kedelai, penetapan harga, dan bertanggung jawab penyerapan kedelai lokal. Hasil dari rekomendasi tersebut diusulkan dan diputuskan dalam Rapat Koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Selain itu juga tim stabilisasi ditugaskan untuk memonitor harga dan pasokan kedelai di dalam negeri yang selanjutnya dilaporkan di rapat koordinasi Menteri Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan ini, pemerintah juga telah mengeluarkan beberapa peraturan Menteri Perdagangan, diantaranya Permendag No. 23 tentang Stabilisasi Harga

Kedelai (SHK) dan Permendag No. 25 tentang Penetapan Harga Pembelian/Penjualan Kedelai Petani. Dalam kedua peraturan tersebut mengatur pembelian dan penjualan kedelai baik dari segi jumlah, harga, waktu serta wilayah. Selain itu juga diatur tentang impor kedelai. Harga Pembelian Kedelai Petani yang selanjutnya disebut HBP Kedelai adalah harga acuan pembelian Kedelai di tingkat petani yang ditetapkan sebesar Rp 7.000/kg. HBP kedelai tersebut berlaku untuk masa panen raya triwulan III periode 1 Juli sampai dengan 30 September 2013.

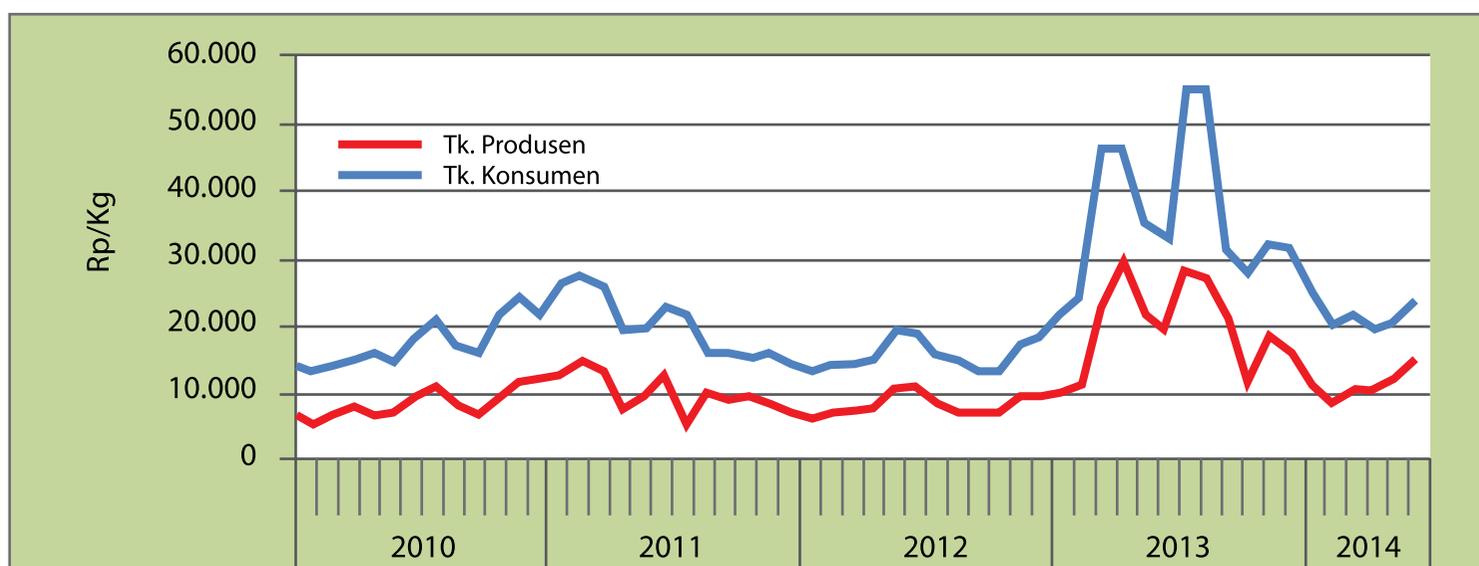
Harga penjualan kedelai di tingkat pengrajin tahu/tempe disebut HJP kedelai ditetapkan sebesar Rp 7.450/kg berlaku 1 bulan. Namun apabila masa berlaku telah lewat, tetapi penetapan HJP yang baru belum ditetapkan, maka HJP kedelai yang berlaku masih sama dengan harga sebelumnya.

Perkembangan harga kedelai lokal di tingkat konsumen selama periode 2010–2014 (sampai dengan Juni 2014) cenderung stabil pada setiap tahunnya yaitu CV<10 persen, meskipun tren perkembangan harga kedelai lokal di tingkat konsumen selama periode 2010–2014 (sampai dengan Juni 2014) memiliki tren naik.

13.3.3. Stabilisasi Harga Bawang Merah dan Cabai Merah Melalui Penetapan Harga Referensi

a. Perkembangan Harga Bawang Merah dan Cabai Merah 2010-2014

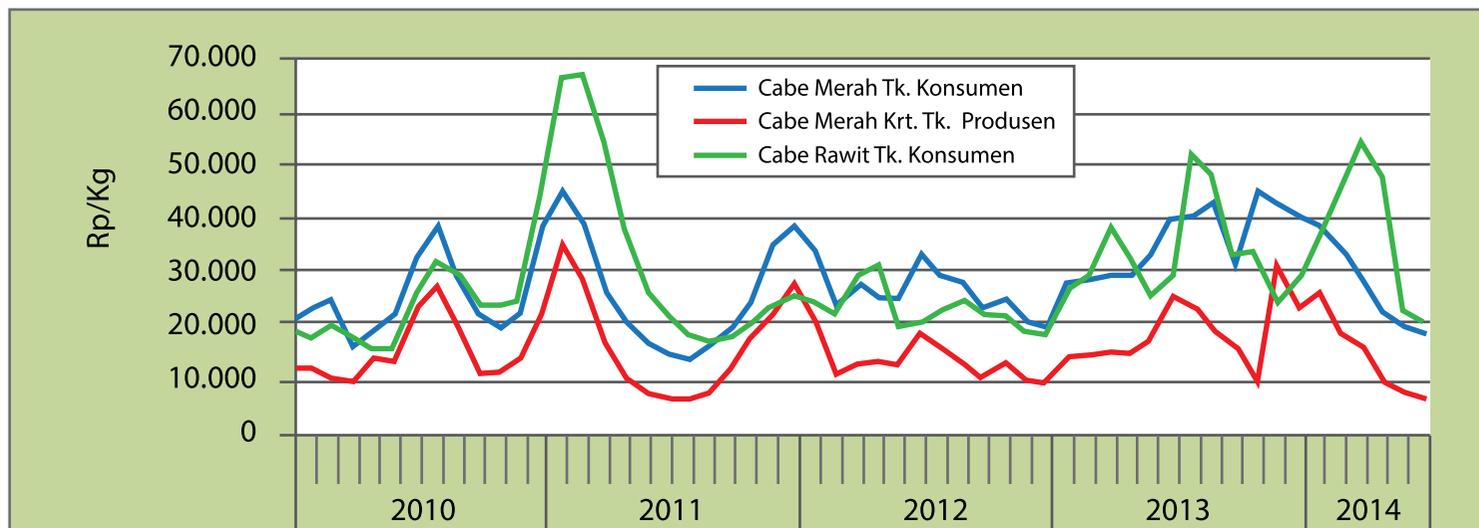
Bawang merah dan cabai merah merupakan salah satu komoditas hortikultura yang sangat strategis karena merupakan bahan industri saos atau industri rumah tangga (warung). Kebutuhan bawang merah dan cabai dari tahun ke tahun semakin meningkat, namun Indonesia mengalami berbagai permasalahan seperti ketersediaan dalam negeri yang belum mencukupi, sehingga untuk memenuhi kekurangannya melalui impor. Selain itu, tata niaga bawang merah dan cabai yang didominasi pengusaha importir sering berdampak pada instabilitas harga bawang merah dan cabai di tingkat masyarakat, baik produsen maupun konsumen atau masyarakat luas.



Sumber: BPS dan P2HP Kementan

Gambar 156. Perkembangan Harga Bawang Merah Tahun 2010-2014

Perkembangan harga bawang merah di tingkat konsumen pada periode 2010-2014 (s.d Juni 2014) cenderung fluktuatif dengan CV di atas 15%, kecuali tahun 2014. Perkembangan harga bawang merah di tingkat konsumen yang cenderung fluktuatif, seiring dengan berfluktuasinya kondisi harga bawang merah di tingkat produsen. Fluktuasi harga bawang merah tertinggi terjadi pada tahun 2013 dengan CV sebesar 32,08% di tingkat konsumen dan 35,85% di tingkat produsen. Pada tahun 2014, harga bawang merah kembali stabil dengan cv sebesar 10,78% di tingkat konsumen dan 20,57% di tingkat produsen.



Sumber: BPS dan P2HP Kementan

Gambar 157. Perkembangan Harga Cabai Merah Tahun 2010-2014

Sementara itu, perkembangan harga cabai ditingkat konsumen, untuk cabai merah gejala harga yang sangat tinggi atau di atas CV 25% terjadi pada tahun 2010, 2011, 2013 dan 2014, sedangkan untuk cabai rawit terjadi pada tahun 2010, 2011 dan 2014. Gejala harga cabai di tingkat konsumen, seiring dengan terjadinya gejala harga di tingkat produsen. Selama periode tahun 2010-2014 fluktuasi harga cabai merah di tingkat produsen CV berkisar antara 32,64%-72,19%. Fluktuasi harga cabai merah lebih dikarenakan pasokan cabai di sentra produksi terbatas akibat curah hujan yang tinggi pada saat bulan-bulan panen raya.

Tabel 46. Fluktuasi Harga Bawang Merah dan Cabai Tahun 2010-2014

Tahun	% Fluktuasi Harga Tk. Konsumen (CV)			% Fluktuasi Harga Tk. Produsen (CV)	
	Cabai Rawit	Cabai Merah	Bawang Merah	Cabai Merah	Bawang Merah
2010	37,71	32,54	21,09	45,70	29,57
2011	62,43	46,63	24,43	72,19	33,87
2012	19,94	19,01	15,08	32,64	23,36
2013	27,58	19,94	32,08	37,11	35,85
2014 (s.d Juni)	38,16	32,98	10,78	64,82	20,47

Sumber: BPS dan P2HP Kementan

Pada tahun 2014 harga di tingkat konsumen untuk cabai rawit mencapai Rp 35.738/kg atau terjadi kenaikan dari tahun sebelumnya, sedangkan harga cabai merah dan bawang merah mengalami penurunan. Sementara itu, harga di tingkat produsen untuk cabai merah dan bawang merah tahun 2014 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan untuk memberikan kelancaran, kepastian pelayanan pemberian rekomendasi impor produk hortikultura dan perlindungan petani hortikultura, perlu meninjau kembali Permentan Nomor 60/Permentan/OT.140/9/2012, maka pada tanggal 19 April 2013, Menteri pertanian menetapkan peraturan baru yaitu Permentan No 47 tahun 2013 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH).

Tujuan dari pemberian RIPH adalah sebagai dasar hukum dalam pelayanan pemberian RIPH dan setiap orang yang akan melakukan impor produk hortikultura, dan memberikan kepastian dalam pelayanan pemberian RIPH dan pelaksanaan impor produk hortikultura oleh setiap orang yang akan melakukan impor produk hortikultura dan jaminan atas produk hortikultura yang diimpor memenuhi keamanan pangan atau seperti yang sudah di bahas dalam pendahuluan diatas.

Pemicu melonjaknya harga bawang merah dan cabai pada tahun 2013 antara lain: (a) kondisi iklim yang tidak menentu, (b) ketersediaan benih bermutu belum cukup, (c) keterbatasan permodalan petani, (d) kontinuitas produk/musim panen yang kurang stabil, (e) Pengelolaan gudang penyimpanan yang kurang memadai, (f) rendahnya posisi tawar di tingkat petani, harga lebih ditentukan oleh para pedagang pengumpul/tengkulak, dan (g) adanya penurunan produktivitas dari 15 ton/ha menjadi 10 ton/ha untuk bawang merah.

Tabel 47. Perkembangan Harga Cabai dan Bawang Merah Tahun 2010-2014

Tahun	Harga Tingkat Konsumen (Rp/kg)			Harga Tingkat Produsen (Rp/kg)	
	Cabai Rawit	Cabai Merah	Bawang Merah	Cabai Merah	Bawang Merah
2010	21.854	23.299	16.852	13.291	7.463
2011	30.906	23.701	19.239	13.902	8.861
2012	20.705	24.034	14.653	10.957	7.043
2013	31.178	33.919	36.292	16.367	19.012
2014 (s.d Juni)	35.738	24.650	20.775	11.720	10.230

Sumber : BPS dan P2HP Kementan

b. Mekanisme Harga Referensi

Pemerintah berupaya untuk menstabilkan harga bawang merah mengingat bawang merah merupakan produk hortikultura yang memiliki sifat antara lain mudah rusak, harga sangat fluktuatif dan hanya terpusat pada daerah-daerah tertentu. Upaya kebijakan yang telah dilakukan yaitu: (a) Undang-Undang No.13 Tahun 2010 tentang Perlindungan Hortikultura, dan Peraturan Menteri Pertanian No. 60/Permentan/OT.140/9/2012; (b) Peraturan Pemerintah No. 47/Permentan/

OT.140/4/2013 tentang RIPH, Revisi dari Peraturan Menteri Pertanian No. 60/Permentan/OT.140/9/2012, Revisi dari Peraturan Menteri Pertanian No. 03/Permentan/OT.140/1/2012.

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan merumuskan kebijakan baru yaitu dengan menerbitkan harga referensi. Pemerintah memberlakukan mekanisme harga referensi hortikultura untuk komoditas bawang merah dan cabai. Harga ini sebagai patokan untuk mengetahui kapan bisa diambil kebijakan importasi. Jika harga di pasar lebih dari harga patokan tersebut, maka keran impor akan di buka. Dalam penentuan harga referensi bawang merah dan cabai (cabai merah, cabai keriting dan cabai rawit), harus memperhatikan beberapa ketentuan yaitu: (a) Harga referensi harus memberikan keuntungan kepada petani dan tidak memberatkan konsumen, serta (b) Dalam penentuan tidak hanya memperhatikan referensi harga pada retail karena mudah dimainkan oleh *retailer*; tetapi harus memperhatikan juga harga di tingkat produsen atau farmgate price. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam penentuan harga referensi tersebut memperhitungkan BEP (*Break Even Point*) atau balik modal dalam usahatani masing-masing komoditas tersebut ditambah keuntungan 40 persen.

Harga referensi bawang merah dipatok pada harga Rp 25.700 per kg. Harga referensi tersebut sudah memperhitungkan balik modal (BEP) petani ditambah keuntungan 40 persen, yang totalnya Rp 11.935 per kg. Setelah dihitung biaya distribusi, susut, transportasi, bongkar muat dan lain- lain ditetapkan harga referensi sebesar Rp 25.700 per kg tersebut. Sementara harga referensi cabai merah dan cabai keriting dipatok pada Rp 26.300 per kg. Harga referensi untuk cabai merah dan cabai keriting, juga sudah memasukkan perhitungan BEP petani sebesar Rp 8.780 per kg. Ditambah lagi dengan keuntungan sebesar 40 persen, sehingga totalnya menjadi Rp 12.290 per kg.

Harga referensi cabai rawit dipatok pada Rp 28.000 per kg. Harga patokan untuk cabai rawit sudah memasukkan BEP petani sebesar Rp 9.547 per kg, serta 40 persen keuntungan, sehingga totalnya menjadi Rp 13.365 per kg. Perhitungan tersebut juga mempertimbangkan susutnya komoditas, jika seperti cabai itu ada beberapa yang busuk, sementara bawang merah susut terjadi saat pemisahan bawang dengan bongkolnya. Kebijakan terkait harga referensi bawang merah dan cabai tersebut telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri nomor 118/PDN/KEP10/2013 tentang Penetapan Harga Referensi Produk Hortikultura dan diberlakukan pada 3 Oktober 2013.

13.3.4. Perkembangan Harga Pangan Lainnya

Perkembangan harga pangan strategis lainnya di tingkat konsumen periode 2010–2014 (s.d Juni), seperti minyak goreng curah, gula pasir lokal, daging sapi, daging ayam ras dan telur ayam ras selama tahun 2014 cenderung lebih stabil jika dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Harga cenderung naik dari tahun ke tahun sejak 2010.

Tabel 48. Perkembangan Harga Pangan Hewani Tingkat Konsumen Tahun 2010-2014

Tahun	Minyak Goreng Curah	Gula Pasir	Daging Sapi	Telur Ayam ras	Daging ayam ras
Harga (Rp/Kg)					
2010	12.029	10.090	62.993	13.471	23.897
2011	12.996	10.144	66.853	15.023	23.749
2012	14.017	11.358	76.692	16.133	26.177
2013	13.233	11.875	92.839	17.694	29.886
2014(s.d Juni)	15.132	12.130	99.279	17.864	28.749
% fluktuasi harga (CV)					
2010	7,20	3,74	3,81	7,18	10,15
2011	5,58	1,68	3,63	5,48	6,78
2012	5,13	6,51	8,37	5,03	5,34
2013	5,23	1,09	2,61	7,03	9,75
2014 (s.d Juni)	2,51	1,33	1,17	7,46	5,40

Sumber : BPS, diolah BKP

Sedangkan perkembangan harga pangan strategis lainnya di tingkat produsen periode 2010–2014 (s.d Juni), seperti daging sapi, daging ayam ras dan telur ayam ras selama tahun 2014 cenderung lebih stabil jika dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, kecuali komoditas telur ayam ras.

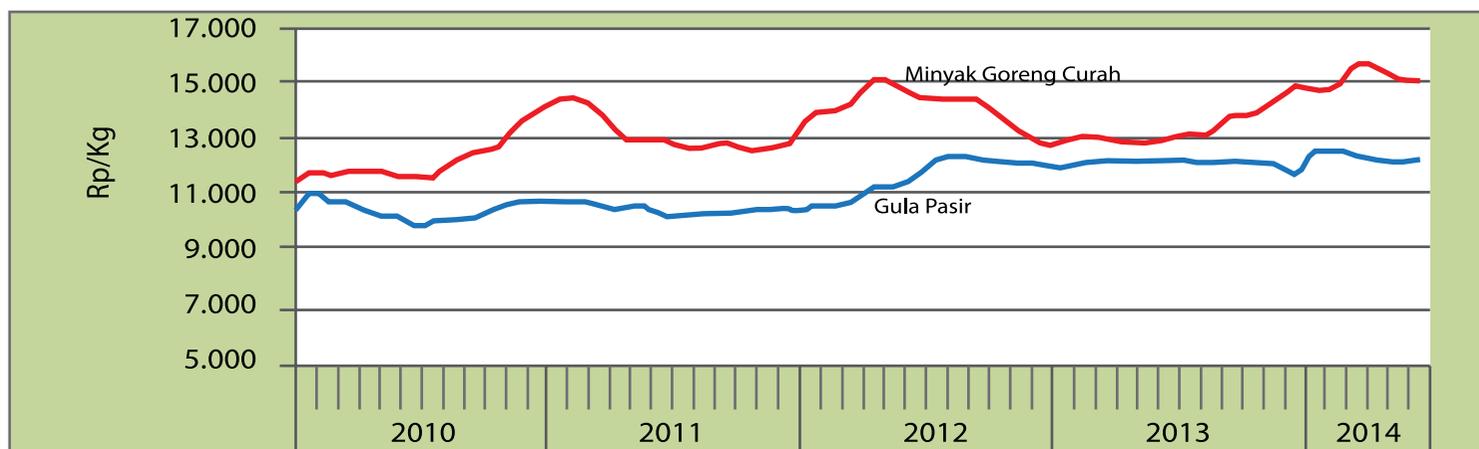
Tabel 49. Perkembangan Harga Pangan Hewani Tingkat Produsen Tahun 2010-2014

Tahun	Daging Sapi	Daging Ayam ras	Telur ayam ras
Harga (Rp/Kg)			
2010	23.706	14.533	11.583
2011	24.527	14.209	12.429
2012	27.473	15.368	13.390
2013	34.713	16.045	14.505
2014(s.d Juni)	37.866	16.227	14.669
% fluktuasi harga (CV)			
2010	4,18	13,81	9,01
2011	2,70	7,78	6,20
2012	6,26	7,09	4,58
2013	5,60	8,93	6,96
2014(s.d Juni)	1,09	6,67	9,06

Sumber : BPS, diolah BKP

a. Gula Pasir dan Minyak Goreng

Tren perkembangan harga gula pasir tingkat konsumen selama periode 2010–2014 (s.d Juni) cenderung naik dari tahun ke tahun, dengan rata-rata harga terendah terjadi pada tahun 2009 sebesar Rp 12.029/kg dan tertinggi tahun 2014 sebesar Rp 13.130/kg. Sementara itu, pola perkembangan harga minyak goreng dari tahun ke tahun cenderung mengalami kenaikan, dan jika dilihat dari tren kenaikan setiap periode Maret-Mei mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada tiap tahunnya. Selama periode 2010-2014 (s.d Juni) harga terendah pada tahun 2010 Rp 11.033/kg dan tertinggi tahun 2014 Rp 13.233/kg

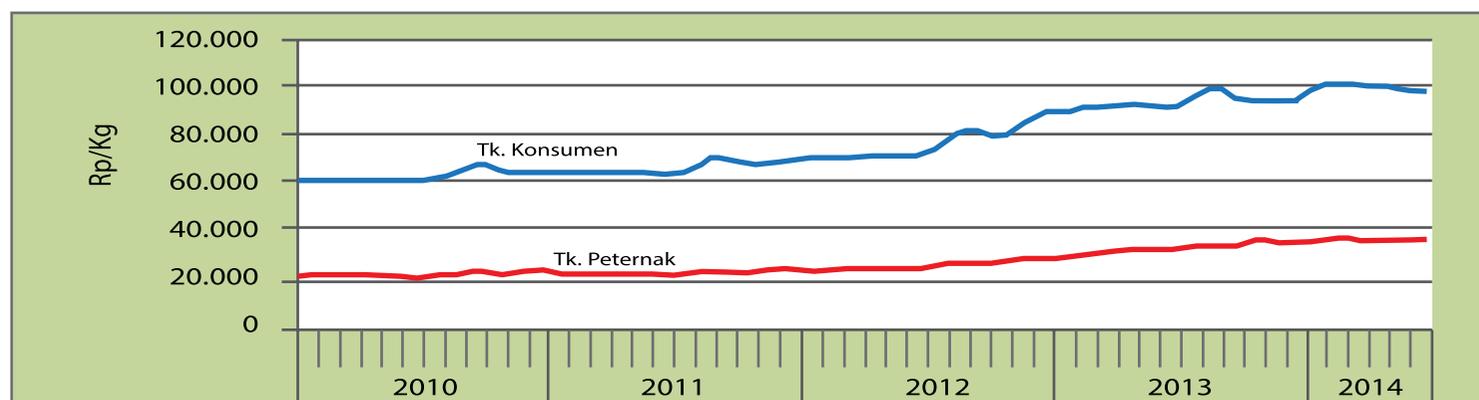


Sumber: BPS diolah BKP

Gambar 158. Perkembangan Harga Minyak Goreng Curah dan Gula Pasir Tingkat Konsumen Periode 2009-2014

b. Daging Sapi

Pola perkembangan harga daging sapi tingkat konsumen selama periode 2010-2014 (s.d Juni) mengikuti pola perkembangan harga daging sapi di tingkat produsen yaitu cenderung naik dari tahun ke tahun, dengan rata-rata harga terendah di tingkat konsumen terjadi pada tahun 2010 sebesar Rp 62.993/kg dan tertinggi tahun 2014 sebesar Rp 99.279/kg. Sedangkan, di tingkat produsen, harga terendah terjadi pada tahun 2010 sebesar Rp 23.706/kg berat hidup dan tertinggi tahun 2014 Rp 37.866/kg berat hidup.

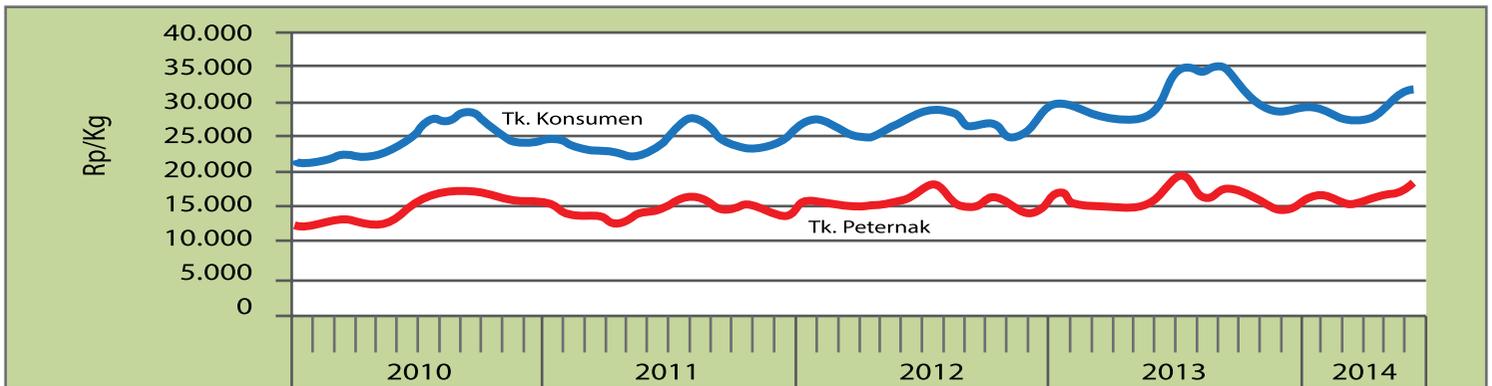


Sumber: BPS diolah BKP

Gambar 159. Perkembangan Harga Daging Sapi Periode 2010-2014

c. Daging Ayam Ras

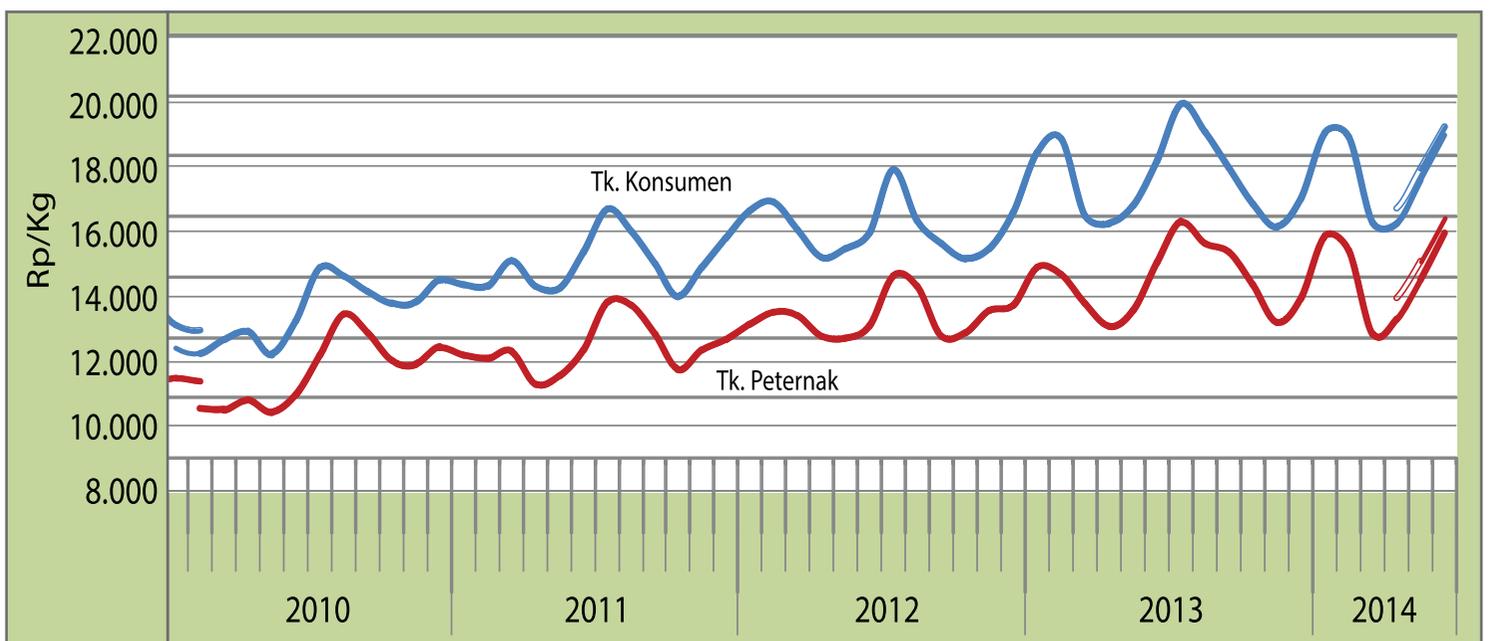
Pola perkembangan harga daging ayam ras tingkat konsumen selama periode 2010-2014 (s.d Juni) mengikuti pola perkembangan harga daging ayam ras di tingkat produsen yaitu cenderung naik dari tahun ke tahun, dan jika dilihat dari tren kenaikan setiap periode puasa - lebaran mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada tiap tahunnya. Kenaikan harga pada periode tersebut lebih disebabkan karena jumlah permintaan yang meningkat, akan tetapi pasokan yang cenderung tetap. Di tingkat konsumen harga daging ayam ras terendah pada tahun 2009 Rp. 23.749/kg dan tertinggi tahun 2013 Rp. 29.866/kg, sedangkan di tingkat peternak, harga daging ayam ras terendah pada tahun 2010 Rp. 14.209/kg berat hidup dan tertinggi tahun 2014 Rp 16.227/kg berat hidup.



Sumber: BPS diolah BKP

Gambar 160. Perkembangan Harga Daging Ayam Ras Periode 2010-2014

d. Telur Ayam Ras



Sumber: BPS diolah BKP

Gambar 161. Perkembangan Harga Telur Ayam Ras Periode 2010-2014

Pola perkembangan harga telur ayam ras tingkat konsumen selama periode 2010-2014 (s.d Juni) mengikuti pola perkembangan harga daging ayam ras di tingkat produsen yaitu cenderung naik dari tahun ke tahun, dan jika dilihat dari trend, kenaikan terjadi setiap awal tahun dan periode puasa - lebaran mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada tiap tahunnya. Kenaikan harga pada periode tersebut lebih disebabkan karena jumlah permintaan yang meningkat memasuki tahun baru dan periode puasa-lebaran, akan tetapi pasokan yang cenderung tetap. Di tingkat konsumen harga telur ayam ras terendah pada tahun 2010 Rp 13.471/kg dan tertinggi tahun 2014 Rp 17.864/kg, sedangkan di tingkat peternak, harga telur ayam ras terendah pada tahun 2010 Rp 11.583/kg berat hidup dan tertinggi tahun 2014 Rp 16.227/kg berat hidup.

13.4. Proteksi/Perlindungan Produk Pertanian

Sebagai upaya perlindungan sumber daya alam hayati khususnya hewan dan tumbuhan di dalam negeri serta dukungan akselerasi ekspor produk pertanian, maka diperlukan adanya penguatan sistem perkarantina dengan menyempurnakan dan meningkatkan kualitas operasional di lapangan.

Upaya perlindungan produk pertanian sebagai wujud dari dukungan target sukses Kementerian Pertanian, yaitu swasembada dan swasembada berkelanjutan khusus untuk padi, jagung serta daging sapi ditunjukkan dari kemampuan melakukan cegah tangkal terhadap hama dan penyakit hewan karantina (HPHK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK).



Gambar 162. Deteksi dan cegah tangkal produk tumbuhan impor

Temuan OPTK terutama yang dapat menyerang padi dan jagung maupun komoditas tumbuhan lainnya akan sangat berbahaya apabila masuk dan menyebar ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Badan Karantina Pertanian dalam kurun waktu 2004 – 2014 telah mendeteksi positif terhadap OPTK dari golongan virus dan bakteri yang khususnya dapat menyerang padi dan jagung dan belum ada di Indonesia, pada tahun 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 dan 2014.

Deteksi dan cegah tangkal tersebut diketahui melalui produk tumbuhan impor, antara lain : benih padi, jagung, rumput melalui pemeriksaan karantina secara laboratoris dengan menggunakan metode pemeriksaan yang akurat, seperti: PCR, ELIZA



Gambar 163. Menteri Pertanian melakukan pemusnahan terhadap benih-benih tumbuhan yang tertular oleh OPTK asal luar negeri

Penangkalan OPTK tersebut diketahui hasil deteksi uji laboratorium karantina tumbuhan terhadap benih padi asal Cina, Phillipine, benih jagung asal Thailand, Cina, India di Balai Besar Karantina Pertanian (BBKP) Tanjung Priok, BBKP Soekarno-Hatta, BBKP Surabaya serta benih rumput asal Australia di Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sumbawa Besar.

Sebagai tindak lanjut dari temuan OPTK maka dilakukan tindakan karantina pemusnahan dengan cara pembakaran produk tumbuhan yang terinfestasi, karena tindakan perlakuan tidak memungkinkan efektif dilaksanakan.

Dalam kurun waktu 2010-2014 Badan Karantina Pertanian juga telah melakukan cegah tangkal terhadap HPHK berbahaya apalagi yang bersifat zoonosis, antara lain: Penyakit *John's Disease (Paratuberculosis)*, *Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE)*, *Infectious Bovine Rhinotracheitis (IBR)*, *Enzootic Bovine Leukosis (EBL)*, *Bovine Viral Diarrhea (BVD)*, *Leptospira*, *Brucellosis*, *surra* baik dalam kegiatan impor maupun antara area (domestik).

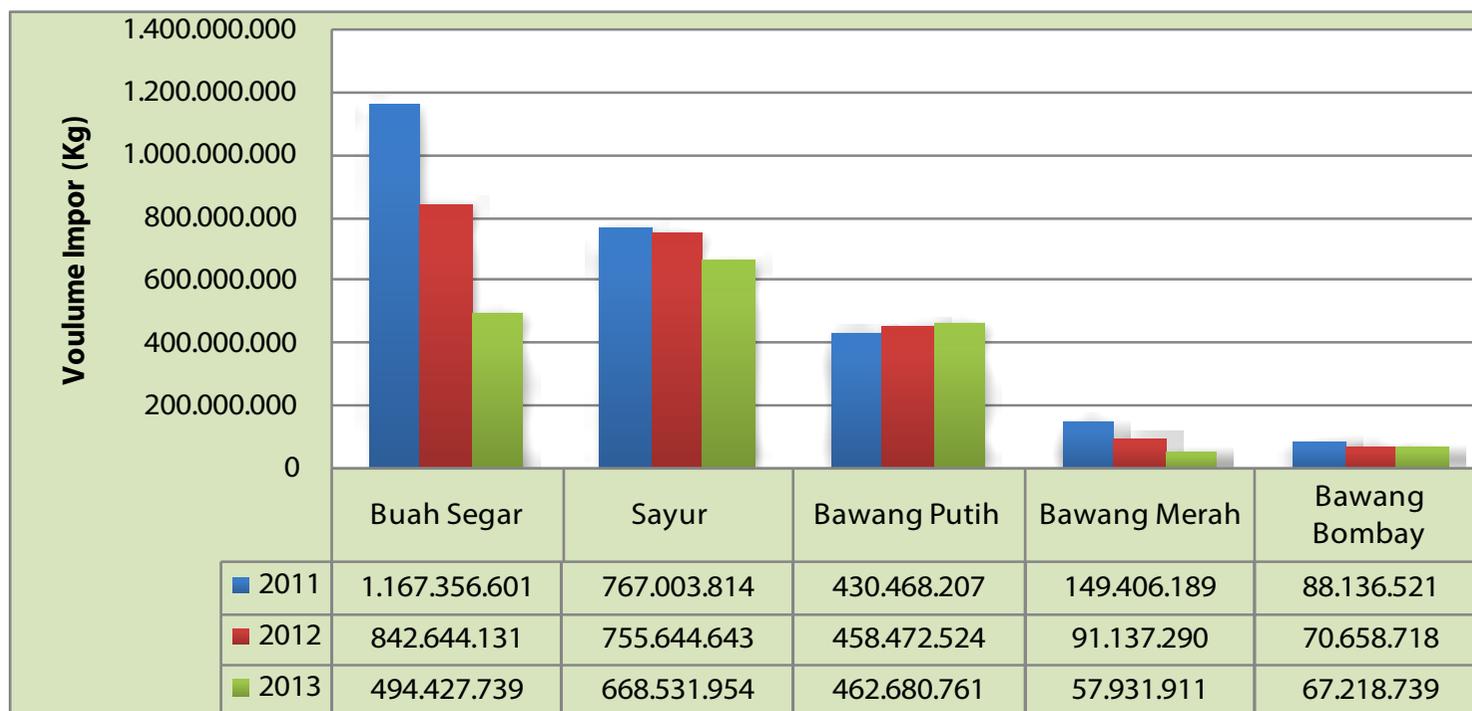


Gambar 164. Pengawasan lalu lintas media pembawa HPHK (sapi)

Penguatan sistem karantina hewan dan karantina tumbuhan senantiasa terus dilakukan dari tahun ke tahun. Implementasi Peraturan Perkarantinaaan dan Keamanan Hayati memberikan pengaruh terhadap menurunkan volume importasi buah dan sayur buah segar antara lain adalah:

1. Peraturan Menteri Pertanian No. 42/Permentan/OT.140/6/2012 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Buah Segar dan Sayuran Buah Segar Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia tanggal 13 Juni 2012;
2. Peraturan Menteri Pertanian No. 43/Permentan/OT.140/6/2012 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Sayuran Umbi Lapis Segar Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia tanggal 13 Juni 2012.

Dalam Permentan tersebut terdapat pengaturan pintu pemasukkan guna mengefektifkan tindakan cegah tangkal introduksi OPTK khususnya lalat buah. Pengaturan pintu pemasukkan sekaligus selaras dengan ketentuan WTO-SPS yang tidak bertentangan untuk melarang perdagangan bebas khususnya buah asal luar negeri. Adanya penutupan pemasukan melalui Pelabuhan Tanjung Priok, berimplikasi terhadap penurunan volume impor buah, sayur segar dan umbi lapis segar.



Gambar 165. Trend Penurunan Volume Buah, Sayur Segar dan Umbi Lapis Impor Tahun 2011-2013

Berdasarkan gambar di atas terlihat bahwa implementasi Permentan No. 42 dan No. 43 Tahun 2012 mampu menurunkan volume impor buah segar sebesar 57,64%, volume impor sayur turun sebesar 12,84%, sedangkan untuk umbi lapis segar volume impornya juga mengalami trend penurunan sebesar 12,00%. Dengan menurunnya volume impor buah segar dan sayur segar artinya dalam konteks pengawasan impor buah dan sayur segar cenderung dapat mengefektifkan pengawasan risiko terhadap masuk dan menyebarnya OPTK.

Sebagai upaya membangun kepatuhan terhadap pengguna jasa karantina hewan dan karantina tumbuhan, Badan Karantina Pertanian senantiasa melakukan identifikasi terhadap pelanggaran UU No 16 Tahun 1992.

Berbagai kasus pelanggaran UU No. 16 Tahun 1992 antara lain adalah kasus pemalsuan dokumen karantina, pemasukan komoditas pertanian secara ilegal dengan tidak melaporkan kepada petugas karantina, lalu lintas komoditas hewan dan tumbuhan tidak disertai dengan kelengkapan dokumen.



Gambar 166 . Cegah Tangkal Masuk dan Menyebarnya OPTK Lalat Buah Asal Luar Negeri

Perlindungan/proteksi produk tumbuhan juga senantiasa dilakukan oleh Badan Karantina Pertanian untuk komoditas pertanian ekspor. Kualitas produk tumbuhan senantiasa harus terjaga terutama terhadap kesehatan tumbuhan untuk menghindari adanya catatan tidak kesesuaian (*Notification of Non-Compliance*) di negara tujuan.

Badan Karantina Pertanian untuk mendukung akselerasi ekspor komoditas pertanian khususnya tumbuhan dilakukan melalui Skim Audit Badan Karantina Pertanian (SAB). SAB dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Badan Karantina Pertanian yang merupakan tata alir proses registrasi melalui proses pemeriksaan atas pemenuhan persyaratan yang ditetapkan untuk dapat dipertimbangkan dan disetujui oleh Ketua Otoritas Skim Audit Badan Karantina Pertanian kepada pelaksana tindakan karantina/perusahaan (pihak ketiga) yang akan diberi mandat untuk melaksanakan fumigasi standar, sertifikasi marking kemasan kayu.

Penyempurnaan penyelenggaraan program registrasi terhadap perusahaan fumigasi dan perusahaan kemasan kayu dalam rangka penguatan kinerja pelaksanaan tindakan karantina yang dilakukan oleh pihak ketiga. Penguatan kinerja tersebut dimaksudkan bahwa dalam Skim Audit Barantan telah menerapkan standar manajemen mutu. Oleh karena itu proses jaminan mutu baik oleh pihak otoritas kompeten (Badan Karantina Pertanian), maupun pelaksana tindakan

karantina (pihak ketiga) dapat dipertanggungjawabkan.

Beberapa hal penting dengan adanya Skim Audit Badan Karantina Pertanian, diantaranya adalah::

- Tindakan perlakuan karantina tumbuhan terhadap komoditas ekspor dilakukan oleh perusahaan-perusahaan fumigasi/kemasan kayu yang telah teregistrasi, sehingga akan meminimalkan adanya ketidaksesuaian dalam memenuhi persyaratan impor negara tujuan, *Notification of Non Compliance (NNC)*. Oleh karena itu dapat meningkatkan kredibilitas Badan Karantina Pertanian di luar negeri khususnya di Negara pengimpor.
- Apabila diasumsikan bahwa setiap perusahaan fumigasi mempunyai 10 tenaga kerja untuk memenuhi struktur organisasinya, maka akan terserap tenaga kerja 920 orang. Sedangkan perusahaan kemasan kayu akan lebih banyak penyerapan tenaga kerjanya, bila diasumsikan 20 orang saja maka akan terserap 1520 orang.



Gambar 167. Pelaksanaan Tindakan Karantina Perlakuan Fumigasi Terhadap Komoditas Tumbuhan Ekspor

Berdasarkan data yang ada jumlah perusahaan yang melayani perlakuan fumigasi dan kemasan kayu sampai dengan tahun 2014 yang aktif sebagai berikut:

Tabel 50. Perusahaan Yang Melayani Perlakuan Fumigasi Dan Kemasan Kayu

Uraian	Registrasi/Penetapan (perusahaan)			
	Fumigasi MB	Fumigasi PH3	Kemasan Kayu	IKT
Aktif	92	27	76	106
Pembekuan	8	0	6	--
Pencabutan	41	0	41	2
Total	141	27	123	108

Adanya layanan ini akan menjaga kualitas produk tumbuhan yang mendapatkan sertifikasi dari karantina tumbuhan (KT). Total produk tumbuhan yang telah mendapatkan sertifikasi KT yang mendapatkan complain dari negara tujuan melalui catatan ketidaksesuaian (*Notification of Non Compliance*) Negara tujuan dari tahun 2010-014 masih terjaga dibawah 1%, artinya lebih dari 99% produk tumbuhan ekspor dari Indonesia diterima di berbagai negara tujuan tanpa ada komplain.



Gambar 168. Menteri Pertanian Melakukan Pemusnahan Daging Celeng Ilegal di Pelabuhan Pelabuhan Merak

Sebagai wujud pelaksanaan tindakan karantina antar area, isu adanya lalu lintas daging celeng (babi hutan) dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa marak terjadi selama 5 tahun terakhir ini. Hal ini disinyalir menjadi daging tersebut dioplos/dicampur dengan daging sapi yang meresahkan masyarakat. Adapun modus operandinya antara lain:

- Daging celeng berasal dari Pulau Sumatera dan diangkut ke Pulau Jawa dengan alat angkut kendaraan roda 4 (Bus/Truck) dan disisipkan dengan barang angkutan lainnya.
- Daging tersebut melalui Pintu Pengeluaran di Pelabuhan Bakauheni dan Pintu Pemasukan di Pelabuhan Merak
- Daging tidak dilengkapi dengan dokumen karantina (Surat Kesehatan) dari Area Asal
- Karena ditengarai untuk menghindari ketatnya pengawasan karantina, maka pelaku terkadang tidak menggunakan pelabuhan pemasukan utama (Pelabuhan Merak) tetapi menggunakan Pelabuhan Bojonegara (20 km dari Pel Merak) atau pelabuhan lain yang luput dari pengawasan.

Badan Karantina Pertanian bekerja sama dengan Kepolisian, Badan Kerveasi Sumber Daya Alam (BKSDA), LSM dan Masyarakat senantiasa dapat mencegah tangkal daging celeng yang dilalu lintaskan dengan kendaraan Bus atau truck. Daging yang tidak dilengkapi dengan dokumen karantina (sertifikat kesehatan) dilakukan penahanan dan pada akhirnya dimusnahkan karena tidak bertuan.



Gambar 169. Pemberkasan Terhadap Para Tersangka oleh PPNS Karantina

Selain itu kontribusi Badan Karantina Pertanian dalam mensukseskan ekspor CPO dari kelapa sawit berasal pengawasan importasi benih dan polen kelapa sawit. Pengawasan pemasukkan benih dan pollen kelapa sawit dalam skala besar dari negara Costa Rica, PNG, Malaysia, negara-negara Afrika dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan benih dalam negeri belum mencukupi kebutuhan untuk pengembangan industri kelapa sawit. Sejak awal tahun 1989 hingga saat ini Badan Karantina Pertanian berkomitmen dan konsisten pengamanan industri kelapa sawit. Dengan *Import Risk Analysis (IRA)* yang ketat, maka hingga kini Indonesia sebagai negara terbesar penghasil buah kelapa sawit dengan berbagai industri turunannya. Badan Karantina Pertanian selalu waspada terhadap penyakit kelapa sawit sebagai OPTK yang berpotensi terbawa benih antara lain: *Fusarium wilt*, *Lethal yellowing*, *Fatal Yellowing*, *Red Ring Nematode*. Dengan tindakan karantina yang dilakukan di negara asal (*Pre-border*) dan pelaksanaan tindakan pengasingan dan pengamatan di border serta pemantauan perkembangan dan pertumbuhan kelapa sawit ex. luar negeri tidak ditemukan adanya gejala serangan OPTK hingga saat ini.



Gambar 170. Pengawasan Karantina Terhadap OPTK Kelapa/Kelapa Sawit dan Pemusnahan Benih Kelapa Sawit Yang Tidak Dilengkapi Dokumen Karantina

Badan Karantina Pertanian juga melakukan pengawasan terhadap introduksi agen hayati. Pemasukkan agen hayati merupakan agens hayati yang bermanfaat untuk kepentingan penunjang kultur teknis pertanian termasuk industri pertanian. Selaras dengan perkembangan teknologi agro-industri yang ramah lingkungan berbagai jenis agens hayati diintroduksi untuk pengendalian OPT, serta untuk agro-industri antara lain introduksi bakteri *Agrobacterium* untuk fermentasi penghasil bumbu penyedap dari tetes tebu.

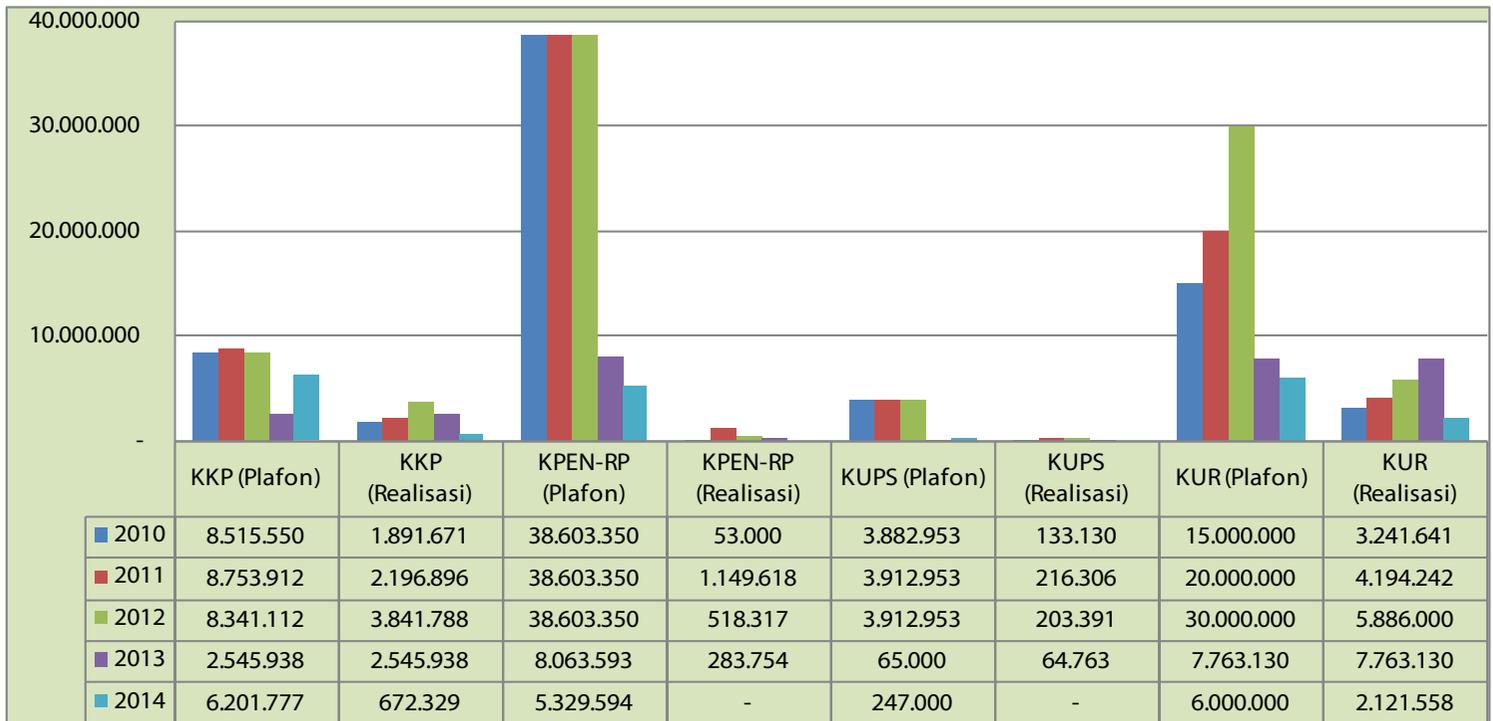
Prestasi Badan Karantina Pertanian secara internasional adalah dipercaya selaku anggota *Standard Committee* pada lembaga *Internasional Plant Protection Convention Secretariat*, FAO untuk pembuatan standard/pedoman internasional dalam memfasilitasi dan harmonisasi perdagangan terhadap produk tumbuhan untuk memberikan jaminan kesehatan tumbuhan. Satuan Kerja Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian (BUT-TMKP) di Bekasi sebagai bagian institusi Badan Karantina Pertanian memberikan kepercayaan pada negara-negara anggota IPPC, berkontribusi memberikan penguatan SDM negara Namibia, Sudan, Singapore, Malaysia, Thailand, Vietnam, Philippines, Suriname, Timor Leste melalui pelatihan teknis perkarantinaan Indonesia.

13.5. Penyediaan Pembiayaan Usahatani yang Murah dan Mudah Diakses Petani

Dukungan perbankan dalam penyediaan pembiayaan dan kredit ke sektor pertanian selama ini masih relatif rendah, berkisar antara 6-7 persen dari total kredit yang disalurkan perbankan. Hal ini disebabkan oleh usaha pertanian rakyat yang berskala kecil, lokasi yang tersebar dan keterbatasan dalam penyediaan jaminan. Selain itu, kelembagaan petani juga belum solid, di samping rata-rata pendidikan petani yang rendah menjadi faktor pembatas dalam mengelola administrasi keuangan. Untuk mendorong tersedianya pembiayaan bagi petani yang bersumber dari swasta, perbankan dan masyarakat, setiap kelompok usaha membutuhkan kebijakan, strategi dan fasilitasi penyediaan skema pembiayaan yang berbeda. Saat ini, kegiatan usaha yang dilakukan penduduk Indonesia masih banyak yang tergolong sebagai usaha mikro, kecil dan menengah yang umumnya belum sepenuhnya terlayani oleh lembaga perbankan (bank umum).

(1) Kredit Program

Untuk mengatasi keterbatasan permodalan dan lemahnya kelembagaan petani, pemerintah mengembangkan fasilitas pembiayaan dalam bentuk skim kredit program dengan subsidi bunga dan penjaminan, serta melaksanakan kegiatan pemberdayaan petani. Skim kredit program yang telah dikembangkan adalah Kredit Ketahanan Pangan (KKP) yang kemudian berubah menjadi Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E), Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP), Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS), dan Kredit Usaha Rakyat (KUR). KKP-E, KPEN-RP, KUPS adalah skim kredit program dengan subsidi bunga, sementara KUR adalah skim kredit program dengan penjaminan.

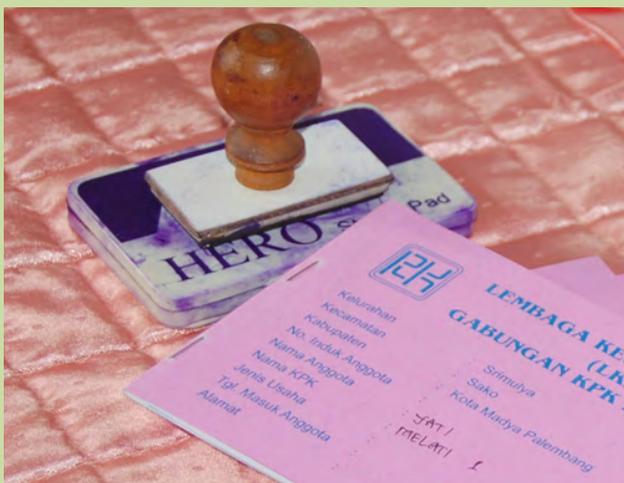


Gambar 171. Realisasi Kredit Program Pertanian Tahun 2010-2014 (jutaan rupiah)

(2) Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A)

Selain kredit program, Kementerian Pertanian mendorong berdirinya Lembaga ekonomi petani atau Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis yang selanjutnya disingkat LKM-A adalah salah satu unit usaha otonom yang didirikan dan dimiliki oleh Gapoktan penerima dana BLM PUAP guna memecahkan masalah/kendala akses permodalan anggota Gapoktan PUAP.

LKM-A Gapoktan Harum Sari



Gambar 126. Kegiatan LKM-A Gapoktan Harum Sari

LKM-A Gapoktan Harum Sari, Kota Palembang mendapat suntikan dana Program PUAP sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) disalurkan kepada 81 anggota (terdiri dari 45 anggota yang terdaftar di RUB, dan 36 tambahan anggota baru). Dalam waktu kurang dari satu tahun, nilai penyaluran dana mencapai Rp 174.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Rupiah). Penyaluran mencapai lebih dari Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) karena angsuran bulanan yang diterima LKM sudah langsung digulirkan kembali. Dengan nilai perolehan bagi hasil untuk LKM Harum Sari sebesar Rp 11.178.000,- (Sebelas Juta Seratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah).

13.6. Penyediaan dan Pengembangan Infrastruktur Pedesaan

Untuk mendukung peningkatan produksi pertanian, Kementerian Pertanian telah melakukan perbaikan dan pembangunan infrastruktur pertanian yang mencakup: Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT), Jaringan Irigasi Desa (JIDES), Tata Air Mikro (TAM), Jalan Usaha Tani (JUT), Jalan Produksi, konservasi Daerah Aliran Sungai (DAS), embung, sawah, sumur, dam parit, dan konservasi lahan.

(1) Kegiatan Pengembangan Sumber Air di Indonesia

Berdasarkan hasil pemetaan lahan sawah yang dilaksanakan Kementerian Pertanian tahun 2012 Indonesia memiliki total lahan sawah seluas 8.13 juta Ha. Masih ada sekitar 149.523 Ha sawah yang memerlukan pengairan, belum lagi pengairan untuk mendukung sub sektor lain seperti hortikultura, perkebunan dan peternakan.

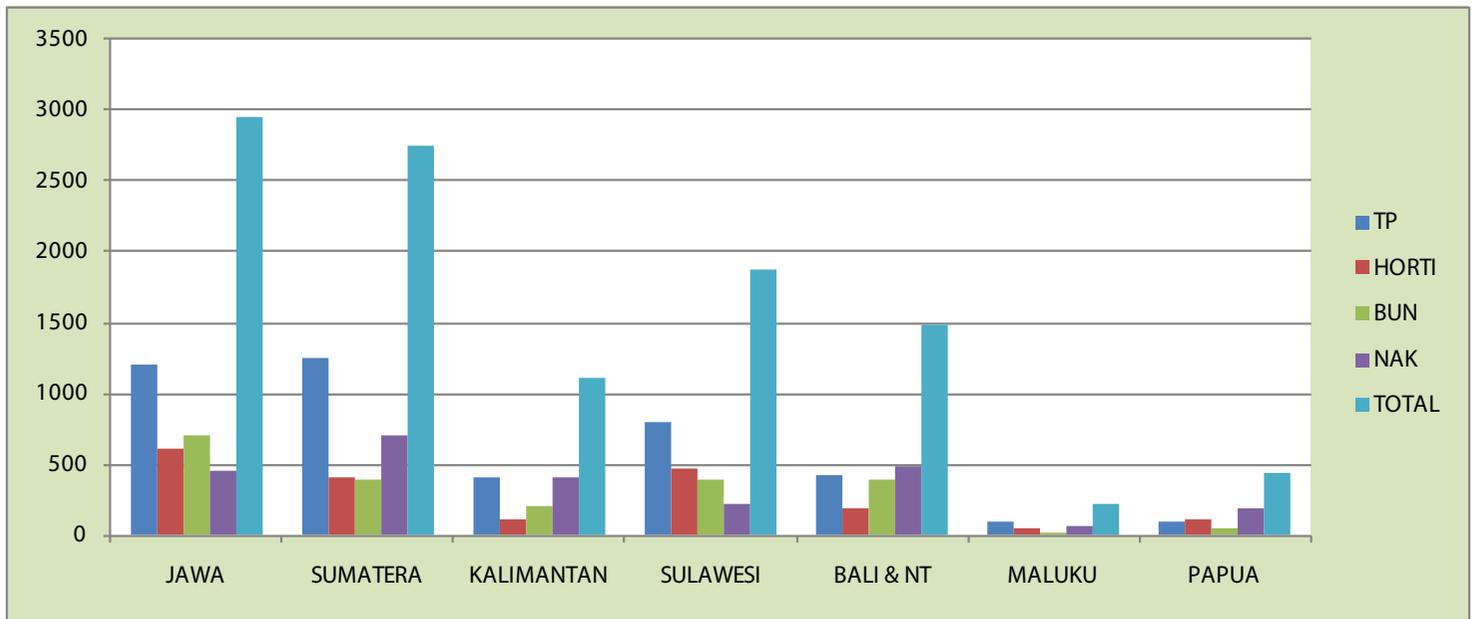
Tabel 51. Hasil Pemetaan Lahan Sawah Tahun 2012

Uraian	Jumlah	Keterangan
Sawah rawa pasang surut	7.230.183 Ha	Kepmen No.390/2007
Sawah rawa lebak	488.852 Ha	Inventarisasi Ditjen SDA
JIAT	92.090 Ha	Inventarisasi Ditjen SDA
Lain-lain (sawah tadah hujan, sawah irigasi desa, ladang)	149.523 Ha	
Total lahan sawah di Indonesia	7.230.183 Ha	Inventarisasi Kementan 2012

Melihat kenyataan diatas, maka sangat diperlukan adanya kegiatan untuk melakukan pengembangan sumber-sumber air baik sumber air permukaan (*surface water*) seperti sungai, danau, mata air, terjunan air, air bekas galian tambang; maupun air tanah (*ground water*) seperti air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

Pengembangan Sumber Air (PSA) bertujuan untuk memanfaatkan potensi sumber air sebagai suplesi air irigasi bagi komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan serta budidaya ternak; meningkatkan intensitas pertanaman dan/atau luas areal tanam; meningkatkan produktivitas pertanian, pendapatan dan kesejahteraan petani; dan memanfaatkan potensi sumber air sebagai air irigasi, baik di daerah irigasi maupun non daerah irigasi.

Sejak tahun 2006 jumlah kegiatan PSA yang telah dilaksanakan sebanyak 11.546 unit yang tersebar di seluruh Indonesia, dengan areal lahan yang dilayani sekitar 127.860 Ha terdiri dari subsektor tanaman pangan, perkebunan, hortikultura dan peternakan.



Gambar 173. Sebaran Kegiatan PSA Per Sub Sektor

Bentuk kegiatan pengembangan irigasi air permukaan sangat beragam sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada, antara lain pompanisasi, kincir angin, hidram, bendung kecil, atau pipanisasi.



Gambar 174. Pipanisasi di Kabupaten Ngawi

Pengembangan Pipanisasi Untuk Meningkatkan Pendapatan Petani

Pengembangan pipanisasi dilaksanakan di Kabupaten Ngawi dengan memanfaatkan sumber air berupa aliran sungai sepanjang 1,6 km dengan menggunakan pipa diameter 5 inci dan dilengkapi dengan 5 bak pembagi sebanyak buah ukuran 1m³. Irigasi perpipaan ini dikelola oleh HIPPA Sido Lestari dengan anggota sebanyak 131 orang di Desa Giriharjo Kecamatan Ngrambe. Dalam setahun petani dapat menanam sebanyak 3 kali serta dapat meningkatkan hasil produksinya dari 3 ton menjadi 6 ton/ha. Hal ini tentu berdampak pada bertambahnya pendapatan yang diperoleh oleh petani, setelah adanya irigasi perpipaan peningkatan pendapatan petani sebesar empat jutaan.

(2) Pengelolaan Jaringan Irigasi

Salah satu kendala dalam peningkatan produksi padi adalah masalah ketersediaan air yang diperlukan dalam usaha tani. Total kerusakan jaringan irigasi berdasarkan *Rapid Assesment* Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2010 adalah sebesar kurang lebih 52%. Untuk itu dilakukan

perbaiki jaringan irigasi oleh Pemerintah, baik Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten sesuai kewenangannya serta terintegrasi antara Kementerian Pekerjaan Umum yang menangani jaringan primer dan sekunder dengan Kementerian Pertanian yang menangani jaringan tersier.

Pengelolaan Tata Air Mikro di Lahan Rawa Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan

Di Kabupaten Barito Kuala telah dilakukan kegiatan normalisasi dan peningkatan saluran-saluran tersier, sub tersier dan kuarter yang telah mengalami kerusakan atau sedimentasi. Selain itu juga dibangun pintu air (*stoplog*) otomatis untuk pengaturan tata air mikro.



Gambar 175. Pengelolaan Tata Air Mikro di Lahan Rawa

Pengembangan Jaringan Irigasi Kabupaten Ciamis Jawa Barat

Kegiatan pengembangan jaringan irigasi di Kabupaten Ciamis berupa pembangunan saluran pada irigasi desa di lokasi yang tergenang karena limpasan air sehingga hanya dapat tanam satu kali dalam setahun. Dengan dibangunnya saluran/senderan maka pada lokasi tersebut dapat tanam dua kali dalam setahun sehingga terjadi peningkatan IP.



Gambar 176. Kondisi Lokasi Setelah Pembangunan Saluran

Rehabilitasi Jaringan Kabupaten Jember, Jawa Timur

Kegiatan dilaksanakan adalah untuk merehabilitasi bendung sederhana dan pembangunan talang air irigasi. Pada awalnya lahan sawah dilokasi tersebut hanya dapat panen padi satu kali dalam setahun yaitu pada musim hujan. Dengan adanya pembangunan ini maka pada musim kemarau pun sawah dapat menghasilkan panen padi secara optimal.



Gambar 177. Rehabilitasi Jaringan Kabupaten Jember

Normalisasi Saluran Pembuang di Kabupaten Karawang, Jawa Barat

Daerah pantura Jawa Barat khususnya Kabupaten Karawang sebagai salah satu sentra produksi padi di Propinsi Jawa Barat masih sering mengalami banjir di saat musim hujan dan kekeringan saat musim kemarau akibat pendangkalan dan berkurangnya lebar saluran drainase akibat sedimentasi. Normalisasi saluran drainase dilakukan sehingga pada lahan sawah disekitar saluran drainase tidak lagi mengalami banjir dan kekeringan.

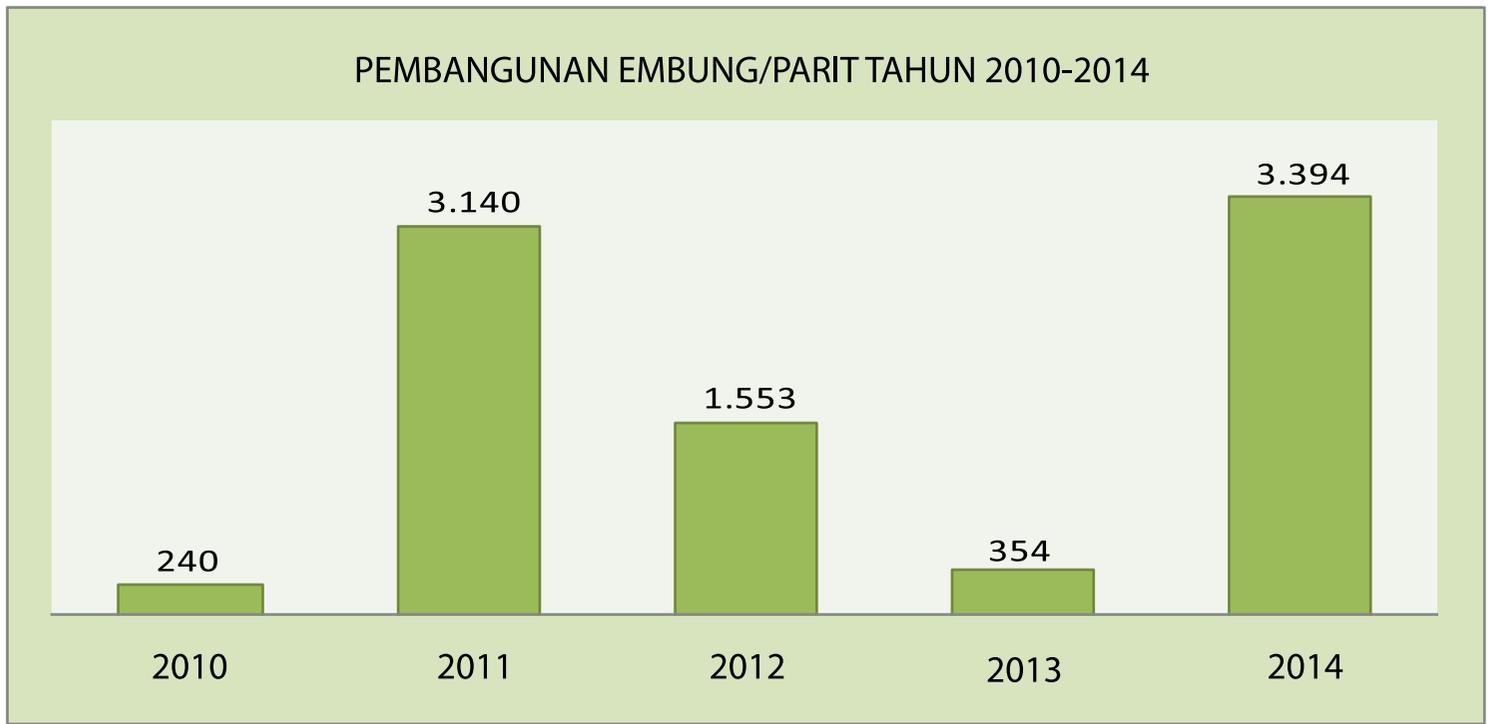
(3) Konservasi Air

Upaya konservasi air dilakukan melalui pembangunan embung yang berupa waduk berukuran mikro (*small farm reservoir*) untuk melakukan pemanenan air hujan dan aliran permukaan (*rain fall and run off harvesting*) pada musim hujan untuk dimanfaatkan pada saat terjadi krisis air terutama pada musim kemarau. Pada ekosistem tadah hujan atau lahan kering dengan intensitas dan distribusi hujan yang tidak merata, embung dapat digunakan untuk menahan kelebihan air irigasi pada musim kemarau.

Pembangunan embung dekat kawasan usaha pertanian merupakan salah satu upaya konservasi air yang tepat guna, murah dan spesifik lokasi, serta dapat mengatur ketersediaan air untuk memenuhi kebutuhan air (*water demand*) di tingkat usaha tani. Pola konservasi air yang sederhana dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan air usaha tani per-individu selama musim kering

serta ketersediaan lahan per individu maupun kelompok.

Rekapitulasi Kegiatan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim melalui Pembangunan Embung dari tahun 2010-2014 dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 179. Pembangunan Embung/Parit dari tahun 2010-2014

Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa kegiatan pembangunan embung meningkat dari tahun ke tahun sejak 2010, dan mencapai puncaknya pada tahun 2014 dengan jumlah embung yang dibangun sebanyak 3.394 buah (data sampai dengan bulan Juni 2014). Hal ini menggambarkan bahwa keberadaan embung sebagai sarana irigasi dilahan kering semakin dibutuhkan, terutama terkait dengan fenomena perubahan iklim saat ini.



14.1. Peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib), dimana It menunjukkan indeks harga barang-barang yang dihasilkan petani sementara Ib mencerminkan indeks harga barang-barang dikonsumsi petani dan barang yang diperlukan untuk memproduksi hasil pertanian. NTP digunakan untuk mengukur kemampuan tukar produk yang dijual petani dengan produk yang dibutuhkan petani dalam produksi dan konsumsi rumah tangga. Umumnya, NTP digunakan sebagai indikator proxy kesejahteraan petani.

Kinerja NTP selama tahun 2010-2013 memperlihatkan kecenderungan yang meningkat setiap tahunnya dimana NTP tertinggi tercatat pada tahun 2012 yaitu sebesar 105,24. Peningkatan NTP tersebut disebabkan oleh laju peningkatan indeks harga yang diterima petani lebih tinggi dibandingkan laju peningkatan indeks harga yang dibayar petani.



Keterangan: *) Data sampai Bulan Mei 2014

Gambar 180. Perkembangan Nilai Tukar Petani, 2010-2014 (2007 = 100)

Peningkatan indeks harga yang diterima petani merupakan hasil dari kebijakan Kementerian Pertanian dalam upaya perlindungan harga komoditas pertanian, sedangkan peningkatan indeks harga yang dibayar petani merupakan hasil kebijakan di luar kendali Kementerian Pertanian. Peningkatan NTP dapat dilakukan dengan meningkatkan indeks harga yang diterima petani, namun hal ini dapat memacu inflasi yang tidak diinginkan oleh pemerintah. Oleh sebab itu, untuk meningkatkan NTP perlu diupayakan agar peningkatan indeks harga yang dibayar petani tidak terlalu progresif.

Perlu dicermati bahwa NTP bukan mutlak ukuran kesejahteraan petani karena walaupun indeks harga yang diterima petani meningkat dengan berbagai kebijakan perlindungan harga yang dilakukan Kementerian Pertanian, namun belum tentu NTP meningkat, karena masih tergantung dengan indeks harga yang dibayar petani.

Peningkatan NTP pada tahun 2013 dibandingkan tahun 2010, mengindikasikan perkembangan yang baik dengan pertimbangan bahwa perhitungan NTP dimaknai sebagai penerimaan petani dari sektor pertanian untuk membiayai seluruh kebutuhan berusaha pertanian dan konsumsi rumahtangga. Dari angka NTP tahun 2013 terlihat bahwa ada sebesar 4,95% dari penghasilan petani yang dapat disimpan setelah memenuhi kebutuhan berproduksi dan konsumsi rumahtangga (100=titik impas). Padahal berdasarkan hasil penelitian Patanas oleh Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, pada tahun 2010 hingga 2012, diketahui bahwa sumber pendapatan rumahtangga tani sebesar 33,87-40% berasal dari sektor non pertanian. Artinya, dengan hanya perolehan pendapatan dari sektor pertanian, petani sudah dapat mencukupi kebutuhan berproduksi dan konsumsinya serta dapat menggunakan sisa penghasilan usahatani dan pendapatan dari sektor non pertanian untuk membiayai kebutuhan non produksi dan non konsumsinya.

Hasil perhitungan NTP oleh BPS dengan menggunakan tahun dasar 2007 menunjukkan bahwa NTP rata-rata tahun 2010-2014 (sampai dengan bulan Mei 2014) mencapai 103,78 (Tabel 52). NTP rata-rata tahun 2010-2014 tertinggi adalah pada subsektor tanaman hortikultura sebesar 106,52, diikuti oleh sub sektor tanaman perkebunan rakyat (105,72), sub sektor peternakan (102,49) dan NTP terendah pada sub sektor tanaman pangan (100,39). NTP tahun 2010-2014 mengalami pertumbuhan rata-rata 0,70%. Pada periode tersebut NTP tanaman pangan, tanaman hortikultura dan peternakan mengalami pertumbuhan positif masing-masing 0,65%, 1,45 dan 0,31%, sedangkan NTP tanaman perkebunan rakyat mengalami pertumbuhan negatif -0,62%.

Tabel 52. Perkembangan Nilai Tukar Petani per Sub Sektor (2007=100), 2010 – 2014

No	Tahun	Nilai Tukar Petani				
		Total	Tanaman Pangan	Tanaman Hortikultura	Tanaman Perkebunan Rakyat	Peternakan
1	2010	101.77	97.78	107.60	104.07	104.10
2	2011	104.58	102.82	108.95	107.29	101.22
3	2012	105.24	104.7	109.03	105.91	101.33
4	2013	104.92	104.62	108.35	104.13	102.05
5	2014*)	104.36	100.63	108.63	105.31	102.88
Rataan		103.78	100.39	106.52	105.72	102.49
Pertumbuhan (%)		0.70	0.65	1.45	-0.62	0.31

Keterangan : *) NTP 2014 sampai dengan bulan Mei 2014

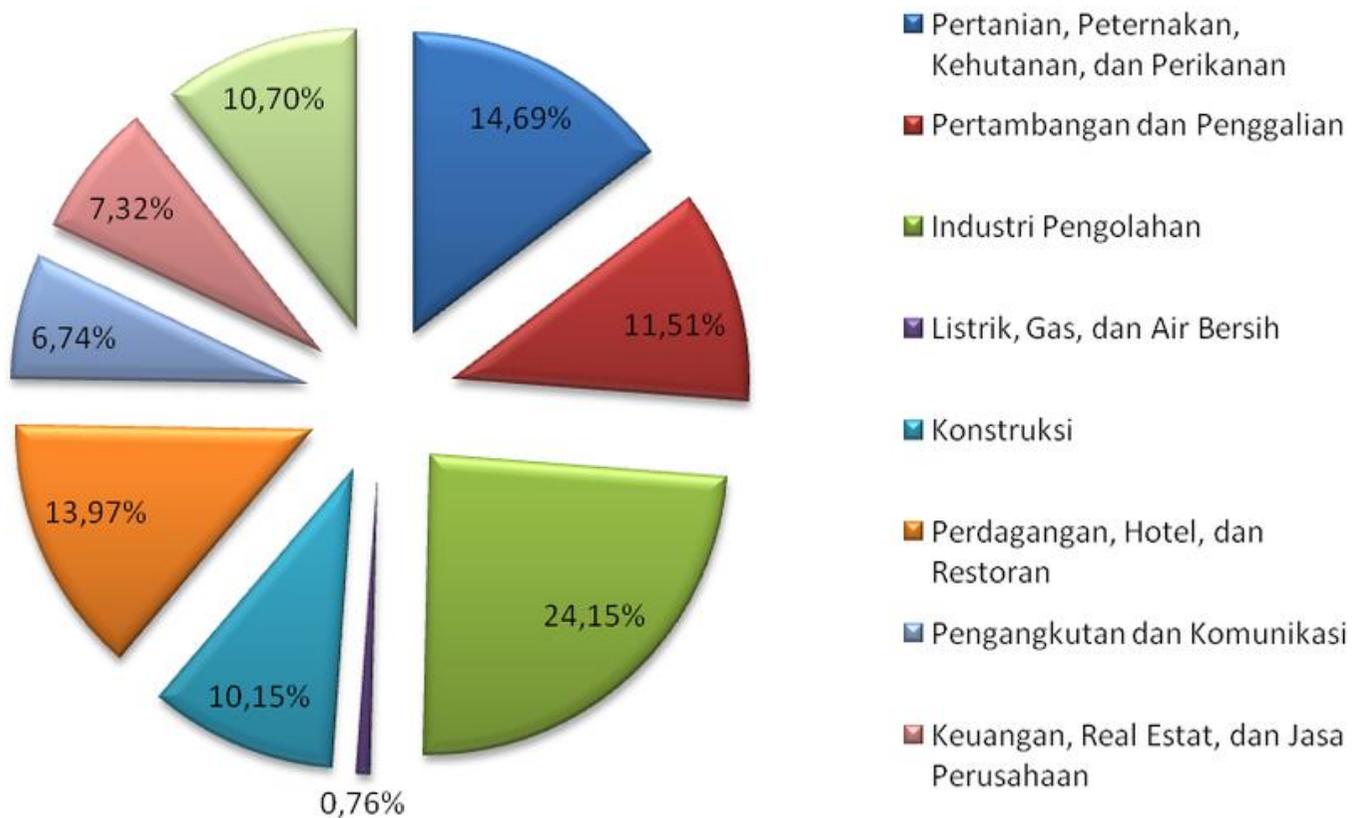
Permasalahan rendahnya NTP antara lain disebabkan oleh: (1) Skala usaha budidaya pertanian yang relatif kecil; (2) Harga komoditas berfluktuasi, terutama pada saat panen raya; (3) Pembangunan infrastruktur yang belum merata sehingga menyebabkan harga jual rendah dan harga kebutuhan lain tinggi; (4) Aplikasi teknologi yang belum optimal, hal ini antara lain disebabkan karena terbatasnya permodalan petani yang mengakibatkan produktivitas rendah (5) Daya saing komoditas pertanian relatif rendah; (6) Laju pertumbuhan harga konsumsi dan harga sarana produksi lebih tinggi dari laju pertumbuhan harga komoditas; (7) Dari sisi konsumsi rumah tangga, pertumbuhan pengeluaran untuk bahan makanan, makanan jadi, perumahan dan sandang lebih tinggi dibandingkan laju pertumbuhan produksi komoditas pertanian; (7) Dari sisi biaya produksi, laju pertumbuhan harga/biaya obat-obatan dan penambahan barang modal tinggi dibandingkan laju pertumbuhan harga komoditas pertanian.

Upaya yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian untuk meningkatkan pendapatan petani, seperti yang tercantum di dalam Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2010-2014 adalah sebagai berikut:

1. Penetapan HPP dan harga output yang proporsional dan lebih berpihak ke petani.
2. Melakukan upaya koordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk memungkinkan diberikannya keringanan pajak terhadap barang-barang modal atau sarana yang digunakan untuk berusahatani.
3. Mengupayakan pemberian skim subsidi bunga kredit dan penjaminan untuk investasi dan modal kerja usahatani.
4. Melanjutkan upaya intervensi stabilisasi harga melalui pembelian dari BULOG, menerapkan secara intensif sistem pembelian dengan resi gudang khususnya untuk komoditi utama pada saat panen.
5. Mengembangkan kelembagaan sistem tunda jual yang memungkinkan petani mendapatkan harga jual produk pertanian yang wajar.
6. Melakukan proteksi terhadap serbuan impor hasil-hasil pertanian, baik melalui instrumen tarif dan non tarif. Hal ini sangat dibutuhkan untuk melindungi kejatuhan harga pertanian akibat perdagangan internasional yang tidak adil (unfair market).
7. Pengembangan infrastruktur oleh Pemerintah yang dilakukan secara padat karya dengan melibatkan petani yang menjadi sasaran kegiatan.
8. Mengembangkan berbagai aktivitas off-farm yang mampu membangkitkan penghasilan bagi petani dengan basis kegiatan yang terkait usahatani, seperti wisata agro, industri rumah tangga berbahan baku hasil pertanian dan industri rumah tangga yang dapat menghasilkan peralatan pertanian sederhana.
9. Mengupayakan insentif bagi tumbuhnya industri hulu dan hilir pertanian.
10. Mengupayakan adanya payung hukum bagi bertumbuhnya Lembaga Pembiayaan Pertanian yang tersedia di perdesaan.

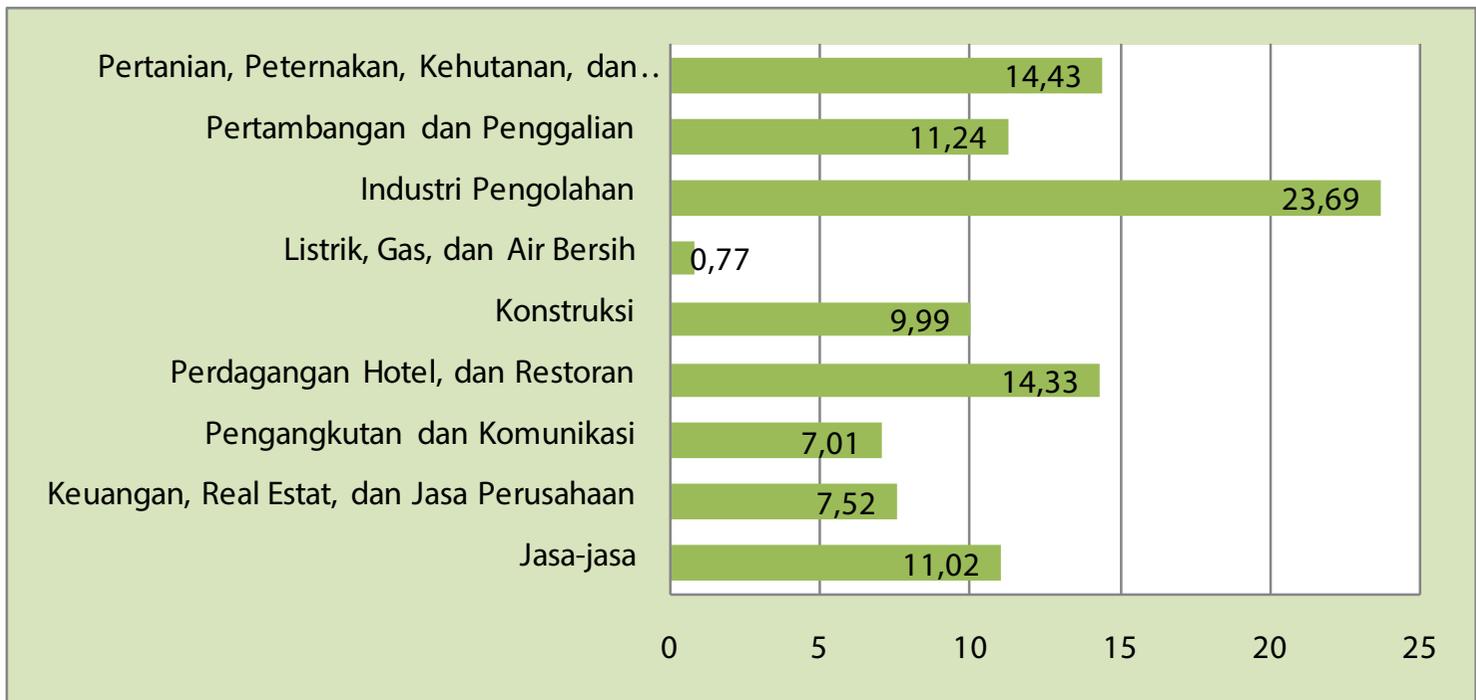
14.2. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto

Produk Domestik Bruto (PDB) sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan pada periode 2010-2013, rata-rata berkontribusi sebesar 14,69% per tahun terhadap pembentukan PDB total. Kontribusi sektor pertanian tersebut relatif tetap untuk setiap tahun, yang ditunjukkan oleh kontribusi tahun 2013 yang juga sebesar 14,43%. Besaran kontribusi ini adalah yang kedua terbesar setelah sektor Industri Pengolahan (23,69%). Berikutnya berturut-turut setelah sektor-sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan adalah sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 14,43%, sektor Pertambangan dan Penggalan sebesar 11,24%, sektor Jasa-Jasa (11,02%), sektor Bangunan (9,99%), sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan (7,52%), sektor Pengangkutan dan Telekomunikasi (7,01%) dan sektor Listrik, Gas dan Air Bersih (0,77%).



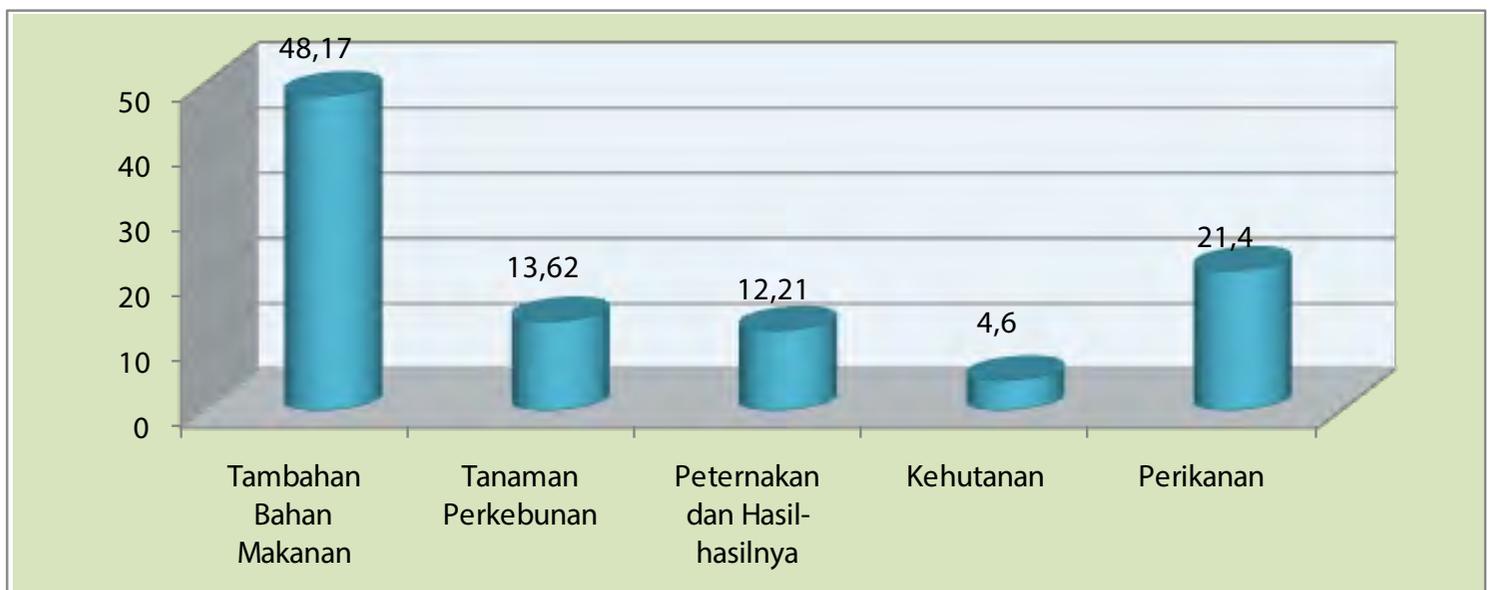
Gambar 181. Rataan Distribusi Produk Domestik Bruto Per Sektor 2010-2013 (%)

Di dalam sektor Pertanian pada periode 2010-2013, sub sektor tanaman pangan adalah kontributor terbesar terhadap pembentukan PDB sektor Pertanian dengan rata-rata kontribusi sebesar 48%. Berturut-turut diikuti oleh kontribusi sub sektor Perikanan (21%), sub sektor Perkebunan sebesar 13 persen, sub sektor Peternakan (12%) dan sub sektor Kehutanan (4%). Distribusi PDB Pertanian menurut sub sektor pertanian tahun 2013 menunjukkan pola yang hampir sama dengan pola selama tahun 2010-2013. Dengan demikian, kontribusi produksi padi yang relatif besar terhadap pembentukan PDB sub sektor Tanaman Pangan menjadi fokus penting dalam pembangunan pertanian melalui peningkatan produksi dan nilai tambah produk.

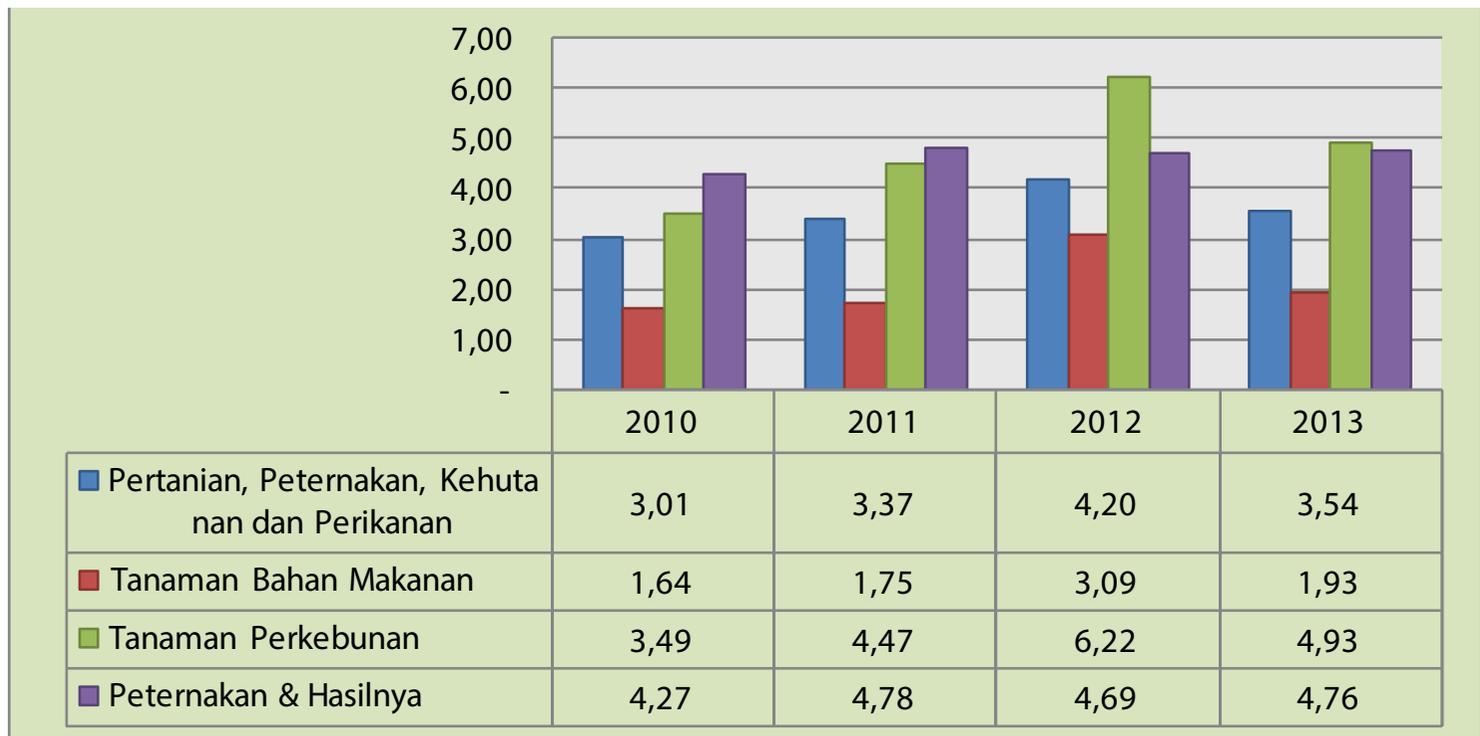


Gambar 182. Distribusi Produk Domestik Bruto Per Sektor 2013 (%)

Pertumbuhan PDB sektor pertanian mengalami akselerasi pasca krisis global tahun 2008. Pada periode tahun 2010-2013, pertumbuhan PDB sektor pertanian (tanaman pangan, perkebunan dan peternakan) mengalami rata-rata peningkatan 3,5 persen/tahun. Dalam sektor pertanian sempit, sub sektor tanaman mengalami pertumbuhan yang lebih kecil (2,1%) dibandingkan dengan sub sektor perkebunan (4,78%) dan peternakan (4,6%). Sub sektor tanaman pangan mengalami pertumbuhan sekitar 3 persen pada tahun 2012, namun menurun lagi pada tahun 2013. Secara umum, semua sub sektor mengalami penurunan pada tahun 2013. Hal ini diduga disebabkan adanya anomali iklim.



Gambar 183. Rataan Distribusi Produk Domestik Bruto Sektor Pertanian 2013 (%)



Gambar 184. Pertumbuhan PDB Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan Tahun 2010-2013 (%)



Gambar 185. Menteri Pertanian Memantau Harga Komoditas Pertanian di Pasar Tradisional

14.3. Kebijakan Pengendalian Inflasi

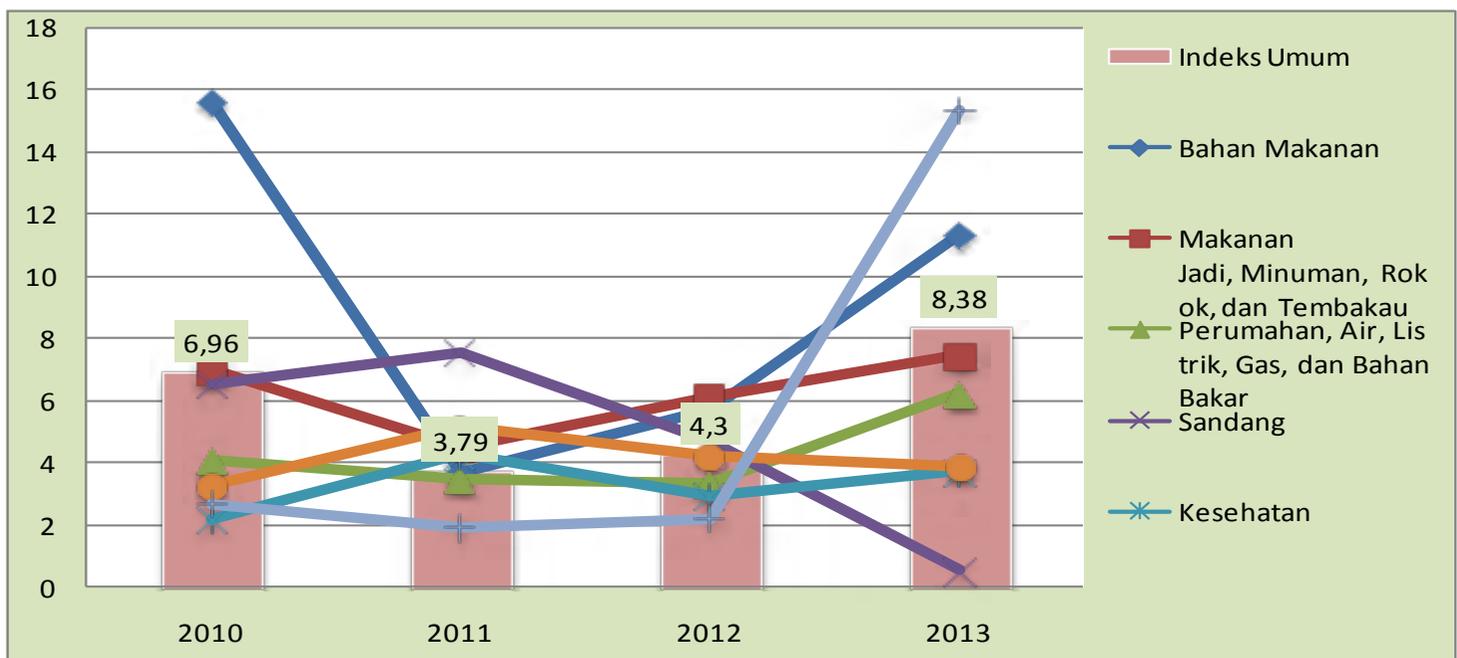
Angka inflasi merupakan salah satu indikator penting yang dapat memberikan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Perkembangan

harga barang dan jasa ini berdampak langsung terhadap tingkat daya beli dan biaya hidup masyarakat, perubahan nilai asset dan kewajiban serta nilai kontrak/transaksi bisnis. Inflasi yang merupakan indikator pergerakan antara permintaan dan penawaran di pasar riil juga terkait erat dengan perubahan tingkat suku bunga, produktivitas ekonomi, nilai tukar rupiah dan valuta asing, indeksasi anggaran dan parameter ekonomi makro lain. Oleh karena itu masyarakat pertanian dan pemerintah sangat berkepentingan terhadap perkembangan dan kontribusi harga produk pertanian terhadap inflasi.

Inflasi dapat digolongkan menurut sifatnya yaitu : (a) Inflasi Merayap: kenaikan harga terjadi secara lambat, dengan persentase yang kecil dan dalam jangka waktu yang relatif lama (di bawah 10% per tahun); (b) Inflasi Menengah: Kenaikan harga yang cukup besar dan kadang-kadang berjalan dalam waktu yang relatif pendek serta mempunyai sifat akselerasi; (c) Inflasi Tinggi: Kenaikan harga yang besar bisa sampai 5 atau 6 kali. Berdasarkan tingkat parah inflasi dibagi menjadi (a). Inflasi ringan (dibawah 10% setahun); (b). Inflasi sedang (antara 10%-30% setahun); (c). Inflasi berat (antara 30%-100% setahun); dan (d). Hiperinflasi (diatas 100% setahun).

14.3.1. Perkembangan Inflasi Umum

Perkembangan inflasi selama kurun waktu 2010-2013 berfluktuasi namun cenderung menurun, meskipun indeks inflasi umum tahun 2013 kembali meningkat dibandingkan tahun 2012. Kenaikan indeks inflasi umum 2013 terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh kenaikan indeks kelompok pengeluaran, yang terdiri dari kelompok bahan makanan; kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau, kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar; kelompok sandang; kelompok kesehatan; kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga; dan kelompok transport, komunikasi, dan jasa keuangan.



Gambar 186. Perkembangan Indeks Inflasi Umum Tahun 2010-2013

14.3.2. Perkembangan Inflasi Berdasarkan Kelompok Pengeluaran

Perkembangan inflasi dilihat dari kelompok pengeluaran selama periode 2010-2012 menunjukkan penurunan secara nyata meskipun tahun 2013 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan indeks inflasi secara nyata juga terjadi pada kelompok bahan makanan, dimana dalam kelompok tersebut sebagian besar terdiri dari komoditas pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa komoditas pertanian selama periode tersebut secara umum berada pada kondisi pergerakan harga yang cukup stabil.

Masih besarnya pangsa pengeluaran pangan sebagian besar masyarakat berarti bobot inflasi kelompok pangan terhadap inflasi semakin besar. Apalagi karakter produk pangan dengan nilai elastisitas permintaan dan penawaran yang rendah menyebabkan besarnya fluktuasi harga pangan. Sebagai komoditas yang banyak dikonsumsi masyarakat, pergerakan harga produk pangan yang akan mempengaruhi inflasi nasional harus diamati secara terus menerus yang memerlukan integrasi langkah-langkah di sektor moneter dengan target peningkatan produksi pangan, manajemen stok, dan perbaikan distribusi komoditas pangan di lapangan.

Perkembangan sampai dengan 2012 menunjukkan indeks inflasi umum relatif stabil pada tiga tahun terakhir dan bahkan indeks inflasi tahun 2012 cenderung lebih rendah dibandingkan tahun 2010. Khusus untuk komoditas pangan pada tahun 2010, kontribusi kenaikan harga bawang merah dan cabe merah cukup signifikan dibandingkan dengan harga komoditas lain. Instabilitas harga pangan pada 2010 juga mempengaruhi laju inflasi tahunan karena musim basah yang terlalu panjang dan memengaruhi pola distribusi bahan pangan. Laju inflasi yang tinggi hampir selalu identik dengan daya beli masyarakat yang rendah dan permintaan agregat yang kecil sehingga aktivitas ekonomi juga melemah. Tahun berikutnya indeks inflasi secara umum menurun didukung oleh menurunnya kontribusi kenaikan harga beras terhadap inflasi nasional. Namun tahun 2013 indeks inflasi kembali meningkat yang dipicu oleh peningkatan inflasi kelompok bahan makanan, salah satunya adalah kenaikan inflasi secara nyata komoditas bawang merah.

Tabel 53. Perkembangan Kontribusi Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2010-2013

Kelompok Pengeluaran	2010	2011	2012	2013
Bahan Makanan	15.64	3.64	5.68	11.35
Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau	6.96	4.51	6.11	7.45
Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar	4.08	3.47	3.35	6.22
Sandang	6.51	7.57	4.67	0.52
Kesehatan	2.19	4.26	2.91	3.7
Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga	3.29	5.16	4.21	3.91
Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	2.69	1.92	2.2	15.36
Indeks Umum	6.96	3.79	4.3	8.38

14.3.3. Kontribusi Produk Pertanian Terhadap Inflasi Nasional

Komoditas penyumbang inflasi menurut 20 urutan terbesar disajikan pada Tabel 2 yang menunjukkan bahwa selama tahun 2010-2012 beras merupakan komoditas penyumbang inflasi terbesar. Namun dilihat perkembangannya sumbangan beras terhadap inflasi semakin menurun meskipun masih tetap berada pada urutan pertama. Penurunan kontribusi inflasi beras terhadap inflasi nasional sangat nyata yaitu dari 1.29 pada tahun 2010 menjadi hanya 0.30 pada tahun 2012 dan bahkan tahun 2013 urutan sumbangan inflasi komoditas beras terhadap inflasi umum turun menjadi berada pada urutan ke-7 dengan sumbangan inflasi hanya sebesar 0.20. Hal ini menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam mempertahankan stabilitas harga beras sehingga tidak mengakibatkan gejolak perubahan harga beras yang sangat berpengaruh terhadap inflasi umum. Pada tahun 2010 komoditas cabai merah, bawang merah, bawang putih dan cabai rawit mempunyai kontribusi besar terhadap inflasi umum namun tahun 2011 dan 2012 inflasi komoditas-komoditas tersebut dikendalikan. Tahun 2013 komoditas bawang merah dan cabe merah kembali berkontribusi cukup besar pada inflasi dimana bawang merah berada pada urutan ke tiga sementara cabe merah pada urutan ke lima dengan sumbangan inflasi masing-masing sebesar 0.38 dan 0.31 sementara beras berada pada urutan ke 7 dengan sumbangan inflasi hanya sebesar 0.20. Dengan sumbangan inflasi yang cukup tinggi dari komoditas bawang merah, cabe merah dan bawang putih pada tahun 2013 tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mengendalikan inflasi komoditas tersebut melalui kebijakan pengaturan impor yaitu Kebijakan RIPH (Rekomendasi Impor Produk Hortikultura). Dengan Kebijakan RIPH tersebut maka impor produk hortikultura diatur pelaksanaannya dengan memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan dan pasokan produk hortikultura yang belum tercukupi dari pasokan di dalam negeri harga saat panen raya dan di luar musim panen.



Gambar 187. Rapat Koordinasi Stabilisasi Harga Pangan

Tabel 54. Posisi Komoditas Pertanian pada 20 Komoditas Dominan
Penyumbang Inflasi Nasional, Tahun 2010-2013

No	2010		2011		2012		2013	
	Komoditas	Inflasi (%)	Komoditas	Inflasi (%)	Komoditas	Inflasi (%)	Komoditas	Inflasi (%)
1	Beras	1.29	Beras	0.54	Beras	0.30	Bensin	1.17
2	Tarif Listrik	0.36	Emas Perhiasan	0.34	Ikan Segar	0.22	Tarif Angkutan Dalam Kota	0.75
3	Cabai Merah	0.32	Rokok Kretek Filter	0.22	Emas Perhiasan	0.20	Bawang Merah	0.38
4	Emas Perhiasan	0.27	Tarif Sewa Rumah	0.21	Rokok Kretek Filter	0.19	Tarif Listrik	0.38
5	Bawang Merah	0.25	Tarif Angkutan Udara	0.19	Tarif Angkutan Udara	0.19	Cabai Merah	0.31
6	Nasi dengan lauk	0.24	Ikan Segar	0.18	Daging Sapi	0.17	Ikan Segar	0.30
7	Cabai Rawit	0.22	Uang Sekolah SLTA	0.10	Gula Pasir	0.15	Beras	0.20
8	Jasa Perpanjangan Stnk	0.22	Tarif Kontrak Rumah	0.09	Tarif Sewa Rumah	0.15	Nasi dengan Lauk	0.20
9	Rokok Kretek Filter	0.16	Nasi dengan Lauk	0.08	Bawang Putih	0.14	Tarif Sewa Rumah	0.20
10	Daging Ayam Ras	0.15	Telur Ayam Ras	0.07	Tarif Kontrak Rumah	0.13	Rokok Kretek Filter	0.19
11	Bawang Putih	0.15	Rokok Kretek	0.07	Nasi dengan lauk	0.12	Tarif Angkutan Udara	0.18
12	Ikan Segar	0.14	Upah Tukang Bukan Mandor	0.07	Bawang Merah	0.10	Upah Tukang Bukan Mandor	0.16
13	Minyak Goreng	0.13	Upah Pembantu Rumah Tangga	0.07	Rokok Kretek	0.09	Bahan Bakar Rumah Tangga	0.16
14	Tarif Sewa Rumah	0.13	Uang Kuliah Akademi/PT	0.07	Upah Tukang bukan Mandor	0.09	Mie	0.12
15	Tarif Angkutan Udara	0.13	Daging Ayam Ras	0.06	Upah Pembantu Rumah tangga	0.09	Daging Ayam Ras	0.11
16	Tarif Kontrak Rumah	0.12	Daging Sapi	0.06	Tempe	0.08	Daging Sapi	0.11
17	Mie	0.11	Ikan Diawetkan	0.06	Uang Kuliah akademi/PT	0.08	Jeruk	0.11
18	Telur Ayam Ras	0.08	Minyak Goreng	0.06	Tahu Mentah	0.07	Upah Pembantu RT	0.10
19	Rokok Kretek	0.08	Bahan Bakar Rumah Tangga	0.05	Mie	0.07	Tarif Angkutan Antar Kota	0.10
20	Upah Tukang Bukan Mandor	0.08	Bensin	0.05	Jeruk	0.06	Ikan Diawetkan	0.09

BAGIAN IV. MANAJEMEN PEMBANGUNAN PERTANIAN

BAB XV. DUKUNGAN MANAJEMEN

15.1. Strategi Induk Pembangunan Pertanian (SIPP) 2015-2045

Strategi Induk Pembangunan Pertanian (SIPP) 2015-2045 disusun sebagai bagian dari pelaksanaan amanat konstitusi untuk mewujudkan Indonesia yang Bermartabat, Mandiri, Maju, Adil dan Makmur paling lambat pada tahun 2045 yakni, setelah 100 tahun Indonesia merdeka. Perayaan 100 tahun Indonesia merdeka dipandang sebagai momentum penting dalam membangkitkan semangat dan memobilisasi sumberdaya nasional guna mewujudkan cita-cita luhur seperti yang diamanatkan oleh konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). SIPP merupakan kesinambungan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025.

Dokumen SIPP disusun selama tahun 2011-2013 oleh para ahli dari berbagai bidang ilmu, dengan memuat paradigma baru pembangunan pertanian ke depan. Paradigma baru yang pertama adalah Pertanian untuk Pembangunan (*Agriculture for Development*); bahwa rencana pembangunan perekonomian nasional disusun dan dilaksanakan berdasarkan tahapan pembangunan pertanian secara rasional. Sektor pertanian dijadikan sebagai motor penggerak transformasi pembangunan yang berimbang dan menyeluruh. Paradigma baru yang kedua adalah Sistem Pertanian-Bioindustri Berkelanjutan sebagai transformasi dari orientasi pembangunan berbasis bahan baku fosil menjadi berbasis sumberdaya terbarukan (sumberdaya hayati). Paradigma ini menuntut peran pertanian tidak hanya penghasil utama bahan pangan, tetapi menjadi penghasil biomassa bahan baku biorefinery untuk menghasilkan bahan pangan, pakan, pupuk, serat, energi, produk farmasi, kimiawi dan bioproduk lainnya.

Buku ini telah mendapat masukan dari berbagai pihak, diantaranya KADIN Indonesia, Perhepi, dan Forum Komunikasi Perguruan Tinggi Pertanian Indonesia (FKPTPI). Selain itu, Forum Dewan Fakultas Pertanian se-Indonesia telah sepakat akan menjadikan dokumen SIPP ini sebagai mata kuliah wajib bagi mahasiswa. Mulai Tahun 2015, Kementerian Pertanian berkomitmen mengalokasikan anggaran sebesar 30% dari total APBN untuk implementasi SIPP di lapangan guna menstimulir investasi yang lebih besar dalam pengembangan bioindustri dan ketahanan pangan dengan pendekatan kawasan.



Gambar 193. Kerangka Dasar SIPP

Diharapkan SIPP dijadikan arahan dan acuan bagi seluruh komponen bangsa, mulai dari pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha lain dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional sesuai dengan konsensus visi, misi, dan arah pembangunan, khususnya pembangunan pertanian, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi dalam satu pola sikap dan pola tindak. Dokumen SIPP ini dimanfaatkan untuk:

1. Menyediakan bahan acuan dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan pertanian dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan turunannya, baik di Pusat maupun Daerah;
2. Menghasilkan instrumen untuk melakukan koordinasi, integrasi, sinergitas dan sinkronisasi rencana pembangunan oleh Pemerintah, rencana pengembangan swadaya masyarakat serta rencana usaha oleh pelaku bisnis;
3. Membangkitkan energi politik untuk mewujudkan suatu konsensus nasional rencana

- pembangunan pertanian jangka panjang;
4. Mendorong diskursus nasional perihal arah dan peta jalan pembangunan pertanian jangka panjang yang paling sesuai bagi Indonesia;
 5. Menyediakan acuan bahan bagi teknokrat, ilmuwan, pendidik dan masyarakat terkait dengan pergeseran paradigma pembangunan pertanian.

Peluncuran buku SIPP 2015-2045 telah dilakukan oleh Menteri Pertanian dihadapan Presiden RI pada saat Pembukaan Penas XIV di Malang tanggal 7 Juni 2014. Secara simbolis Buku SIPP disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur, Bupati Malang, Ketua KTNA, Dirut PT Bulog, Dirut PT Agro Makmur Pertiwi, Rektor Universitas Jember dan Rektor Universitas Trunojoyo. Selain itu telah disampaikan pula kepada seluruh Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, Gubernur, Kepala Bappeda dan Dinas/Badan lingkup Pertanian Provinsi seluruh Indonesia. Untuk memudahkan diakses oleh khalayak umum, Buku SIPP juga dapat diunduh dari situs web Kementerian Pertanian.



Gambar 194. Presiden RI me-launching buku SIPP 2015-2045 di Malang

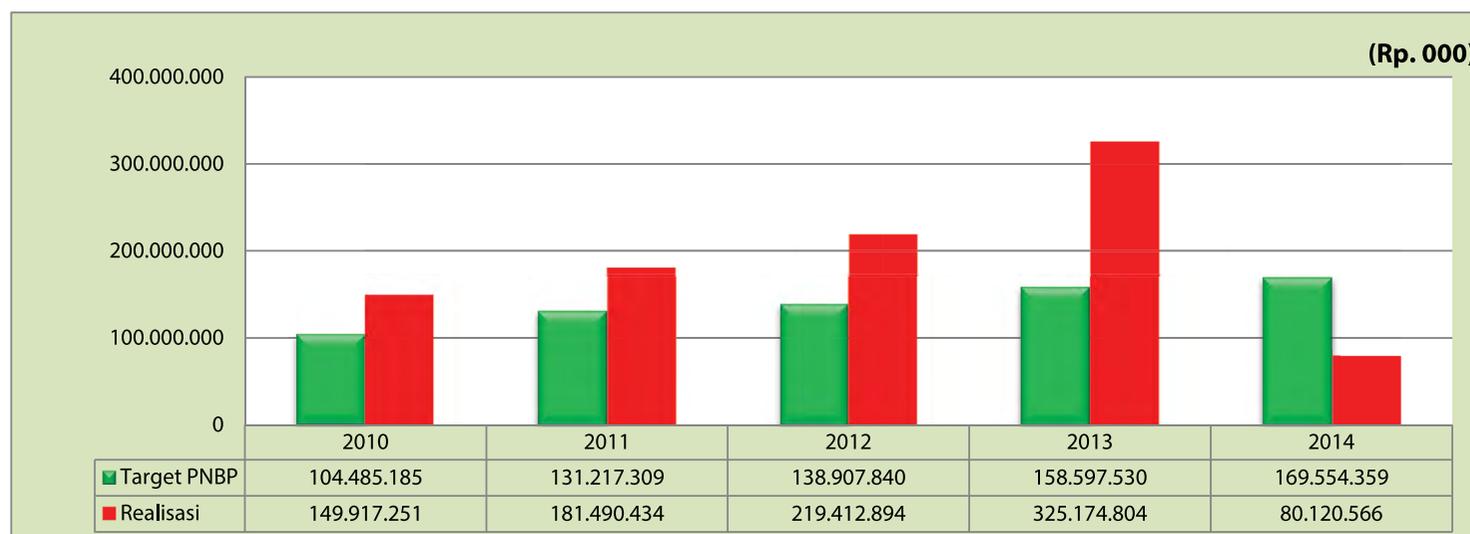
15.2. Perkembangan Anggaran dan Pembiayaan Kredit Kementerian Pertanian Tahun 2010-2012

Alokasi APBN Kementerian Pertanian memperlihatkan peningkatan yang cukup tajam pada tahun 2011, dari sebelumnya Rp. 8,038 triliun pada tahun 2010 menjadi Rp. 16,72 triliun. Anggaran tersebut relatif stabil pada tahun 2012 dan 2013, namun menurun pada tahun 2014.



Gambar 195. Perkembangan APBN Kementerian Pertanian dan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian Tahun 2010-2014

Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian meningkat selama tahun 2010-2014. Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian meningkat dari Rp. 1,54 triliun pada tahun 2010 menjadi Rp. 2,58 triliun pada tahun 2014.

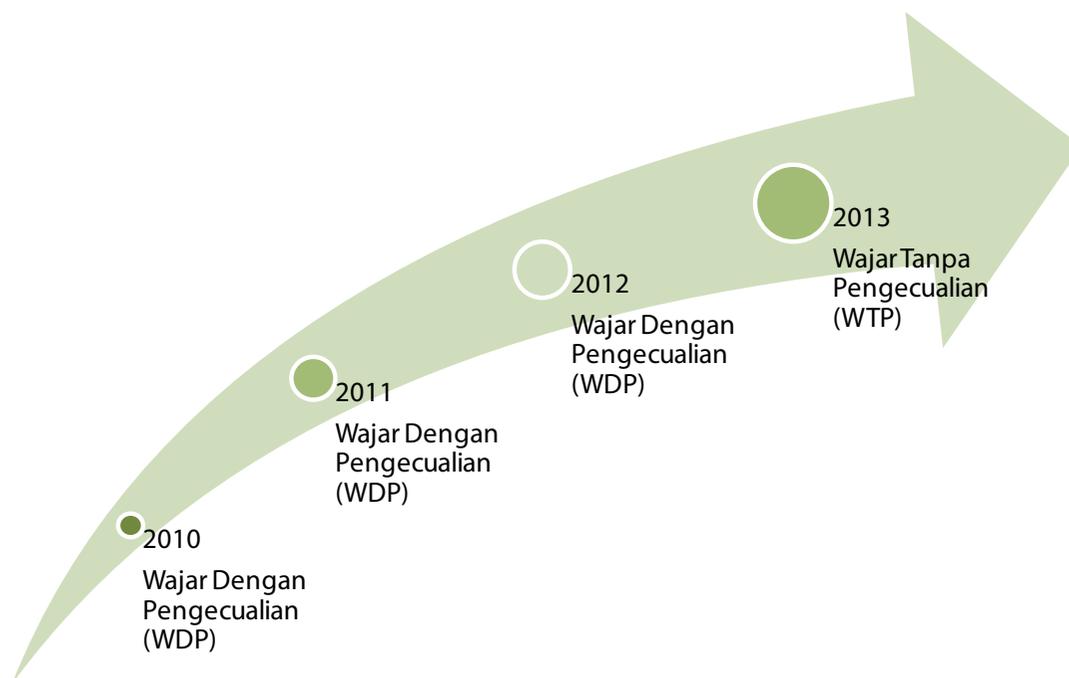


Gambar 196. Target dan Realisasi PNBPNP Tahun 2010-2014

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian Pertanian pada Periode Kabinet Indonesia Bersatu Jiid 2 terus mengalami kenaikan. Untuk Target Tahun 2010 ditetapkan target sebesar Rp. 104.485.185.000 dengan realisasi sebesar Rp149.917.251.000 dengan persentase 143,48%, dan untuk tahun 2013 target ditetapkan sebesar Rp158.597.530.000 dengan realisasi sebesar Rp. 325.174.804.000.

15.3. Akuntabilitas Keuangan

Pada tahun 2010 Laporan Keuangan Kementerian Pertanian memperoleh opini WDP yaitu dengan pengecualian aset tetap senilai Rp. 598,21 miliar, pengelolaan hibah belum tertib, dan lemahnya pengendalian internal. Laporan Keuangan Kementerian tahun 2011 kembali memperoleh opini WDP dengan pengecualian untuk aset tetap yang tidak ditemukan, belum dilakukan input hasil koreksi penilaian, serta inventarisasi atas aset yang dimanfaatkan PT Riset Perkebunan Nusantara (RPN) belum dapat diakui sebagai Barang Milik Negara (BMN).



Gambar 197. Capaian Opini BPK Periode Tahun 2010-2013

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK-RI atas laporan keuangan Kementerian Pertanian periode 2010-2013, diidentifikasi masih banyak dijumpai aset-aset Barang Milik Negara (BMN) yang tidak diketahui keberadaannya, sehingga status aset tersebut sangat mempengaruhi kualitas pelaporan akuntansi keuangan negara. Pihak eselon I lingkup Kementerian Pertanian dan Biro Keuangan dan Perlengkapan diharapkan semakin pro-aktif dalam upaya menyelesaikan temuan dimaksud secara komprehensif dengan pihak BPK-RI, sehingga dapat segera dituntaskan.

Opini BPK-RI terhadap hasil pemeriksaan laporan keuangan Kementerian Pertanian tahun 2013 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini ini perlu dipertahankan oleh segenap aparatur

di lingkungan Kementerian Pertanian agar Kementerian Pertanian menjadi instansi pemerintah yang senantiasa berintegritas dan berwibawa.

15.4. Penyediaan dan Pengolahan Data Serta Sistem Informasi Pertanian

Sesuai dengan Inpres No. 3 Tahun 2003 mengenai E-Government, dalam memberikan pelayanan data dan informasi pertanian, Kementerian Pertanian sudah memberikan pelayanan informasi dengan sistem *on-line*, dimana hampir sebagian besar informasi pertanian saat ini telah dapat diakses melalui website kementerian pertanian (www.pertanian.go.id). Publikasi yang secara rutin diterbitkan oleh Kementerian Pertanian telah di-upload pada website Kementerian Pertanian (<http://www.pertanian.go.id>) maupun website Pusdatin (<http://pusdatin.setjen.pertanian.go.id>) yang dapat dengan mudah didownload oleh para pengguna/masyarakat. Di samping untuk mengkases informasi pertanian, masyarakat juga dapat menyampaikan informasi melalui website yang sama.

Layanan Sistem Informasi Pertanian meliputi : (1) Penyediaan Layanan Konektisitas Internet Kementerian Pertanian; (2) Penyediaan Layanan Email Kementerian Pertanian ; (3) Penyediaan Layanan Aplikasi/Website Kementerian Pertanian; dan (4) Penyediaan Layanan LPSE Kementerian Pertanian.

Seluruh layanan ini digunakan sebagai media dalam mendistribusikan layanan dasar aplikasi TIK Kementerian Pertanian yang didukung dengan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan TIK yang selalu diperbaiki sesuai kebutuhan dan perkembangan TIK terkini.

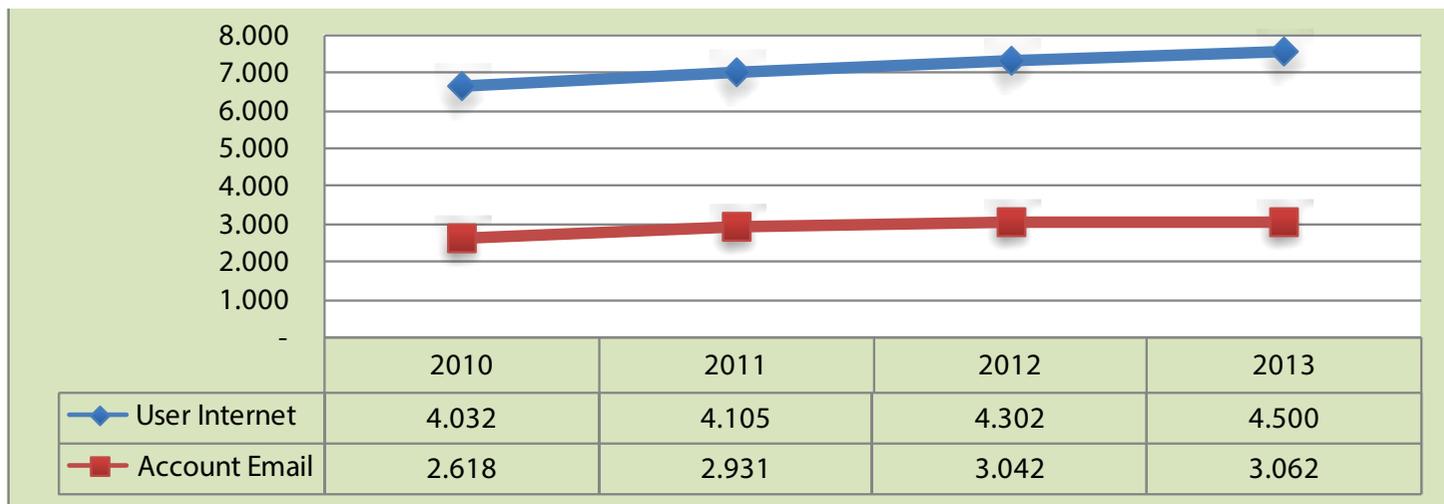
(1) Layanan Koneksi Internet Kementerian Pertanian 2004-2013

Bandwidth yang dimiliki Kementerian Pertanian saat ini adalah sebesar 100 Mbps untuk melayani kurang lebih 4500 user. Koneksi internet ini dilakukan monitoring secara teratur oleh Pusdatin melalui fasilitas *NOC (Network Operating Center)*.



Gambar 199 . Peningkatan Kapasitas *Bandwidth* Kementerian Pertanian Tahun 2010-2013

Pada tahun 2010 jumlah komputer yang terkoneksi ke internet adalah 4.032 unit. Perkembangan jumlah komputer yang terkoneksi ke internet mengalami peningkatan pesat sampai tahun 2013 user internet di Kementerian Pertanian mencapai 4500 user.



Gambar 200 Peningkatan Jumlah Komputer dan Akun *Email* Kementerian Pertanian Tahun 2010-2013

Pada tahun 2010 email Kementerian Pertanian yang saat ini memiliki alamat domain @pertanian.go.id telah digunakan oleh 2.618 user dengan jumlah komputer yang terkoneksi ke internet saat itu adalah 4.032 unit. Perkembangan jumlah komputer yang terkoneksi ke internet mengalami peningkatan pesat pada tahun 2014 sebanyak 3.062 unit dengan user e-mail bertambah menjadi 2.618 user. Kapasitas mailbox yang dimiliki oleh tiap user saat ini adalah 2 GB dengan fasilitas *attachment* 10 MB.



Gambar 201. Jumlah *Server* dan *Storage* di Kementerian Pertanian Tahun 2010-2013

Data Center Kementerian Pertanian pada tahun 2013, telah memiliki 75 server yang diperkuat dengan 52 TB fasilitas penyimpanan data (storage). Jumlah ini berkembang terus dari tahun 2010,

dimana saat itu Kementerian Pertanian hanya memiliki 47 TB dengan 40 server.

(2) Penyediaan Pelayanan Aplikasi/Website Kementerian Pertanian

Dalam rangka mendukung good government, Kementerian Pertanian telah mengembangkan 3 kategori aplikasi yaitu :

- Aplikasi Sistem Informasi Manajemen meliputi: SIMPEG, SIMONEV, SIMONAS, E-Office disamping itu aplikasi yang digunakan oleh mitra kerja meliputi TNDE/SIKD, Aplikasi IPNBK, Perizinan online, Aplikasi P2BN, Sistem Peringatan dini (SPD) online, Aplikasi TGR, E-Proposal, Simluh, Sim Kehadiran
- Aplikasi Sistem Informasi Pertanian meliputi: Sistem Informasi Geografi, Geodatabase Pertanian dan Metadata Spasial, Sistem Percepatan Data Tanaman Pangan, Basisdata Ekspor Impor, Basisdata Harga, Basisdata PDB, Basis data Konsumsi, Basisdata NTP, Basis data Tenaga Kerja, Basisdata Hulu, Basis data Lahan. Basisdata Statistik Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Peternakan); e-form Hortikultura, e-Form Peternakan.
- Aplikasi website meliputi: Website Kementerian; Sekretariat Jenderal; Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, Portal Multimedia ; SMS Center, Forum Konsultasi dan Tanggap Respon, Aplikasi Berbagi Dokumen dan Pengetahuan (ABDP), Papan Display Elektronik (PDE) dan Basisdata Peraturan Perundang-Undangan (<http://perundangan>); Aplikasi Berbagi Dokumen dan Pengetahuan.

(3) Penyediaan Pelayanan LPSE Kementerian Pertanian

e-Procurement pada dasarnya adalah sebuah aplikasi komputer berbasis web dan dapat diakses oleh user yang telah diberikan otoritas oleh pengelola aplikasi. Setelah Peraturan Presiden Nomor 54 mulai dipergunakan, Kementerian Pertanian mulai bekerjasama dengan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) menggunakan aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik atau lebih dikenal dengan nama SPSE. Aplikasi ini sudah mulai digunakan di Kementerian Pertanian sejak diresmikan pada tanggal 21 April 2011. Berdasarkan PP Nomor 35 tahun 2011 jis PP Nomor 70 tahun 2012 maka telah dibentuk Tim LPSE yang ditetapkan hingga saat ini dengan Keputusan Menteri Pertanian No. 86/Kpts/OT.160/1/2013 tentang Pembentukan Tim LPSE.

Pada tahun 2013, Kementerian Pertanian mendapat penghargaan dari LKPP berupa e-procurement award 2013 " Kategori Penguatan Peran Serta Komunitas Pengadaan" dan e-procurement award 2013 " Kategori Partisipasi Penerapan E Catalogue". Selain itu, pada tahun 2013 Kementerian Pertanian juga mendapat penghargaan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika berupa "Desktop Asement Peningkatan Keamanan Informasi 2012" dan "Indeks KAMI Indeks Keamanan Informasi".

(4) Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan

Pengembangan Sumber Daya Manusia berupa layanan Pembinaan dan Bimbingan Teknis

Statistik dan Sistem Informasi Pertanian telah terselenggaranya berbagai program bimbingan teknis Statistik dan Sistem Informasi dan Komunikasi baik di pusat maupun di daerah di mana kegiatan ini bertujuan untuk memudahkan aksesibilitas data dari daerah ke pusat dan sebaliknya dari tahun 2010 s/d 2013 telah diikuti 32.637 orang petugas dan pengelola data baik di Pusat maupun di daerah seperti tersebut pada tabel berikut.

Tabel 56. Bimbingan Teknis dan Sistem Informasi Pertanian untuk Pengelola Data di Pusat dan di Daerah

No	Tahun Pelaksanaan	Jumlah Peserta	Keterangan
1	2010	3.181	Pengelola data Statistik dan Sistem Informasi Pertanian di Pusat dan di daerah yang mengikuti bimbingan teknis Refreshing/Advokasi/sosialisasi/Implementasi Statistik dan Sistem Informasi Pertanian
2	2011	2.083	
3	2012	3.032	
4	2013	3.481	
Jumlah		32.637	

15.5. Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik

Setelah disahkan dan diimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, tuntutan akan keterbukaan dalam memperoleh informasi di Indonesia semakin mendesak. Kementan sebagai Badan Publik juga diwajibkan menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, secara akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Keterbukaan Informasi Publik berkeinginan menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (*good governance*) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik dalam rangka *Open Government* Indonesia.

Menindaklanjuti hal tersebut, Kementan segera meresponnya dengan menyesuaikan struktur organisasi Kementerian Pertanian dengan membentuk Biro Hukum dan Informasi Publik melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, yang salah satu tugasnya adalah melaksanakan penyiapan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi Publik bidang pertanian.

Berbagai produk hukum terkait informasi publik di lingkungan Kementerian Pertanian telah diterbitkan, seperti, a) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian; b) Peraturan Menteri Pertanian Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/6/2012 tentang

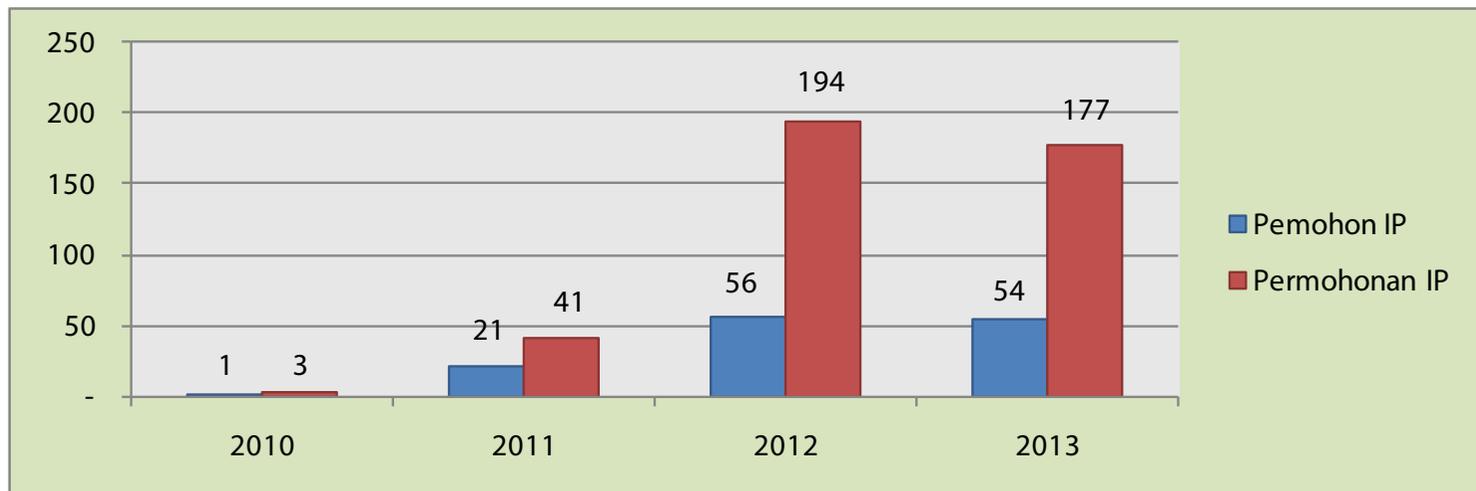
Pedoman Uji Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian; c) Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2678.1/Kpts/OT.160/5/2011 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Pelaksana Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian; d) Keputusan Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kementerian Pertanian Nomor 116/Kpts/RC.200/A.3/II/2012 tentang Panduan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan untuk Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik pada Kementerian Pertanian; e) Keputusan Menteri Pertanian Nomor 105/Kpts/HK.060/1/2013 tentang Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Pertanian; dan f) tiga Keputusan Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik selaku PPID Utama terkait Daftar Informasi Publik yang dikuasai Kementerian Pertanian.

Untuk implementasinya, Biro Hukum dan Informasi Publik selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama telah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dengan mengembangkan Sistem Informasi Layanan Permohonan Informasi Publik (SILAYAN) *Online*, yaitu aplikasi pelayanan informasi publik berbasis *web*. SILAYAN *Online* merupakan transformasi mekanisme layanan permohonan informasi dan pengajuan keberatan seperti tertuang dalam UU KIP, kedalam bentuk online dengan menghilangkan sekat ruang, namun tetap dalam peraturan yang berlaku, serta mengakomodasi Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1/2010 terkait pelaporan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian/ Lembaga.



SILAYAN *Online* terintegrasi dengan tiga aplikasi informasi public lainnya, yaitu, SIBERAT (Sistem Informasi Pengajuan Keberatan Permohonan Informasi Publik), SIREKAP (Sistem Informasi Rekapitulasi Informasi Publik), dan SIDADO (Sistem Informasi Database Dokumen Informasi Publik). Aplikasi tersebut dapat diakses melalui Portal PPID <http://ppid.pertanian.go.id>. Aplikasi SILAYAN *Online* dilengkapi dengan *system* peringatan dini yang dapat memberitahukan PPID, antara lain lama permohonan Informasi Publik yang telah diajukan maupun jenis Informasi Publik yang dapat dipenuhi atau ditolak; sehingga potensi sengketa Informasi Publik dapat dicegah. Sementara itu, pemohon selain melakukan permohonan Informasi Publik secara *online*, juga dapat memantau proses permohonannya, dan terjamin hak-haknya.

SILAYAN *Online* berhasil masuk kedalam TOP 99 Inovasi dari 515 proposal pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik tahun 2014 yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai ajang tertinggi dari Pemerintah atas pengakuan praktik inovasi dari jenis atau beberapa jenis pelayanan yang dilakukan di setiap Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah.



Gambar 202. Jumlah Pemohon dan Permohonan Informasi Publik pada PPID Utama Kementerian Pertanian 2010-2013

Selain penggunaan TIK, Biro Hukum dan Informasi Publik juga mengelola desk Pelayanan Informasi Publik dan Agribisnis yang terletak di Lantai 1 Gedung Pusat Informasi Agribisnis. Pada Tahun 2010 terdapat satu pemohon informasi yang memohon informasi public melalui Sekretariat Jenderal. Seiring dengan dibentuknya PPID permohonan diajukan melalui desk Pelayanan Informasi Publik dan Agribisnis. Pada Tahun 2011, terdapat 21 pemohon informasi, tahun 2012, jumlah pemohon informasi makin meningkat, yaitu, sebanyak 56 pemohon informasi. Sementara tahun 2013 menurun menjadi 54 orang. Dari sisi permohonan informasi publik, pada tahun 2013 terdapat 177 informasi publik yang dimohon. Jumlah tersebut agak menurun jika dibandingkan dengan tahun 2012 yang mencapai 194 informasi publik. Sementara pada tahun 2010 terdapat 3 informasi publik yang dimohon dan tahun 2011, terdapat 41 informasi publik. Fluktuasi jumlah pemohon maupun jumlah informasi publik yang dimohon dari tahun 2010 sampai dengan 2013 tersaji pada Grafik 1.

Terdapat lima jenis informasi publik yang terbanyak dimohon pada tahun 2012 dan 2013, yaitu Agribisnis, Pengelolaan Informasi Publik, Kinerja Badan Publik, Dokumen Kementerian Pertanian, dan Profil Badan Publik. Cakupan dari jenis informasi tersebut adalah sebagai berikut:

- Agribisnis, meliputi informasi budidaya, bibit unggul, produksi pertanian, tingkat konsumsi produk olahan pertanian, produsen/industri komoditas atau produk olahan pertanian, ekspor impor pertanian, penyakit tumbuhan beserta penanggulangannya, *statistic* perkebunan, agroindustri, mesin pertanian, peta daerah sentra produksi, harga (produsen komoditas pertanian dan pupuk), teknologi pertanian, Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), pupuk

- dan pestisida terdaftar, harga pupuk, serta kursus/pelatihan agribisnis.
- Pengelolaan Informasi Publik, meliputi dokumen mengenai peraturan perundang-undangan di bidang informasi publik.
 - Kinerja Badan Publik, meliputi dokumen mengenai organisasi dan tata kerja Kementerian Pertanian, program kerja, dsb
 - Dokumen Kementerian Pertanian, meliputi dokumen mengenai Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA), Rencana Strategis, serta Pengadaan Barang/Jasa.
 - Profil Badan Publik, meliputi dokumen mengenai Profil Kementerian Pertanian, daftar Pejabat Kementerian Pertanian, data jumlah Pejabat Struktural Eselon IV Setjen Kementan, data pendidikan dan usia Pejabat Struktural Eselon IV Setjen Kementan, informasi kompetensi Pegawai, serta data Analisis Jabatan Pejabat Struktural Eselon IV.

Dari hasil penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2013, pelayanan permohonan informasi publik mendapat nilai 92,9 dengan mutu layanan kategori A sehingga dapat dikatakan kinerja pelayanan informasi public sangat baik.

Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Kementerian Pertanian juga disampaikan melalui berbagai event pameran, baik sebagai peserta pameran yang diselenggarakan oleh pihak lain maupun pameran yang diselenggarakan sendiri oleh Kementerian Pertanian. Beberapa pameran yang diikuti, antara lain, a) Pameran Agrinex, b) Pameran Pekan Informasi Nasional (PIN), c) Pameran Gelar Agribisnis PENAS, d) Pameran Hari Pangan Sedunia (HPS), e) Pameran Gelar Karya Pemberdayaan Masyarakat dan MDGs Expo, f) Pekan Flor i& Flora Nasional (PF2N), dan g) Krida Pertanian Fair.

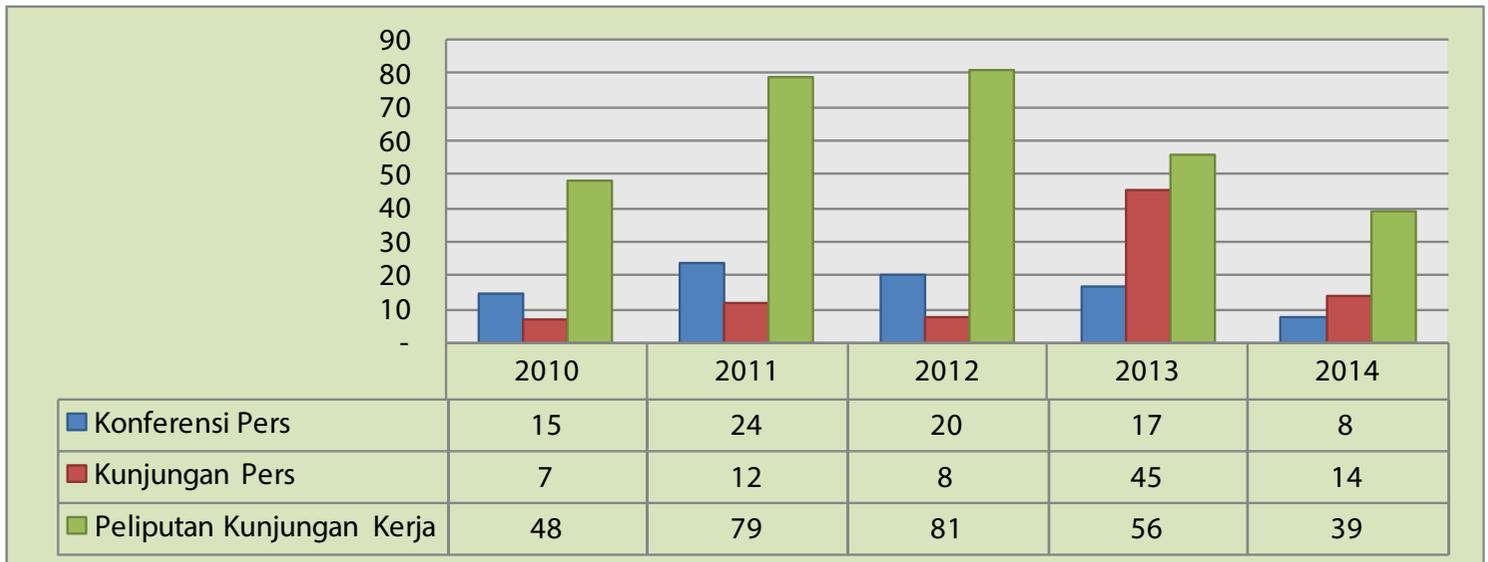
15.6. Kehumasan

Kebijakan dan program pembangunan pertanian yang telah dilaksanakan, sangat penting untuk dikomunikasikan kepada berbagai pihak dan masyarakat sebagai bukti kongkrit peran serta dan dukungan Kementerian Pertanian dalam pembangunan nasional. Pembangunan pertanian melibatkan banyak pemangku kepentingan (stakeholders), sehingga dalam implementasinya diperlukan suatu pemahaman dan langkah-langkah operasional yang harmonis.

Informasi tentang strategi, kebijakan dan program serta kinerja hasil pembangunan pertanian disampaikan kepada masyarakat luas melalui berbagai media baik cetak maupun elektronik. Perkembangan media cetak dan elektronik yang maju pesat akhir-akhir ini, tidak dapat dipungkiri berperan penting dalam mempercepat sampainya informasi kepada masyarakat dan mendorong pemahaman publik yang semakin berkembang.

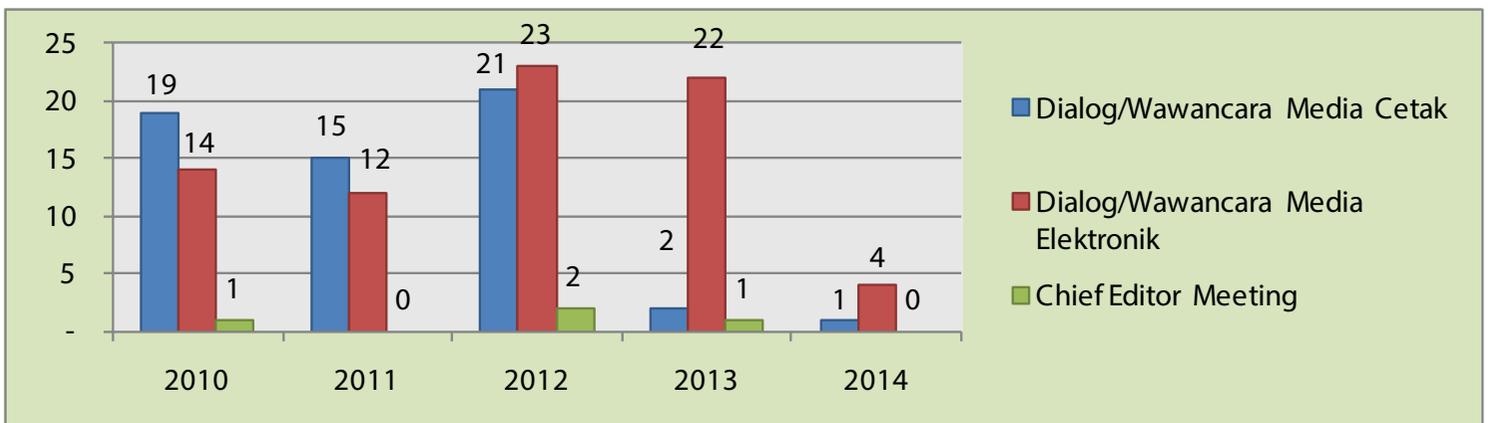
Memperhatikan hal tersebut, menjadi penting kiranya sebuah upaya sosialisasi, dokumentasi, publikasi dan penyebarluasan informasi kontribusi pembangunan pertanian dan kinerja yang

telah dihasilkan serta upaya-upaya yang sudah, sedang, dan akan dilaksanakan Kementerian Pertanian melalui media massa secara tepat, efektif, dan efisien kepada masyarakat luas, serta para pemangku kepentingan sektor pertanian.



Gambar 203. Pelaksanaan Kegiatan Menteri Pertanian 2010-2014

Kegiatan kehumasan Kementerian Pertanian dalam rangka penyebarluasan informasi, sosialisasi kebijakan dan program pembangunan pertanian antara lain meliputi: konferensi pers, kunjungan pers, peliputan kunjungan kerja Menteri Pertanian, dialog/wawancara Menteri Pertanian di media cetak dan elektronik (TV/Radio), pertemuan Menteri Pertanian dengan Pimpinan Redaksi Media Massa (*Chief Editor Meeting*), temu koordinasi kehumasan baik lintas sektoral maupun internal kehumasan Kementerian Pertanian, media visit serta pemasyarakatan program pembangunan pertanian melalui beberapa kegiatan di media cetak dan elektronik.

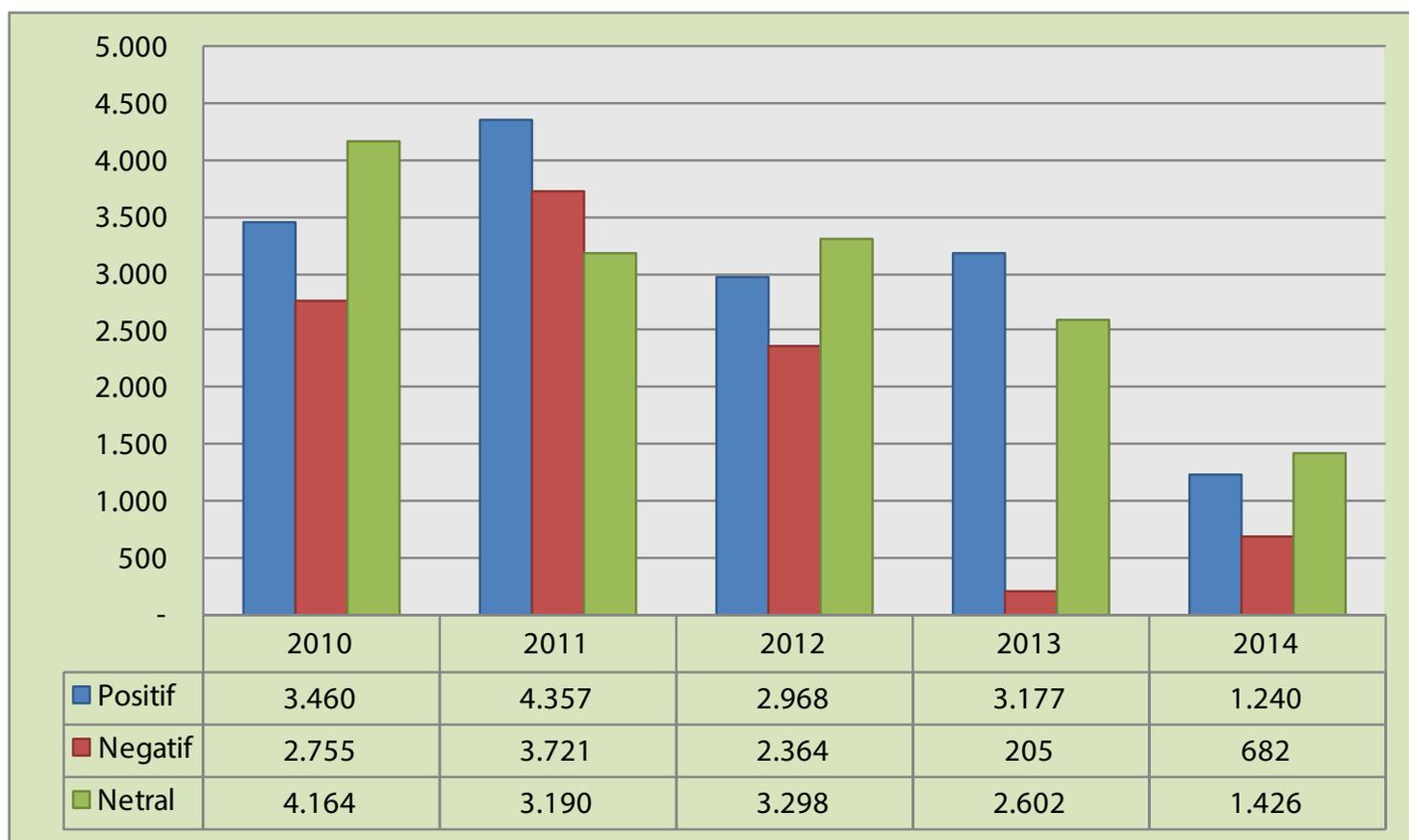


Gambar 204. Pelaksanaan Dialog Oleh Menteri Pertanian Tahun 2010 – 2014

Secara umum terdapat kondisi dinamis dalam kegiatan kehumasan, baik terkait jenis kegiatan maupun frekwensi pelaksanaannya. Dari grafik kegiatan menteri, terlihat bahwa kunjungan kerja Menteri Pertanian ke wilayah potensi pertanian cenderung terus dilakukan pada setiap periode

kepemimpinan, demikian pula untuk kunjungan pers. Sedangkan grafik pelaksanaan dialog menunjukkan kegiatan dialog atau wawancara Menteri Pertanian dengan media cetak, media elektronik dan pimpinan redaksi media massa.

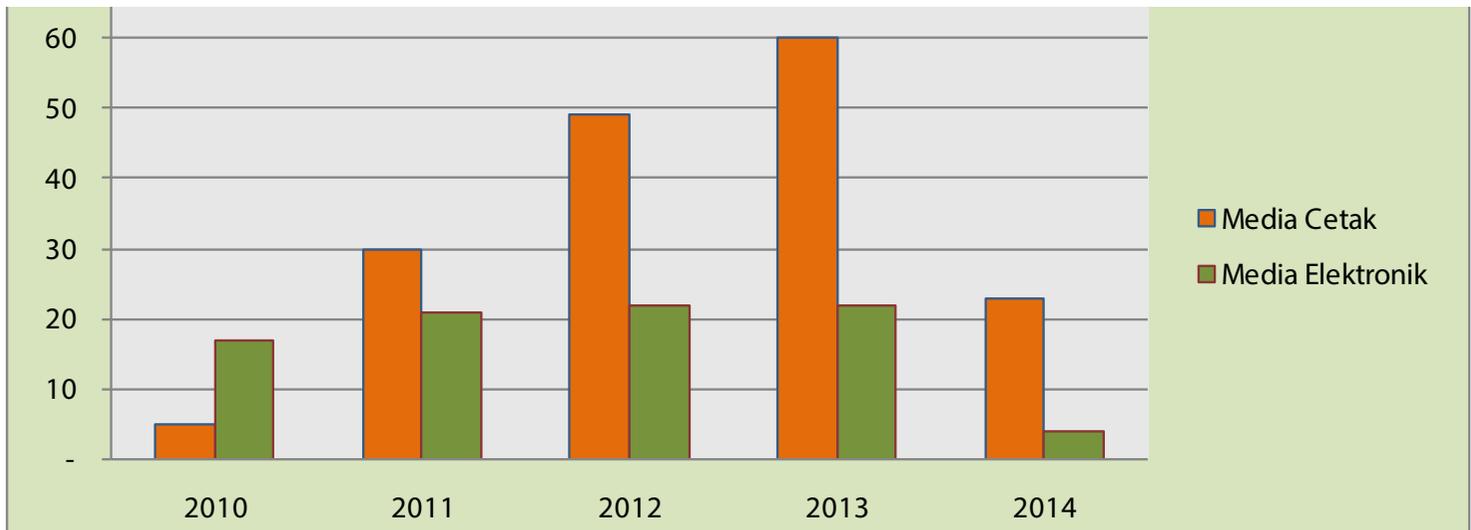
Selanjutnya pada Grafik Berita Pertanian Tahun 2010-2014 menunjukkan jumlah pemberitaan di media cetak dan elektronik yang merupakan tanggapan masyarakat atau public terhadap pembangunan pertanian yang dimuat di media massa dengan sifat kecenderungan berita dengan kategori positif, negative dan netral. Berdasarkan Grafik Berita Pertanian Tahun 2010-2014 tersebut dapat diketahui bahwa secara umum dari tahun 2010-2014 terdapat kecenderungan peningkatan berita positif dan netral. Untuk berita positif terkait pertanian yang semakin meningkat, menunjukkan semakin meningkatnya pemahaman masyarakat/publik yang memberikan pendapat positif terhadap kebijakan dan program pertanian. Namun demikian untuk berita netral yang semakin meningkat, mengindikasikan bahwa berita yang ditulis di berbagai media, tidak langsung menyangkut kinerja Kementerian Pertanian, namun merupakan berita tentang pertanian yang terkait atau menjadi tanggung jawab unit instansi/ lembaga/ kementerian yang lain (*stakeholders*).



Gambar 205. Berita Pertanian Tahun 2010-2014

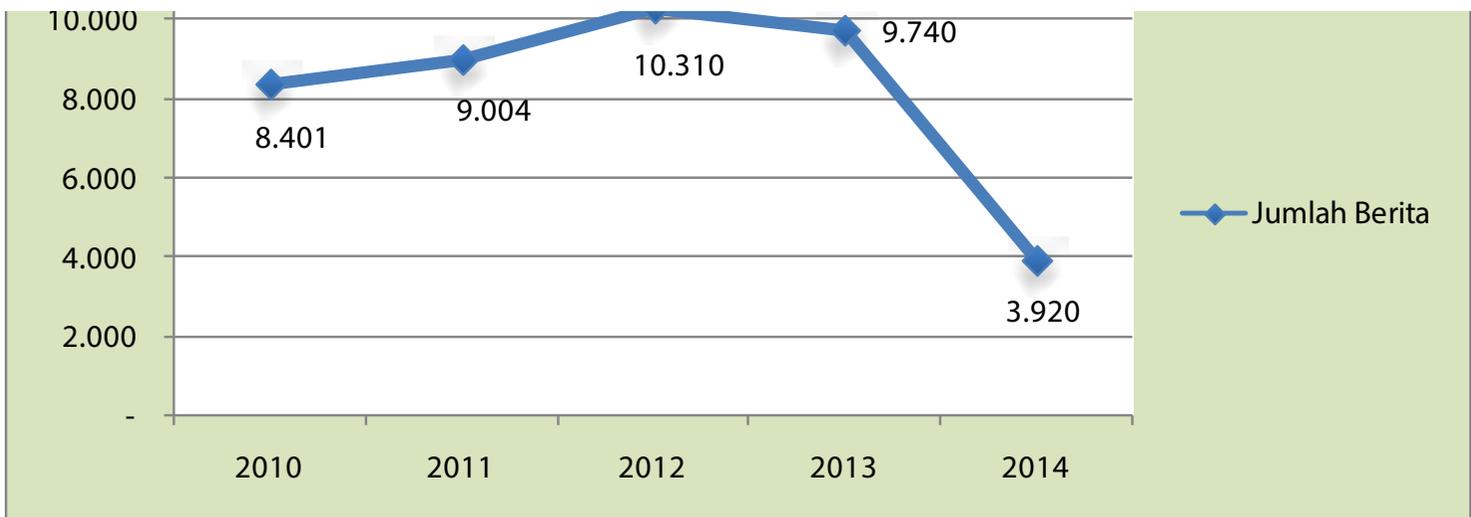
Dalam upaya menyeimbangkan isu berita yang dimuat di media massa, Dalam upaya menyeimbangkan isu berita yang dimuat di media massa , kehumasan Kementerian Pertanian juga melakukan counter berita yang merupakan respon, agar isu tidak berkembang menjadi

krisis. Respon krisis ini merupakan upaya menginformasikan kebijakan, program dan keberhasilan pertanian disesuaikan dengan isu yang berkembang, baik untuk media cetak (koran, tabloid dan majalah) maupun elektronik (TV dan Radio). Secara rinci gambaran respon krisis 2010-2014 dapat dilihat pada gambar berikut.



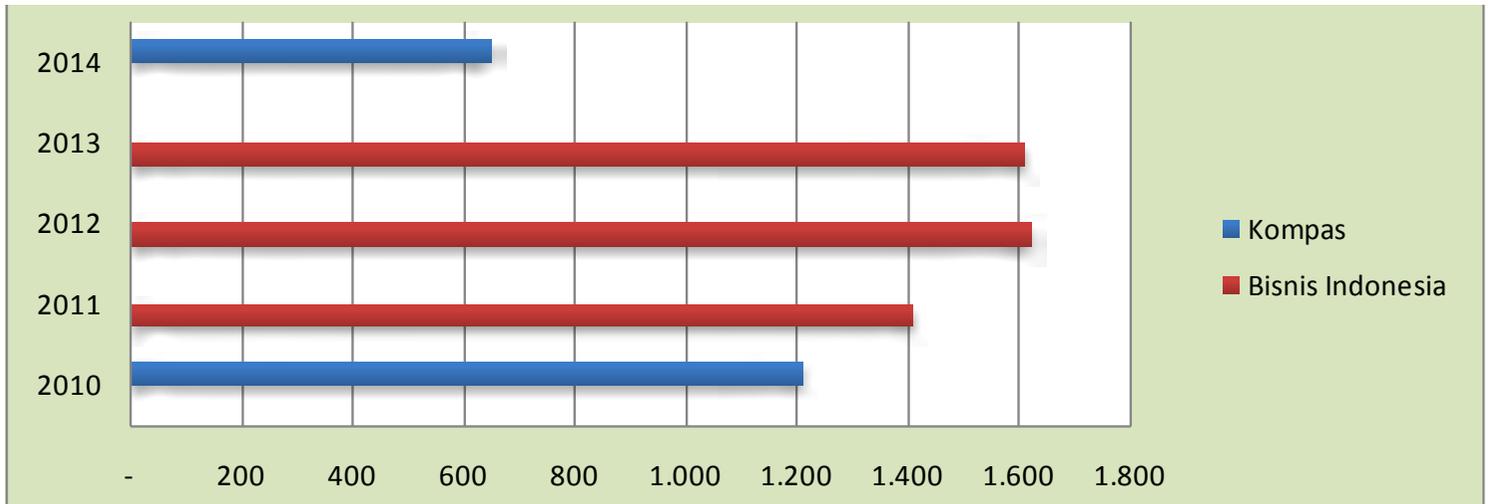
Gambar 206. Respon Krisis di Media Cetak dan Media Elektronik Tahun 2010-2014

Humas juga berfungsi untuk memonitor pemberitaan mengenai Kementerian Pertanian yang ada di media massa, terutama berita terkait pertanian yang terdapat di media cetak. Hal ini dilakukan untuk mengetahui opini publik terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian serta untuk mengetahui hasil peliputan wartawan terhadap kegiatan maupun kebijakan Kementerian Pertanian. Sehingga dapat diketahui apakah kegiatan/kebijakan tersebut tersosialisasi dengan baik, yang dapat menentukan citra Kementerian Pertanian di mata stakeholder-nya. Secara rinci gambaran pemberitaan Kementerian Pertanian di media cetak 2010-2014 diuraikan dalam gambar berikut.



Gambar 207. Pemberitaan Media Cetak Tahun 2010-2014

Sementara itu, berdasarkan 20 media cetak nasional berlangganan yang dimonitor dalam bentuk klipring berita pertanian, maka dapat terlihat media cetak yang paling banyak memberitakan mengenai Kementerian Pertanian. Secara rinci gambaran Media Cetak Terbanyak yang Memberitakan Kementerian Pertanian 2010-2014 diuraikan dalam gambar berikut.



Gambar 208.

Media Cetak Terbanyak yang Memberitakan Kementerian Pertanian Tahun 2010-2014

15.7. Kepegawaian dan Reformasi Birokrasi

Perkembangan data Pegawai Negeri Sipil (PNS) menurut Eselon I Kementerian Pertanian 2010-2014 adalah sebagai berikut:

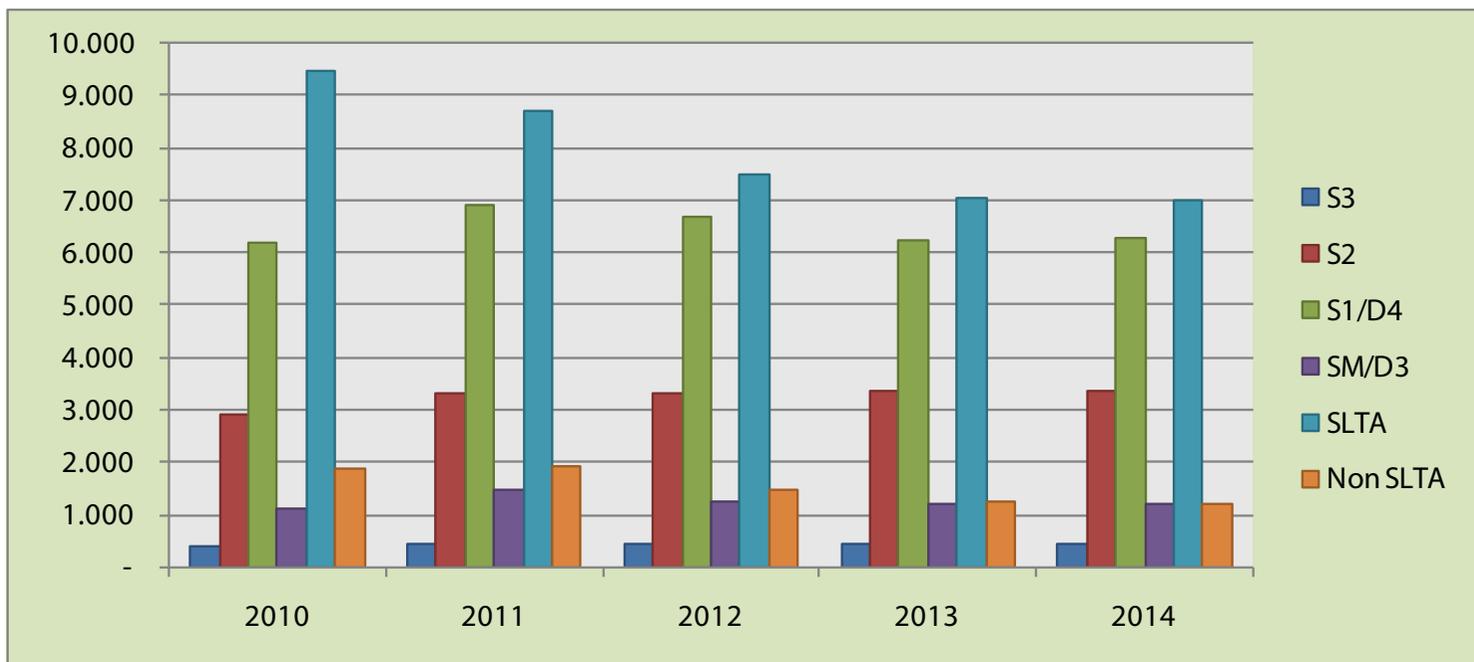


*) Data Per 27 Juni 2014

Gambar 209. Jumlah Pegawai Kementerian Pertanian Tahun 2010-2014

Data PNS menurut Pendidikan

Dilihat dari tingkat pendidikan, pegawai negeri sipil Kementerian Pertanian 2010-2014 adalah sebagai berikut:



*) Data Per 27 Juni 2014

Gambar 210. Data PNS Kementerian Pertanian Berdasarkan Pendidikan 2010-2014

Dari perkembangan data Pegawai Negeri Sipil menurut Tingkat Pendidikan, menunjukkan bahwa selama kurun waktu tersebut, perubahan atau pergeseran data dikarenakan oleh perubahan administratif kepegawaian antara lain disebabkan oleh penambahan gelar pendidikan dari pegawai Tugas Belajar dan Ijin Belajar. Selain itu diketahui bahwa pegawai negeri sipil Kementerian Pertanian terbanyak berpendidikan SLTA dan Sarjana/D4.

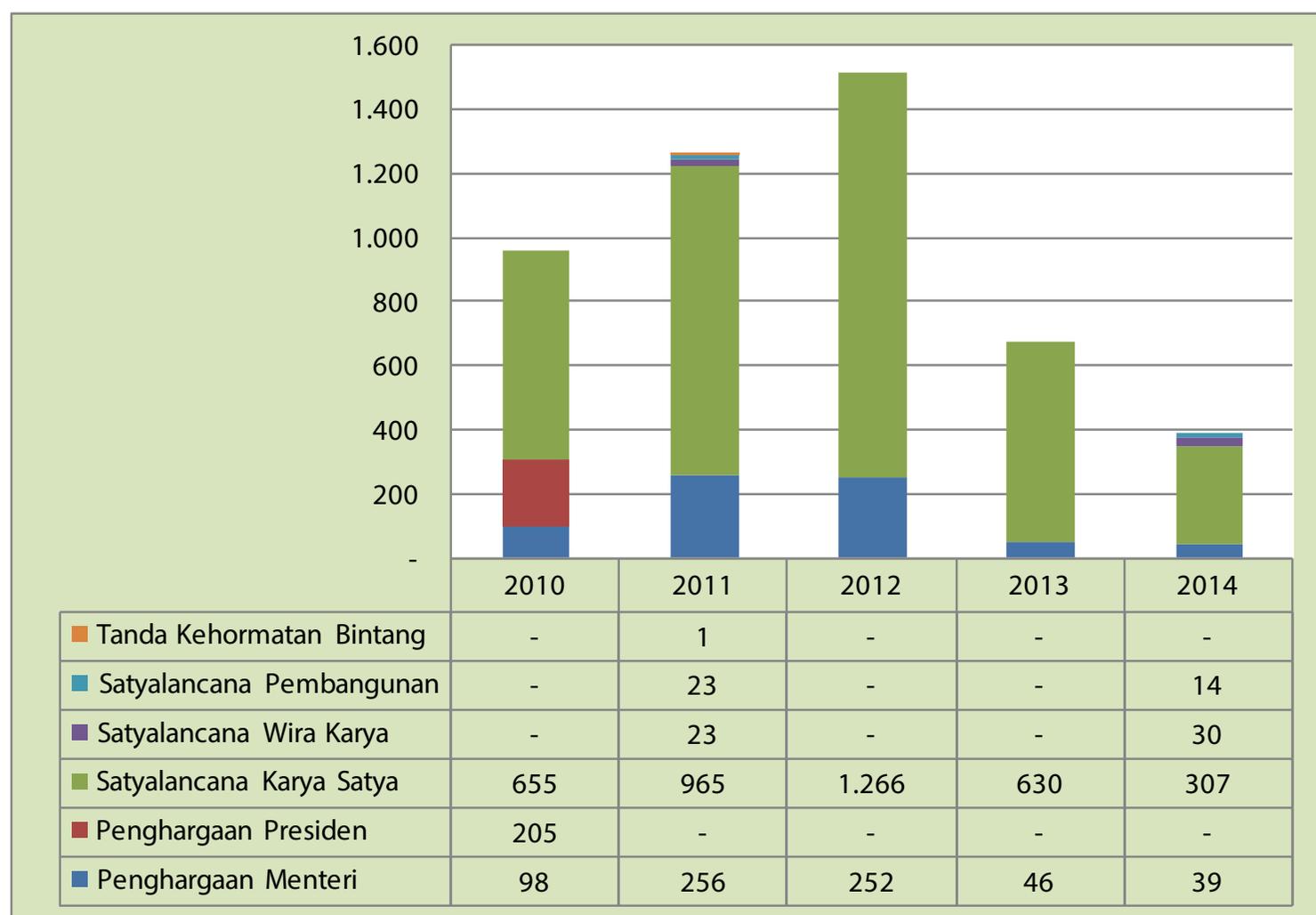
Untuk meningkatkan profesionalisme pegawai dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kementerian Pertanian mengembangkan jabatan fungsional Rumpun Ilmu Hayat (RIHP). Dalam kurun waktu 2010-2014, jabatan fungsional yang dikembangkan adalah sebagai berikut:

Tabel 57. Jabatan Fungsional Rumpun Ilmu Hayat Pertanian (RIHP)

No	Jabatan Fungsional	Dasar Hukum
1	Pengawas Mutu Pakan	Kepmen PAN No.: Kep/31/M.PAN/3/2004
2	Pengawas Mutu Hasil Pertanian	Permen PAN No. PER/17/M.PAN/4/2006
3	Penyuluh Pertanian	Permen PAN No. PER/02/M.PAN/2/2008
4	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)	Permen PAN No. PER/10/M.PAN/5/2008
5	Pengawas Benih Tanaman	Permen PAN No. 09 Tahun 2010
6	Pengawas Bibit Ternak	Permen PAN dan RB No. 2 Tahun 2011
7	Medik Veteriner	Permen PAN dan RB No. 52 Tahun 2012
8	Paramedik Veteriner	Permen PAN dan RB No. 53 Tahun 2012
9	Analisis Pasar Hasil Pertanian	Permen PAN dan RB No. 6 Tahun 2012
10	Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman (PVT)	Permen PAN dan RB No. 32 Tahun 2013

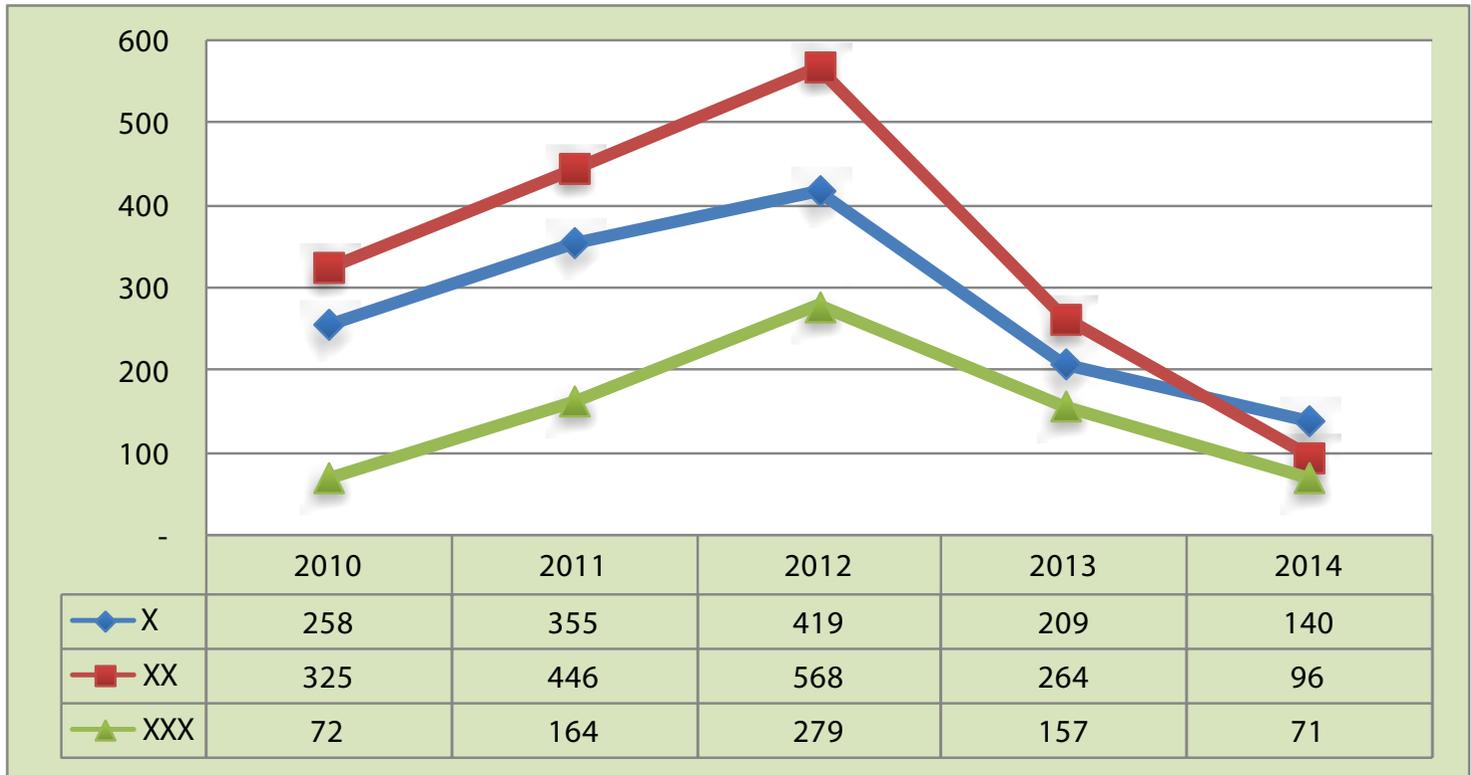
Dalam rangka meningkatkan motivasi pejabat fungsional Rumpun Ilmu Hayat Lingkup Pertanian, Kementerian Pertanian telah melakukan upaya penyesuaian tunjangan jabatan fungsional dan telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, dan Pengawas Mutu Pakan serta Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian.

Sebagai bentuk penghargaan atas jasa-jasanya kepada negara dan sekaligus sebagai upaya meningkatkan motivasi kerja pegawai, Kementerian Pertanian memberikan penghargaan dalam bentuk penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang, Satya Lancana Pembangunan, Satya Lancana Wira Karya dan Satya Lancana Karya Satya. Selain itu, Menteri Pertanian juga memberikan penghargaan bagi PNS maupun kepada petani di seluruh Indonesia yang mempunyai prestasi di daerahnya dan berdampak keluar daerahnya. Rekapitulasi penerima Tanda Kehormatan Bintang, Satyalancana Pembangunan, Satyalancana Wira Karya, Satyalancana Karya Satya, Penghargaan Presiden dan Penghargaan Menteri dari tahun 2010-2014 sebagai berikut:



Gambar 211. Rekapitulasi Penerima Tanda Kehormatan Kementerian Pertanian

Untuk Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya (SLKS) 2010-2014, rinciannya sebagai berikut.



*) Data Per 27 Juni 2014

Gambar 212. Pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya (SLKS) 2010-2014

Reformasi Birokrasi

Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Tahun 2010-2014 berisi 9 (sembilan) program dan 29 (dua puluh sembilan) kegiatan yang berisi langkah perubahan atau pembaharuan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi aspek regulasi, kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia, pengawasan, akuntabilitas kinerja, pelayanan publik, serta perubahan pola pikir dan budaya kerja. Berikut ini capaian pelaksanaan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian sampai dengan tahun 2014 yang merupakan akhir tahun pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Tahun 2010-2014:

(1) Manajemen Perubahan

Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan dimulai dari pembentukan Tim Manajemen Perubahan yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 6201/Kpts/OT.150/12/2012 tentang Pembentukan Tim Manajemen Perubahan di Lingkungan Kementerian Pertanian. Saat ini telah disusun dan disosialisasikan Dokumen Manajemen Perubahan Kementerian Pertanian yang berisi strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi Kementerian Pertanian. Pengukuran Kualitas Budaya Kerja juga telah dilakukan sejak tahun 2010-2012 menggunakan Pedoman Peraturan Menteri Pertanian Nomor 24 Tahun 2012 dengan hasil nilai kualitas budaya kerja untuk Tahun 2010 adalah 68,00 (baik), Tahun 2011 adalah 69,16 (baik), Tahun 2012 adalah 71,00 (baik), Tahun 2013 adalah 80,85 (baik).

Dalam rangka mempercepat proses keberhasilan perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Kementerian Pertanian maka pada Tahun 2013 ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 tahun 2012 tentang Pedoman Nilai-Nilai dan Makna Bekerja Bagi Pegawai Kementerian Pertanian. Nilai-nilai (*Values*) Kementerian Pertanian yaitu Komitmen, Keteladanan, Profesional, Integritas dan Disiplin (KKPID).

(2) Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Dalam rangka tertib penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Pertanian telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 617/Kpts/OT.140/5/2003. Selain itu agar peraturan perundang-undangan yang disusun sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan tingkat atasnya atau sesuai dengan kebutuhan, maka setiap tahun disusun Program Legislasi Kementerian Pertanian (PROLEGTAN), yang pada dasarnya merupakan dokumen tahunan perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan di Kementerian Pertanian yang berisi rencana penyusunan regulasi baru dan penyempurnaan regulasi.

Peraturan perundang-undangan yang telah disusun meliputi peraturan di bidang tanaman pangan, sarana prasarana dan penelitian, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian, bidang peternakan dan kesehatan hewan, serta karantina pertanian.

(3) Penataan Dan Penguatan Organisasi

Telah dilaksanakan penataan organisasi UPT unit kerja Eselon I Kementerian Pertanian selama 3 tahun terakhir, yaitu Ditjen Tanaman Pangan 3 UPT, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 59 UPT, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan 22 UPT, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian 13 UPT. Penguatan unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, pelayanan publik, kepegawaian dan diklat telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, yang kemudian ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Menteri Pertanian tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV pada masing-masing unit kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian.

Dalam rangka melaksanakan program penataan dan penguatan organisasi saat ini telah dibentuk Tim Pengkajian Organisasi Kementerian Pertanian melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 603/Kpts/OT.160/2/2013. Pada tahun 2013 juga telah dilakukan audit/evaluasi Organisasi Kementerian Pertanian oleh Konsultan dari Kementerian PAN dan RB dengan hasil berupa usulan dengan 3 (tiga) alternatif, yaitu:

- Pengurangan eselon I;
- Penggabungan fungsi;
- Memberdayakan pejabat fungsional dengan mengurangi jumlah jabatan eselon III dan IV di lingkungan Kementerian Pertanian.

(4) Penataan Tata Laksana

Dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan unit kerja Kementerian pertanian, sejak tahun 2010 hingga 2014 ini telah dilakukan beberapa kegiatan dalam hal Penataan Tata Laksana yaitu:

- Telah disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) sebanyak 25.043 buah meliputi SOP unit kerja pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Kementerian Pertanian.
- Telah ditetapkan Permentan No. 23 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan SOP AP di Lingkungan Kementerian Pertanian, Kepmentan No. 114 Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Standar Operasional Prosedur Kementerian Pertanian, Permentan No. 61 Tahun 2014 tentang Pedoman Monitoring, dan Evaluasi SOP di Lingkungan Kementerian Pertanian.
- Telah dilaksanakan Kegiatan Bimbingan Teknis dan Monitoring & Evaluasi kepada unit kerja pusat dan unit pelaksana teknis (UPT) di Lingkungan Kementerian Pertanian terkait Standar Operasional Prosedur (SOP) selama kurun waktu 2010 – 2014.
- Dalam rangka tertib administrasi perubahan pemangku jabatan dan tertib pemberian tunjangan kinerja, saat ini terdapat Aplikasi Sistem Informasi Evaluasi Jabatan (SIVAJAB). Aplikasi ini disusun berbasis Web Base yang digunakan untuk melakukan proses rekonsiliasi perubahan data pemangku jabatan lingkup Kementerian Pertanian.

(5) Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

a. Penataan Sistem Rekrutmen Pegawai, Analisa Jabatan, dan Evaluasi Jabatan.

Dalam proses pengisian formasi yang lowong berdasarkan kebutuhan riil organisasi, terutama menyangkut jumlah dan kualifikasi pendidikan Kementerian Pertanian menyusun Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33/Permentan/OT.140/6/2011 tentang Penyusunan Pedoman Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil. Pada tahun 2013 untuk pengisian formasi pegawai tahun 2014 Kementerian Pertanian telah menggunakan sistem pendaftaran secara online dan seleksi ujian masuk dengan menggunakan sistem *Computer Assisted Test (CAT)* dalam proses pengadaan atau rekrutmen pegawai.

Kementerian Pertanian telah menetapkan Pedoman Analisis Jabatan, yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 54 Tahun 2009. Hasilnya adalah saat ini telah tersusun informasi jabatan dan dokumen peta dan uraian jabatan sesuai perkembangan lingkungan strategis.

Guna keseragaman dalam penentuan kelas dan nilai jabatan di lingkungan Kementerian Pertanian telah ditetapkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 5798 Tahun 2012 tentang Penetapan Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pertanian. Jumlah jabatan yang ada di lingkungan Kementerian Pertanian berjumlah 2.188 jabatan dengan rincian jabatan sebagai berikut:

1. Jabatan struktural sejumlah 1794 jabatan;

2. Jabatan fungsional Rumpun Ilmu Hayat Pertanian (RIHP) yang berjumlah 46 jabatan untuk semua jenjang;
3. Jabatan fungsional tertentu non RIHP yang berjumlah 80 jabatan untuk semua jenjang;
4. Jabatan fungsional umum berjumlah 268 jabatan.

b. Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan, Assesmen Individu, dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan terkait kompetensi jabatan Kementerian Pertanian sebagai berikut:

1. penyusunan Konsep Standar Kompetensi Jabatan lingkup Kementerian Pertanian;
2. pembahasan Konsep Standar Kompetensi Jabatan Lingkup Kementerian Pertanian.

Dalam rangka pengembangan standar kompetensi jabatan di lingkungan Kementerian Pertanian antara lain pengembangan beberapa jabatan fungsional tertentu sebanyak 10 (sepuluh) jabatan fungsional sebagaimana telah diterangkan diatas. Jabatan fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian dan Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman merupakan jabatan fungsional yang baru ditetapkan, dan saat ini masih dalam masa *inpassing*. Di samping itu beberapa peraturan yang telah ditetapkan sebagai pedoman, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pejabat fungsional Rumpun Ilmu Hayat.

Pada tahun 2011, Kementerian Pertanian telah merintis kegiatan *Assesment Individu* Berdasarkan Kompetensi. Enam orang sarjana dari jurusan psikologi sebagai pelaksana kegiatan telah direkrut dan ditempatkan di beberapa eselon I dalam dua tahun terakhir. Untuk meningkatkan kompetensi teknis, mereka diikutsertakan dalam pelatihan/*workshop assesment center* dari BKN. Saat ini juga telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 Tahun 2010 tentang Pedoman Seleksi Administrasi Calon Peserta Penilaian Kompetensi PNS, dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2010 tentang Pedoman Penilaian Kompetensi PNS untuk diangkat pada jabatan struktural Kementerian Pertanian.

Pada Tahun 2013 Kementerian Pertanian telah melaksanakan *assesment individu* bagi Pejabat Eselon III lingkup Kementerian Pertanian. Peserta yang terlibat berasal dari Pejabat Eselon III dari seluruh eselon I pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Pertanian. Kegiatan ini bertujuan agar Kementerian Pertanian memiliki sebuah peta kompetensi untuk para pejabat eselon III dan juga hasil dari kegiatan ini dapat menjadi sebuah pertimbangan dalam penempatan dan promosi jabatannya.

Sejak Tahun 2012 telah dilakukan Sosialisasi dan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) lingkup Kementerian Pertanian dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 dan Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2013. Penetapan SKP seluruh pegawai lingkup Kementerian Pertanian sudah diterapkan mulai awal Januari 2014.

(6) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

a. Peningkatan Standar Pelayanan Publik

Selama kurun waktu 2004 – 2014 telah dilaksanakan beberapa kegiatan sebagai wujud usaha peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Kementerian Pertanian yaitu:

1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Penghargaan Abdibaktitani kepada Unit Pelayanan Publik Bidang Pertanian
2. Permentan Nomor 78 Tahun 2012 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Pertanian
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Pertanian.
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 69 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengukuran Budaya Kerja di Lingkungan Kementerian Pertanian
5. Penerapan ISO
 - a) Penerapan ISO 17025-2001 pada 40 UPT
 - b) Penerapan ISO 9001-2008 pada 80 UPT
6. Penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) pada UPT di lingkungan Badan Karantina Pertanian.
7. Pembentukan sekretariat pengelolaan pengaduan masyarakat tingkat Kementerian, Unit Kerja Eselon I, dan Unit Kerja Pelayanan Publik.

b. Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Kementerian Pertanian telah melakukan *survey* pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada unit kerja pelayanan publik setiap tahun berdasarkan Peraturan Menpan dan RB Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pedoman Umum Penyusunan IKM Unit Pelayanan instansi Pemerintah dan telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengukuran IKM di lingkungan Kementerian Pertanian. Hasil pengukuran indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik bidang pertanian Tahun 2010 - 2013 dengan nilai rata-rata IKM Kementerian Pertanian pada nilai interval 3.13 – 3.17 (Baik).

1) Beberapa unit kerja pelayanan Kementerian Pertanian masuk dalam TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik Indonesia Tahun 2014, dengan jenis layanan sebagai berikut:

- Sistem Informasi Permohonan Layanan Informasi Publik (SILAYAN) pada Biro Hukum dan Informasi Publik.
- Semen Beku *Sexing* dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik berdasarkan partisipasi masyarakat pada Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari.
- Klinik Tanaman Perkebunan pada Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak.
- Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Permohonan Pemeriksaan Karantina secara *On Line* pada Balai Karantina Pertanian Kelas II Palu.

2) Hasil Monitoring Kepatuhan Kementerian Pertanian dalam pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yaitu pada periode penilaian bulan November 2013 Kementerian

Pertanian dengan nilai 945, peringkat 4 masuk dalam zona hijau.

(7) Monitoring Dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pertanian dilaksanakan dengan metode Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) secara online berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 1 Tahun 2012. PMPRB ini dilaksanakan oleh seluruh unit kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian yang menjadi bahan dan dalam pembangunan profil pencapaian reformasi Kementerian Pertanian yang pada Tahun 2012 memperoleh hasil penilaian sebagai berikut:

- Nilai pencapaian komponen pengungkit hasil 66,65;
- Nilai survey internal terhadap pegawai 69,06;
- Nilai pencapaian komponen pengungkit dan komponen hasil dengan survey internal 67,14;
- Nilai pemenuhan target indikator internal 71,23;
- Nilai pemenuhan target indikator eksternal 79,27.

15.8. Peraturan Perundang-undangan

Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan Program Legislasi Pertanian (Prolegtan) merupakan instrumen perencanaan program pembentukan peraturan perundang-undangan dari tingkat nasional sampai dengan Peraturan Menteri Pertanian yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.

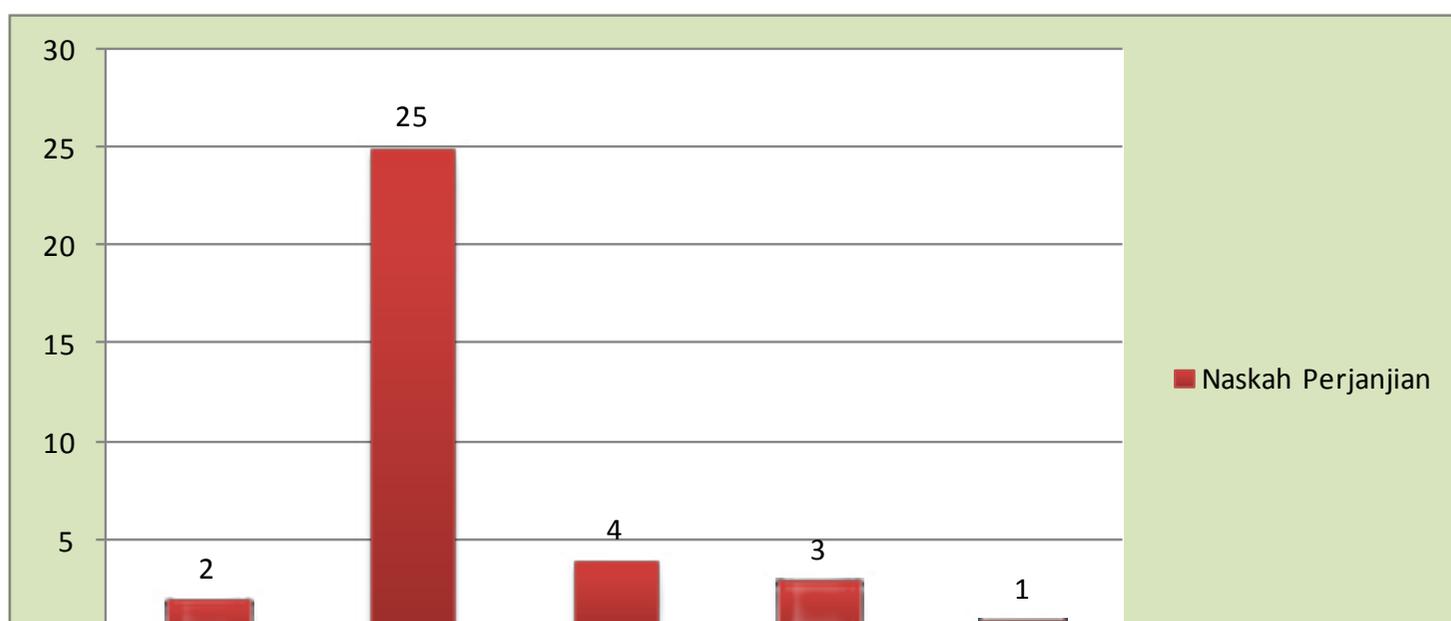
Sesuai sasaran yang hendak dicapai dalam pelaksanaan Prolegtan yaitu terbentuknya sistem hukum yang kuat melalui terbitnya peraturan perundang-undangan di bidang pertanian, sebagai dasar landasan operasional pencapaian pembangunan pertanian secara menyeluruh, maka hukum pertanian harus ditegakkan, karena merupakan salah satu sarana mewujudkan ketertiban, keadilan dan ketentraman. Hukum pertanian bergerak secara dinamis menyesuaikan dengan isu dan tuntutan yang berkembang di masyarakat, karena itu pembangunan hukum di bidang pertanian harus berwawasan holistik, sistemik dan dapat mengantisipasi pergeseran paradigma pembangunan, menjamin kelestarian dan perlindungan fungsi lingkungan hidup, mendukung Hak Kekayaan Intelektual (HKI), mendorong penerapan Hak Asasi Manusi (HAM), pengembangan Otonomi Daerah, privasi, globalisasi serta menjadi landasan pembangunan hukum di bidang pertanian harus dapat menjawab tantangan di masa mendatang serta mengamankan keberlanjutan hasil pembangunan pertanian yang dicapai.

Adapun produk legislasi Kementerian Pertanian yang dihasilkan pada tahun 2010-2014 berupa Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Peraturan Menteri Pertanian, dan Keputusan Menteri Pertanian ditampilkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 55. Produk Legislasi Pertanian Tahun 2010-2014

Produk Hukum	2010	2011	2012	2013	2014	Total
Undang-undang	1	-	1	1	-	3
Peraturan Pemerintah	1	2	6	1	1	11
Peraturan Presiden	-	4	-	2	-	6
Instruksi Presiden	1	-	-	-	-	1
Peraturan Menteri Pertanian	71	97	84	135	79	466
Keputusan Menteri Pertanian	4055	5682	6726	5268	647	22378

Penyusunan Naskah Perjanjian yang dibuat dalam bentuk Kesepakatan Bersama atau Nota Kesepahaman untuk dan atas nama Kementerian Pertanian merupakan salah satu bentuk instrumen kebijakan dalam rangka pembangunan pertanian. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Instrumen perjanjian dapat dijadikan pilihan karena mampu memberikan berbagai manfaat. Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penyusunan perjanjian diantaranya yaitu membangun sistem perencanaan pembangunan yang lebih terpadu, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya dan potensi yang ada di Kementerian Pertanian, meningkatkan kemampuan Kementerian Pertanian untuk menyelesaikan permasalahan tertentu, penyusunan kegiatan sesuai dengan skala prioritas, pengelolaan manajemen kegiatan yang lebih baik, meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kapasitas SDM Kementerian Pertanian, dan meningkatkan hubungan kerja yang baik antar pihak.



Gambar 191. Naskah Perjanjian Kementerian Pertanian yang Dihasilkan Pada Periode 2010-2014

Naskah Perjanjian dibuat dengan berbagai maksud dan tujuan serta ditandatangani oleh pejabat lingkup Kementerian Pertanian, baik oleh Menteri Pertanian maupun pejabat lain dibawahnya seperti Pejabat Eselon I, Pejabat Eselon II, dan/atau pejabat lainnya yang diberikan kuasa.

Untuk perjanjian dalam negeri bersifat kebijakan dan koordinasi program pembangunan yang dilakukan oleh Menteri Pertanian dan/atau oleh Pejabat Kementerian Pertanian untuk dan atas nama Kementerian Pertanian, selama tahun 2004 sampai dengan tahun 2014 tercatat sebanyak 60 Naskah Perjanjian dalam bentuk Kesepakatan Bersama maupun Nota Kesepahaman dengan rincian jumlah sebagaimana gambar berikut ini.

15.9. Hubungan Kerjasama Internasional

Dalam kerangka multilateral, Kementerian Pertanian berperan sebagai anggota aktif dengan berkontribusi dan memanfaatkan kerja sama pada 13 Organisasi Internasional Pemerintah, yaitu: APHCA, APPPC, CIMMYT, FAO, ICCO, IPPC, IRRI, ISO, ISTA, ITPGRFA, OIE, UNCAPSA, UNCSAM. Selain itu, Kementerian Pertanian juga berperan aktif pada berbagai forum internasional diantaranya: UN Bodies Forum (FAO, WFP, IFAD, UNFCCC, UNEP), WTO, G20, OECD, GRA, GEF, dan WEF. Pada tahun 2014, Kementerian Pertanian menandatangani perpanjangan MoU kerja sama dengan Organisasi Internasional Non Pemerintah Asing yaitu, Mercy-USA for Aid and Development, Inc untuk periode 2014-2017.

Sejak tahun 2010, Kementerian Pertanian aktif dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan terkait peningkatan kemitraan antara publik dan swasta (*Public-Private Partnership/PPP*) melalui forum PISAgro (WEF) dan berbagai inisiatif PPP dalam proyek IFAD, serta kampanye positif kelapa sawit Indonesia.

Kementerian Pertanian juga secara konsisten aktif mengembangkan kerjasama dalam kegiatan penanganan dampak perubahan iklim melalui berbagai forum internasional sebagai upaya pelaksanaan RAN/RAD sesuai Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2011.

Khusus untuk ASEAN, dalam rangka menunjang kepemimpinan Indonesia di ASEAN pada tahun 2011, Kementerian Pertanian menjadi tuan rumah Pertemuan Tingkat Menteri Pertanian dan Kehutanan ASEAN (AMAF), yang dihadiri oleh sepuluh Negara ASEAN, China, Jepang, Korea dan India. Capaian utama dalam pertemuan ini adalah perjanjian pengalokasian cadangan pangan regional khusus situasi darurat, yang disebut ASEAN Plus *Three Emergency Rice Reserve* (APTERR).

Selanjutnya, selama periode 2010-2014 Indonesia telah berhasil mendorong ditandatanganinya berbagai kesepakatan kerjasama regional yang mencakup *ASEAN Animal Health Trust Fund* (AAHTF), *MOU ASEAN-China on Food and Agriculture Cooperation*, *MOU on ASEAN Co-Operation in Agriculture and Forest Products Promotion Scheme*, *MOU ASEAN-China on Strengthening Sanitary*

and Phytosanitary Cooperation, MOU ASEAN-FAO on Strengthening Cooperation in Agriculture and Forestry, dan MOU ASEAN-OIE.

Pada tahun 2012 Kementerian Pertanian menjadi tuan rumah Pertemuan Tingkat Menteri Pertanian Developing Eight (D-8) bidang Ketahanan Pangan ke-3 di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Capaian utama dalam pertemuan ini adalah dihasilkannya Mataram Initiative yaitu komitmen bersama Menteri-menteri D-8 untuk program ketahanan pangan D-8. Pada tahun 2013, Menteri Pertanian RI telah menerima kunjungan kehormatan dari Sekretaris Jenderal D-8. Selanjutnya, Kementerian Pertanian menjadi tuan rumah Pertemuan *Governing Council* UNCAPSA ke-8 tahun 2012 di Yogyakarta, dan *Governing Council* UNCAPSA ke-9 tahun 2013 di Bogor. Tahun 2014, Kementerian Pertanian juga menjadi tuan rumah Pertemuan *IMT-GT Working Group on Agriculture, Agro-based Industry and Environment (WGAAE)* ke-7 di Palembang, Sumsel, dan Pertemuan *IMT-GT Working Group on Halal Product and Services (WGHAPAS)* ke-8 di Medan, Sumut.

Pada tanggal 31 Mei 2012, Menteri Pertanian bersama dengan seluruh Menteri anggota ekonomi APEC terkait sektor pertanian menyatakan deklarasi yang disebut "*Kazan Declaration on APEC Food Security*" untuk secara bersama-sama sepakat meningkatkan produksi dan produktifitas pertanian berkelanjutan, memfasilitasi lebih lanjut fasilitasi perdagangan dan pengembangan pasar pangan, meningkatkan keamanan pangan, memperbaiki akses pangan bagi kelompok rentan dan memperbaiki kesejahteraan petani.

Pada Konferensi FAO ke-38 tahun 2013, Pemerintah RI menerima penghargaan "*Notable Result*" sebagai negara yang telah berhasil mencapai target penurunan angka kelaparan dan kemiskinan lebih dari 50% sesuai target pertama MDGs dan target *World Food Summit (WFS)*, tiga tahun lebih awal dari tahun 2015.

Pada tahun 2013, Kementerian Pertanian menjadi Ketua *Policy Partnership on Food Security (PPFS)* 2013. Pada periode tersebut fora PPFS telah menyelesaikan *Food Security Road Map Toward 2020* yang telah dinyatakan dalam *APEC Leaders Declaration* bahwa road map tersebut dapat dijadikan pendekatan strategis di APEC untuk pencapaian ketahanan pangan global. Indonesia dalam hal ini telah berhasil memasukan komponen petani kecil sebagai stakeholder penting dalam pencapaian ketahanan pangan Global.

Pada tahun 2014, Kementerian Pertanian secara kontinu mengawal kepentingan Indonesia dalam rangka memajukan komoditas pertanian yang berkontribusi terhadap pertumbuhan berkelanjutan dan inklusif masuk dalam nominasi *Development Product* untuk dikompilasi dan dikaji oleh *APEC Policy Support Unit (PSU)*. Komoditas pertanian yang menjadi fokus dalam hal ini utamanya CPO, karet alam, kelapa, kopi tidak digongseng, essential oil, jahe, manggis dan anggrek.

Seiring dengan meningkatnya posisi Indonesia sebagai *Middle Income Country* (MIC) Kementerian Pertanian secara konsisten ikut dalam mendukung program Kerja sama Selatan-Selatan Indonesia. Kementerian Pertanian berperan aktif dalam memberikan bantuan teknis terkait sektor pertanian, antara lain dengan menyelenggarakan 31 topik pelatihan yang telah diikuti oleh 316 peserta dari 27 negara di kawasan Asia, Pasifik, Afrika.



Gambar 192. 31st FAO Regional Conference For Asia and the Pacific

Kementerian Pertanian juga telah memenuhi komitmen pemberian total sebanyak 249 unit alsintan (traktor tangan, pompa air, power tresher dan rice milling unit.) ke Fiji, Vanuatu, Tanzania Sudan, Gambia, Tonga, Samoa, Laos, Papua Nugini, Myanmar, Kamboja dan Etiophia. Selain itu juga telah dilakukan pengiriman tenaga ahli bidang pertanian dalam sebanyak 13 orang ke-6 negara yakni ke Fiji, Vanuatu, Tanzania, Sudan, Suriname dan Madagaskar.

BAB XVI. PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN PERTANIAN

Saat ini dikenal 3 (tiga) istilah paradigma pengawasan intern yaitu paradigma *Watchdog*, *Counseling Partner* dan *Quality Assurance*. Pola pengawasan yang diterapkan lebih bersifat represif yaitu lebih menekankan aspek penegakan disiplin melalui penindakan yang sifatnya menghukum agar efek jera yang ditimbulkan cukup besar.

Upaya memenuhi kebutuhan akan pelayanan pengawasan intern yang lebih baik, Inspektorat Jenderal pada tahun 2010 mulai menerapkan paradigma *Quality Assurance*, yaitu pola pengawasan yang bersifat pre-emptif, menitikberatkan pada penjaminan mutu kualitas pengawasan yang memadai bagi mitra kerja di lingkup Kementerian Pertanian.

Kegiatan strategis unggulan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal periode 2010-2014 adalah: (1) Gerakan SPI Kementerian Pertanian; (2) Gerakan WBK; (3) Gerakan SAKIP; (4) Gerakan WTP; (5) Gerakan PMPRB.

Landasan hukum pelaksanaan gerakan ini adalah Peraturan Pemerintah (PP) No.60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Gerakan ini dibentuk sebagai pendorong percepatan terwujudnya penerapan SPIP secara baik dan benar dan mampu memberikan dampak positif bagi unit kerja di lingkungan Kementerian Pertanian. Secara garis besar, pelaksanaan tahunan gerakan ini dibagi ke dalam 3 (tiga) bentuk kegiatan yaitu: (a) Pembinaan SPIP Kementan (wilayah barat, tengah dan timur Indonesia); (b) Penilaian SPIP; (c) Forum Nasional SPIP. Bagi unit kerja yang dinilai telah memiliki tingkat penerapan SPIP yang baik (handal) akan diberikan penghargaan (reward) oleh Menteri Pertanian.

Gerakan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dibentuk berdasarkan amanah pada Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang mewajibkan setiap instansi pemerintah menggalakkan semangat anti korupsi di lingkungan kerjanya. Diawali dengan menggunakan metode Tafakur, Hisab dan Dzikir (THD) di tahun 2009 yang menitikberatkan pada pembinaan mental dan spiritual aparatur, Inspektorat Jenderal pada tahun 2010 melakukan penyempurnaan metode pembinaan dengan menerapkan metode Komitmen Anti Korupsi (KAK) yang menitikberatkan pada penguatan integritas aparatur pemerintah. Serupa dengan pola gerakan SPIP, gerakan WBK ini disusun dalam 3 (tiga) bentuk kegiatan yaitu: (a) Pembinaan Komitmen Anti Korupsi/KAK (wilayah barat, tengah dan timur Indonesia); (b) Penilaian WBK; dan (c) Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia). Bagi unit kerja yang dinilai telah memiliki tingkat kepatuhan yang baik akan diberikan penghargaan (reward) oleh Menteri Pertanian. Pada tahun 2013, Menteri Pertanian menetapkan sebanyak 166 unit kerja berpredikat WBK. Berkaitan dengan hal ini, Inspektorat Jenderal juga ditunjuk sebagai pengelola *Whistle Blowing*

System, atau lebih dikenal dengan istilah WBS, yang diatur melalui Permentan No.77/Permentan/OT.140/8/2013 tanggal 12 Agustus 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Kementerian Pertanian dan Permentan No.88/Permentan/OT.210/9/2013 tanggal 9 September 2013 tentang Pengembangan Fasilitas Sistem Penanganan Pengaduan Masyarakat (*Whistleblower's System*) di Lingkungan Kementerian Pertanian. Bagi masyarakat dan aparatur pemerintah lingkup Kementerian Pertanian yang ingin melaporkan adanya praktek-praktek penyimpangan/tindak pidana korupsi, dapat menyampaikannya pada WBS dan dijamin bahwa pelapor akan dilindungi sesuai ketentuan yang berlaku. inilah bentuk konkret komitmen Inspektorat Jenderal dalam mewujudkan WBK, Kementan juga meluncurkan Whistle Blowing System (WBS) yaitu website yang menampung pengaduan dari masyarakat mengenai tindak korupsi di Kementerian Pertanian. Selain berfungsi sebagai forum pengaduan masyarakat, website WBS juga memonitor kasus pembangunan pertanian, misalnya ketersediaan pupuk, benih, dan sebagainya. Dengan adanya WBS diharapkan kinerja Kementan dapat lebih baik dan dapat membuka peluang masyarakat untuk menilai kinerja Kementan.

Gerakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal berlandaskan amanah dalam ketentuan Inpres No.7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Gerakan ini dikemas dalam 3 (tiga) bentuk kegiatan yaitu: (1) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tingkat Eselon I dan Kementerian; (2) Workshop Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tingkat Eselon I; dan (3) Workshop Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tingkat Unit Pelaksana Teknis (UPT). Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah terwujudnya akuntabilitas kinerja unit kerja melalui penyampaian laporan kinerja secara obyektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketidakteragaman penyampaian materi laporan kinerja instansi berpengaruh pada hasil penilaian kualitas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tingkat kementerian oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB). Adapun skor LAKIP Kementerian Pertanian tahun 2013 adalah 71,03 atau berpredikat "B+".

Gerakan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dengan latar belakang semangat untuk memperoleh opini WTP dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI terhadap kualitas laporan keuangan Kementerian Pertanian, berlandaskan ketentuan dalam Undang-Undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. Gerakan ini dikemas dalam 4 (empat) bentuk kegiatan yaitu: (1) Audit Barang Milik Negara (BMN); (2) Reviu Laporan Keuangan Tingkat Eselon I dan Kementerian; (3) Pendampingan Workshop Penyusunan Laporan Keuangan Eselon I; (4) Diklat Reviu Laporan Keuangan. Informasi terkini yang diterima Inspektorat Jenderal, bahwa opini BPK-RI terhadap laporan keuangan Kementerian Pertanian tahun 2013 adalah "Wajar Tanpa Pengecualian" (WTP). Kesuksesan setiap aparatur negara dalam mematuhi ketentuan yang berlaku merupakan kunci bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Berkaitan dengan penerapan amanah ketentuan pada PermenPAN dan RB No.1 Tahun 2012

tentang Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB) dan PermenPAN dan RB No.31 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan PMPRB Secara Online, Menteri Pertanian menerbitkan Kepmentan No.3590/Kpts/ OT.160/10/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pembentukan Tim PMPRB Kementerian Pertanian, ditindaklanjuti dengan penerbitan 2 (dua) SK Inspektur Jenderal yaitu:

1. No. 826/Kpts/OT.160/H/11/2012 tanggal 12 November 2012 tentang Pembentukan Tim Kerja Gugus Tugas Quality Assurance PMPRB Kementerian Pertanian;
2. No. 827/Kpts/OT.160/H/11/2012 tanggal 12 November 2012 tentang Pembentukan Tim Kerja PMPRB lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

Atas dasar landasan tersebut di atas, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan proses PMPRB melalui 3 (tiga) tahap panel yaitu:

1. Panel I (tahun 2012): Yaitu tahapan PMPRB hingga pengiriman secara resmi ke dalam aplikasi PMPRB online KemenPAN dan RB oleh Tim Assesor setiap eselon I, setelah didampingi oleh Tim *Quality Assurance*.
2. Panel II (tahun 2012): Yaitu tahapan PMPRB hingga pengiriman secara resmi ke dalam aplikasi PMPRB *online* KemenPAN dan RB oleh Tim Assesor setiap eselon I, setelah Tim *Quality Assurance* Inspektorat Jenderal selesai menverifikasi tingkat kehandalan serta kelengkapan data dukung tersaji dalam aplikasi PMPRB *online* Panel I, untuk selanjutnya dikonsultasikan dan disetujui oleh Menteri Pertanian.
3. Panel III (tahun 2013): Yaitu tahapan finalisasi pengiriman secara resmi hasil PMPRB tingkat kementerian ke dalam aplikasi PMPRB *online* oleh Tim *Quality Assurance*.

Hasil PMPRB tahun 2012 menempatkan Kementerian Pertanian pada tingkatan nilai persentase 45%. Hal tersebut berdampak pada pemberian tunjangan kinerja sebesar 45% dari total tunjangan kinerja yang ditetapkan untuk Kementerian Pertanian.

Dalam upaya meningkatkan wawasan auditor di lingkup Inspektorat I, II, III, IV dan Investigasi secara berkala setiap tahunnya, Inspektorat Jenderal senantiasa menyiapkan beragam kegiatan pendidikan dan pelatihan teknis bidang pengawasan pada periode KIB I, diantaranya diklat: Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja, Pengembangan Karakter, Sistem Akuntansi Pemerintah, Audit Keuangan, Audit Pengadaan Barang dan Jasa, Investigasi, Reviu RKA-KL, dan Reviu Laporan Keuangan.

Sedangkan diklat yang diadakan pada periode KIB II, diantaranya diklat: Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor, Sistem Akuntansi Instansi, Essential Core of Learning, Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang dan Jasa, Bendahara Pengeluaran, SAKIP, *e-procurement*, *Fraud Investigation and Legal Evidance (FILE)*, Aplikasi *e-Monev*, Audit Forensik, Audit Konstruksi Bangunan dan Jaringan Irigasi, Penyusunan Laporan Barang Milik Negara dan *Training Integrated Results and*

Risk-Based Audit (IRRBA).

Dalam rangka meningkatkan wawasan auditor terhadap aspek audit forensik yang mencakup bidang akuntansi, audit dan hukum, maka Inspektorat Jenderal dan Pusdiklatwas BPKP menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) No. 112/KP.460/H.1/09/2012 dan No.KEP-0256/DL/4/2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Audit Forensik dan Reviu Laporan Keuangan bagi Pegawai di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. Diklat ini merupakan diklat pendalaman yang penting dipahami oleh para auditor, mengingat dalam beberapa kasus spesifik, mereka dituntut untuk mampu membedah beragam permasalahan yang sangat kompleks sesuai dengan perkembangan zaman. Pada tahun 2012, sebanyak 30 auditor peserta diklat audit forensik dinyatakan lulus sertifikasi.



Gambar 193. Menteri Pertanian RI Suswono memberikan arahan pada acara pembukaan Pembinaan Tekad Antikorupsi

KemenPAN dan RB pada tahun 2013 telah melakukan penilaian terhadap kinerja instansi pemerintah dalam hal tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, Kementerian Pertanian mendapat perolehan nilai yang cukup baik pada beberapa unit kerja lingkup Kementerian.

Untuk pertama kalinya sejak dilakukannya survei integritas oleh KPK pada tahun 2007, unit kerja di lingkungan Kementerian Pertanian pada tahun 2008 masuk dalam hasil survei integritas KPK. Unit kerja tersebut secara berturut-turut berada pada posisi ranking 11, 55 dan 69 dari 105 layanan publik di 35 instansi yang dilakukan survei oleh KPK.

Sedangkan hasil survei integritas tahun 2011 bertujuan untuk mengetahui nilai integritas, indikator dan subindikator integritas dalam layanan publik. Dari 22 Instansi pusat, ternyata KPK mencatat ada 10 instansi pusat yang memiliki Nilai baik dalam hasil survei tersebut.

Survei Integritas Sektor Publik tahun 2012 dilakukan oleh KPK dalam rangka memberikan penilaian terhadap integritas layanan yang diberikan oleh lembaga pemerintah kepada masyarakat. Hasil penilaian merupakan cerminan bagaimana masyarakat sebagai pengguna layanan memberikan penilaian yang didasarkan dari pengalaman pengguna layanan dalam mengurus layanan di lembaga tersebut. Terdapat 20 instansi pusat yang memperoleh nilai integritas di atas 6 (enam) dan Kementerian Pertanian berada pada posisi 12.

Survei Integritas Sektor Publik tahun 2013 dilakukan oleh KPK dalam rangka memberikan penilaian terhadap integritas layanan yang diberikan oleh lembaga pemerintah kepada masyarakat. Hasil penilaian merupakan cerminan bagaimana masyarakat sebagai pengguna layanan memberikan penilaian yang didasarkan dari pengalaman pengguna layanan dalam mengurus layanan di lembaga tersebut.

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, Survei Integritas Sektor Publik pada tahun ini menyertakan layanan pengadaan barang dan jasa (PBJ) di tingkat pusat dan daerah. Penetapan PBJ sebagai salah satu obyek survei merupakan bentuk sinergitas program pencegahan yang dilakukan KPK. Dari 20 instansi pusat yang disurvei oleh KPK, Kementerian Pertanian berada pada posisi 5 (lima) besar.

Dalam rangka menyatukan pemahaman dan membangun kepercayaan masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik unit kerja lingkup Kementerian Pertanian di Pusat dan Daerah, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan acara Sosialisasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pada tanggal 10 April 2014. Tujuan diselenggarakannya acara ini adalah untuk menindaklanjuti hasil penilaian dari Ombudsman Republik Indonesia tahun 2013 terhadap kinerja pelayanan publik di Kementerian Pertanian.

Pada tahun 2013, *Ombudsman* melakukan dua kali penilaian kinerja pelayanan publik di Kementerian Pertanian dengan Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (Pusat PVTTP) sebagai sampel atau lokus penilaian. Hasil penilaian disampaikan sebagai berikut:

1. Pada periode penilaian I di bulan Januari-Juni 2013, Kementerian Pertanian berada pada zona merah atau kepatuhan yang rendah dengan nilai 485 dan berada di peringkat 14 dari 18 kementerian/lembaga negara.
2. Pada periode penilaian II di bulan Juli-Desember 2013, Kementerian Pertanian memperoleh nilai 945 (dari maksimal 1.000), masuk zona hijau atau kepatuhan yang tinggi dan ada di peringkat 4 dari 18 kementerian/lembaga negara.

PENUTUP

Pembangunan pertanian selama 2010-2014 telah banyak mencapai keberhasilan yang memberikan manfaat bagi bangsa, meskipun masih ada beberapa yang belum tercapai sebagaimana yang ditargetkan. Kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian nasional cukup nyata. Hal ini bisa dilihat pada kontribusi sector pertanian terhadap PDB nasional yang mencapai 15% per tahun selama 2010-2013. Investasi di sektor pertanian primer dari Penanaman Modal Asing (PMA) mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 15,43% per tahun sedangkan neraca perdagangan produk pertanian surplus sebesar US\$ 86,15 milyar.

Produksi pangan utamanya padi, jagung, kedelai, gula dan daging sapi juga mengalami peningkatan. Pada periode 2010-2014, pertumbuhan produksi padi sebesar 1,30% per tahun, jagung 0,46% per tahun, gula hablur 3,31% per tahun, daging sapi dan kerbau 7,5% per tahun. Selain komoditas pangan utama tersebut, beberapa komoditas lain produksinya juga tumbuh positif, yaitu daging unggas 2,81% per tahun, telur 7,80% per tahun, buah-buahan 1,15% per tahun, sayuran 3,38% per tahun, kelapa sawit 7,46% per tahun, karet 4,11% per tahun, kelapa 0,64% per tahun dan kopi 0,38% per tahun.

Produksi padi pada 2010 tercatat 66,47 juta ton GKG meningkat menjadi 69,87 juta ton pada tahun 2014, setara dengan beras 39,28 juta ton. Dengan tingkat konsumsi pada tahun 2014 sebesar 35,08 juta ton beras, maka pada tahun 2014 tercapai surplus beras sebesar 4,2 juta ton. Sebaliknya untuk kedelai, walau pertumbuhannya 0,88% per tahun, namun capaian produksinya masih di bawah kebutuhan. Kesulitan yang dihadapi dalam peningkatan produksi kedelai adalah penyediaan perluasan lahan baru, mengingat lahan yang ditanami kedelai saat ini adalah lahan yang sama yang juga ditanami padi dan jagung.

Pertumbuhan produksi komoditas utama tersebut juga diikuti oleh pertumbuhan pendapatan rata-rata per tahun. Untuk petani tanaman pangan naik 8,68%, pekebun naik 2,45%, peternak naik 4,04% per kapita per tahun selama 2010-2013. Pada periode yang sama, jumlah penduduk miskin di perdesaan atau pada sektor pertanian menurun dengan laju sebesar 3,69% per tahun. Dalam kaitannya dengan penurunan jumlah penduduk miskin, Pemerintah Indonesia pada tahun 2013 mendapat "Notable Result" dari FAO karena telah berhasil mencapai target penurunan angka kelaparan dan kemiskinan lebih dari 50% sesuai target pertama *Millenium Development Goals* (MDGs) dan target *World Food Summit* (WFS), tiga tahun lebih awal dari tahun 2015.

Pada setiap periode pembangunan pertanian akan selalu ada tantangan dan permasalahan. Tantangan dan permasalahan yang dihadapi saat ini dan ke depan dalam pembangunan pertanian yang menonjol adalah: (1) meningkatnya permintaan beras sesuai dengan peningkatan jumlah penduduk, (2) adanya perubahan iklim global yang berdampak pada perubahan sistem usahatani, (3) konversi lahan pertanian ke non pertanian, (4) sempitnya luas garapan dan status kepemilikan lahan, (5) rusaknya infrastruktur jaringan irigasi, (6) terbatasnya

infrastruktur transportasi dan perhubungan seperti pelabuhan, moda transportasi untuk distribusi ternak dan komoditas pangan lainnya baik kereta api, kapal laut maupun angkutan udara, (7) sulitnya mendapatkan permodalan, (8) menurunnya minat generasi muda untuk terjun di bidang pertanian, (9) persyaratan agunan kredit KKPE berupa sertifikat tanah dan (10) semakin menyusutnya jumlah penyuluh. Tantangan dan permasalahan tersebut lebih banyak di luar rentang kendali Kementerian Pertanian. Untuk itu, perlu dukungan dari sektor lain.

Kami berharap Menteri Pertanian yang akan menggantikan Menteri Pertanian KIB II dapat mengantisipasi, mengambil langkah-langkah, dan mencari solusi dalam menghadapi tantangan dan permasalahan serta meneruskan penyelesaian program yang belum diselesaikan oleh Menteri Pertanian KIB II, antara lain: (1) penerbitan perda baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota tentang pengendalian konversi lahan Provinsi, Kabupaten/Kota sebagai tindak lanjut UU 41/2009 yang dikoordinasikan Kementerian Dalam Negeri, (2) percepatan redistribusi HGU lahan terlantar seluas 200 ribu Ha oleh BPN, (3) penyediaan lahan kedelai 155 ribu Ha di daerah transmigrasi oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, (4) melanjutkan cetak sawah dengan pendekatan *Rice Estate* di Kabupaten Merauke dan Bulungan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten dan (5) pembentukan kelembagaan ketahanan pangan sesuai amanat Undang-undang Pangan No. 18/2012.

Dalam rangka menyiapkan landasan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan pertanian ke depan, Kementerian Pertanian telah menerbitkan buku Strategi Induk Pembangunan Pertanian (SIPP) 2015-2045. Konsep dan pendekatan pembangunan pertanian ke depan mendasarkan pada paradigma pertanian untuk pembangunan. Dalam implementasinya, pembangunan pertanian ke depan memfokuskan pada Sistem Pertanian-Bioindustri Berkelanjutan.

Terkait dengan tata kelola pemerintahan, selama periode 2010-2014, Kementerian Pertanian telah melaksanakan reformasi birokrasi dengan melakukan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai pedoman dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi. Kementerian Pertanian juga telah mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK pada Tahun Anggaran 2013. Sedangkan untuk penilaian kinerja layanan publik, Kementerian Pertanian memperoleh peringkat 4 dari 18 kementerian/lembaga negara pada tahun 2013 dari Ombudsman RI. Adapun tentang indeks integritas, Kementerian Pertanian berada pada posisi 5 dari 20 instansi pusat yang disurvei Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ucapan terima kasih dan penghargaan disampaikan kepada semua pemangku kepentingan terutama para Gubernur, Bupati, Walikota dan seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup pertanian di Provinsi, Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada petugas lapang, penyuluh, pengawas benih, pengamat hama, inseminator, Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP) dan petani, pekebun serta peternak atas kerja kerasnya dalam meningkatkan ketahanan pangan untuk peningkatan kesejahteraan petani.

Semoga Allah SWT selalu memberi rahmat kepada bangsa dan negeri tercinta, amin.

KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
Jl. Harsono RM No. 3
Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Telp/Fax. 62-21 7804156

www.pertanian.go.id